



PEMERINTAH PROVINSI BALI

**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMO 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI

- I. KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN
PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**
- II. PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025**
- III. LAMPIRAN I : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN**
- IV. LAMPIRAN II : RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BALI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
- V. LAMPIRAN III : RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BALI MENURUT URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali
 2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
 3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Provinsi Bali
 4. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali
 6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Bali
 7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bali
9. Dinas Perhubungan Provinsi Bali
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
13. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
15. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
16. Dinas Pariwisata Provinsi Bali
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
20. Sekretariat Daerah Provinsi Bali
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
24. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
27. Badan Penghubung Provinsi Bali
28. Inspektorat Provinsi Bali
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

VI. LAMPIRAN IV : REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN

VII. LAMPIRAN V : REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

VIII. LAMPIRAN VI : REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

IX. LAMPIRAN VII : SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

- X. LAMPIRAN VIII : SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN APBD PROVINSI BALI**
- XI. LAMPIRAN IX : SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH**
- XII. LAMPIRAN X : DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**
- XIII. LAMPIRAN XI : DAFTAR PIUTANG DAERAH**
- XIV. LAMPIRAN XII : DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA**
- XV. LAMPIRAN XIII : DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN- LAIN**
- XVI. LAMPIRAN XIV : DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2025**
- XVII. LAMPIRAN XV : DAFTAR DANA CADANGAN**
- XVIII. LAMPIRAN XVI : DAFTAR PINJAMAN DAERAH**

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI**

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025**



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1-5078 Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD T.A 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD T.A 2025;

b. Bahwa sesuai hasil rapat antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali terhadap beberapa ketentuan dalam Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah mendapat persetujuan bersama untuk penyempurnaan dan penyesuaian;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
25. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Uraian lebih lanjut penyempurnaan Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Bali sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Kedua dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 31 Desember 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI,



Ketua,

Dewa Made Mahayadnya, S.H.

Wakil Ketua,

I Wayan Disel Astawa, S.E

Wakil Ketua,

Ida Gede Komang Kresna Budi, S.AP.

Wakil Ketua,

I Komang Nova Sewi Putra, S.E

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Pj. Gubernur Bali di Denpasar;
3. Yth. Pimpinan DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Bupati / Walikota Se-Bali;
5. Ketua DPRD Kabupaten / Walikota Se-Bali
6. Arsip;

MATRIK PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	HASIL EVALUASI OLEH MENTERI DALAM NEGERI	HASIL PENYEMPURNAAN EBALUASI RANCANGAN APBD 2025
I.	TUJUAN EVALUASI	
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup: A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; B. kepentingan umum; C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); sebagaimana maksud Pasal 314 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 111 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal	

	7 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.	
II.	GAMBARAN UMUM	
	Berdasarkan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 314 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan Gubernur Bali, meliputi: A. Fokus kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 1. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,25%-6,25%. 2. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 sebesar 2,31%. 3. Proyeksi Kemiskinan Proyeksi penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 4,06%. 4. Proyeksi Gini Rasio Proyeksi gini rasio pada tahun 2025 sebesar 0,379-0,382.	

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan Belanja <i>Mandatory Spending</i> serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Provinsi Bali tetap berkomitmen memfokuskan kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan Belanja <i>Mandatory Spending</i>, pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, untuk mengukur tingkat potensi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali, diuraikan tren alokasi dan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 1 sebagai berikut:

Tabel 1							
Tren Alokasi dan Realisasi Pendapatan Daerah							
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022				APBD Tahun Anggaran 2023		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4=3:2		5	6	7=6:5
PENDAPATAN DAERAH	5.596.479.850.692	5.873.474.539.905	104,95		7.248.953.175.947	6.768.699.641.073	93,37
Pendapatan Asli Daerah	3.494.115.418.572	3.850.887.413.337	110,21		5.041.446.320.153	4.623.648.871.938	91,71
Pendapatan Transfer	2.047.466.392.120	2.017.662.349.796	98,54		2.152.312.055.794	2.139.850.791.635	99,42
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	54.898.040.000	4.924.776.772	8,97		55.194.800.000	5.199.977.500	9,42
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024			Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rata-Rata Rasio
	Target (Rp)	Realisasi s.d (30 September 2024) (Rp)	%	(%)	(%)	(%)	(%)
1	8	9	10=9:8	11=5:2	12=8:5	13=11:8	14=(11+12+13):3
PENDAPATAN DAERAH	6.876.016.193.600	6.932.397.715.674	100,82	29,53	(5,14)	(12,34)	4,02
Pendapatan Asli Daerah	4.590.033.889.600	4.928.712.775.743	107,38	44,28	(8,95)	(21,98)	4,45
Pendapatan Transfer	2.280.238.060.000	1.999.370.156.931	87,68	5,12	5,94	7,03	6,03
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.744.244.000	4.314.783.000	75,11	0,54	(89,59)	(0,63)	(29,89)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren target pendapatan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,02% dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan

	pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat. 2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan dan pariwisata serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang bersumber dari retribusi. 3. Pengembangan Infrastruktur Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan. 4. Kerjasama dan Kemitraan Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek- proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan. 5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.	

	6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 7. Pengawasan dan Akuntabilitas Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. C. Belanja Daerah Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, untuk mengukur belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali, di bawah ini terlampir tren alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:	

Tabel 2 Tren Alokasi dan Realisasi Belanja Daerah							
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4=3/2	5	6	7=6:5	
BELANJA DAERAH	7.541.821.522.461	6.741.065.092.325	89,38	7.932.886.363.138	6.613.665.437.677	83,37	
Belanja Operasi	4.076.148.648.130	3.784.571.890.212	92,85	4.474.769.277.170	3.954.414.302.114	88,37	
Belanja Modal	1.800.399.412.612	1.450.937.891.716	80,59	1.409.820.872.741	920.204.818.153	65,27	
Belanja Tidak Terduga	7.848.875.371	4.759.779.107	60,64	15.828.456.983	9.519.788.187	60,14	
Belanja Transfer	1.657.424.586.348	1.500.795.531.290	90,55	2.032.467.756.244	1.729.526.529.224	85,09	
Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024		Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rata-Rata Rasio	
	Target (Rp)	Realisasi s.d. (30 September 2024) (Rp)	%	(%)	(%)	(%)	(%)
1	8	9	10=9:8	11=5:2	12=8:5	13=11:8	14=(11+12+13):3
BELANJA DAERAH	7.795.681.730.804	5.974.002.880.711	76,63	5,19	(1,73)	(12,42)	(2,99)
Belanja Operasi	4.755.763.778.329	3.642.875.240.973	76,60	9,78	6,28	3,30	6,45
Belanja Modal	798.894.222.750	397.385.097.439	49,74	(21,69)	(43,33)	24,37	(13,55)
Belanja Tidak Terduga	52.205.727.068	5.977.934.041	11,45	101,67	229,82	155,91	162,46
Belanja Transfer	2.188.818.002.657	1.927.764.608.258	88,07	22,63	7,69	(64,02)	(11,23)
Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi belanja daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,99% dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.							
Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah antara lain:							
1. Perencanaan Anggaran yang Tepat							
Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.							
2. Anggaran Berbasis Kinerja							
Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengevaluasi hasil							

	dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja. 3. Biaya per Layanan Publik Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut. 4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi Bali perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara <i>real-time</i> serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Provinsi Bali dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. 5. <i>E-Government</i> dan <i>E-Procurement</i> Penguatan implementasi platform <i>e-government</i> dan <i>e-procurement</i> untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui <i>platform e-government</i> dan <i>e-procurement</i> lebih efektif dan efisien. 6. Monitoring dan Evaluasi Program Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan <i>output</i> yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan	

	anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. D. Pembiayaan Daerah Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk mengukur pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali, diuraikan tren alokasi dan realisasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:	

Tabel 3
Tren Alokasi dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5
Pembiayaan Daerah	1.945.341.671.769	1.193.798.304.069	61,37	683.933.187.191	66.746.644.320	9,76
Penerimaan Pembiayaan	2.050.341.671.769	1.293.798.304.069	63,10	1.079.721.253.120	408.963.390.625	37,88
Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000.000	100.000.000.000	95,24	395.788.065.929	342.216.746.305	86,46

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2024			Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2023 dan Target APBD Tahun Anggaran 2022	Rasio dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Target APBD Tahun Anggaran 2023	Rasio dari Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Target APBD Tahun Anggaran 2024	Rata-Rata Rasio
	Target (Rp)	Realisasi s.d. (30 September 2024) (Rp)	%	(%)	(%)	(%)	(%)
1	8	9	10=9:8	11=5:2	12=8:5	13=11:8	14=(15+16+17):3
Pembiayaan Daerah	919.665.537.204,00	200.629.391.164	21,82	(64,84)	34,47	(13,05)	(14,47)
Penerimaan Pembiayaan	1.175.582.550.556	342.650.523.382	29,15	(47,34)	8,88	2,17	(12,10)
Pengeluaran Pembiayaan	255.917.013.352	142.021.132.218	55,49	276,94	(35,34)	56,87	99,49

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, tren alokasi pembiayaan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalami penurunan rata-rata sebesar 14,47% dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran
- Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Evaluasi Kinerja Program
- Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

E. Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 4, sebagai berikut:

Tabel 4

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) daerah	B.31.900/4412/PADFE/BPKAD	11 Juli 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Juli)
2.	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali	Nomor B.00.900/31674/Setda	12 Juli 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
3.	Kesepakatan Rancangan KUA antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali	B.00.100.3.7/36882/SETDA B.08.900/19179/KEU/SETWAN	12 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4.	Kesepakatan Rancangan PPAS antara Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Bali	B.00.100.3.7/36883/SETDA B.08.900/19180/KEU/SETWAN	12 Agustus 2024	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
5.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Provinsi Bali	-	30 September 2024	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6.	Persetujuan bersama DPRD Provinsi Bali dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025	B.00.900.1.1/54426/SETDA B.08.900/29785/KEU/DPRD	26 November 2024	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
7.	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi	B.00.900/44966/SETDA	26 November 2024 Disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 27 November 2024	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum sepenuhnya berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk selanjutnya harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD mulai dari RKPD, KUA dan

Pemerintah Provinsi Bali pada tahun-tahun mendatang akan lebih tertib dan tetap mengupayakan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

	PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah; dan 4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan; sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

III.	SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH	
	A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Penyediaan anggaran Percepatan Penurunan Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (<i>under faltering</i>) pada anak balita dan menurunnya prevalensi <i>wasting</i> (kurus) pada anak balita Rp269.036.488.187,00 atau 3,94% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp270.631.520,00 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	Alokasi anggaran belanja dimaksud, merupakan pelaksanaan tugas Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan monitoring evaluasi, yang bertujuan mempercepat peningkatan Indikator Kinerja Gizi (IKG) dalam rangka percepatan penurunan stunting terutama yang berkaitan penanganan intervensi gizi spesifik, antara lain: 1. Pertemuan Analisa Program Gizi, untuk mengkoordinasikan kegiatan konvergensi dalam upaya percepatan penurunan stunting, dengan peserta dari Kabupaten (TPG Puskesmas); 2. Monev Surveilans Gizi, dilaksanakan setiap triwulan dan evaluasi tahunan bertujuan untuk mengetahui capaian indikator kinerja gizi terkait pelayanan gizi masyarakat; 3. Pertemuan Koordinasi Program Gizi, upaya percepatan penurunan stunting khususnya pada upaya peningkatan kualitas Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal bagi balita dan ibu hamil serta Capaian Program Gizi sampai TW III; 4. Monev Pelaksanaan PMT Lokal di Kab/Kota, untuk mengetahui pelaksanaan PMT pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil KEK.

	1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp20.655.000,00 atau 7,63% dari total sub kegiatan; dan 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp124.212.000,00 atau 45,90% dari total sub kegiatan b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp2.592.450.616,00 pada SKPD Dinas Kesehatan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp294.745.000,00 atau 11,37% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp695.281.280,00 atau 26,82% dari total sub kegiatan; 3) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp285.600.000,00 atau 11,02% dari total sub kegiatan; dan 4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp346.740.000,00 atau 13,37% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan	Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut: 1. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dianggarkan untuk membiayai tenaga non ASN pada Komisi Penanggulangan AIDS sejumlah 15 orang dan Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia sejumlah 5 orang. 2. Belanja Perjalanan Dinas Biasa dianggarkan untuk : a. Kegiatan PPTI merupakan Monitoring Lapangan penanggulangan Tuberkulosis di kabupaten/kota b. Monitoring, evaluasi dan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Program Penyakit Menular seperti Penyakit zoonosis (Rabies), Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulosis, Hepatitis, Diare, ISPA, Kusta, Filariasis dan Kecacingan. c. Monitoring, evaluasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Penyakit Tidak Menular seperti Pendampingan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok, Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular, Eliminasi Ca Cervix, Pengendalian Dampak Rokok dan Program Kesehatan Jiwa d. Kegiatan Kesehatan Lingkungan diperuntukan untuk penilaian kabupaten/kota sehat.

	Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi Penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi Rp133.004.025.462,00 atau 1,95% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp45.254.634.268,00; b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Rp24.316.561.020,00; c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Rp16.419.793.732,00; d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp15.149.691.020,00; e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan Rp8.342.009.482,00; f. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Rp5.151.845.180,00; g. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rp3.926.373.180,00; h. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan Rp2.483.385.440,00; i. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi Rp2.151.976.540,00; dan j. Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp1.082.159.380,00;	

	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya. Selain itu, penyediaan anggaran Pengendalian Inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan Rp2.483.385.440,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan	

	Ketahanan Pangan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp118.863.500,00 atau 2,04% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.772.967.264,00 atau 2,04% dari total sub kegiatan; dan 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp145.672.000,00 atau 2,04% dari total sub kegiatan; b. Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian Rp1.082.159.380,00 pada SKPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp938.629.728,00 atau 86,74% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Pengendalian Inflasi. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan	Belanja Jasa Tenaga Administrasi merupakan pendukung kegiatan diperlukan dalam rangka pengawasan jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan yang tersedia dan beredar dipasaran, sehingga dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga. Disamping itu juga tenaga administrasi ini membantu dalam pengawasan benih karena fungsional pengawas benih sangat kurang dari jumlah optimal. Belanja Jasa Tenaga Administrasi dalam sub kegiatan ini diperlukan tenaga pendukung dalam mengoptimalkan kegiatan dimasing-masing kebun induk yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan pengembangan prasarana kawasan dan komoditas pertanian sehingga diharapkan menghasilkan benih unggul yang baik dan bisa diterima dan dimanfaatkan serta ditanam oleh petani dalam percepatan pengembangan komoditas pertanian penyumbang inflasi.

	butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Penyediaan anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp162.329.120.172,10 atau 2,38% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Rp650.611.600,00 pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp648.000.000,00 atau 99,60% dari total sub kegiatan; dan b. Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan	Belanja Jasa Tenaga Ahli yang dimaksud dialokasikan untuk pembayaran tenaga Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) yang membantu dalam mendukung pencapaian output sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

	Pengentasan Kemiskinan Rp602.185.680,00 pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp417.168.768,00 atau 69,28% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Sehat Penyediaan anggaran Makan Bergizi Sehat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah. Dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah	Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

	Provinsi Bali wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Alokasi Anggaran Program Tiga Juta Rumah Penyediaan anggaran Program Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah antara lain: - Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; - Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR; - Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan - Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang melalui Sekretaris Jenderal kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri	Kebijakan dimaksud bukan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

	Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah. 6. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan daerah, antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di Bidang Pertanian. Selanjutnya, guna mewujudkan Swasembada Pangan di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harga pangan di daerah, dengan mengambil langkah-langkah antara lain: a. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan; b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; dan c. Monitoring harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar, sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan pengawasan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Alokasi Anggaran Swasembada Energi dalam rangka Kemandirian Energi di Daerah Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.	

	Selanjutnya, penganggaran swasembada energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat mencapai kemandirian energi di tingkat daerah. 8. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.865.206.228.400,00 atau 76,92% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada	

	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan ebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:	

Tabel 5
Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pertanian, Kelautan, IKM, UMKM dan Pariwisata	205.167.094.695	3,01
2.	Pendidikan, IPTEK dan Kesehatan	2.842.580.022.300	41,63
3.	Tenaga Kerja dan Kesehatan Sosial	88.231.788.283	1,29
4.	Adat, Tradisi, Seni dan Budaya	694.218.733.240	10,17
5	Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	97.937.082.006	1,43
6	Infrastruktur	932.308.943.367	13,66
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	1.966.941.341.422	28,81
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	6.827.385.005.313	100,00
	Total Belanja Daerah	6.827.385.005.313	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 belum sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyelaraskan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan Lampiran Tabel

Alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan alokasi belanja yang telah disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD.

	3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam SIPD RI. C. Penyediaan Anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (<i>Mandatory Spending</i>), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Penyediaan anggaran Fungsi Pendidikan Rp2.586.378.341.705,00 atau 37,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp47.370.185.000,00; - Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp32.664.481.560,00; - Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Rp22.212.384.000,00; - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp14.664.435.400,00; dan - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp11.150.616.000,00;	

	telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Bali dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai dengan sub kegiatan. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemuatakhirannya	

	sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus Rp25.603.703.200,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp250.000.000,00 atau 15,68% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp332.025.000,00 atau 20,83% dari total sub kegiatan; 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp254.726.000,00 atau 15,98% dari total sub kegiatan; dan 4) Belanja Sewa Hotel Rp268.000.000,00 atau 16,81% dari total sub kegiatan. b. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Rp900.976.300,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	

	1) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) Rp103.680.000,00 atau 11,51% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Modal <i>Personal Computer</i> Rp490.684.800,00 atau 54,46% dari total sub kegiatan; dan 3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp230.035.000,00 atau 25,53% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Fungsi Pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Rp1.970.340.964.469,00 atau 32,62% dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan	

	Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp15.149.691.020,00; - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp29.565.559.255,00; - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp11.150.616.000,00; - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota Rp828.355.360,00; dan - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp137.682.000,00; belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan butir	Alokasi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam RAPBD TA 2025 telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja infrastuktur pelayanan publik dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

	5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyesuaian porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemuatakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Rp9.650.922.400,00 pada SKPD Sekretariat DPRD, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:	

	1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp4.342.332.000,00 atau 44,99% dari total sub kegiatan; dan 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp5.134.455.900,00 atau 53,20% dari total sub kegiatan. b. Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual Rp2.877.131.700,00 pada SKPD Sekretariat Daerah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.952.000.000,00 atau 67,85% dari total sub kegiatan; dan 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp294.748.000,00 atau 10,24% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan Alokasi 3. Anggaran Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp2.614.748.550.901,20 atau 38,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang	Sudah dilakukan rasionalisasi untuk perjalanan dinas luar negeri dikurangi sebesar Rp134.625.900,00 dan untuk perjalanan dinas biasa dilakukan rasionalisasi sebesar Rp77.755.000,00

	bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.331.791.443.901,20 atau 34,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya a. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan PKB Rp1.132.106.644.500,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan	Pemerintah Provinsi Bali akan tetap mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

	dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran Hasil Penerimaan PKB, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar melakukan penyesuaian terhadap hasil penerimaan PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mengalami perubahan sebagai akibat pemberian dan/atau pengurangan dasar pengenaan PKB, BBNKB,	

	Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang berlaku efektif pada tanggal 5 Januari 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 102 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. b. Alokasi Anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok Penyediaan anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok Rp354.875.391.691,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum, seperti: 1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan: a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;	Pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan penggunaan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian daerah provinsi atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), Pajak Rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Rokok bagian hak provinsi atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); dan c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan untuk digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), selain itu dapat digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI.	

	2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk: a) minimal berupa: (1) sosialisasi ketentuan di bidang Cukai Hasil Tembakau; dan (2) operasi pemberantasan rokok illegal; diprioritaskan apabila Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud; b) penggunaan/pemanfaatan Pajak Rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana Pajak Rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum; sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran atas Hasil Penerimaan Pajak Rokok dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan	

	pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Alokasi Anggaran Belanja Bagi Hasil Penyediaan anggaran Belanja Bagi Hasil Rp582.188.016.684,00 atau 8,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) $\text{Rp}476.000.000.000,00 \times 70\% = \text{Rp}333.200.000.000,00$; 2) Belanja Bagi Hasil Pajak Air Permukaan $\text{Rp}1.150.485.000,00 \times 50\% = \text{Rp}575.242.500,00$; dan 3) Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok $\text{Rp}354.875.391.691,00 \times 70\% = \text{Rp}248.412.774.183,70$. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota dimaksud sesuai dengan target Pajak Daerah yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Bali kepada kabupaten/kota yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain	

	dalam rangka bagi hasil sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 dan butir 3.4.4.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan Pajak Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.4.1.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target Pajak Daerah pada akhir Tahun Anggaran 2024 yang memengaruhi besaran Bagi Hasil Pajak Provinsi Bali, disalurkan kepada kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 3.4.4.1.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut: 1. SPM Pendidikan Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pendidikan Rp222.665.807.860,00 atau 11,29% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.972.853.766.953,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:	

	a. Angka Partisipasi Sekolah Rp117.008.068.000,00, yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Rp3.533.566.200,00; 2) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp8.871.116.400,00; 3) Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Rp68.000.000.000,00; dan 4) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Rp4.704.150.000,00. b. Literasi dan Numerasi Rp53.508.307.360,00 yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Rp4.375.715.500,00; 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp32.664.481.560,00; dan 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp15.227.396.400,00. c. Kekhususan SMK Rp51.058.070.200,00, yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp2.955.825.000,00; dan 2) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp47.370.185.000,00; d. Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Rp1.091.362.300,00, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Rp900.976.300,00;	

	harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) dan butir 5.3.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

	Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus Rp4.755.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp230.035.000,00 atau 25,53% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) Rp103.680.000,00 atau 11,51% dari total sub kegiatan; dan 3) Belanja Modal <i>Personal Computer</i> Rp490.684.800,00 atau 54,46% dari total sub kegiatan. b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp15.227.396.400,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan <i>Cover</i> Rp375.056.200,00 atau 2,46% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp2.700.000.000,00 atau 17,73% dari total sub kegiatan; 3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp2.171.025.000,00 atau 14,26% dari total sub kegiatan; 4) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp2.491.200.000,00 atau 16,36% dari total sub kegiatan;	

	5) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp941.760.000,00 atau 6,18% dari total sub kegiatan; 6) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp382.500.000,00 atau 2,51% dari total sub kegiatan; 7) Belanja Modal <i>Personal Computer</i> Rp5.352.307.200,00 atau 35,15% dari total sub kegiatan; dan 8) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-<i>Software</i> Rp509.600.000,00 atau 3,35% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Pendidikan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021	Anggaran pada Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus sebesar Rp4.755.000.000,00 dan anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik sebesar Rp15.227.396.400,00 merupakan anggaran BOSDA bagi Satuan Pendidikan SLB Negeri se-Bali dalam rangka mendukung pencapaian SPM Pendidikan.

	tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. 2. SPM Kesehatan Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Kesehatan Rp433.530.620,00 atau 0,06% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp781.848.724.315,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Pelayanan kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Rp276.401.260,00; dan b. Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi Rp157.129.360,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun	

	2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Rp276.401.260,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: - Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp14.310.000,00 atau 5,18% dari total sub kegiatan; - Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp36.000.000,00 atau 13,02% dari total sub kegiatan; dan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp117.240.000,00 atau 42,42% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Kesehatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana	Adapun sub rincian objek belanja pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana yang tersusun dalam RKA, telah menunjang output Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan pada tahap Pra Krisis. Rincian belanja tersebut diperuntukkan sebagai berikut: 1) Sosialisasi pedoman HEOC ke 9 kab/kota dengan melibatkan peserta dari rumah sakit, puskesmas, BPBD, lintas sektor kebencanaan yang terkait, aparat desa seperti pecalang dan organisasi profesi; 2) perjalanan dinas dengan tujuan ke dinas kesehatan kab/kota untuk melakukan evaluasi pembentukan HEOC; 3) perjalanan dinas ke rumah sakit untuk mengecek pelaksanaan <i>hospitals disaster</i> dan simulasi yang dilakukan dalam kesiapsiagaan krisis/bencana; 4) berkoordinasi ke <i>Public Safety Center</i> (PSC) untuk monitoring kegiatan kegawatdaruratan sehari hari ataupun bencana; 5) Penyelenggaraan rapat persiapan dengan tim yang akan dilibatkan dan rapat evaluasi.

	maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp781.848.724.315,00 atau 11,45% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Rp110.428.247.793,00; b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Rp779.312.080,00; dan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Rp401.179.980,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di Bidang Kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam rangka mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan, mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;	

	b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan <i>Stunting</i>: 1) peningkatan skrining anemia remaja putri; 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; 3) pemeriksaan kehamilan (<i>Antenatal Care</i>); 4) konsumsi TTD ibu hamil; 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK); 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta); 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (<i>weight faltering, wasting, dan Stunting</i>); 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan 11) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita. c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: 1) Tuberkulosis (TBC); 2) <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV); 3) Malaria; dan 4) Penyakit menular lainnya. d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: 1) Diabetes Melitus; 2) Hipertensi; dan 3) Penyakit tidak menular lainnya.	

	e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu; 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, <i>stroke</i>, jantung, dan <i>uronefrology</i>) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan: 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;	

	3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, <i>stroke</i>, jantung, dan <i>uronefrology</i>); 4) tenaga kesehatan di Labkesda; 5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan 6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu. sebagaimana maksud butir 5.3.3.b dan butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023. 3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp91.640.984.847,00 atau 19,46% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp470.974.474.633,20. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp73.307.419.135,00, yang antara lain tercantum pada:	

	1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp41.803.049.560,00; dan 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota Rp29.565.559.255,00. b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Rp18.333.565.712,00, yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp14.892.528.760,00; dan 2) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Rp3.182.090.552,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun	

	2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Rp1.938.810.320,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp973.393.792,00 atau 50,21% dari total sub kegiatan; b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp41.621.328,00 atau 2,15% dari total sub kegiatan; c. Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp34.979.616,00 atau 1,80% dari total sub kegiatan; dan d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp25.082.000,00 atau 1,29% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai	

	dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp320.817.100,00 atau 5,44% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp5.896.377.380,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi Rp5.896.377.380,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan	

	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Rp195.783.400,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp173.820.320,00 atau 88,78% dari total sub kegiatan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Belanja tenaga administrasi merupakan pelaksana kegiatan yang saat ini tersedia dalam melakukan pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus dalam rangka menghasilkan data dasar dalam penyusunan SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

	5. SPM Sosial Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Sosial Rp7.792.996.100,00 atau 20,31% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp38.377.545.501,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut: a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti Rp2.778.648.900,00, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Rp2.500.000.000,00; b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Rp2.607.285.000,00, yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Rp1.882.032.600,00; c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti Rp1.871.531.000,00, yang antara lain tercantum pada: 1) Sub Kegiatan Pemulasaraan Rp332.890.100,00; dan 2) Sub Penyediaan Permakanan Rp1.200.262.500,00. d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan di Dalam Panti Rp184.119.400,00; dan e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi Rp351.411.800,00; harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

	Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Rp2.521.680.300,00 pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp2.500.000.000,00 atau 99,14% dari total sub kegiatan; dan b. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Rp290.746.400,00 pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp66.150.000,00 atau 22,75% dari total sub kegiatan; 2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp37.259.400,00 atau 12,82% dari total sub kegiatan; 3) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp10.632.000,00 atau 3,66% dari total sub kegiatan;	rincian objek Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain senilai Rp2.500.000.000,- merupakan pembayaran perawatan kesehatan bagi ODGJ (penyandang disabilitas mental terlantar) di RSJ Provinsi Bali. Belanja-belanja yang tercantum dalam Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari dimaksud, dipergunakan untuk mendukung operasional kegiatan sehari-hari penghuni di dalam panti.

	4) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp79.380.000,00 atau 27,30% dari total sub kegiatan; 5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp37.107.000,00 atau 12,76% dari total sub kegiatan; 6) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp29.300.000,00 atau 10,08% dari total sub kegiatan; dan 7) Belanja Jasa Pengolahan Sampah Rp19.200.000,00 atau 6,60% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Sosial. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Penyediaan anggaran untuk Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp20.855.897.793,00 atau 21,76% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	

	Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp95.825.014.725,00. Alokasi anggaran untuk Belanja SPM tersebut hanya diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi Rp20.855.897.793,00, harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor	

	900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui Pelatihan Teknis termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Rp355.556.420,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp44.000.000,00 atau 12,37% dari total sub kegiatan; b. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp104.292.192,00 atau 29,33% dari total sub kegiatan; dan c. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp117.416.000,00 atau 33,02% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran Belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf	

	c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 5.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: 1. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan Penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali Rp43.700.498.243,00 atau 0,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:	

	a. Alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat Rp12.051.128.551,00 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan b. Alokasi Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat Rp14.313.377.618,00 atau 0,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali di luar Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN Rp17.335.992.074,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp1.015.639.700,00; b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Rp2.529.988.960,00; c. Sub Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp89.999.800,00; dan d. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Rp2.037.292.060,00; belum memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar).	Pengalokasian anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan tersebut sudah sangat mencukupi dan telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan riil SKPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dan apabila dialokasikan secara berlebihan akan berdampak pada kurang efektifnya penyerapan anggaran.

	Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali sekurang-kurangnya 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.1) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: a. kegiatan pengawasan, yaitu: 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksaan kinerja; 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD; 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; 4) Reviu Laporan Keuangan;	

	5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi <i>Probit Audit</i>, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP; b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan	

	c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton dan lain-lain; sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada SKPD Inspektorat Daerah Provinsi Bali Rp4.768.689.000,00 atau 10,91% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah Rp43.700.498.243,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Bali dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN Penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp51.563.104.347,00 atau 0,76% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada: a. Alokasi Belanja Pegawai pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp31.255.280.353,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025; dan	

	b. Alokasi Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp456.960.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Rp19.850.863.994,00 atau 0,29% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN Rp3.713.014.720,00; dan b. Sub Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Rp1.518.188.420,00; belum memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang Pendidikan dan Pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD	Pemerintah Provinsi Bali akan tetap berupaya untuk memenuhi alokasi belanja pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

	Tahun Anggaran 2025, dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Alokasi Anggaran untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Penyediaan anggaran untuk FKUB Rp1.053.095.256,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp1.053.095.256,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, dengan berpedoman pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya, penyediaan anggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan	

	sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Alokasi Anggaran Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Penyediaan anggaran Pelaksanaan FORKOPIMDA Rp999.999.700,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Rp999.999.700,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Provinsi Bali sebagai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Gubernur Bali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Penyediaan anggaran TP-PKK Rp3.277.541.920,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp3.277.541.920,00, dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi melalui:	

	a. Upaya percepatan penurunan <i>Stunting</i> melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti <i>trafficking</i> dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga dan perkoperasian; d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka <i>Stunting</i>, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, <i>Thermometer</i>, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma	

	dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat; f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi: 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila; 2) gotong royong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkooperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; dan 10) perencanaan sehat. g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi Bali dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan	

	Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024; h. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga dapat mengalokasikan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Provinsi Bali, serta kegiatan lainnya; dan i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah; sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp3.277.541.920,00 pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp530.100.000,00 atau 16,17% dari total sub kegiatan; dan	

	b. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.127.895.000,00 atau 34,41% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada Sub Kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 6. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu Penyediaan anggaran Penguatan Posyandu belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengalokasikan anggaran Penguatan Posyandu dan digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan	Proporsi alokasi anggaran dimaksud telah disesuaikan kembali berdasarkan perhitungan kebutuhan operasional dan biaya kegiatan pokok Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Belanja makanan dan minuman lapangan bukan diperuntukkan untuk operasional pengurus Tim Penggerak PKK, melainkan belanja pendukung diperuntukan untuk sasaran kegiatan (diberikan kader PKK ataupun masyarakat sasaran kegiatan), sedangkan belanja Perjalanan dinas biasa mengacu perencanaan kegiatan Tahun 2025 berdasarkan hasil RAKORNAS TP PKK Tahun 2024, bahwa akan diselenggarakan kegiatan TP PKK tingkat nasional Tahun 2025 berupa Rapat Kerja Nasional X (Rakernas X), Puncak Peringatan HKG PKK Tingkat Nasional ke-53 dan Jambore PKK Nasional serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PKK Tahun 2025, sehingga perlu dipersiapkan biaya dukung untuk keikutsertaan kegiatan dimaksud.

	Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 serta pemutakhirannya. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain: a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas: 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa; 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa. b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM; dan c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan; sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 7. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial Penyediaan anggaran Perhutanan Sosial yang tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Rp30.000.500,00; dan b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan Rp93.681.540,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung Pembangunan dan Pengembangan Kesatuan Pengelolaan	

	Hutan dan pembiayaan pengelolaan Perhutanan Sosial yang dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan, dengan berpedoman pada Pasal 124 dan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 8. Alokasi Anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Penyediaan anggaran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang antara lain tercantum pada: - Sub Kegiatan Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa Rp117.943.020,00; - Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp457.999.760,00; - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Rp205.861.860,00; - Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp675.410.580,00; dan - Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rp37.595.700,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 5.3.12.3).a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 9. Alokasi Anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia Penyediaan anggaran Memajukan Kebudayaan Indonesia yang antara lain tercantum pada:	

	a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Rp30.933.076.500,00; b. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi Rp10.611.715.720,00; c. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi Rp10.332.582.420,00; dan d. Kegiatan Pengelolaan Museum Provinsi Rp5.796.891.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada butir 5.3.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 10. Alokasi Anggaran Bantuan Hukum Penyediaan anggaran Bantuan Hukum yang tercantum pada: a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum Rp2.959.128.700,00; b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM Rp280.210.360,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum, dengan berpedoman pada butir 5.3.30.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 11. Alokasi Anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyediaan anggaran Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Pemerintah Daerah yang antara lain tercantum pada: a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Penyediaan anggaran bantuan hukum berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp24.374.125.320,00; dan b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp1.196.846.320,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dengan berpedoman pada butir 5.3.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 12. Alokasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penyediaan anggaran yang bersumber dari BLUD, antara lain tercantum pada: a. Belanja Pegawai BLUD Rp119.276.691.593,00; b. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp208.816.201.390,00; c. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp25.165.186.000,00; d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp4.208.000.000,00; dan e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp1.490.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,	

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan butir 5.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 13. Alokasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana BOS, antara lain tercantum pada: a. Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp196.486.059.200,00; b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Rp40.534.046.520,00; dan c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Rp19.485.084.280,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemuatakhirannya, sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.3.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
IV.	KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali	

tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No	Keterangan	RKPD	KUA dan PPAS	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025
1.	Jumlah Program	261	261	266
2.	Jumlah Kegiatan	629	629	634
3.	Jumlah Sub Kegiatan	1606	1606	1620
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	5.565.949.682.264	5.565.809.023.510	6.827.385.005.313

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk selanjutnya harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD dengan berpedoman pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

	2023, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024. Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD	

	Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Bali tentang APBD	

	Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
V.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
	A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah 1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. 2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Provinsi Bali berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Penambahan sub kegiatan baru dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 merupakan sub kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik, DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2025, serta program prioritas provinsi yang telah dibahas dan disetujui bersama.

	Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (<i>performance based</i>), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan	

	perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD	

sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp6.027.724.313.823,00, diuraikan sebagaimana Tabel. 7 sebagai berikut:

Tabel. 7
Pendapatan Daerah

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	6.027.724.313.823	
Pendapatan Asli Daerah	3.581.371.604.823	59,41
Pajak Daerah	2.611.036.410.791	43,32
Retribusi Daerah	337.336.008.147	5,60
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	193.896.695.885	3,22
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	439.102.490.000	7,28
Pendapatan Transfer	2.440.644.709.000	40,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000	40,49
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0,00

Uraian	Target Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Pendapatan Daerah (%)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.708.000.000	0,09
Pendapatan Hibah	5.708.000.000	0,09
Dana Darurat	0	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Rp3.581.371.604.823,00 atau 59,41% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.590.033.889.600,00 atau 66,75% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp6.876.016.193.600,00, dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.041.446.320.153,00 atau 69,55% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.248.953.175.947,00, dan dibandingkan dengan target PAD dalam Peraturan Daerah

	Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.494.115.418.572,00 atau 62,43% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp 5.596.479.850.692,00. Selain itu, tren realisasi PAD tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: a. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 Rp4.928.712.775.742,55 atau 107,38% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp4.590.033.889.600,00; b. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2023 Rp4.623.648.871.938,02 atau 91,71% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp5.041.446.320.153,00; dan c. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 Rp3.850.887.413.337,35 atau 110,21% dari total PAD dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp3.494.115.418.572,00. Berdasarkan data tren realisasi PAD tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan kembali atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:	Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan perhitungan atas target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan potensi dan proyeksi target PAD serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target PAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta perhitungan menyesuaikan dengan mulai berlakunya PKB, BBNKB, Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen MBLB per tanggal 5 Januari 2025 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

	a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1) Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah Rp2.611.036.410.791,00 atau 43,32% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp1.132.106.644.500,00; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp627.703.889.600,00; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Rp476.000.000.000,00; d) Pajak Air Permukaan Rp1.150.485.000,00; e) Pajak Rokok Rp354.875.391.691,00; f) Pajak Alat Berat Rp120.000.000,00; dan g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp19.080.000.000,00. 2) Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah Rp337.336.008.147,00 atau 5,60% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a) Retribusi Jasa Umum Rp311.749.308.983,00; b) Retribusi Jasa Usaha Rp21.586.699.164,00; dan c) Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.000.000.000,00. Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat	

	pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan: a. pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana	

	maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; b. kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; c. dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan d. pemberian insentif PBBKB untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen); sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2), butir 3.3.1.1.1.o.3) dan butir 3.3.1.1.1.r Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan PKB sebagaimana tercantum pada butir a.1).a) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

	Selain itu, untuk penggunaan Pajak Rokok sebagaimana tercantum dalam butir a.1).e) dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari hak Provinsi untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak Rokok berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dalam rangka mendukung program JKN, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian Provinsi, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak Provinsi untuk pendanaan program JKN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 dan butir 3.3.1.1.2.c.1).b)	

	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran target pendapatan Pajak Rokok harus disesuaikan dengan alokasi Pajak Rokok yang ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor KEP-49/PK/2024 tanggal 22 Oktober 2024 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2025 Rp354.875.391.691,00. 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp193.896.695.885,00 atau 3,22% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan merupakan penerimaan daerah atas Hasil Penyertaan Modal Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan Hasil Penyertaan Modal antara lain dari: a. PT. BPD Bali Rp191.580.177.566,00 atau 29,71% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp644.912.000.000,00; dan b. PT. Asuransi Bangun Askrida Rp184.259.300,00 atau 16,02% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp1.150.000.000,00;	

	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Bali sampai dengan Tahun Anggaran 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain: a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.3.1.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.	

Selanjutnya, terhadap hasil Penyertaan Modal pada: a. BUMD yang kinerjanya belum memadai (performance based) dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu: 1) PT. Puri Raharja Rp609.518.542,00 atau 6,98% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp8.736.000.000,00; dan 2) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) Rp1.522.740.477,00 atau 1,07% dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp142.000.000.000,00. b. BUMD yang belum memberikan bagian laba dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yaitu: 1) PT. Jasamarga Bali dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp100.000.000.000,00; dan 2) Perusahaan Daerah Provinsi Bali dari total Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Rp5.282.769.658,00; agar melakukan langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. 3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Rp439.102.490.000,00 atau 7,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025.	Terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bali yang belum menunjukkan kinerja yang memadai (performance based), akan dilakukan upaya-upaya pembenahan dengan harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemerintah Provinsi Bali saat ini masih fokus melakukan pengembangan usaha atau diversifikasi terhadap Perumda Provinsi Bali serta melakukan upaya peningkatan kinerja PT. Jasamarga Bali Tol, yang masih difokuskan pada percepatan pengembalian Break Even Poin (BEP) selama 37 Tahun, sehingga sampai dengan saat ini semua pemegang saham belum mendapatkan bagian laba atas penyertaan modal tersebut.

	Selain itu, tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: - Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 Rp659.991.514.031,41 atau 169,97% dari total target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp388.297.696.494,00; - Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 Rp401.662.321.228,70 atau 42,69% dari total target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp940.941.381.702,00; dan - Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2022 Rp385.967.099.179,88 atau 100,64% dari total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp383.496.351.484,00. Berdasarkan data tren realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 agar memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut: - Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp390.000.000,00 atau 0,01% dari total pendapatan daerah	Pemerintah Provinsi Bali dalam menetapkan target pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah memperhatikan potensi dan proyeksi target penerimaan atas pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan butir 3.3.1.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b. Hasil Kerja Sama Daerah Rp3.135.020.000,00 atau 0,05% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.	

	c. Jasa Giro Rp10.000.000.000,00 atau 0,17% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. d. Pendapatan Bunga Rp1.000.000.000,00 atau 0,02% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp1.000.000,00 atau 0,00002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp1.000.000,00 atau 0,00002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	

	Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp50.500.100.000,00 atau 0,84% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp600.000,00 atau 0,00001% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. i. Pendapatan dari Pengembalian Rp100.000.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

	j. Pendapatan BLUD Rp48.974.770.000,00 atau 0,81% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	
	4. Pendapatan Transfer Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer Rp2.440.644.709.000,00 atau 40,49% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp2.440.644.709.000,00 atau 40,49% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan: a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp244.948.196.000,00 lebih kecil Rp2.194.674.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Rp247.142.870.000,00;	Penganggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp244.948.196.000,00 lebih kecil Rp2.194.674.000,00 dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 Rp247.142.870.000,00 disebabkan oleh penganggaran DBH Cukai Hasil Tembakau telah dihitung menurut bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota.

	b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.401.748.162.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Rp1.401.748.162.000,00; c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp127.058.736.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Rp127.058.736.000,00; d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp653.911.029.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Rp653.911.029.000,00; dan e. Insentif Fiskal Rp12.978.586.000,00 sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Rp12.978.586.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan besaran alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam	

	Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Dana TKD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat menganggarkan penarikan dana TDF pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>. 5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp5.708.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam jenis Pendapatan Hibah Rp5.708.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri Rp5.708.000.000,00 atau 0,09% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran	

	2025, guna menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan Penjelasan atas Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.3.3.1.a dan butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pendapatan Hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Provinsi Bali, diprioritaskan untuk: a. biaya operasional ke-SAMSATan untuk kepentingan dan kebutuhan SAMSAT dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB dan SWDKLLJ; b. kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat Provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ; c. biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT; sebagaimana maksud butir 3.3.31.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

VI.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
	A. Kebijakan Umum Belanja Daerah 1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Wajib dan Belanja Mandatory Spending serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

	3. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak <i>absurd</i> untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Belanja Daerah untuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain Urusan Wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. B. Urusan Pemerintah Daerah Ringkasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan Jenis Belanja Daerah diuraikan sebagaimana Tabel.8 sebagai berikut:	

	Tabel. 8 Urusan Pemerintah Daerah						
	Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	2.874.858.038.974	490.917.864.533	0	0	3.365.775.903.507	49,30
	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	1.743.710.142.993	229.143.623.960	0	0	1.972.853.766.953	28,90
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	686.240.321.500	95.608.402.815	0	0	781.848.724.315	11,45
	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	317.897.544.124	153.076.930.509	0	0	470.974.474.633	6,90
	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.760.849.800	1.135.527.580	0	0	5.896.377.380	0,09
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban	87.405.681.656	8.419.333.069	0	0	95.825.014.725	1,40
	Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
		Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
	Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	34.843.498.901	3.534.046.600	0	0	38.377.545.501	0,56
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	962.549.751.591	408.747.930.039	0	0	1.371.297.681.630	20,09
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	43.235.194.722	144.064.000	0	0	43.379.258.722	0,64
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.193.076.860	4.141.522.900	0	0	6.334.599.760	0,09
	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	2.340.063.140	17.648.960	0	0	2.357.712.100	0,03
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	306.851.700	0	0	0	306.851.700	0,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11.023.681.283	2.942.615.500	0	0	13.966.296.783	0,00
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	647.998.540	0	0	0	647.998.540	0,01

Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.638.209.913	0	0	0	20.638.209.913	0,30
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	703.554.240	0	0	0	703.554.240	0,01
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	47.112.545.531	2.055.257.416	0	0	49.167.802.947	0,72
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	86.184.740.937	318.894.974.230	0	0	405.079.715.167	5,93
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.807.974.046	972.452.200	0	0	24.780.426.246	0,36
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	19.584.539.900	0	0	0	19.584.539.900	0,29
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	87.810.156.532	67.374.500	0	0	87.877.531.032	1,29
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	447.978.560	0	0	0	447.978.560	0,01
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	435.742.980	0	0	0	435.742.980	0,01
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	614.751.712.907	79.467.020.333	0	0	694.218.733.240	10,17
Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	544.139.160	45.000.000	0	0	589.139.160	0,01
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	781.590.640	0	0	0	781.590.640	0,01
Urusan Pemerintahan Pilihan	221.013.806.561	4.390.433.560	0	0	225.404.240.121	3,30
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	32.422.726.305	3.461.417.400	0	0	35.884.143.705	0,53
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	24.192.341.102	274.162.200	0	0	24.466.503.302	0,36
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	93.494.627.533	167.607.800	0	0	93.662.235.333	1,37
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	47.234.899.472	0	0	0	47.234.899.472	0,69
Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	115.499.500	0	0	0	115.499.500	0,00
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	20.625.233.149	476.633.000	0	0	21.101.866.149	0,31
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2.903.594.700	10.613.160	0	0	2.914.207.860	0,04
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	24.884.800	0	0	0	24.884.800	0,00

Urusan Pemerintah Daerah	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025					Rasio terhadap Total Belanja Daerah (%)
	Belanja Operasi (Rp)	Belanja Modal (Rp)	Belanja Tidak Terduga (Rp)	Belanja Transfer (Rp)	Jumlah Belanja (Rp)	
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	444.633.761.992	67.890.156.878	0	0	512.523.918.870	7,51
Sekretariat Daerah	199.338.531.194	34.883.686.067	0	0	234.222.217.261	3,43
Sekretariat DPRD	245.295.230.798	33.006.470.811	0	0	278.301.701.609	4,08
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	327.228.886.395	14.260.312.116	133.598.041.000	787.453.202.628	1.262.540.442.139	18,49
Perencanaan	26.245.004.693	1.635.489.680	0	0	27.880.494.373	0,41
Keuangan	223.371.623.016	9.385.573.389	133.598.041.000	787.453.202.628	1.153.808.440.033	16,90
Kepegawaian	48.443.732.927	1.601.183.000	0	0	50.044.915.927	0,73
Pendidikan dan Pelatihan	1.518.188.420		0	0	1.518.188.420	0,02
Penelitian dan Pengembangan	18.277.435.463	1.121.764.840	0	0	19.399.200.303	0,28
Pengelolaan Penghubung	9.372.901.876	516.301.207	0	0	9.889.203.083	0,14
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	37.187.003.543	6.513.494.700	0	0	43.700.498.243	0,64
Inspektorat Daerah	37.187.003.543	6.513.494.700	0	0	43.700.498.243	0,64
Unsur Pemerintahan Umum	45.314.019.263	828.301.540	0	0	46.142.320.803	0,68
Kesatuan Bangsa dan Politik	45.314.019.263	828.301.540	0	0	46.142.320.803	0,68
Total	4.912.785.268.319	993.548.493.366	133.598.041.000	787.453.202.628	6.827.385.005.313	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

C. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran

2025 Rp6.827.385.005.313,20, diuraikan sebagaimana Tabel. 9 sebagai berikut:

Tabel. 9
Belanja Daerah

Uraian	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	6.827.385.005.313,20	
BELANJA OPERASI	4.912.785.268.319,20	71,96
Belanja Pegawai	2.614.748.550.901,20	38,30
Belanja Barang dan Jasa	1.456.756.752.282,00	21,34
Belanja Subsidi	5.025.000.000,00	0,07
Belanja Hibah	836.104.965.136,00	12,25
Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	0,00
BELANJA MODAL	993.548.493.366,00	14,55
Belanja Modal Tanah	25.415.000.000,00	0,37
Belanja Modal Peralatan dan Mesln	244.812.177.862,00	3,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	560.470.499.958,00	8,21
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	140.409.081.666,00	2,06
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.265.084.280,00	0,33
Belanja Modal Aset Lainnya	176.649.600,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	133.598.041.000,00	1,96
Belanja Tidak Terduga	133.598.041.000,00	1,96
BELANJA TRANSFER	787.453.202.628,00	11,53
Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684,00	8,53
Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944,00	3,01

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

	Penyediaan anggaran Belanja Operasi Rp4.912.785.268.319,20 atau 71,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Penyediaan anggaran belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja: a. Belanja Pegawai Penyediaan anggaran Belanja Pegawai Rp2.614.748.550.901,20 atau 38,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada: 1) Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp1.277.675.251.897,60 atau 18,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2025, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan	

	Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan <i>acress</i> yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk Gaji Pokok dan Tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagai berikut: 1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp74.594.128.582,00 yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan ASN seharusnya Rp87.288.204.303,17 atau terdapat selisih kurang Rp12.694.075.721,17. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban	Alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN dihitung berdasarkan batas paling tinggi Gaji atau Upah (Gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan) ASN per bulan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Peserta PPU (Pekerja Penerima Upah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp12.000.000,00 sehingga perhitungan alokasi anggaran iuran Jaminan Kesehatan untuk ASN telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

	pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp190.070.160,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, belum memenuhi alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, mengingat besaran alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD seharusnya Rp191.281.200,00 atau terdapat selisih kurang Rp1.211.040,00.	Pemerintah Provinsi Bali telah menyesuaikan besaran alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp191.281.200,00.

	Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp9.075.394,00, yang	

	diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi alokasi anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, sebagai berikut:	

	1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada: a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp2.211.643.985,00; dan b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp6.033.981.121,00; belum memenuhi alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, mengingat besaran alokasi anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN seharusnya: c) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN, yaitu 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari gaji pokok Rp914.929.383.463,60 yaitu Rp2.195.830.520,31 atau terdapat selisih lebih Rp15.813.464,69; dan d) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN, yaitu 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari gaji pokok Rp914.929.383.463,60 yaitu Rp6.587.491.560,94 atau terdapat selisih kurang Rp553.510.439,94. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyesuaikan alokasi anggaran Iuran	Penyesuaian alokasi anggaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN dan Iuran Jaminan Kematian ASN akan dilakukan pada pergeseran anggaran mendahului perubahan atau pada Perubahan APBD TA 2025.

	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada: a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp3.598.560,00; dan b) Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp10.795.680,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011,	

	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan pada: a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp155.520,00; dan b) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp466.560,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

	c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa: 4) Penyediaan anggaran Belanja <i>Medical Check Up</i> bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengalokasikan Belanja <i>Medical Check Up</i> bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diperuntukkan bagi KDH/WKDH sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5) Penyediaan anggaran Belanja <i>Medical Check Up</i> Rp121.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak	

	termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja <i>Medical Check Up</i> bagi ASN yang antara lain tercantum pada: (1) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Rp154.125.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (2) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Rp120.000.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;	

	(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Rp1.200.000,00 pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan (4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp30.000.000,00 pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, mengingat penyediaan anggaran Belanja <i>Medical Check Up</i> bagi ASN tidak memiliki dasar hukum yang melandasinya dan Belanja <i>Medical Check Up</i> seharusnya hanya diperuntukkan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Untuk itu, penyediaan anggaran Belanja <i>Medical Check Up</i> bagi ASN dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan)	Anggaran belanja <i>Medical Check Up</i> akan dilakukan penyesuaian penempatan anggarannya pada kode rekening yang sesuai.

	misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Penyediaan anggaran Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp22.706.288.740,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025,	

	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.10 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp59.371.656.584,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum pada: b) Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.749.300.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. c) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp2.536.485.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan	

	diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi dengan berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023. d) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp251.343.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. e) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp9.900.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. f) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp2.475.000.000,00, dianggarkan dalam	

	Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD pada saat melaksanakan Reses dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. g) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (1) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD Rp25.236.000.000,00; dan (2) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp14.688.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. Selanjutnya, alokasi anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang	

	Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp360.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017. 5) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Penyediaan anggaran Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Rp2.740.972.768,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah	

	Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp5.372.057.408,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp1.250.000.000,00 dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp3.581.371.604.823,00 yaitu Rp5.372.057.407,23. Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. 7) Belanja TPP ASN Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN Rp1.149.704.583.908,60 atau 16,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah	

	Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp590.497.836.223,60; b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp66.749.782.951,40; c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp30.701.699,00; dan d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp140.606.922.421,60; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rp1.149.704.583.908,60 mengalami kenaikan Rp414.381.955.978,60 atau 36,04% dibandingkan dengan Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Rp735.322.627.930,00.	Peningkatan alokasi anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dibandingkan dengan anggaran belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 disebabkan karena adanya perubahan nomenklatur objek belanja TPP ASN pada Tahun 2025 yang mencakup TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya, serta pengalokasian anggaran TPP untuk PPPK yang telah melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur pemberian TPP bagi ASN.

	Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 kepada Menteri Dalam Negeri mengingat terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, kebijakan pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria Pertimbangan Objektif Lainnya yaitu diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam	

	ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) Jasa pelayanan; b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada: (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp280.872.927.000,00; (2) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp2.084.180.000,00; (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor Rp38.912.613.183,00; (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp29.112.041.859,00; (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan Rp123.098.196,00; (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan Rp5.100.000,00; (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah Rp346.096.215,00; (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp150.000.000,00; dan (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-	

	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Rp213.284.160,00; dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b. Belanja Barang dan Jasa Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa Rp1.456.756.752.282,00 atau 21,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir	

	3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain diuraikan ke dalam pada objek belanja: 1) Belanja Barang Penyediaan anggaran Belanja Barang Rp191.329.258.823,00 atau 2,80% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Barang Pakai Habis Rp189.017.797.053,00 atau 2,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Rp6.525.886.300,00; (2) Belanja Bahan-Bahan Kimia Rp1.438.074.283,00; (3) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Rp28.990.583.214,00; (4) Belanja Bahan-Bahan Baku Rp207.862.300,00; (5) Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman Rp1.339.768.650,00; (6) Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Rp863.325.100,00; (7) Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp825.850.440,00; (8) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.262.197.300,00;	

	(9) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Rp3.398.159.160,00; (10) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Rp5.061.470.160,00; (11) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp622.991.700,00; (12) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp4.156.265.138,00; (13) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp1.276.717.300,00; (14) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp1.660.021.400,00; (15) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp3.060.418.800,00; (16) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga Rp1.020.683.300,00; (17) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata Rp2.850.750.000,00; (18) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp20.502.945.744,00; (19) Belanja Obat-Obatan-Obat Rp9.283.008.300,00; (20) Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp9.725.908.700,00; (21) Belanja Natura dan Pakan-Pakan Rp1.067.104.000,00; (22) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp42.473.875.000,00; (23) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp11.933.812.564,00;	

	(24) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp8.115.535.000,00; (25) Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Rp350.000.000,00; (26) Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD Rp2.253.562.500,00; (27) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Rp422.889.700,00; (28) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Rp723.465.500,00; (29) Belanja Pakaian Adat Daerah Rp491.605.800,00; (30) Belanja Pakaian Batik Tradisional Rp374.877.600,00; (31) Belanja Pakaian Olahraga Rp917.200.000,00; dan (32) Belanja Pakaian Paskibraka Rp572.750.000,00. b) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Rp2.311.461.770,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) Rp118.746.000,00; (2) Belanja Peralatan dan Mesin-Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp1.667.404.400,00;	

	(3) Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan Rp107.129.000,00; dan (4) Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam Rp1.712.400,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh KDH, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. c) Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperhatikan penyediaan anggaran dengan besaran alokasi yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.262.197.300,00;	

	(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp20.502.945.744,00; (3) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp42.473.875.000,00; dan (4) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Rp11.933.812.564,00; untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:	Alokasi anggaran dimaksud telah dihitung berdasarkan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024.

	(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Pihak Ketiga/Pihak Lain yang tercantum pada: (a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp10.307.687.400,00; dan (b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp137.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pengadaan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain	

	ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (2) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp48.262.309.032,00 atau 0,71% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja: (a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp34.019.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: i. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp2.904.000.000,00 yang antara lain tercantum pada: (i) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp346.500.000,00, pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (ii) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp720.000.000,00, pada Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pada Dinas	

	Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. ii. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp9.403.000.000,00; dan iii. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) Rp21.712.000.000,00,00. (b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp14.243.309.032,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: i. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp13.987.309.032,00; dan ii. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat Rp256.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian	

	hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan: (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD; (2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial; (3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan (4) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2) Belanja Jasa Penyediaan anggaran Belanja Jasa Rp564.581.618.994,00 atau 8,27% dari total belanja	

	daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Jasa Kantor Rp449.213.153.919,00 atau 6,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp1.483.200.000,00; (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia Rp8.768.150.000,00; (3) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp1.410.400.000,00; (4) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara Rp1.108.800.000,00; (5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Rp23.079.666.624,00; (6) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Rp10.072.890.880,00; (7) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp31.966.295.680,00; (8) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp498.811.576,00; (9) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Rp12.962.777.104,00; (10) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana Rp1.892.159.408,00; (11) Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp2.428.800.000,00;	

	(12) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Rp7.109.950.000,00; (13) Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp159.548.104.140,00; (14) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp9.872.559.552,00; (15) Belanja Jasa Tenaga Ahli Rp11.702.450.000,00; (16) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp32.172.027.608,00; (17) Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp30.710.964.653,00; (18) Belanja Jasa Tenaga Supir Rp11.436.983.248,00; (19) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik Rp1.536.000.000,00; (20) Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO Rp248.500.000,00; (21) Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp2.802.300.000,00; (22) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi Rp4.445.000.000,00; (23) Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan Rp2.027.233.633,00; (24) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp8.338.758.572,00; (25) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp5.759.245.000,00; (26) Belanja Tagihan Telepon Rp2.167.111.195,00; (27) Belanja Tagihan Air Rp2.143.322.653,00; (28) Belanja Tagihan Listrik Rp19.632.013.908,00; (29) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp1.939.141.150,00;	

	(30) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Rp17.968.950.000,00; (31) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan Rp2.130.551.093,00; (32) Belanja Pengolahan Air Limbah Rp2.688.680.000,00; dan (33) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp11.839.800.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang	

	diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi Rp55.219.555.579,00 atau 0,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada: Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp24.615.993.600,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: (a) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai	

	dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali; (b) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III; dan (c) dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan bantuan iuran PBPU mandiri tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk menganggarkan kewajiban tunggakan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengambil langkah-langkah antara lain: (a) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

	Bali dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan kelas III selain PPU dan PBI; (b) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan (c) menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7)	

	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (2) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp11.414.251.440,00; (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp649.149.124,00; dan (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp791.166.924,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.1), butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (3) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan Rp3.872.760.000,00; dan (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan Rp2.633.476.800,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan	

	kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin eskترم dalam rangka penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, sebagaimana maksud butir 5.3.6.a.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (4) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN Rp9.757.757.691,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 bagi Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan butir 5.3.6.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. (5) Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Asuransi Barang Milik Daerah Rp1.485.000.000,00 yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan	

	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Sewa Tanah Rp3.000.000,00 atau 0,00004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal Rp3.000.000,00; (2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp22.183.413.396,00 atau 0,32% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa <i>Excavator</i> Rp1.764.500.000,00; (b) Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya Rp1.392.500.000,00; (c) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp2.351.074.200,00; (d) Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya Rp7.587.189.000,00; (e) Belanja Sewa Mebel Rp637.727.436,00;	

	(f) Belanja Sewa Alat Pendingin Rp525.000.000,00; (g) Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) Rp517.150.000,00; (h) Belanja Sewa Peralatan <i>Studio Audio</i> Rp3.234.720.000,00; (i) Belanja Sewa <i>System/Power Supply</i> Rp353.800.000,00; (j) Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya Rp1.554.000.000,00; (k) Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya Rp1.308.692.760,00; dan (l) Belanja Sewa Peralatan Permainan Rp320.300.000,00. (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp14.988.805.000,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp855.000.000,00; (b) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp8.860.100.000,00; (c) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp510.150.000,00; dan (d) Belanja Sewa Hotel Rp4.724.905.000,00. (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp393.900.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian Rp295.700.000,00;	

	(5) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud Rp3.676.541.100,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan <i>Franchise</i> Rp2.507.011.000,00; dan (b) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-<i>Software</i> Rp1.169.530.100,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) dan apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1)	Alokasi anggaran dimaksud telah dihitung berdasarkan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

	dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada: (1) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp1.241.952.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah Rp349.500.000,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang Rp263.000.000,00; dan (c) Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang Rp300.394.000,00. (2) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp10.082.686.000,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (a) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi Rp900.000.000,00; (b) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei Rp3.265.046.000,00;	

	(c) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik Rp3.875.000.000,00; (d) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Konsultansi Manajemen Rp112.000.000,00; dan (e) Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Khusus Rp1.550.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing- masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Selain itu, uraian tersebut di atas juga harus memperhatikan aspek urgensi dan efektivitas hasil jasa konsultansi dimaksud terhadap kualitas perumusan kebijakan baik di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah maupun pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, penganggaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam Belanja Modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.d Lampiran	

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp7.508.612.000,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp5.920.330.000,00; (2) Belanja Bimbingan Teknis Rp242.100.000,00; dan (3) Belanja Diklat Kepemimpinan Rp1.346.182.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), Pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi serta memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2) dan butir 3.4.1.2.2.f.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	

	Rp16.108.818.180,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Provinsi Bali harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara <i>virtual</i> maupun <i>hybrid</i>, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3) Belanja Pemeliharaan	

	Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan Rp49.624.640.193,00 atau 0,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp24.465.287.340,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya Rp1.475.000.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa Rp153.300.000,00; (3) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Rp10.846.700.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.056.650.000,00; (5) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp1.646.400.000,00; (6) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya Rp1.242.105.000,00; (7) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin Rp1.568.150.000,00;	

	(8) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus Rp452.000.000,00; (9) Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya Rp600.000.000,00; (10) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-<i>Personal Computer</i> Rp1.505.990.000,00; (11) Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Rp982.810.000,00; dan (12) Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp1.422.390.000,00. b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp19.373.215.928,00 atau 0,28% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor Rp8.918.413.807,00; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang Rp238.897.856,00; (3) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp338.175.073,00; (4) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp975.573.661,00;	

	(5) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp1.047.200.000,00; (6) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Rp364.750.000,00; (7) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir Rp200.000.000,00; (8) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Rp4.686.428.017,00; dan (9) Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama Rp1.293.000.000,00. c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp5.508.926.925,00 atau 0,08% dari total belanja daerah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi Rp2.800.000.000,00; (2) Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya Rp520.033.600,00; (3) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya Rp420.400.000,00; (4) Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain Rp253.878.000,00;	

	(5) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp687.494.325,00; dan (6) Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya Rp450.480.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada: a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana	

	telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4) Belanja Perjalanan Dinas Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Rp197.656.664.650,00 atau 2,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp176.178.064.000,00 atau 2,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp170.440.034.000,00 yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp644.194.000,00, pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;	

	(b) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.560.874.000,00, pada Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja; (c) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.595.840.000,00, pada Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (d) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp831.876.000,00, pada Sub Kegiatan Diseminasi Informasi pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; (e) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp772.992.000,00, pada Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pada SKPD Inspektorat; (f) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp14.780.902.000,00, pada Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda pada Sekretariat DPRD; dan (g) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp10.322.172.000,00, pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada SKPD Sekretariat Daerah. (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.204.660.000,00;	

	(3) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp3.383.070.000,00; dan (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota Rp150.300.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar	

	kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp21.478.600.650,00 atau 0,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp21.478.600.650,00 yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp5.572.832.100,00, pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian pada SKPD Sekretariat DPRD; (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp4.702.832.250,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum pada SKPD Sekretariat DPRD; (3) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp5.134.455.900,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur pada SKPD Sekretariat DPRD; (4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp4.171.882.350,00 pada Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada SKPD Sekretariat DPRD;	

	(5) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp581.455.050,00, pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pada SKPD Sekretariat Daerah; (6) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp474.759.000,00, pada Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri pada SKPD Dinas Pariwisata; dan (7) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri Rp240.384.000,00, pada Sub Kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri digunakan untuk perjalanan dinas biasa yang dilakukan di luar negeri dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri,	

	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria: (1) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; (2) transparansi dan akuntabilitas; (3) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali; (4) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran; (5) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan (6) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah; sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan	

	yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005. Selanjutnya, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada: a) SKPD Sekretariat Daerah Rp19.742.008.050,00 atau 8,38% dari total belanja pada SKPD Sekretariat Daerah Rp235.592.947.061,00; dan b) SKPD Sekretariat DPRD Rp104.997.999.600,00 atau 37,73% dari total belanja pada SKPD Sekretariat DPRD Rp278.301.701.609,00; harus dirasionalkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, penanganan inflasi,	Penyediaan alokasi anggaran dinas dimaksud telah dilakukan penyesuaian dalam RAPBD TA 2025.

	memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Belanja Subsidi Penyediaan anggaran Belanja Subsidi Rp5.025.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat, sebagaimana maksud	

	Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.4.a dan butir 3.4.1.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.4.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal belanja subsidi ditujukan kepada BUMD penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, apabila Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (<i>full cost recovery</i>), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya	

melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana maksud butir D.2.d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah Rp836.104.965.136,00 atau 12,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Tabel 10, sebagai berikut:

Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel. 10, sebagai berikut:

Tabel. 10

Tren Belanja Hibah terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Hibah (Rp)	Realisasi Belanja Hibah (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	403.159.161.920	355.343.676.845	88,14	7.541.821.522.461	5,35
APBD 2023	1.068.846.413.720	899.081.801.849	84,12	7.932.886.363.138	13,47
APBD 2024	1.185.973.472.396	925.860.050.664	78,07	7.795.681.730.804	15,21

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024

	Rp1.185.973.472.396,00 atau 15,21% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.795.681.730.804,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.068.846.413.720,00 atau 13,47% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00 dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp403.159.161.920,00 atau 5,35% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.541.821.522.461,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Hibah tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 Rp925.860.050.664,00 atau 78,07% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.185.973.472.396,00; 2) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Rp899.081.801.849,00 atau 84,12% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.068.846.413.720,00; dan 3) Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 Rp355.343.676.845,00 atau 88,14% dari total Belanja Hibah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp403.159.161.920,00.	

	Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Hibah yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp715.739.085.136,00 atau 10,48% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp555.589.085.136,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp527.078.335.136,00, yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp463.900.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembinaan Pemerintahan Desa Adat pada SKPD Dinas Pemajuan Masyarakat Adat; (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp722.335.136,00 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular pada SKPD Dinas Kesehatan; (3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan	

	Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp500.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan (4) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp60.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp28.510.750.000,00, yang tercantum pada: (1) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp28.210.750.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan	

	Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan (2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp300.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp2.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp2.000.000.000,00 yang hanya hanya tercantum pada Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp157.850.000.000,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp155.100.000.000,00, yang antara lain tercantum pada:	

	(1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp10.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya pada SKPD Dinas Kebudayaan; (2) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp140.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan (3) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp5.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial pada SKPD Sekretariat Daerah. b) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.750.000.000,00, yang hanya tercantum pada Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Alokasi anggaran belanja hibah telah mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan serta telah dilakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi belanja hibah tersebut.

	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran Belanja Hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40%	

	(empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,	

	sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5.b dan butir 3.4.1.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS.	

	Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp23.841.580.000,00 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

e. Belanja Bantuan Sosial
Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial Rp150.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel 11, sebagai berikut:

Tabel. 11

Tren Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Sosial (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	140.000.000	139.016.000	99,30	7.541.821.522.461	0,002
APBD 2023	0	0	0,00	7.932.886.363.138	0,00
APBD 2024	250.000.000	250.000.000	100,00	7.795.681.730.804	0,003

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp250.000.000,00 atau 0,003% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.795.681.730.804,00, mengalami peningkatan

	dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp0,00 atau 0,00% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00 dan sama dengan alokasi Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp140.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.541.821.522.461,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 Rp250.000.000,00 atau 100% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp250.000.000,00; b) Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023; dan c) Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 Rp139.016.000,00 atau 99,30% dari total Belanja Bantuan Sosial dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp140.000.000,00. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp150.000.000,00 atau 0,002% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi	

	Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp150.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Rp150.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target	

	pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4)	

	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan Pemerintah Daerah dianggarkan pada SKPD terkait, sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan	

	Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam RKPD, KUA dan PPAS. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut: a) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras; b) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bansos reguler, dan bantuan beras; dan c) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia); sebagaimana maksud butir 5.2.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Belanja Modal Penyediaan anggaran Belanja Modal Rp993.548.493.366,00 atau 14,55% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan	

	diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada: - perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan - standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga; sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada: - Belanja Modal Tanah Rp25.415.000.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah Rp25.415.000.000,00 atau 0,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: - Belanja Modal Tanah Persil Rp25.400.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp25.400.000.000,00; dan - Belanja Modal Lapangan Rp15.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air Rp15.000.000,00;	

	dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp244.812.177.862,00 atau 3,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Besar Rp2.397.013.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp1.600.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal <i>Excavator</i> Rp1.200.000.000,00; dan (2) Belanja Modal <i>Asphalt Equipment</i> Rp400.000.000,00. b) Belanja Modal Alat Bantu Rp797.013.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal <i>Electric Generating Set</i> Rp720.000.000,00. 2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp31.185.806.587,00 atau 0,46% dari total belanja daerah dalam Rancangan	

	Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp31.185.806.587,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang Rp24.707.127.825,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada SKPD Sekretariat Daerah; b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp5.553.513.925,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Rp5.508.513.925,00 pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada SKPD Sekretariat Daerah; dan c) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Rp908.164.837,00. 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp22.759.177.760,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Kantor Rp1.336.016.300,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Rp1.173.583.500,00; b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp21.368.954.460,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Mebel Rp10.392.584.300,00 yang antara lain tercantum pada: (a) Belanja Modal Mebel Rp5.887.903.200,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah, pada	

	SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (b) Belanja Modal Mebel Rp907.336.000,00, pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pada SKPD Inspektorat; dan (c) Belanja Modal Mebel Rp402.739.800,00, pada Sub Kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi, pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. (2) Belanja Modal Alat Pendingin Rp7.011.259.960,00; dan (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (<i>Home Use</i>) Rp2.701.381.200,00. 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp15.243.651.319,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Studio Rp11.416.604.550,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan <i>Studio Video</i> dan Film Rp10.588.133.850,00; dan (2) Belanja Modal Alat Studio Lainnya Rp433.576.300,00. b) Belanja Modal Alat Komunikasi Rp3.827.046.769,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF Rp1.147.500.000,00;	

	(2) Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus Rp1.807.940.069,00; dan (3) Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya Rp871.606.700,00. 5) Belanja Modal Komputer Rp33.530.795.076,00 atau 0,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Komputer Unit Rp21.831.986.100,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Komputer Jaringan Rp27.833.800,00; dan (2) Belanja Modal <i>Personal Computer</i> Rp21.804.152.300,00. b) Belanja Modal Peralatan Komputer Rp11.698.808.976,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Peralatan <i>Personal Computer</i> Rp2.401.370.876,00; dan (2) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp2.460.621.000,00. 6) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp695.443.200,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp695.443.200,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Rambu Bersuar Rp448.000.000,00; dan b) Belanja Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp247.443.200,00.	

	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp560.470.499.958,00 atau 8,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Bangunan Gedung Rp548.226.972.378,00 atau 8,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp548.226.972.378,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp18.098.867.364,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp6.065.522.864,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada SKPD Badan Pendapatan Daerah; b) Belanja Modal Bangunan Gudang Rp3.222.000.000,00; c) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp9.938.670.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp9.268.670.000,00, pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;	

	d) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp115.351.116.400,00 yang antara lain tercantum pada: (1) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp90.212.384.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp4.012.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp8.871.116.400,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp3.000.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp1.120.000.000,00 pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp8.135.616.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan	

	Utilitas Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. e) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp1.807.921.951,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga Rp1.680.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; dan f) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp280.782.843.000,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp276.800.000.000,00, pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. 2) Belanja Modal Monumen Rp4.785.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Rp4.785.000.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Peninggalan Rp4.750.000.000,00; dan 3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp3.250.527.580,00 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Rp3.250.527.580,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Pagar Rp3.250.527.580,00;	

	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp140.409.081.666,00 atau 2,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp71.636.186.482,00 atau 1,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Jalan Rp71.246.186.482, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: (1) Belanja Modal Jalan Provinsi Rp70.911.437.482,00 yang antara lain tercantum pada Belanja Modal Jalan Provinsi Rp45.254.634.268,00 pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan (2) Belanja Modal Jalan Lainnya Rp334.749.000,00. b) Belanja Modal Jembatan Rp390.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi Rp390.000.000,00. 2) Belanja Modal Bangunan Air Rp24.739.970.272,00 atau 0,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja: a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp15.517.373.400,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp15.517.373.400,00; dan	

	b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp5.921.348.420,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp5.921.348.420,00. 3) Belanja Modal Instalasi Rp13.027.374.757,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp11.627.374.757,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya Rp8.277.374.205,00; 4) Belanja Modal Jaringan Rp29.515.550.155,00 atau 0,43% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Rp29.515.550.155,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya Rp29.515.550.155,00; dan 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp1.490.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Rp1.490.000.000,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp1.490.000.000,00. e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp22.265.084.280,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan	

	Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp45.000.000,00 atau 0,001% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp45.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Buku Umum Rp45.000.000,00; f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp176.649.600,00 atau 0,003 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp176.649.600,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp176.649.600,00 yang diuraikan pada sub rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-<i>Software</i> Rp116.649.600,00; dan 2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp60.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

	Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada: a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp45.986.939.400,00 atau 0,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Rp45.986.939.400,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Alat Kedokteran Mata Rp1.561.541.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Mata Rp1.561.541.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan; dan 2) Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir Rp44.118.000.000,00 yang hanya tercantum pada Belanja Modal Alat Kedokteran Mata Rp44.118.000.000,00 pada Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang	

	Medik Fasilitas Layanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan. b. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp26.959.453.100,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja: 1) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp1.276.608.900,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a) Belanja Modal Alat Laboratorium Umum Rp473.846.000,00; dan b) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lain Rp24.762.900,00. 2) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp25.674.719.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp25.674.719.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.	

	Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga Rp133.598.041.000,00 atau 1,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Belanja Transfer Penyediaan anggaran Belanja Transfer Rp787.453.202.628,00 atau 11,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek belanja: a. Belanja Bagi Hasil Rp582.188.016.684,00 atau 8,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.4.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. b. Belanja Bantuan Keuangan Rp205.265.185.944,00 atau 3,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, tren alokasi dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga)	

tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel 12, sebagai berikut:

Tabel 12.

Tren Belanja Bantuan Keuangan terhadap Belanja Daerah

Tahun Anggaran	Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	Realisasi Belanja Bantuan Keuangan (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
APBD 2022	303.313.478.733	269.544.177.473	88,87	7.541.821.522.461	4,02
APBD 2023	522.374.803.508	285.161.996.258	54,59	7.932.886.363.138	6,58
APBD 2024	366.931.922.273	340.048.704.800	92,67	7.795.681.730.804	4,71

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp366.931.922.273,00 atau 4,71% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.795.681.730.804,00, dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp522.374.803.508,00 atau 6,58% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00, dan

	dibandingkan dengan alokasi Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp303.313.478.733,00 atau 4,02% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.541.821.522.461,00. Selain itu, tren realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut: 1) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 Rp340.048.704.800,00 atau 92,67% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp366.931.922.273,00; 2) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Rp285.161.996.258,00 atau 54,59% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp522.374.803.508,00; dan 3) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Rp269.544.177.473,00 atau 97,73% dari total Belanja Bantuan Keuangan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp303.313.478.733,00. Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Keuangan yang diuraikan ke dalam objek belanja: 1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp1.137.364.975.000,00; dan 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa Rp1.938.912.949.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan	

	keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.4.2.a, butir 3.4.4.2.b dan butir 3.4.4.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Provinsi Bali tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita dan menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah	

	Daerah Provinsi Bali, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana maksud butir 3.4.4.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada:	

	1. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Rp1.518.757.500,00 pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp831.876.000,00 atau 54,77% dari total sub kegiatan; 2. Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Rp602.185.680,00 pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp417.168.768,00 atau 69,28% dari total sub kegiatan; 3. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Rp219.328.560,00 pada SKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp139.056.256,00 atau 63,40% dari total sub kegiatan; 4. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus Rp4.375.715.500,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp3.974.867.360,00 atau 90,84% dari total sub kegiatan; 5. Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Rp32.664.481.560,00 pada SKPD Dinas Pendidikan,	Sub Kegiatan Diseminasi Informasi dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pada Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi yang diantaranya melaksanakan tugas pelayanan Pimpinan terkait hubungan masyarakat (humas), publikasi dan dokumentasi serta mengkoordinir peliputan kegiatan Pimpinan dan program Pemerintah Provinsi yang lingkup kegiatannya meliputi seluruh Kabupaten/Kota se-Bali. Belanja Jasa Tenaga Administrasi yang didalamnya juga termasuk Tenaga Konsultan Pendamping Koperasi dan UMKM pada Pusat Layanan Unit Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (PLUT KUMKM) Provinsi Bali sangat diperlukan dalam memberikan layanan kepada UMKM seperti memberikan konsultasi/pendampingan usaha, pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha berintegritas, pelatihan teknis dan manajerial, pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk, pengembangan produk unggulan daerah, serta layanan lainnya, dengan harapan menambah pengetahuan dan keterampilan SDM UMKM, meningkatkan kualitas produk UMKM itu sendiri, memperluas akses pasar dan promosi UMKM sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan dari UMKM tersebut. Belanja Jasa Tenaga Administrasi merupakan Gaji Tenaga Administrasi Sekolah yang berstatus kontrak (Non ASN) pada SLB Negeri Se-Bali Belanja Jasa Tenaga Administrasi merupakan Gaji Tenaga Administrasi Sekolah yang berstatus kontrak (Non ASN) pada SMK Negeri Se-Bali

	Kepemudaan dan Olahraga, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp24.300.080.736,00 atau 74,39% dari total sub kegiatan; dan 6. Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Rp1.730.464.200,00 pada SKPD Dinas Perhubungan, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp1.042.921.920,00 atau 60,27% dari total sub kegiatan; diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan serta, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. E. Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain tercantum pada: 1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya Rp90.610.900,00 pada SKPD Dinas Kebudayaan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub	Penyediaan belanja jasa tenaga administrasi pada Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi merupakan personil non ASN yang bertugas pada ruang kendali (CC Room) dan pengendali lalu lintas, mengingat keterbatasan jumlah pegawai ASN untuk pelaksanaan kegiatan. Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp.34.425.000,00 digunakan untuk menyediakan bahan kimia dan peralatan dalam kegiatan Bimtek kepada Juru Pelihara Cagar Budaya di 9 Kabupaten/Kota se-Bali, yang pesertanya 20 orang per Kabupaten/Kota.

	rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp34.425.000,00 atau 37,99% dari total sub kegiatan; 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp1.223.464.200,00 pada SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Jasa Tenaga Administrasi Rp799.573.472,00 atau 65,35% dari total sub kegiatan; dan b. Belanja Jasa Tenaga Keamanan Rp243.348.448,00 atau 19,89% dari total sub kegiatan. 3. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota Rp3.177.297.100,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium Rp139.056.256,00 atau 4,38% dari total sub kegiatan; dan b. Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi Rp678.000.000,00 atau 21,34% dari total sub kegiatan. 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik Rp12.663.732.480,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja: a. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp1.740.000.000,00 atau 13,74% dari total sub kegiatan; b. Belanja Modal Alat Pendingin Rp2.313.668.880,00 atau 18,27% dari total sub kegiatan;	Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyediaan jasa seluruh Tenaga Non ASN di Sekretariat dan kedepannya akan dilakukan penyesuaian pengalokasian anggaran dimaksud. Penyediaan Belanja Jasa Tenaga Laboratorium mencakup pengadaan tenaga laboratorium (non ASN) untuk uji bahan bangunan. Tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat-alat pengujian laboratorium guna mendukung pembangunan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pengadaan alat laboratorium bahan bangunan digunakan untuk pengujian teknis, mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Bali yang berkualitas. Anggaran yang tercantum dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik merupakan anggaran BOSDA bagi Satuan Pendidikan yang diperuntukkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan

	c. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya Rp1.979.665.800,00 atau 15,63% dari total sub kegiatan; d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp27.396.000,00 atau 0,22% dari total sub kegiatan; dan e. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-<i>Software</i> f. Rp330.400.000,00 atau 2,61% dari total sub kegiatan. 5. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp4.012.000.000,00, pada SKPD Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp4.012.000.000,00 atau 100% dari total sub kegiatan; dan 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi Rp4.361.812.000,00, pada SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp1.991.992.000,00 atau 45,67% dari total sub kegiatan; tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari Sub Kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD,	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah memang diperuntukkan dalam rangka aktivitas rehabilitasi ruang kelas di Satuan Pendidikan dengan sub rincian obyek belanja modal pada Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sesuai yang tercantum dalam SIPD. Belanja Modal bangunan gedung kantor dimasukkan dalam Sub Kegiatan ini berdasarkan petunjuk dari Kementerian PPPA karena sub kegiatan ini sumber dananya dari DAK FISIK Kemen PPPA.

	KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
VII	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
	A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah 1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.3.a	

	Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 4. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. 5. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan Penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 13 sebagai berikut:	

	Tabel. 13		
	Pembiayaan Daerah		
Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:			
1. Penerimaan Pembiayaan			
Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp1.201.125.499.578,20, yang hanya diuraikan ke dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp1.201.125.499.578,20 atau 17,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025.			
Selanjutnya, tren SiLPA alokasi dan realisasi SiLPA Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama 3 (tiga) tahun dari Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagaimana Tabel. 14 sebagai berikut:			

	Tabel. 14					
	Tren SiLPA terhadap Belanja Daerah					
	Tahun Anggaran	SiLPA (Rp)	Realisasi SiLPA (Rp)	%	Total Belanja Daerah (Rp)	%
	1	2	3	4=3:2	5	6=2:5
	APBD 2022	2.050.341.671.769	1.293.798.304.067	63,10	7.541.821.522.461	27,19
	APBD 2023	1.079.721.253.120	408.963.390.625	37,88	7.932.886.363.138	13,61
	APBD 2024	1.175.582.550.556	342.650.523.382	29,15	7.795.681.730.804	15,08
Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengalokasikan SiLPA dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut secara persentase mengalami peningkatan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.175.582.550.556,00 atau 15,08% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp7.795.681.730.804,00, dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.079.721.253.120,00 atau 13,61% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp7.932.886.363.138,00, dan mengalami penurunan dibandingkan dengan alokasi SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.050.341.671.769,00 atau 27,19% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp7.541.821.522.461,00. Selain itu, tren realisasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:						

	a. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 per tanggal 22 November 2024 Rp342.650.523.381,56 atau 29,15% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp1.175.582.550.556,00; b. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2023 Rp408.963.390.625,37 atau 37,88% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2023 Rp1.079.721.253.120,00; dan c. Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 Rp1.293.798.304.068,62 atau 63,10% dari total SiLPA dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Rp2.050.341.671.769,00. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pengeluaran Pembiayaan Penyediaan anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp401.464.808.088,00 atau 5,88% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pengeluaran pembiayaan: a. Penyertaan Modal Daerah Penyediaan anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Besaran alokasi SiLPA yang dirancang dalam Rancangan peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, telah diperhitungkan dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, serta perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang memengaruhi SiLPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	Rp158.000.000.000,00 atau 2,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali mengenai Penyertaan Modal Daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Gubernur Bali dan DPRD Provinsi Bali atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.5.2.2.b dan butir 3.5.2.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.5.2.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Bali tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Penyediaan anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Rp243.464.808.088,00 atau 3,57% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana maksud Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.2.3.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang harus dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, sebagaimana maksud butir 3.5.2.3.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang telah disepakati dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI).
VIII	REKOMENDASI	
	Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran	

	APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut: A. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut: 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru; 3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur; 4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas; 5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	

	B. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut: 1. Swasembada pangan, energi, dan air; 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara; 3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi; 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi; 5. Pemberantasan kemiskinan; 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba; 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat; 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi; 9. Penguatan pertanahan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif; 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas; 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup; 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani; 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan; 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi; 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.	

	C. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan mengambil langkah-langkah antara lain: 1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu <i>source of growth</i>; 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD; 3. Menurunkan nilai <i>Incremental Capital-Output Ratio</i> (ICOR) yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas; dan 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program upskilling dan <i>reskilling</i> tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Provinsi Bali. D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.	

	E. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam penyusunan Rancangan RKPD, Rancangan KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 untuk: 1. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID); dan 2. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan; sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.	

	G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. H. Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan, sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025. I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja, dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas	

	dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, memenuhi alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi Bali 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar) tidak termasuk Belanja Gaji, Tunjangan ASN dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat, dan memenuhi alokasi anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penataan pegawai Non ASN melalui seleksi pengadaan PPPK, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. menganggarkan gaji bagi pegawai Non ASN yang sedang mengikuti proses seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024 hingga diangkat menjadi ASN; dan 2. apabila jumlah pegawai Non ASN yang telah mengikuti seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai Non ASN dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dengan menganggarkan gaji bagi PPPK Paruh Waktu yang disediakan di luar Belanja Pegawai;	

	sebagaimana diamanatkan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji Bagi Pegawai Non ASN. L. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>), Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. M. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) dalam upaya peningkatan penggunaan aspal buton sebagai bahan tambah, bahan substitusi, dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan	

	Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. N. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah strategis, antara lain: 1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi; 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (<i>roadmap</i>) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten, dan terukur; 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya; dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. O. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain: 1. menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sebagai	

	kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah; 2. mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>); 3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap SKPD untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah; dan 4. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (<i>Battery Electric Vehicle</i>) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. P. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut: 1. Keadaan darurat meliputi: a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau	

	c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 2. Keperluan mendesak meliputi: a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau masyarakat; sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Q. Pemerintah Daerah Provinsi Bali menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain untuk Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.	

	R. Dalam rangka mewujudkan salah satu agenda Asta Cita dan kelancaran program pengembangan ekonomi kreatif dan industri kreatif di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali dapat membentuk Dinas Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugasnya yang diutamakan untuk pengembangan ekosistem ekonomi kreatif, antara lain: 1. melakukan koordinasi pengembangan riset seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi; 2. melakukan pengembangan Pendidikan di wilayah provinsi; 3. melakukan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; 4. mendorong penyediaan infrastruktur untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; 5. melakukan koordinasi pengembangan sistem pemasaran untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; 6. melakukan pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif; 7. melakukan fasilitasi kekayaan intelektual untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; 8. melakukan perlindungan hasil kreativitas di wilayah provinsi; dan 9. melakukan/menindaklanjuti pengembangan ekonomi kreatif lainnya sesuai kewenangan pemerintah provinsi; sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 dan Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif.	

	S. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau 2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran. Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat: 1. nama kegiatan; 2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan; 3. jumlah anggaran; dan 4. alokasi anggaran per tahun. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. T. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:	

	1. pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah; 2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan pemuatakhirannya; sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B.PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	

	U. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengambil langkah-langkah antara lain: 1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2. mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4. menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5. menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran <i>Sport Development Index</i> (SDI) di daerah; 6. menyediakan dukungan untuk pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dukungan <i>sport science</i> yang bekerjasama dengan Universitas; dan 7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan 8. menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah; sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. V. Dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi	

	tindak pidana korupsi, Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan langkah-langkah, antara lain: 1. melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali; 2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri; 3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun; 4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah; 5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan 6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. W. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan	

	dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. X. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Menteri ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Y. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Bali.	

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 31 Desember 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BALI
KETUA,



DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H.

WAKIL KETUA

I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E.

WAKIL KETUA

IDA GEDE KOMANG KRESNA BUDI

WAKIL KETUA

I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E.

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025**



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 berjumlah sebesar Rp7.228.849.813.401,20 (tujuh triliun dua ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu empat ratus satu rupiah dua puluh sen) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah	Rp6.027.724.313.823,00
b. belanja daerah	<u>Rp6.827.385.005.313,20</u>
defisit (a – b)	Rp(799.660.691.490,20)

c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan	Rp1.201.125.499.578,20
2. pengeluaran	<u>Rp 401.464.808.088,00</u>
pembiayaan netto (1 – 2)	Rp 799.660.691.490,20

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.027.724.313.823,00 (enam triliun dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp3.581.371.604.823,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.611.036.410.791,00 (dua triliun enam ratus sebelas miliar tiga puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp337.336.008.147,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp193.896.695.885,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp439.102.490.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar seratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.440.644.709.000,00 (dua triliun empat ratus empat puluh miliar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah), yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, direncanakan sebesar Rp5.708.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus delapan juta rupiah), yaitu pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp6.827.385.005.313,20 (enam triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar Rp4.880.783.654.845,20 (empat triliun delapan ratus delapan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp2.614.645.674.805,20 (dua triliun enam ratus empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima rupiah dua puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.447.603.014.904,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga juta empat belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp5.090.000.000,00 (lima miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp813.294.965.136,00 (delapan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar Rp1.007.960.216.627,00 (satu triliun tujuh miliar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp25.418.325.760,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp250.200.970.942,00 (dua ratus lima puluh miliar dua ratus juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp531.631.164.379,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp178.268.021.666,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus enam puluh delapan juta dua puluh satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp22.265.084.280,00 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp176.649.600,00 (seratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp151.187.931.213,00 (seratus lima puluh satu miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah) yaitu belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, direncanakan sebesar Rp787.453.202.628,00 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp582.188.016.684,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh delapan juta enam belas ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp205.265.185.944,00 (dua ratus lima miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp799.660.691.490,20 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.201.125.499.578,20 (satu triliun dua ratus satu miliar seratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh sen), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, direncanakan sebesar Rp401.464.808.088,00 (empat ratus satu miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah; dan
 - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp158.000.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar rupiah).

- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp243.464.808.088,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp799.660.691.490,20 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sen).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp799.660.691.490,20 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah dua puluh sen).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya akan disesuaikan dalam Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Provinsi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (8-364/2024)

LAMPIRAN I

**RINGKASAN APBD PROVINSI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**



LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.581.371.604.823,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.611.036.410.791,00
4.1.02	Retribusi Daerah	337.336.008.147,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	193.896.695.885,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	439.102.490.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.440.644.709.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	6.027.724.313.823,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	4.880.783.654.845,20
5.1.01	Belanja Pegawai	2.614.645.674.805,20
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.447.603.014.904,00
5.1.04	Belanja Subsidi	5.090.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	813.294.965.136,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.007.960.216.627,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.418.325.760,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.200.970.942,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	531.631.164.379,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.268.021.666,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.265.084.280,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	176.649.600,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	151.187.931.213,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213,00
5.4	BELANJA TRANSFER	787.453.202.628,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944,00
	Jumlah Belanja	6.827.385.005.313,20

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-799.660.691.490,20
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.201.125.499.578,20
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.201.125.499.578,20
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.201.125.499.578,20
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	401.464.808.088,00
	Pembiayaan Netto	799.660.691.490,20
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00


 Pj. GUBERNUR BALI,

 S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN II

RINGKASAN APBD PROVINSI YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	356.739.830.983,00	2.814.140.998.740,20	523.483.745.373,00	0,00	0,00	3.337.624.744.113,20
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.350.000.000,00	1.744.585.938.825,00	223.201.423.600,00	0,00	0,00	1.967.787.362.425,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	2.350.000.000,00	1.741.443.382.717,00	223.112.617.000,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	0,00	2.256.477.766,00	88.806.600,00	0,00	0,00	0,00
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0002	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	0,00	886.078.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	305.219.038.983,00	685.251.957.040,00	96.267.544.015,00	0,00	0,00	781.519.501.055,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	305.219.038.983,00	339.077.224.972,00	808.482.700,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	0,00	4.636.845.646,00	371.968.400,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	0,00	8.826.600.489,00	1.007.141.200,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	0,00	5.286.213.670,00	1.282.741.720,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	RSUD Bali Mandara	0,00	200.686.107.309,00	64.255.586.205,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Rumah Sakit Jiwa	0,00	35.978.343.308,00	18.603.149.570,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	0,00	81.218.160.000,00	8.781.840.000,00	0,00	0,00	0,00
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	0,00	9.542.461.646,00	1.156.634.220,00	0,00	0,00	0,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	49.161.432.000,00	257.861.952.238,20	190.925.870.509,00	0,00	0,00	448.787.822.747,20

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0001	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	0,00	1.878.843.640,00	2.139.137.200,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0002	UPTD Pengelolaan Air Minum	0,00	33.763.210.452,00	7.506.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.0.00.01.0003	UPTD Pengelolaan Air Limbah	0,00	12.076.373.000,00	2.360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1	03	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	49.161.432.000,00	210.143.525.146,20	178.920.233.309,00	0,00	0,00	0,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	4.698.948.850,00	1.135.527.580,00	0,00	0,00	5.834.476.430,00
1	04	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	4.698.948.850,00	1.135.527.580,00	0,00	0,00	0,00
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	0,00	87.021.414.122,00	8.419.333.069,00	0,00	0,00	95.440.747.191,00
1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	58.197.198.468,00	602.619.100,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	24.962.548.950,00	3.419.873.100,00	0,00	0,00	0,00
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0001	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	0,00	3.861.666.704,00	4.396.840.869,00	0,00	0,00	0,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.360.000,00	34.720.787.665,00	3.534.046.600,00	0,00	0,00	38.254.834.265,00
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.360.000,00	29.126.957.807,00	79.649.600,00	0,00	0,00	0,00
1	06	1.06.2.08.0.00.06.0001	UPTD Pelayanan Sosial	0,00	5.593.829.858,00	3.454.397.000,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.497.024.000,00	972.600.463.229,00	393.317.824.159,00	0,00	0,00	1.365.918.287.388,00
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.704.320.000,00	43.143.666.758,00	144.064.000,00	0,00	0,00	43.287.730.758,00
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0001	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	0,00	907.284.461,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	07	2.07.3.29.0.00.01.0002	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	0,00	975.605.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	07	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	4.704.320.000,00	41.260.777.137,00	116.064.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	2.196.103.186,00	4.141.522.900,00	0,00	0,00	6.337.626.086,00
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	0,00	1.133.215.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	08	1.06.2.08.0.00.06.0002	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	1.062.887.886,00	4.141.522.900,00	0,00	0,00	0,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	0,00	2.183.889.374,00	17.648.960,00	0,00	0,00	2.201.538.334,00
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	1.151.509.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	09	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	1.032.379.442,00	17.648.960,00	0,00	0,00	0,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	0,00	382.727.700,00	0,00	0,00	0,00	382.727.700,00
2	10	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	0,00	382.727.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	0,00	10.860.001.299,00	2.942.615.500,00	0,00	0,00	13.802.616.799,00
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0,00	1.831.465.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0006	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	370.828.985,00	17.615.500,00	0,00	0,00	0,00
2	11	3.28.2.11.0.00.01.0007	UPTD Pengelolaan Sampah	0,00	8.657.706.864,00	2.925.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	589.682.750,00	0,00	0,00	0,00	589.682.750,00
2	12	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	589.682.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	21.716.072.927,00	0,00	0,00	0,00	21.716.072.927,00
2	13	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	21.716.072.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	678.793.860,00	0,00	0,00	0,00	678.793.860,00
2	14	2.13.2.12.2.14.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	678.793.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	268.064.000,00	47.647.534.243,00	2.055.257.416,00	0,00	0,00	49.702.791.659,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	268.064.000,00	32.812.983.126,00	783.049.940,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	0,00	2.570.482.710,00	443.228.800,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0002	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	0,00	8.487.511.611,00	144.834.520,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0003	UPTD Perlengkapan Jalan	0,00	3.153.930.752,00	596.094.000,00	0,00	0,00	0,00
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0004	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	0,00	622.626.044,00	88.050.156,00	0,00	0,00	0,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0,00	87.288.016.535,00	303.433.486.350,00	0,00	0,00	390.721.502.885,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	65.414.224.541,00	299.021.725.810,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0001	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	0,00	7.248.885.100,00	894.220.390,00	0,00	0,00	0,00
2	16	2.16.2.20.2.21.02.0002	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	0,00	14.624.906.894,00	3.517.540.150,00	0,00	0,00	0,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	0,00	23.835.263.248,00	972.452.200,00	0,00	0,00	24.807.715.448,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	20.741.885.838,00	972.452.200,00	0,00	0,00	0,00
2	17	2.17.0.00.0.00.01.0001	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00	3.093.377.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.040.000,00	20.171.142.940,00	0,00	0,00	0,00	20.171.142.940,00
2	18	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.040.000,00	20.171.142.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	0,00	87.810.156.532,00	67.374.500,00	0,00	0,00	87.877.531.032,00
2	19	1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	87.810.156.532,00	67.374.500,00	0,00	0,00	0,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	0,00	431.471.640,00	0,00	0,00	0,00	431.471.640,00
2	20	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	431.471.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	0,00	410.712.320,00	0,00	0,00	0,00	410.712.320,00
2	21	2.16.2.20.2.21.02.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	0,00	410.712.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.519.600.000,00	621.938.026.463,00	79.498.402.333,00	0,00	0,00	701.436.428.796,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	2.519.600.000,00	121.781.939.541,00	331.754.660,00	0,00	0,00	0,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0001	UPTD Taman Budaya	0,00	6.400.906.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0002	UPTD Museum Bali	0,00	4.933.259.756,00	78.744.953.433,00	0,00	0,00	0,00
2	22	2.22.0.00.0.00.01.0003	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	0,00	6.744.494.148,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	22	2.22.0.00.0.00.05.0000	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	0,00	482.077.426.468,00	386.694.240,00	0,00	0,00	0,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	0,00	565.598.328,00	45.000.000,00	0,00	0,00	610.598.328,00
2	23	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0,00	565.598.328,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	751.603.126,00	0,00	0,00	0,00	751.603.126,00
2	24	4.01.2.23.2.24.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0,00	751.603.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	332.916.560.014,00	222.597.142.977,00	4.388.871.160,00	0,00	0,00	226.986.014.137,00
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.824.750.000,00	32.715.053.553,00	3.459.855.000,00	0,00	0,00	36.174.908.553,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.824.750.000,00	28.886.075.579,00	3.263.523.520,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0001	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	0,00	1.432.062.464,00	38.554.200,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	0,00	1.010.924.488,00	137.332.080,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	0,00	1.073.004.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	25	3.25.0.00.0.00.01.0004	UPTD Pelabuhan Perikanan	0,00	312.986.230,00	20.445.200,00	0,00	0,00	0,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	325.005.275.200,00	24.164.188.168,00	274.162.200,00	0,00	0,00	24.438.350.368,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	26	3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	325.005.275.200,00	24.164.188.168,00	274.162.200,00	0,00	0,00	0,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	843.394.814,00	94.877.981.875,00	167.607.800,00	0,00	0,00	95.045.589.675,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	843.394.814,00	85.409.872.694,00	167.607.800,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0009	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	0,00	532.326.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0012	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	2.505.052.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0013	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	2.928.792.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0014	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	1.071.483.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0015	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	2.430.454.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1.219.380.000,00	47.181.527.728,00	0,00	0,00	0,00	47.181.527.728,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.219.380.000,00	43.276.515.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0001	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	0,00	943.845.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0002	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	0,00	615.450.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	0,00	401.538.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	0,00	341.539.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	28	3.28.2.11.0.00.01.0005	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	0,00	1.602.637.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	0,00	115.499.500,00	0,00	0,00	0,00	115.499.500,00
3	29	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	115.499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	0,00	20.617.713.865,00	476.633.000,00	0,00	0,00	21.094.346.865,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	20.033.307.619,00	476.633.000,00	0,00	0,00	0,00
3	30	3.31.3.30.0.00.02.0002	UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	0,00	584.406.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	23.760.000,00	2.900.293.488,00	10.613.160,00	0,00	0,00	2.910.906.648,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.760.000,00	1.888.308.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	31	3.31.3.30.0.00.02.0001	UPTD Rumah Kreatif	0,00	1.011.984.802,00	10.613.160,00	0,00	0,00	0,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	0,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00
3	32	2.07.3.29.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	0,00	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	194.046.695.885,00	459.237.279.674,00	68.706.946.479,00	0,00	0,00	527.944.226.153,00
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	194.046.695.885,00	214.918.807.698,00	34.883.686.067,00	0,00	0,00	249.802.493.765,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	Biro Hukum	0,00	6.229.730.688,00	683.947.240,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0000	Sekretariat Daerah	194.046.695.885,00	81.731.654.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0001	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0,00	33.557.655.890,00	398.256.320,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0003	Biro Umum dan Protokol	0,00	87.026.794.480,00	2.121.288.292,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0005	Biro Organisasi	0,00	2.588.922.900,00	175.493.140,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0007	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	0,00	3.784.049.736,00	31.504.701.075,00	0,00	0,00	0,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD	0,00	244.318.471.976,00	33.823.260.412,00	0,00	0,00	278.141.732.388,00
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	0,00	244.318.471.976,00	33.823.260.412,00	0,00	0,00	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.136.524.202.941,00	329.973.076.189,00	15.524.807.876,00	151.187.931.213,00	787.453.202.628,00	1.284.139.017.906,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	01		PERENCANAAN	0,00	26.336.104.087,00	2.720.347.240,00	0,00	0,00	29.056.451.327,00
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	26.336.104.087,00	2.720.347.240,00	0,00	0,00	0,00
5	02		KEUANGAN	5.126.774.182.941,00	222.167.260.604,00	9.565.211.589,00	151.187.931.213,00	787.453.202.628,00	1.170.373.606.034,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.464.954.781.000,00	40.347.795.099,00	1.114.714.640,00	151.187.931.213,00	787.453.202.628,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0001	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	0,00	3.418.829.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	Badan Pendapatan Daerah	2.661.819.401.941,00	148.013.938.529,00	8.450.496.949,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0001	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	0,00	5.169.318.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0002	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	0,00	2.288.059.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0003	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	0,00	2.469.136.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0004	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	0,00	4.774.948.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0005	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	0,00	5.388.790.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0006	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	0,00	3.412.562.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0007	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	0,00	2.320.580.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0008	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	0,00	2.449.028.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0009	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	0,00	2.114.272.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03		KEPEGAWAIAN	9.690.020.000,00	48.414.453.589,00	1.601.183.000,00	0,00	0,00	50.015.636.589,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.690.020.000,00	39.432.851.037,00	575.633.000,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0,00	1.981.602.552,00	25.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0002	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,00	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	0,00	1.518.830.394,00	0,00	0,00	0,00	1.518.830.394,00
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.518.830.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0,00	22.163.525.639,00	1.121.764.840,00	0,00	0,00	23.285.290.479,00
5	05	5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Riset dan Inovasi Daerah	0,00	22.163.525.639,00	1.121.764.840,00	0,00	0,00	0,00
5	07		PENGLOLAAN PENGHUBUNG	60.000.000,00	9.372.901.876,00	516.301.207,00	0,00	0,00	9.889.203.083,00
5	07	5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung	60.000.000,00	9.372.901.876,00	516.301.207,00	0,00	0,00	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0,00	36.954.528.203,00	1.709.720.040,00	0,00	0,00	38.664.248.243,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	0,00	36.954.528.203,00	1.709.720.040,00	0,00	0,00	38.664.248.243,00
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	0,00	36.954.528.203,00	1.709.720.040,00	0,00	0,00	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0,00	45.280.165.833,00	828.301.540,00	0,00	0,00	46.108.467.373,00
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	45.280.165.833,00	828.301.540,00	0,00	0,00	46.108.467.373,00
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	45.280.165.833,00	828.301.540,00	0,00	0,00	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0001	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode			Urusan Pemerintah Daerah	Pendapatan	Belanja				
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah Belanja
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0002	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0003	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0004	UPTD Benih/Bibit Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0005	UPTD Laboratorium Perlindungan Tanaman Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0006	UPTD Pertanian Terpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0007	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0008	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0010	UPTD Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	27	3.27.2.09.0.00.01.0011	UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan, Sertifikasi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	4.01.2.23.2.24.01.0006	Biro Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	03	5.03.0.00.0.00.01.0001	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	04	5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	6.027.724.313.82 3,00	4.880.783.654.84 5,20	1.007.960.216.62 7,00	151.187.931.21 3,00	787.453.202.62 8,00	0,00

GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN III

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA,
DAN PEMBIAYAAN**



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI

**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

PENDAPATAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	6.027.724.313.823,0 0	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.581.371.604.823,0 0	
4.1.01	Pajak Daerah	2.611.036.410.791,0 0	
4.1.02	Retribusi Daerah	337.336.008.147,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	193.896.695.885,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	439.102.490.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.440.644.709.000,0 0	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.440.644.709.000,0 0	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.708.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0012 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0036 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.980.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.366.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.704.150.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.782.735.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.956.434.118,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.820.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.809.198.792,00	
5.1.05	Belanja Hibah	22.025.950.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.877.341.478,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.978.639.730,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.409.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.899.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0072 Pembangunan Ruang Kelas Baru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.871.116.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0075 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.996.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.312.128.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.715.508.800,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.212.384.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.150.616.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0028 Pengadaan Mebel Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.022.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.907.903.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.712.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.658.185.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.393.781.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.955.825.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0042 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.272.868.244,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.432.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.285.344.318,00	
5.1.05	Belanja Hibah	73.788.630.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.029.567.802,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.426.307.880,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0047 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0053 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0054 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0069 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.012.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.189.441.560,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.022.098.320,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0073 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.628.200,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0008 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.880.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0044 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.533.566.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0048 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.593.966.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0049 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.649.915.980,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0051 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.611.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	594.364.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0052 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.391.516.090,00	
5.1.05	Belanja Hibah	709.720.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.627.137.240,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.136.670,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0053 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.547.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0059 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.370.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0060 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.171.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0069 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	758.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.220.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.03.0071 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.880.000,00	
Program	: 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik		
Kegiatan	: 1.01.04.1.01 Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal		
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.04.1.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.999.700,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu		

Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.331.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.524.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	1.317.702.881.213,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.284.575.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.856.500,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.145.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.193.400,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.771.880,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.943.680,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.526.250,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	608.350.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	978.222.150,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.869.139.322,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	954.685.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.200.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.530.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0001 UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan		
Program	: 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
Indikator Hasil	: Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK		
Kegiatan	: 1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		
Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0057 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.774.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0059 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.908.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.01.0078 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.961.000,00	
Kegiatan	: 1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		

Indikator Keluaran	: Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK		
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0050 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0051 Pengembangan konten digital untuk pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.386.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0052 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.646.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.02.1.02.0072 Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.991.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.355.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.806.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.499.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.994.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	755.752.266,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0002 UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan		
Program	: 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
Indikator Hasil	: Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal		
Kegiatan	: 1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.100.800,00	
Kegiatan	: 1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 1.01.03.1.02.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.663.300,00	
Program	: 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		
Indikator Hasil	: Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan		
Kegiatan	: 1.01.06.1.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali		
Sub Kegiatan	: 1.01.06.1.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
Program	: 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.613.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.547.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.946.000,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.397.642,00	
Kegiatan	: 1.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.810.000,00	
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Faskes yang Terakreditasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Cakupan Kepesertaan JKN		

Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	267.525.580,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.542.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.757.730,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.231.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.631.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.072.600,00	

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.026.492,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.813.727.362,00	
5.1.05	Belanja Hibah	722.335.136,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.127.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0016 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.665.908.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0017 Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0019 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	322.771.520,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0021 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.867.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0025 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
Indikator Keluaran	: Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.464.110,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.356.540,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.759.680,00	
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.03.1.01 Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan		

Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.01.0001 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.448.460,00	
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.590.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0002 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.400,00	
Program	: 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial		
Kegiatan	: 1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		
Indikator Keluaran	: Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.153.570,00	
Kegiatan	: 1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		
Sub Kegiatan	: 1.02.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.106.400,00	
Program	: 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri		
Kegiatan	: 1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya dukungan kerjasama mitra potensial/lintas sektor		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.01.0001 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.451.330,00	
Kegiatan	: 1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kabupaten/kota yang 80% Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif		
Sub Kegiatan	: 1.02.05.1.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	205.158.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.876.110,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	298.345.834.158,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.282.014,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.583.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.268.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	791.833.100,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.649.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.968.394,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.170.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.318.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	484.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.894.558.346,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.769.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	893.602.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat		
Program	: 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.03.1.02.0001 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.183.034,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.924.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.316.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.268.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.458.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.134.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	363.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	810.685.512,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.755.300.000,00	

5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.700.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0007 Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.517.120,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.995.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.045.300,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.102.835.086,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.270.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.782.431.593,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.203.501.390,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	970.146.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.080.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.690.210,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.017.847.192,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0023 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.794.227.018,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.015.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.703.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	587.076.720,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	202.695.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.790.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.358.000,00	

Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	988.375.510,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.690.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.839.940,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	660.665.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0004 RSUD Bali Mandara		

Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.978.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.277.374.205,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.686.107.309,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	72.000.000.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.000.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000.000,00	

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.000.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0026 Pengembangan Rumah Sakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.944.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.025.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.578.149.570,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.114.110.402,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.790.288.206,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	8.032.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.967.200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.600.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0006 Rumah Sakit Mata Bali Mandara		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	36.451.800.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.766.360.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.623.840.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.458.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	700.000.000,00	
Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan		
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan		
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan		
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0025 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.783.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0027 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.490.490.960,00	
Kegiatan	: 1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi		

Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.140.277.494,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.498.300,00	
Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.575.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.279.580,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.009.720,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	408.786.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.970.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.836.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.126.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	850.000.000,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.082.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	780.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.439.612,00	
Kegiatan	: 1.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP		
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	532.441.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.000.000,00	
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		

Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0001 UPTD Balai Peralatan dan Pengujian		
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat		
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- undangan jasa konstruksi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	855.776.610,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.018.000.000,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan		
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.782.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.930.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.638.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.446.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.010.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.126.400,00	

Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	329.075.880,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.521.050,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0002 UPTD Pengelolaan Air Minum		
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Minum Layak		
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.763.210.452,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.016.500.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	700.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	790.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.0.00.01.0003 UPTD Pengelolaan Air Limbah		
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah		
Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0018 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.660.000,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.066.713.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.010.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program	: 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
Indikator Hasil	: Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0009 Pembangunan Tanggul Sungai		
Indikator Keluaran	: Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0082 Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		
Indikator Keluaran	: Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.593.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0096 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		
Indikator Keluaran	: Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.270.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0105 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.833.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0120 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.004.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.992.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.429.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	651.348.420,00	
Kegiatan	: 1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya		
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.707.430,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.917.923.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.827.973.634,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.113.317.870,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	599.450.000,00	
Program	: 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		

Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Minum Layak		
Kegiatan	: 1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kapasitas layanan SPAM		
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.868.839.454,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.009.100,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.515.550.155,00	
Program	: 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
Indikator Hasil	: Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak		
Kegiatan	: 1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat		
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0013 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat		
Indikator Keluaran	: Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.090.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.150.000.552,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.946.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	
Program	: 1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		

Indikator Hasil	: Persentase cakupan pelayanan air minum layak		
Kegiatan	: 1.03.07.1.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional		
Sub Kegiatan	: 1.03.07.1.01.0031 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.074.300,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.750.000.000,00	
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
Indikator Hasil	: Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik		
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.035.800,00	
5.1.05	Belanja Hibah	112.025.750.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.018.670.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.468.500,00	
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		

-	-	0,00	
Program	: 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
Indikator Hasil	: Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap		
Kegiatan	: 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap		
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.646.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.711.201.205,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Direkonstruksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.369.753.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.950.874.776,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.416.193.732,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	555.505.182,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.784.229.425,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.632.830.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.169.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan yang Dibangun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan		
Indikator Keluaran	: Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.839.949.608,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.10.1.01.0044 Pengelolaan Leger Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Program	: 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	907.982.222,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan rapat pembahasan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi		
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.619.540,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.276.150,00	
Program	: 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
Indikator Hasil	: Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang		

Kegiatan	: 1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.01.0005 Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah publikasi informasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.705.400,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.581.870,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.466.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
Indikator Keluaran	: Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.510.600,00	
Kegiatan	: 1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali		
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0007 Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan		
Indikator Keluaran	: Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	371.250.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.12.1.04.0014 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK		

Indikator Keluaran	: Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.261.632,00	
Program	: 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.006.372,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	354.358.232,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	49.809.216.070,20	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.800.000,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.172.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.820.120,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.734.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.816.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.880.000,00	

Kegiatan	: 1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.638.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	449.282.500,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.190.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	436.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.895.440,00	
Kegiatan	: 1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.568.132.460,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.696.230,00	
Sub Kegiatan	: 1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.208.704,00	
Bidang Urusan	: 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
Program	: 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi		
Kegiatan	: 1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.149.750,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.01.0008 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.033.700,00	
Kegiatan	: 1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun		
Sub Kegiatan	: 1.04.02.1.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	421.690.350,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	360.527.580,00	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	735.000.000,00	
Program	: 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Indikator Hasil	: Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh		
Kegiatan	: 1.04.03.1.02 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi		
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0003 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.579.678.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.03.1.02.0014 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		
Indikator Keluaran	: Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.026.320.000,00	
Program	: 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
Indikator Hasil	: Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU		
Kegiatan	: 1.04.05.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman		
Indikator Keluaran	: Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman		
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.718.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.301.363.350,00	
Sub Kegiatan	: 1.04.05.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.995.000,00	
Bidang Urusan	: 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja		
Program	: 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Indikator Hasil	: Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0006 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.554.610,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.999.900,00	

Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0013 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.450.348.273,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0014 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.849.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0015 Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.993.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0016 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.555.110,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0017 Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.955.245.872,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.01.0018 Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.687.312,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0001 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0002 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.742.662.038,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.02.0003 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.984.820,00	
Kegiatan	: 1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	24.932.928.311,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.706.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.802.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	498.633.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.033.390,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.301.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.505.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.985.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.720.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	923.397.642,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.841.523.590,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.668.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0013 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.354.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0023 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.690.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0024 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.643.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0025 Penyusunan Rencana Kontijensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.436.900,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0027 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	283.594.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0028 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.960.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.191.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.898.900,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0028 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		

Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.027.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.03.0030 Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	462.156.000,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0007 Penanganan Pasca Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	277.076.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0010 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.980.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0013 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.802.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0018 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang dilegalkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.317.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0019 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.818.100,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)		
Kegiatan	: 1.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.051.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.041.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.605.845.478,00	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.100.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.104.200,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.982.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.047.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.229.424,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.258.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.742.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.687.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.681.700,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.186.386.448,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		

Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.287.969.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.380.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.272.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.810.000,00	
Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
Unit Organisasi	: 1.05.0.00.0.00.04.0001 UPTD Pengendalian Bencana Daerah		
Program	: 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana		
Kegiatan	: 1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana		

Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0029 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		
Indikator Keluaran	: Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	953.192.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.02.0030 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	212.209.900,00	
Kegiatan	: 1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana		
Sub Kegiatan	: 1.05.03.1.04.0022 Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	677.060.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.772.940.069,00	
Program	: 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)		
Kegiatan	: 1.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.846.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.992.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.829.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.623.900.800,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.124.078.904,00	
Kegiatan	: 1.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.05.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	312.657.600,00	
Bidang Urusan	: 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Program	: 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS		
Kegiatan	: 1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.484.600,00	
Kegiatan	: 1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial		
Sub Kegiatan	: 1.06.02.1.02.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.148.500,00	

Program	: 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		
Indikator Hasil	: Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani		
Kegiatan	: 1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 1.06.03.1.01.0001 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya		
Kegiatan	: 1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.624.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0004 Penyediaan Alat Bantu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.024.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.01.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	403.782.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.941.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.120.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.812.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0006 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.500.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.970.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	272.890.100,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0001 Penyediaan Permakanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.04.0010 Pemulangan ke Daerah Asal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.120.000,00	
Program	: 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan		
Kegiatan	: 1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.01.0001 Pengangkatan Anak antar WNI		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.136.600,00	
Kegiatan	: 1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin		
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0001 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.791.100,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.05.1.02.0002 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
Program	: 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
Indikator Hasil	: Persentase korban bencana yang tertangani		
Kegiatan	: 1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah korban bencana yang terfasilitasi		
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.06.1.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	344.931.800,00	
Program	: 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
Indikator Hasil	: Persentase Penanganan TMP sesuai standar		
Kegiatan	: 1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 1.06.07.1.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.258.400,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.06.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.907.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.952.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.004.800,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.603.009.121,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.900.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.508.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.649.600,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	96.022.700,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.647.200,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.163.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.462.484,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.175.080.364,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.155.808.038,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0001 UPTD Pelayanan Sosial		
Program	: 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya		
Kegiatan	: 1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0001 Pengasuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.401.500,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0002 Penyediaan Makanan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.478.250.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0003 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.680.300,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.759.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0009 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.02.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
Kegiatan	: 1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti		
Indikator Keluaran	: Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0001 Penyediaan Permakanan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.450.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0002 Penyediaan Sandang		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0005 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0007 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.987.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0010 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.04.1.03.0012 Pemulasaraan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
Program	: 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 1.06.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.813.400,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.941.800,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.415.000,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	337.221.344,00	
Kegiatan	: 1.06.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.322.984,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.454.397.000,00	
Sub Kegiatan	: 1.06.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.136.217.130,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
Bidang Urusan	: 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.0.00.01.0001 UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
Kegiatan	: 2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.350.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)		
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan		

Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.252.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.117.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.899.394,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	986.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.298.000,00	

Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.728.560,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.131.673,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.550.034,00	
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.0.00.01.0002 UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja		
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3		
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku		
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0003 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	415.850.050,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)		
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.980.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.896.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.944.274,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.884.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	957.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.839.896,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.559.904,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.692.636,00	
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Program	: 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi		
Kegiatan	: 2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi		
Sub Kegiatan	: 2.07.03.1.04.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.997.600,00	
Program	: 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
Indikator Hasil	: Persentase Penyerapan Tenaga Kerja		
Kegiatan	: 2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasi bekerja/ berwirausaha		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.663.300,00	
Kegiatan	: 2.07.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya		
Sub Kegiatan	: 2.07.04.1.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		
Indikator Keluaran	: Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.313.800,00	

Program	: 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan		
Kegiatan	: 2.07.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.566.000,00	
Kegiatan	: 2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan Jumlah rohaniwan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan		
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0001 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penetapan UMP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0003 Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah penetapan UMK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.05.1.03.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.927.573.000,00	
Program	: 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos		
Kegiatan	: 2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja		
Sub Kegiatan	: 2.07.06.1.01.0001 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	
Program	: 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)		
Kegiatan	: 2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	30.837.309.502,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.680.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.992.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.179.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.133.994,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.124.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.614.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.104.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.064.000,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.873.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	384.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	626.571.323,00	
Kegiatan	: 2.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai		
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	741.917.508,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	213.265.968,00	
Sub Kegiatan	: 2.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	933.971.742,00	
Bidang Urusan	: 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Program	: 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG		
Kegiatan	: 2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.01.0008 Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.634.200,00	
Kegiatan	: 2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		
Sub Kegiatan	: 2.08.02.1.02.0003 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.333.500,00	
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Rasio Perempuan korban kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.546.100,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.03.0004 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	
Program	: 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		

Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Keluarga		
Kegiatan	: 2.08.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan		
Sub Kegiatan	: 2.08.04.1.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.878.600,00	
Program	: 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		
Indikator Hasil	: Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah		
Kegiatan	: 2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan		
Sub Kegiatan	: 2.08.05.1.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.996.400,00	
Program	: 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
Indikator Hasil	: Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)		
Kegiatan	: 2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.01.0003 Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.325.700,00	
Kegiatan	: 2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak		
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	650.611.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.06.1.02.0005 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.145.600,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Rasio anak korban kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0006 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.743.600,00	
Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak		
Unit Organisasi	: 1.06.2.08.0.00.06.0002 UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak		
Program	: 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
Indikator Hasil	: Rasio Perempuan korban kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.407.200,00	
Kegiatan	: 2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar		
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.03.1.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.556.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.115.256.000,00	
Program	: 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
Indikator Hasil	: Rasio anak korban kekerasan		
Kegiatan	: 2.08.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga		
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.499.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.07.1.03.0008 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.018.000,00	
Program	: 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD PPA)		
Kegiatan	: 2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.528.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.266.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.340.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
Kegiatan	: 2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.131.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.345.692,00	

Sub Kegiatan	: 2.08.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.381.702,00	
Bidang Urusan	: 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Program	: 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi		
Kegiatan	: 2.09.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian		
Sub Kegiatan	: 2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
Indikator Keluaran	: Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.326.192,00	
Program	: 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Angka Kecukupan Energi (AKE)		
Kegiatan	: 2.09.04.1.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen ketersediaan pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148.245.830,00	
Kegiatan	: 2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina		
Sub Kegiatan	: 2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.569.780,00	

Program	: 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi		
Kegiatan	: 2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.368.130,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0009 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan		
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.812.760,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.177.112,00	
Program	: 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.09.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.927.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.648.960,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Kegiatan	: 2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.230.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.721.230,00	
Kegiatan	: 2.09.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.908.820,00	
Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.110.820,00	

Sub Kegiatan	: 2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.060.000,00	
Bidang Urusan	: 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Unit Organisasi	: 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Program	: 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan		
Kegiatan	: 2.10.05.1.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		
Sub Kegiatan	: 2.10.05.1.01.0003 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.876.000,00	
Program	: 2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Indikator Hasil	: Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi		
Kegiatan	: 2.10.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi		
Sub Kegiatan	: 2.10.06.1.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.847.700,00	
Program	: 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		
Indikator Hasil	: Persentase data informasi pertanahan yang handal		
Kegiatan	: 2.10.10.1.01 Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.10.10.1.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.004.000,00	
Bidang Urusan	: 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik		
Kegiatan	: 2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.999.800,00	
Kegiatan	: 2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.02.1.02.0006 Pemantauan dan Evaluasi KLHS		
Indikator Keluaran	: Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.110.820,00	
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas air Indeks kualitas air laut Indeks kualitas udara		
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.493.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.960.000,00	
Program	: 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
Indikator Hasil	: Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		
Kegiatan	: 2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.04.1.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		
Indikator Keluaran	: Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.261.000,00	
Program	: 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
Indikator Hasil	: Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3		
Kegiatan	: 2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.11.05.1.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.056.300,00	
Program	: 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
Indikator Hasil	: Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH		
Sub Kegiatan	: 2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.700,00	
Program	: 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		

Indikator Hasil	: Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga		
Kegiatan	: 2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3		
Sub Kegiatan	: 2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.117.590.230,00	
Program	: 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
Indikator Hasil	: Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		
Kegiatan	: 2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH		
Sub Kegiatan	: 2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.999.700,00	
Program	: 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi		
Sub Kegiatan	: 2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.994.300,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0006 UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup		
Program	: 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
Indikator Hasil	: Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan		
Kegiatan	: 2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi		

Sub Kegiatan	: 2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.757.125,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.866.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	935.500,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.299.040,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.615.500,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.970.820,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0007 UPTD Pengelolaan Sampah		
Program	: 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
Indikator Hasil	: Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional		
Kegiatan	: 2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		
Indikator Keluaran	: Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.143.408.590,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.725.000.000,00	
Program	: 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)		
Kegiatan	: 2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.229.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.701.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.917.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
Kegiatan	: 2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah		
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.930.974,00	
Sub Kegiatan	: 2.11.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.270.000,00	
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Unit Organisasi	: 2.13.2.12.2.14.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
Indikator Hasil	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP El mencapai target		
Kegiatan	: 2.12.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk		
Sub Kegiatan	: 2.12.02.1.01.0004 Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.619.030,00	
Program	: 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
Indikator Hasil	: Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target		
Kegiatan	: 2.12.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil		
Indikator Keluaran	: Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil		
Sub Kegiatan	: 2.12.03.1.01.0004 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.063.720,00	
Bidang Urusan	: 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
Program	: 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
Indikator Hasil	: Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa		
Kegiatan	: 2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan		
Sub Kegiatan	: 2.13.03.1.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.878.612,00	
Program	: 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
Indikator Hasil	: Persentase desa cepat berkembang		
Kegiatan	: 2.13.04.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa		
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0002 Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.162.830,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0008 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.492.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.04.1.01.0016 Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.595.700,00	
Program	: 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif		
Kegiatan	: 2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif		
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0004 Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.746.520,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0005 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.354.940,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0006 Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.557.120,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.05.1.01.0009 Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.244.528.080,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.180.000.000,00	
Program	: 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.13.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.455.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.205.012,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.755.423.571,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.066.130,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.992.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.523.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.738.750,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.048.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.626.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.624.000,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.439.600,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	515.870.594,00	
Kegiatan	: 2.13.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terselesaikan		
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.098.383.428,00	
Sub Kegiatan	: 2.13.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.810.000,00	
Bidang Urusan	: 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
Program	: 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
Indikator Hasil	: Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana		
Kegiatan	: 2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali		
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana		
Indikator Keluaran	: Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.955.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.14.03.1.01.0013 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	478.838.860,00	
Bidang Urusan	: 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Rasio konektivitas layanan angkutan darat		
Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.703.542,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0005 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.844.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	529.972.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.06.0004 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.880.000,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.10 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.10.0003 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.664.400,00	
Kegiatan	: 2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.13.0001 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	411.437.370,00	
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Persentase Aksesibilitas Pelayaran		

Kegiatan	: 2.15.03.1.08 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Sangsit		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.08.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.638.650,00	
Program	: 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		
Indikator Hasil	: Persentase lintasan kereta api yang terbangun		
Kegiatan	: 2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Berbasis Kereta Api Lintasan Canggü-Mengwi		
Sub Kegiatan	: 2.15.05.1.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	646.933.460,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.236.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.643.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	24.527.125.316,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.514.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.993.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.258.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	614.776.540,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.253.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	938.788.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	168.273.400,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.775.436,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelayanan administrasi perkantoran		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.767.984,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.770.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.130.374.168,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pusat Pengendalian LLAJ		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional		
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	596.800.000,00	

Kegiatan	: 2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.05.0001 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.299.151.218,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.244.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.924.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	143.228.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	222.164.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	207.660.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.765.792,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.299.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0002 UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita		
Kegiatan	: 2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.08.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.938.004.159,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang tersedia Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Komponen instalasi Listrik yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas yang tersedia Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	915.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.440.440,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.149.520,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.324.588,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.876.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.491.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah gedung kantor yang tersedia Jumlah mebel yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.685.000,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah jasa pelayanan umum kantor (jasa kebersihan) yang tersedia Jumlah jasa surat menyurat berupa materai yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.910.892,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.638.132,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perlengkapan Jalan		
Program	: 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
Indikator Hasil	: Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik		
Kegiatan	: 2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.008.551.820,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	495.443.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.02.1.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	944.221.240,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.276.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.066.400,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.650.800,00	

Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.654.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	
Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan		
Unit Organisasi	: 2.15.0.00.0.00.01.0004 UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan		
Program	: 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM		
Kegiatan	: 2.15.03.1.09 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.03.1.09.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.540.200,00	
Program	: 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.15.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.401.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		

5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.919.356,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.493.444,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Tersedia Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.130.800,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.700,00	
Kegiatan	: 2.15.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.984.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.15.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Bidang Urusan	: 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Program	: 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
Indikator Hasil	: Persentase informasi yang disebarluaskan		
Kegiatan	: 2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi		
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten		
Indikator Keluaran	: Jumlah Konten Informasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.256.984.130,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.658.650,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi		
Indikator Keluaran	: Persentase khalayak yang terpapar informasi publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.255.049.782,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	228.951.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.687.524.460,00	

Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	373.117.170,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.357.171.032,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	342.520.420,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.936.233.828,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.862.200,00	
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
Kegiatan	: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0025 Koordinasi penyusunan proses bisnis		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.935.189.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0029 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.338.598.202,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.01	Belanja Modal Tanah	25.403.325.760,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.556.674.240,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.748.512.120,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.400.000.000,00	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.911.602.192,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.555.000.000,00	
Program	: 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)		
Kegiatan	: 2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.685.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.290.300,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	25.339.726.517,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.051.700,00	
5.1.05	Belanja Hibah	1.396.250.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.443.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.914.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.670.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.522.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.630.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	683.978.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.761.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	697.980.340,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan		

Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Kegiatan	: 2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai		
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.151.128.888,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.164.773.120,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.180.000,00	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0001 UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital		
Program	: 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
Indikator Hasil	: Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
Kegiatan	: 2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0014 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.963.388.200,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	329.830.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0016 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.285.496.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	334.390.340,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.000.000,00	
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0002 UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali		
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0018 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.514.213.894,00	
Sub Kegiatan	: 2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.110.693.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.117.540.150,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Program	: 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP		
Kegiatan	: 2.17.02.1.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 2.17.02.1.01.0002 Fasilitas Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.686.994,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	90.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.02.1.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 2.17.02.1.02.0003 Fasilitas Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.600,00	

Program	: 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi berkualitas		
Kegiatan	: 2.17.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.934.000,00	
Kegiatan	: 2.17.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi		
Sub Kegiatan	: 2.17.03.1.02.0002 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.498.810,00	
Program	: 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
Indikator Hasil	: Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta		
Kegiatan	: 2.17.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0002 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.110.620,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.06.1.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.600,00	

Program	: 2.17.07 PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
Indikator Hasil	: Persentase pertumbuhan wirausaha		
Kegiatan	: 2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan		
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0001 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.176.002,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.07.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.400.000,00	
Program	: 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0001 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.843.804,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0002 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0005 Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan		
Indikator Keluaran	: Wirausaha yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.08.1.01.0006 Fasilitas Inkubator Usaha Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)		
Kegiatan	: 2.17.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.177.312,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.184.900,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	16.368.269.734,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.997.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.405.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.071.194,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.753.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.452.200,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.259.256,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	797.265.444,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.938.368,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	272.000.000,00	
Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Unit Organisasi	: 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
Program	: 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
Indikator Hasil	: Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi		
Kegiatan	: 2.17.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		
Sub Kegiatan	: 2.17.05.1.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.615.568.416,00	
Program	: 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)		
Kegiatan	: 2.17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	699.600,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.146.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.904.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	990.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	160.265.968,00	
Kegiatan	: 2.17.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.191.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.17.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.132.984,00	
Bidang Urusan	: 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Unit Organisasi	: 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
Program	: 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		

Indikator Hasil	: Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)		
Kegiatan	: 2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha		
Sub Kegiatan	: 2.18.02.1.02.0005 Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.186.230,00	
Program	: 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali		
Kegiatan	: 2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.03.1.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.553.520,00	
Program	: 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku		
Kegiatan	: 2.18.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	667.234.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.04.1.01.0008 Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.501.640,00	
Program	: 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Nilai Investasi		
Kegiatan	: 2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi		

Indikator Keluaran	: Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal		
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0004 Pengawasan Penanaman Modal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0005 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.146.230,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.05.1.01.0006 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.900.000,00	
Program	: 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
Indikator Hasil	: Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan		
Kegiatan	: 2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.18.06.1.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.790.820,00	
Program	: 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.130.595.620,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.073.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.134.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.516.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	327.386.000,00	

Kegiatan	: 2.18.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.846.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.319.974.430,00	
Kegiatan	: 2.18.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.336.436.050,00	
Sub Kegiatan	: 2.18.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.307.900,00	
Bidang Urusan	: 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga		
Program	: 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		

Indikator Hasil	: Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan		
Kegiatan	: 2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pemuda yang berprestasi		
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0010 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda		
Indikator Keluaran	: Jumlah yang menerima penghargaan pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.324.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0011 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0012 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	788.299.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.02.1.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	113.475.000,00	
Program	: 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi		

Kegiatan	: 2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0004 Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.818.328.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.268.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.02.0006 Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.190.429.632,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.106.500,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional		
Indikator Keluaran	: Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.03.0008 Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	351.400.000,00	
Kegiatan	: 2.19.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan		
Sub Kegiatan	: 2.19.03.1.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000.000,00	
Program	: 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan		
Kegiatan	: 2.19.04.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
Indikator Keluaran	: Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka		
Sub Kegiatan	: 2.19.04.1.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	
Bidang Urusan	: 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Unit Organisasi	: 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		
Program	: 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
Indikator Hasil	: Indeks Pembangunan Statistik		
Kegiatan	: 2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi		
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	138.351.510,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0008 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.417.110,00	
Sub Kegiatan	: 2.20.02.1.01.0011 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		
Indikator Keluaran	: Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.703.020,00	
Bidang Urusan	: 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
Program	: 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
Indikator Hasil	: Indeks Evalaksan		
Kegiatan	: 2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.024.900,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.677.410,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.312.800,00	
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.312.000,00	
Kegiatan	: 2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun		
Sub Kegiatan	: 2.21.02.1.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.385.210,00	
Bidang Urusan	: 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra		
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terkelolanya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		

Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	750.509.552,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.865.155.064,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.948.586.970,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.02.0003 Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.349.881.206,00	
Kegiatan	: 2.22.02.1.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	441.210.100,00	
5.1.05	Belanja Hibah	9.685.000.000,00	
Program	: 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
Indikator Hasil	: Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan		

Kegiatan	: 2.22.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.986.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.03.1.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	361.312.370,00	
Program	: 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi		
Kegiatan	: 2.22.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.22.04.1.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.453.000,00	
Program	: 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju		
Kegiatan	: 2.22.05.1.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.01.0002 Penetapan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.753.230,00	
Kegiatan	: 2.22.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya yang diinventarisasi		
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.761.876,00	
5.1.05	Belanja Hibah	10.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.388.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.107.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.05.1.02.0004 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.610.900,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.022.340,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.374.500,00	

Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi Keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	59.283.471.111,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.678.506,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.085.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	331.754.660,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.915.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.488.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.495.000,00	

Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	720.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.104.242.068,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.287.460,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	743.912.888,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		

Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPTD Taman Budaya		
Program	: 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya		
Kegiatan	: 2.22.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memadai		
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.529.984.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.02.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.516.000,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Taman Budaya		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.997.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.340.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.994.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.470.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	985.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.147.368.058,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.066.728.792,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPTD Museum Bali		
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Museum Bali		
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali		
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	909.890.300,00	

Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.609.445.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.705.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.043.500,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.517.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.472.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.402.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.713.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.698.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.388.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.264.840,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.640.136,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.080.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	722.444.080,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.665.521.933,00	
Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.01.0003 UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali		
Program	: 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali		
Kegiatan	: 2.22.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai		

Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	756.260.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.087.713.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.06.1.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.832.600,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.995.300,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.057.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.593.100,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.777.400,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.440.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.278.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.491.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.930.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	946.852.824,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.002.328.024,00	

Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat		
Unit Organisasi	: 2.22.0.00.0.00.05.0000 Dinas Pemajuan Masyarakat Adat		
Program	: 2.22.09 PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI		
Indikator Hasil	: Indeks Membangun Desa Adat		
Kegiatan	: 2.22.09.8.01 Pembinaan Kelembagaan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina		
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.01.0001 Pembinaan Pemerintahan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.670.107.876,00	
5.1.05	Belanja Hibah	464.000.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.01.0002 Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Desa Adat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.177.312,00	
Kegiatan	: 2.22.09.8.02 Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses		
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.02.0001 Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.02.0002 Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.865.706,00	
Kegiatan	: 2.22.09.8.03 Penyelenggaraan Desa Adat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan		
Sub Kegiatan	: 2.22.09.8.03.0003 Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	388.347.930,00	
Program	: 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: -		
Kegiatan	: 2.22.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di proses		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	12.042.395.722,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.400.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Proses		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.934.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.145.200,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.243.700,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	414.430.000,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.609.840,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257.994.240,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai		
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	548.179.734,00	
Kegiatan	: 2.22.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai		

Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.441.852,00	
Sub Kegiatan	: 2.22.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.617.147.396,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.700.000,00	
Bidang Urusan	: 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0005 Biro Organisasi		
Program	: 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik		
Kegiatan	: 2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.066.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.066.392,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.01.0016 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dan informasi Perpustakaan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.132.984,00	
Kegiatan	: 2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca		
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.066.492,00	
Sub Kegiatan	: 2.23.02.1.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.132.984,00	
Program	: 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
Indikator Hasil	: Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun		
Kegiatan	: 2.23.03.1.01 Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun		
Sub Kegiatan	: 2.23.03.1.01.0001 Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.132.984,00	
Bidang Urusan	: 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Biro Umum dan Protokol		
Program	: 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
Indikator Hasil	: - Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip - Nilai Evaluasi Kearsipan		
Kegiatan	: 2.24.02.1.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terwujudnya Penataan Arsip		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.01.0006 Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daftar Arsip Dinamis		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.965.866,00	
Kegiatan	: 2.24.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik		
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.757.500,00	
Sub Kegiatan	: 2.24.02.1.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	317.879.760,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
Bidang Urusan	: 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0008 Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.495.000,00	
Kegiatan	: 3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.101.492,00	
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah produksi perikanan tangkap		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		
Indikator Keluaran	: Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.850.902,00	
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.03.1.09 Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.09.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		
Indikator Keluaran	: Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.723.000,00	
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.427.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.05.0013 Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.620.000,00	
Program	: 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		

Indikator Hasil	: Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku		
Kegiatan	: 3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil		
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0016 Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.268.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.05.1.01.0017 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		
Indikator Keluaran	: Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.240.984,00	
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.958.502,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.25.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.748.000,00	

Kegiatan	: 3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	25.341.415.889,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.200.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.459.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	728.957.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.642.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.923.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.820.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.565.620,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.611.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.050.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.364.936,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.924.074,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.255.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.230.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0001 UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut		
Program	: 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		
Kegiatan	: 3.25.04.1.06 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		
Indikator Keluaran	: Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas		
Sub Kegiatan	: 3.25.04.1.06.0003 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	824.870.604,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.664.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.117.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.996.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.554.200,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.599.200,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		

Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	166.497.984,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.346.476,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan		
Program	: 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan		
Kegiatan	: 3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan		
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0003 Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.241.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.06.1.02.0004 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		
Indikator Keluaran	: Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitas, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.260.800,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.260.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.433.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.072.080,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.020.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.232.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.457.188,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.780.000,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0003 UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali		
Program	: 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
Indikator Hasil	: Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		
Kegiatan	: 3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan		
Sub Kegiatan	: 3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		
Indikator Keluaran	: Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		

Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.848.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.510.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	784.146.692,00	
Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan		
Unit Organisasi	: 3.25.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pelabuhan Perikanan		
Program	: 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		
Kegiatan	: 3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan		
Sub Kegiatan	: 3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.699.000,00	
Program	: 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.25.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.835.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.445.200,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Kegiatan	: 3.25.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik		
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.25.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.401.330,00	
Bidang Urusan	: 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata		
Unit Organisasi	: 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata		
Program	: 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing		
Kegiatan	: 3.26.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Daya Tarik Wisata yang berdaya saing		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.935.516,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Berbasis Komunitas Lokal		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.02.0001 Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
-	-		
-	-		
-	-	0,00	

Kegiatan	: 3.26.02.1.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: 1 Laporan		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	278.795.900,00	
Kegiatan	: 3.26.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar		
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0009 Fasilitas Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.672.510,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.02.1.04.0013 Kesiadaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.116.230,00	
Program	: 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan		
Kegiatan	: 3.26.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata		
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0001 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	305.544.020,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.793.804,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.03.1.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.242.262.312,00	
Program	: 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
Indikator Hasil	: Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		
Kegiatan	: 3.26.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.881.384,00	
Kegiatan	: 3.26.04.1.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		
Sub Kegiatan	: 3.26.04.1.02.0017 Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.486.700,00	
Program	: 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
Indikator Hasil	: Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan		
Kegiatan	: 3.26.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan		
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0004 Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.630.092,00	

Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0014 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.069.504,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.05.1.01.0017 Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
Indikator Keluaran	: Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.422.102,00	
Program	: 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISPAR)		
Kegiatan	: 3.26.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.996.812,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.105.970.608,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.216.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.551.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	274.162.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.617.494,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.882.600,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	179.997.000,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.008.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.312.719.880,00	
Kegiatan	: 3.26.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.217.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.26.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	313.400.000,00	
Bidang Urusan	: 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.591.720,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.928.862.604,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.285.772,00	
5.1.05	Belanja Hibah	2.610.000.000,00	
Program	: 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian		
Kegiatan	: 3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian		
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	977.248.752,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.560.140,00	
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis		
Kegiatan	: 3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah HPR Yang Mendapatkan Pelayanan Vaksinasi Jumlah Kontrol Populasi HPR		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.791.667.602,00	
Kegiatan	: 3.27.04.1.05 Kesejahteraan Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.613.410,00	
Program	: 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan		
Kegiatan	: 3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		
Indikator Keluaran	: Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina		
Sub Kegiatan	: 3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.073.630,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.849.162,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	301.514.152,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	59.017.237.822,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	295.899.180,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.263.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.274.500,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.607.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.003.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.125.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.840.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	417.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.109.662,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.845.842.822,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	742.110.364,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.800.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0009 UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan		
Program	: 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
Indikator Hasil	: Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis		
Kegiatan	: 3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji		
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit		
Indikator Keluaran	: Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.221.240,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	299.104.820,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0012 UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Program	: 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Terkendalnya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)		
Kegiatan	: 3.27.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		
Indikator Keluaran	: Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)		
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	423.615.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.402.740,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	335.163.354,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	599.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.056.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	178.320.332,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.277.312,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.897.642,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0013 UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Populasi Ternak		
Kegiatan	: 3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.030.315.210,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.095.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.126.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	262.970.816,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.971.640,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.943.280,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0014 UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sertifikat Benih		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	330.785.372,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	331.592.852,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.197.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.269.200,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.109.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.074.020,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.155.410,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Unit Organisasi	: 3.27.2.09.0.00.01.0015 UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		
Program	: 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura		
Kegiatan	: 3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		
Indikator Keluaran	: Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0007 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	554.830.310,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0011 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	662.854.730,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.042.372,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi		
Indikator Keluaran	: Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.569.924,00	
Kegiatan	: 3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada		
Sub Kegiatan	: 3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.194.200,00	
Program	: 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 3.27.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.996.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.998.100,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.912.191,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.999.312,00	
Kegiatan	: 3.27.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.570.410,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.566.492,00	
Sub Kegiatan	: 3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
Bidang Urusan	: 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Program	: 3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
Indikator Hasil	: Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
Sub Kegiatan	: 3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.400.230,00	
Program	: 3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
Indikator Hasil	: Persentase peningkatan kelas kelompok		
Kegiatan	: 3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		
Sub Kegiatan	: 3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.500,00	
Program	: 3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		
Indikator Hasil	: Indeks Kualitas Lahan Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan		
Kegiatan	: 3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.554.810,00	
Program	: 3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)		
Kegiatan	: 3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.694.200,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	39.982.439.046,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	186.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.679.800,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.097.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	593.922.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.560.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.283.344,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	840.290.360,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	472.289.248,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0001 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.205.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.025.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.650.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.753.592,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.705.410,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657.084.954,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		

Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0002 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.129.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.443.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.698.100,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.050.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.434.092,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	488.554.597,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0003 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.373.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.355.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.707.300,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.560.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.397.312,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.154.492,00	

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.990.000,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0004 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.137.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.811.900,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.502.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.379.792,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.425.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.382.984,00	
Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
Unit Organisasi	: 3.28.2.11.0.00.01.0005 UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai		
Kegiatan	: 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai		

Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.530.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.920.800,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.598.700,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.354.292,00	
Kegiatan	: 3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai		
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.130.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	884.133.673,00	
Sub Kegiatan	: 3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.970.000,00	
Bidang Urusan	: 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Program	: 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		
Indikator Hasil	: Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan		
Kegiatan	: 3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan		
Sub Kegiatan	: 3.29.02.1.01.0003 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
Program	: 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
Indikator Hasil	: Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan		

Kegiatan	: 3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan		
Sub Kegiatan	: 3.29.03.1.03.0003 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
Program	: 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
Indikator Hasil	: Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan		
Kegiatan	: 3.29.05.1.08 Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.29.05.1.08.0005 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.999.500,00	
Bidang Urusan	: 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
Kegiatan	: 3.30.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		
Sub Kegiatan	: 3.30.02.1.04.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	302.955.644,00	
Program	: 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
Indikator Hasil	: Jumlah Pasar ber SNI		
Kegiatan	: 3.30.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas		

Indikator Keluaran	: Jumlah Pasar yang dibina Jumlah Toko Swalayan yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.30.03.1.01.0002 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.968.600,00	
Program	: 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		
Indikator Hasil	: Persentase stabilitas harga barang Pokok		
Kegiatan	: 3.30.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah		
Sub Kegiatan	: 3.30.04.1.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	243.576.100,00	
Program	: 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
Indikator Hasil	: Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif		
Kegiatan	: 3.30.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran		
Sub Kegiatan	: 3.30.05.1.01.0004 Peningkatan Citra Produk Ekspor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.600,00	
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Indeks Keberdayaan Konsumen		
Kegiatan	: 3.30.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0001 Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen		
Indikator Keluaran	: Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.05	Belanja Hibah	456.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.01.0002 Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.992.200,00	
Kegiatan	: 3.30.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.03.0003 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.621.202,00	
Program	: 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
Indikator Hasil	: Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali		
Kegiatan	: 3.30.07.1.03 Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali		
Sub Kegiatan	: 3.30.07.1.03.0005 Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.832.962,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)		
Kegiatan	: 3.30.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.082.800,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		

Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	15.598.486.223,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.500.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.267.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.454.400,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	476.633.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.483.394,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	316.901.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	340.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	576.131.150,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.194.900,00	

Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.042.460,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.553.984,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang		
Program	: 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
Indikator Hasil	: Indeks Keberdayaan Konsumen		
Kegiatan	: 3.30.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan		
Sub Kegiatan	: 3.30.06.1.02.0005 Pengembangan Layanan Pengujian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	244.401.176,00	
Program	: 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)		
Kegiatan	: 3.30.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.455.700,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.887.400,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.038.040,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.280.000,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.274.886,00	
Kegiatan	: 3.30.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.30.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.969.044,00	
Bidang Urusan	: 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase industri kreatif yang tumbuh		
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Industri yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.682.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.700.626.786,00	
Program	: 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
Indikator Hasil	: Persentase Ketersediaan Data Industri		
Kegiatan	: 3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Persentase Data Industri yang terkumpul		
Sub Kegiatan	: 3.31.04.1.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.900,00	
Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan		

Unit Organisasi	: 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD Rumah Kreatif		
Program	: 3.31.02 PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
Indikator Hasil	: Persentase industri kreatif yang tumbuh		
Kegiatan	: 3.31.02.1.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Persentase Industri yang dibina		
Sub Kegiatan	: 3.31.02.1.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	827.213.500,00	
Program	: 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)		
Kegiatan	: 3.31.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.821.900,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.613.160,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.450.500,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.212.000,00	
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
Kegiatan	: 3.31.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.555.410,00	
Kegiatan	: 3.31.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 3.31.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.051.492,00	
Bidang Urusan	: 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Unit Organisasi	: 2.07.3.29.3.32.01.0000 Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral		
Program	: 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
Indikator Hasil	: Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD		
Kegiatan	: 3.32.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target		
Sub Kegiatan	: 3.32.03.1.01.0018 Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.884.800,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 4.01 SEKRETARIAT DAERAH		
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		

Unit Organisasi	: 4.01.0.00.0.00.01.0004 Biro Hukum		
Program	: 4.01.05 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
Indikator Hasil	: Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum		
Kegiatan	: 4.01.05.1.01 Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum		
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	936.594.722,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.709.540,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasinya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.300.042,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.01.0004 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	443.463.170,00	
Kegiatan	: 4.01.05.1.02 Fasilitasi Bantuan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0001 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.504.028.296,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.05.1.02.0002 Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM		
Indikator Keluaran	: Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.703.440,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.606.100,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.377.294,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	683.947.240,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.990.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.491.000,00	

Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	468.823.394,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	766.752.790,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.290.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	78.458.344.494,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		

Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	2.988.309.510,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0001 Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		
Program	: 4.01.03 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali		
Kegiatan	: 4.01.03.1.01 Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0001 Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.157.990,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.01.0003 Fasilitasi Penataan Wilayah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.862.600,00	
Kegiatan	: 4.01.03.1.02 Pelaksanaan Otonomi Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0001 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	399.993.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.02.0002 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.999.500,00	

Kegiatan	: 4.01.03.1.03 Fasilitas Kerja Sama Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi		
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0001 Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.909.422,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.03.1.03.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	948.670.200,00	
Program	: 4.01.04 PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		
Indikator Hasil	: Persentase Tindakanlanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual		
Kegiatan	: 4.01.04.1.01 Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Mental Spiritual		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0001 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.834.763.996,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.01.0002 Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.398.752,00	
Kegiatan	: 4.01.04.1.02 Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
Sub Kegiatan	: 4.01.04.1.02.0003 Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.821.861.676,00	

5.1.05	Belanja Hibah	22.043.750.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	332.213.362,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Umum		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.976.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.026.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	398.256.320,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.727.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	339.429.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Barang Milik Daerah yang tertata		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	905.956.492,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.160.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.800.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0003 Biro Umum dan Protokol		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	538.866.748,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.879.744,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	320.620.172,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	645.221.040,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.916.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.952.676.318,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	694.995.040,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.336.554.462,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.194.377.134,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.540.874,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.069.469.360,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.176.844.128,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.891.296.300,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.876.182.652,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.950.111.774,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	346.256.452,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	5.372.057.408,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.956.114.296,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	584.072.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.554.975.848,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	456.048.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.497.098,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.13 Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.13.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	541.115.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.14 Fasilitas Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya Fasilitas Keprotokolan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.14.0003 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.079.394.124,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0005 Biro Organisasi		
Program	: 4.01.02 PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		
Indikator Hasil	: Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik		
Kegiatan	: 4.01.02.1.01 Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0001 Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0002 Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.01.0003 Penataan Analisis Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.065.792,00	
Kegiatan	: 4.01.02.1.02 Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
Indikator Keluaran	: Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik		
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0001 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.055.892,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0002 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.037.392,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0003 Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.997.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0004 Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.065.492,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.02.1.02.0005 Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.066.192,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		

Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi		
Kegiatan	: 4.01.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.976.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	438.559.188,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.493.140,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.342.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	789.308.052,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.450.000,00	
Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0000 Sekretariat Daerah		
Unit Organisasi	: 4.01.2.23.2.24.01.0007 Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian		
Program	: 4.01.06 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti		
Kegiatan	: 4.01.06.1.01 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.01.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.987.000,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.02 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.865.000,00	
Kegiatan	: 4.01.06.1.03 Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
Sub Kegiatan	: 4.01.06.1.03.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.007.800,00	
Program	: 4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		

Indikator Hasil	: Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		
Kegiatan	: 4.01.07.1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0001 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.970.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0002 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.852.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.875.454.175,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.985.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik		
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0001 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.981.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.02.0002 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
Kegiatan	: 4.01.07.1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		

Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0001 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.996.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0002 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.995.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.07.1.03.0003 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.560.000,00	
Program	: 4.01.08 PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
Indikator Hasil	: Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku		
Kegiatan	: 4.01.08.1.01 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku		
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.01.0001 Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
Kegiatan	: 4.01.08.1.02 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Sub Kegiatan	: 4.01.08.1.02.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
Program	: 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali		
Kegiatan	: 4.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.950.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.386.246.936,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	629.246.900,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.464.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	284.960.000,00	
Kegiatan	: 4.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	543.480.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.950.000,00	
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD		
Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD		
Program	: 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
Indikator Hasil	: Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)		
Kegiatan	: 4.02.02.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.931.295.420,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0002 Pembahasan Rancangan Perda		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.090.198.230,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	926.795.510,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran		
Indikator Keluaran	: Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.765.207.192,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.685.902.010,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0003 Pembahasan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.839.257.410,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0004 Pembahasan Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.702.591.710,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.812.628.310,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.602.197.714,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.599.763.250,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.786.622.980,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.684.155.020,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.665.224.500,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.285.481.230,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.872.166.400,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	730.186.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.477.743.520,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.318.303.470,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.810.849.012,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.076.800,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.05.0003 Pelaksanaan Reses		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.222.107.320,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	862.378.564,00	
Kegiatan	: 4.02.02.1.08 Fasilitasi Tugas DPRD		

Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.648.671.930,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	507.423.720,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.02.1.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.688.751.700,00	
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)		
Kegiatan	: 4.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.165.710,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	307.463.410,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	13.761.340.678,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	121.140.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	155.478.410,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.841.510,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.070.300,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.016.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.834.120.446,00	

Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.631.600,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.320.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.802.329.336,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.600.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.234.375.500,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.700.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	380.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.677.324.042,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.756.238,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.015.661.300,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.388.884.912,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.040.000,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		

Indikator Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	59.732.867.624,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.694.242.500,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.618.510,00	
Kegiatan	: 4.02.01.1.16 Layanan Administrasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD		
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.444.240,00	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.1.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	932.320.400,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 5.01 PERENCANAAN		
Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
Program	: 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku		
Kegiatan	: 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaaan Pembangunan Daerah Provinsi		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.497.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	164.767.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.01.0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.558.970.642,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	522.329.832,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.02.0004 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.109.200,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	274.355.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	582.461.632,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.03.0004 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.556.800,00	
Kegiatan	: 5.01.02.1.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data SIPD		
Sub Kegiatan	: 5.01.02.1.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.369.700,00	
Program	: 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Kegiatan	: 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.314.520,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.194.510,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.847.622,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.219.112,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	240.081.022,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.211.812,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.873.110,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.409.620,00	
Kegiatan	: 5.01.03.1.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan		
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	326.252.960,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.929.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.012.150,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.913.600,00	
Program	: 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.981.114,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.474.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.444.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.221.600,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	16.307.950.481,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.934.150,00	

Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	128.225.512,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.810,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.046.592,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	643.741.640,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	129.063.004,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.119.210,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.183.410,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.255.410,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	734.696.410,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	361.989.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.155.092,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.616.910,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	197.266.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	726.775.182,00	
Kegiatan	: 5.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	771.388.362,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.660.410,00	
Sub Kegiatan	: 5.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	346.066.492,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.714.616.000,00	
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN		
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		

Indikator Hasil	: Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu		
Kegiatan	: 5.02.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.287.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.110.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.764.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.456.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.089.801.740,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	674.584.700,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0002 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.119.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0003 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.846.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0004 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.127.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	194.972.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0008 Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.929.000,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan perbendaharaan disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.03.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.999.800,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.600.306,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.04.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.404.400,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.05 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.026.843.633,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	205.265.185.944,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA		
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	151.187.931.213,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.05.0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.4	BELANJA TRANSFER		
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	582.188.016.684,00	
Kegiatan	: 5.02.02.1.06 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan implementasi SIPD		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.06.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.903.500,00	
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah		
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0001 Penyusunan Standar Harga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Standar Harga yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.872.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0003 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	323.449.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.295.156.812,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.487.200,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	20.152.321.982,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.628.432.002,00	

Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.204.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.110.820,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	973.168.040,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.675.840,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.587.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.999.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	127.305.410,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	544.586.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.300.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.089.830,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Mebel yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.520.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.456.710,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.043.777.914,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.546.600,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30.000.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0001 UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Program	: 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah		
Kegiatan	: 5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.02.03.1.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.748.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.449.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.485.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.271.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.525.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.260.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.690.444,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Program	: 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina		
Sub Kegiatan	: 5.02.02.1.02.0001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.008.900,00	
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		

Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase capaian PAD terhadap target PAD		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	238.541.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.290.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.625.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0012 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.095.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0013 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.120.000,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.721.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.941.200,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	140.528.140.151,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	303.600.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.039.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	318.006.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.575.894,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.960.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.428.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	483.325.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	226.733.625,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	970.874.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.636.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.159.660,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.095.522.864,00	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.749.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.148.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.433.104,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	420.453.373,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.469.592,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.609.652,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	839.934.430,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	571.794.960,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	712.457.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.538.973,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0001 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng		

Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.753.359.942,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.377.516,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.259.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.216.140,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.239.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.854.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.789.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	261.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.714.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.180.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	643.353.314,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.723.800,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0002 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	360.859.772,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	671.186.002,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.664.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.248.420,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.691.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.775.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.491.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		

Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.703.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	154.708.392,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.020.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	430.385.464,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.625.800,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		

Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0003 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.620.592,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	498.676.002,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.949.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.866.890,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.783.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.285.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.855.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	225.937.992,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.460.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.098.428,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.250.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0004 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		

Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.140.725.352,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	665.703.576,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.037.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	133.993.390,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.186.050,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.840.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.575.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.120.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	378.000.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	437.230.947,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.265.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.338.992,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	664.194.297,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.840.000,00	

Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0005 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.609.200.078,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	490.087.084,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.435.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.920.870,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.122.194,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.536.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.424.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.875.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.365.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.491.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.550.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	391.923.894,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.895.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	203.989.104,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.040.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.906.893,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.026.900,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0006 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.154.773.644,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.206.150,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.931.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.966.580,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.718.634,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.463.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.212.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.375.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.826.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.497.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.300.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	551.731.412,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.020.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0007 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	492.786.822,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	594.342.232,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.009.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.788.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.399.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.250.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.975.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.789.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	359.849.487,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.995.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.518.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.176.002,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.099.200,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0008 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	440.509.592,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	463.615.756,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.660.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.050.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.280.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.674.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.325.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.835.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.991.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.390.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.464.134,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.560.000,00	
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0000 Badan Pendapatan Daerah		
Unit Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.03.0009 UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem		
Program	: 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah		
Kegiatan	: 5.02.04.1.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)		
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0008 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	491.616.002,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.04.1.01.0010 Penagihan Pajak Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	458.820.592,00	
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai evaluasi manajemen kinerja		
Kegiatan	: 5.02.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi umum yang tersedia		

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.827.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.245.980,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.837.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.182.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	

Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.410.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.000.000,00	
Kegiatan	: 5.02.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.490.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.835.592,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.843.542,00	
Sub Kegiatan	: 5.02.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.020.500,00	
Bidang Urusan	: 5.03 KEPEGAWAIAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Instansi		
Kegiatan	: 5.03.02.1.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.830.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0003 Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	890.904.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.584.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.033.410,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.750.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.203.012,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.02 Mutasi dan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.793.110,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.543.410,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.454.410,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.730.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.587.606.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.248.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.244.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.600.410,00	
Kegiatan	: 5.03.02.1.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.185.902,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.577.100,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.870.702,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	136.347.902,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.684.700,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.646.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.074.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.020.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	31.255.280.353,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.800.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.762.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.768.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.079.034,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.503.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.137.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	290.593.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		

Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	575.633.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.386.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	253.600.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	867.129.578,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	996.648.320,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.731.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117.700.000,00	
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0001 UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai		
Program	: 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Indeks Profesionalitas ASN Instansi		
Kegiatan	: 5.03.02.1.03 Pengembangan Kompetensi ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN		
Sub Kegiatan	: 5.03.02.1.03.0002 Pengelolaan Assessment Center		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.598.227.300,00	
Program	: 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.361.800,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.298.000,00	

Kegiatan	: 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.550.000,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.398.952,00	
Kegiatan	: 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.656.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.660.000,00	
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0002 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia		
Kegiatan	: 5.03.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia		
Sub Kegiatan	: 5.03.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
Indikator Keluaran	: Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	700.000.000,00	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	
Bidang Urusan	: 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Unit Organisasi	: 5.03.5.04.0.00.02.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Program	: 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Indikator Hasil	: Persentase ASN yang lulus Pengembangan SDM berbasis Kompetensi		
Kegiatan	: 5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah jenis kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0001 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.191.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0002 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.898.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	499.545.492,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0004 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.566.500,00	

Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.950.910,00	
Sub Kegiatan	: 5.04.02.1.02.0008 Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.678.000,00	
Bidang Urusan	: 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Unit Organisasi	: 5.05.0.00.0.00.01.0000 Badan Riset dan Inovasi Daerah		
Program	: 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		
Indikator Hasil	: Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan		
Kegiatan	: 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0002 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0008 Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	386.742.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	227.852.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Indikator Keluaran	: Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	975.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0006 Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.365.900,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.02.1.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	
Program	: 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 5.05.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.01	Belanja Pegawai	11.225.206.527,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.800.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.938.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	198.905.500,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	107.436.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.180.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.998.700,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.024.000,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	419.204.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	465.615.240,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.992.600,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.200.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	341.506.444,00	
Kegiatan	: 5.05.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	795.794.806,00	
Sub Kegiatan	: 5.05.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.100.582.562,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.945.000,00	
Bidang Urusan	: 5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung		
Unit Organisasi	: 5.07.0.00.0.00.01.0000 Badan Penghubung		
Program	: 5.07.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		
Indikator Hasil	: Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta		
Kegiatan	: 5.07.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Indikator Keluaran	: Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung		
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0001 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.309.700,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.618.787,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0004 Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	314.769.196,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.02.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.485.776.784,00	
Program	: 5.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung)		
Kegiatan	: 5.07.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.999.300,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	3.056.488.696,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.550.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.989.400,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.981.200,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.499.300,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.171.000,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	229.503.420,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.989.100,00	

Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	306.800.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.159.107.136,00	
Kegiatan	: 5.07.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: -		
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.332.537.868,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	175.164.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.179.000,00	
Sub Kegiatan	: 5.07.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	141.769.196,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
Bidang Urusan	: 6.01 INSPEKTORAT DAERAH		
Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		

Unit Organisasi	: 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat		
Program	: 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota		
Kegiatan	: 6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.768.384,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	254.791.784,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0003 Reviu Laporan Kinerja		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.999.500,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0004 Reviu Laporan Keuangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	252.391.492,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0005 Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.768.184,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0006 Kerjasama Pengawasan Internal		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM

5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449.960.300,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.768.484,00	
Kegiatan	: 6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu		
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	114.768.684,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.02.1.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	912.792.776,00	
Program	: 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
Indikator Hasil	: Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan		
Kegiatan	: 6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	394.509.276,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		

Indikator Keluaran	: Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.241.952,00	
Kegiatan	: 6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asistensi		
Indikator Keluaran	: Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan		
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.141.676,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	169.988.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	494.364.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.03.1.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
Indikator Keluaran	: Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.996.400,00	
Program	: 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 6.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	26.261.979.033,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase layanan administrasi yang terpenuhi		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.999.400,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.109.394,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.070.300,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.140.800,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	849.995.000,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.709.720.040,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

Indikator Keluaran	: Persentase jasa penunjang yang terpenuhi		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.092.900,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.500.000,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	309.560.560,00	
Kegiatan	: 6.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase barang milik daerah yang terpelihara		
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.621.453.428,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	131.952.212,00	
Sub Kegiatan	: 6.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	224.762.984,00	

BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
Bidang Urusan	: 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Unit Organisasi	: 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
Program	: 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
Indikator Hasil	: Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila		
Kegiatan	: 8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.196.846.794,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.02.1.01.0012 Pembentukan Paskibraka		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paskibraka		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.535.199.600,00	
Program	: 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
Indikator Hasil	: Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik		
Kegiatan	: 8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.03.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.187.294,00	
5.1.05	Belanja Hibah	23.841.580.000,00	

Program	: 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
Indikator Hasil	: Persentase Ormas yang terdata		
Kegiatan	: 8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.04.1.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	381.089.000,00	
5.1.05	Belanja Hibah	300.000.000,00	
Program	: 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
Indikator Hasil	: Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah		
Kegiatan	: 8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.05.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	549.045.322,00	
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	
Program	: 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		
Indikator Hasil	: Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial		
Kegiatan	: 8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	676.176.212,00	

Sub Kegiatan	: 8.01.06.1.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	999.999.700,00	
Program	: 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
Indikator Hasil	: Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		
Kegiatan	: 8.01.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.164.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Indikator Keluaran	: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.01	Belanja Pegawai	9.939.115.243,00	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.900.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.921.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.977.300,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.229.424,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.880.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.996.100,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.759.000,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah		

Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.401.500,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.2	BELANJA MODAL		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	416.922.740,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.994.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	916.019.544,00	
Kegiatan	: 8.01.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah laporan barang milik daerah terpelihara		
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Indikator Keluaran	: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		

5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	790.100.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.960.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.981.800,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.880.000,00	
PEMBIAYAAN DAERAH			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.201.125.499.578,20	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.201.125.499.578,20	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	401.464.808.088,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	158.000.000.000,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	243.464.808.088,00	

Pi. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IV

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN
PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 16 - 18 tahun	100 Persen							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	93.50 Indeks 98.50 Indeks 88.50 Indeks 75.00 Nilai 60.75 Nilai							
1	1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)									
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	8 Unit	0,00	68.000.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula									
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang	0,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket	0,00	1.980.000.000,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	0,00	382.366.000,00	0,00	0,00	382.366.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA
5	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta didik	4.704.150.000,00	0,00	0,00	0,00	4.704.150.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
6	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	950 Peserta Didik	2.782.735.000,00	0,00	0,00	0,00	2.782.735.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1249 Orang	31.956.434.118,00	0,00	0,00	0,00	31.956.434.118,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
8	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
9	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	155 Satuan Pendidikan	162.820.000,00	0,00	0,00	0,00	162.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-SMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	156 Satuan Pendidikan	128.835.148.792,00	32.855.981.208,00	0,00	0,00	161.691.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler
11	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas									
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	90 Orang	57.409.900,00	0,00	0,00	0,00	57.409.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	85.899.900,00	0,00	0,00	0,00	85.899.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	44.690.000,00	0,00	0,00	0,00	44.690.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru									
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Ruang	0,00	8.871.116.400,00	0,00	0,00	8.871.116.400,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
15	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900 Orang	104.996.800,00	0,00	0,00	0,00	104.996.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
16	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	90 Satuan Pendidikan	9.312.128.200,00	2.715.508.800,00	0,00	0,00	12.027.637.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Kebinekaan SMK Indeks Inklusivitas SMK Rerata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rerata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	93.00 Indeks 97.00 Indeks 85.50 Indeks 69.55 Nilai 56.85 Nilai 79.50 Persen 90.85 Persen							
17	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	0,00	22.212.384.000,00	0,00	0,00	22.212.384.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
18	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	0,00	11.150.616.000,00	0,00	0,00	11.150.616.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
19	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah									
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5 Paket	7.022.700,00	3.907.903.200,00	0,00	0,00	3.914.925.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
20	1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	32 Paket	21.712.000.000,00	25.658.185.000,00	0,00	0,00	47.370.185.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengusan-SMK
21	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	360 Peserta didik	5.393.781.500,00	0,00	0,00	0,00	5.393.781.500,00	Kab. Buleleng, Kubutambahan, Kubutambahan	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
22	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	680 Peserta Didik	2.955.825.000,00	0,00	0,00	0,00	2.955.825.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
23	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1325 Orang	20.272.868.244,00	0,00	0,00	0,00	20.272.868.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
24	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
25	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	172 Satuan Pendidikan	522.432.000,00	0,00	0,00	0,00	522.432.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Pengembangan-SMK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
26	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	175 Satuan Pendidikan	155.073.974.318,00	25.455.875.682,00	0,00	0,00	180.529.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler
27	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan									
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	172 Orang	64.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
28	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	56.800.000,00	0,00	0,00	0,00	56.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
29	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	112.160.000,00	0,00	0,00	0,00	112.160.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
30	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	10 Ruang	0,00	4.012.000.000,00	0,00	0,00	4.012.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
31	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	58 Satuan Pendidikan	2.189.441.560,00	7.022.098.320,00	0,00	0,00	9.211.539.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
32	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan									
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	900 Orang	104.628.200,00	0,00	0,00	0,00	104.628.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Indeks Inklusivitas SDLB Indeks Inklusivitas SMALB Indeks Inklusivitas SMPLB Rerata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	93.50 Indeks 93.25 Indeks 93.50 Indeks 98.50 Indeks 93.25 Indeks 88.70 Indeks 92.50 Indeks 98.50 Indeks 89.50 Indeks 73.50 Nilai 77.50 Nilai 77.75 Nilai 62.00 Nilai 70.00 Nilai 67.00 Nilai							
33	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	0,00	1.880.000.000,00	0,00	0,00	1.880.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuwangi Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sidakarya	Dana Bagi Hasil (DBH)
34	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus									
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2337 Peserta Didik	3.533.566.200,00	0,00	0,00	0,00	3.533.566.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
35	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.593.966.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593.966.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
36	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	149 Orang	4.649.915.980,00	0,00	0,00	0,00	4.649.915.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
37	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus									
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	306.611.500,00	594.364.800,00	0,00	0,00	900.976.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
38	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus									
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	14 Satuan Pendidikan	9.101.236.090,00	1.707.273.910,00	0,00	0,00	10.808.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOS Reguler
39	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	60 Orang	15.547.600,00	0,00	0,00	0,00	15.547.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
40	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	14 Dokumen	138.370.000,00	0,00	0,00	0,00	138.370.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
41	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan									
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	14 Dokumen	16.171.600,00	0,00	0,00	0,00	16.171.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
42	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah									
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	758.000.000,00	1.220.000.000,00	0,00	0,00	1.978.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
43	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14 Satuan Pendidikan	362.880.000,00	0,00	0,00	0,00	362.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Nilai Prestasi Kinerja (NPK) Pendidik dan Tenaga Kependidikan minimal baik	100 Persen							
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Rasio ketersediaan Guru dalam kondisi ideal	66.5 Persen							
44	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Dokumen	39.999.400,00	0,00	0,00	0,00	39.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Laporan	39.999.700,00	0,00	0,00	0,00	39.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai							
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun dengan baik serta tepat waktu	8 Dokumen							
46	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	150.331.500,00	0,00	0,00	0,00	150.331.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
47	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	169.524.400,00	0,00	0,00	0,00	169.524.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan keuangan yang disusun dengan baik dan tepat waktu	59 Laporan							
48	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10680 Orang/Bulan	1.317.702.881.213,00	0,00	0,00	0,00	1.317.702.881.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	1.284.575.800,00	0,00	0,00	0,00	1.284.575.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
50	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60 Dokumen	249.856.500,00	0,00	0,00	0,00	249.856.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	4 Jenis							
51	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	766.145.000,00	0,00	0,00	0,00	766.145.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase administrasi pegawai yang dilayani dengan baik	100 Persen							
52	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	68.193.400,00	0,00	0,00	0,00	68.193.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen							
53	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	47 Paket	280.771.880,00	186.943.680,00	0,00	0,00	467.715.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
54	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
55	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.840.000,00	0,00	0,00	0,00	10.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
56	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	31.526.250,00	0,00	0,00	0,00	31.526.250,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
57	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	608.350.000,00	0,00	0,00	0,00	608.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen							
58	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	978.222.150,00	0,00	0,00	0,00	978.222.150,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
59	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.869.139.322,00	0,00	0,00	0,00	8.869.139.322,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	954.685.000,00	0,00	0,00	0,00	954.685.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
61	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.677.200.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1.977.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
62	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	268.530.000,00	0,00	0,00	0,00	268.530.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	72 Persen							
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah pemuda yang berprestasi	91 Orang							
63	2.19.02.1.01.0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda									
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	75 Orang	648.324.000,00	0,00	0,00	0,00	648.324.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
64	2.19.02.1.01.0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	1 Dokumen	199.999.900,00	0,00	0,00	0,00	199.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
65	2.19.02.1.01.0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi									
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	100 Persentase	199.900.000,00	0,00	0,00	0,00	199.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
66	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi									
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	90 Orang	788.299.500,00	0,00	0,00	0,00	788.299.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
67	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi									
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	90 Orang	113.475.000,00	0,00	0,00	0,00	113.475.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi	50.50 Persen							
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan	5 Kejuaraan							
68	2.19.03.1.02.0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga									
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	250 Orang	15.818.328.500,00	5.268.000,00	0,00	0,00	15.823.596.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
69	2.19.03.1.02.0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi									
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	5 Kegiatan	8.190.429.632,00	62.106.500,00	0,00	0,00	8.252.536.132,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional, regional dan internasional	180 Orang							
70	2.19.03.1.03.0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi									
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	351.400.000,00	0,00	0,00	0,00	351.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang telah dibina dan dikembangkan	59 Organisasi							
71	2.19.03.1.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait									
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	1 Dokumen	60.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemuda yang aktif dalam Organisasi Kepramukaan	53 Persen							
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase anggota Pramuka yang aktif pada Satuan Karya Pramuka	53 Persen							
72	2.19.04.1.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi									
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1 Laporan	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK	80.00 Persen							
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah sekolah menengah atas yang menerapkan layanan berbasis TIK	90 Sekolah							
73	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	720 Orang	101.970.000,00	0,00	0,00	0,00	101.970.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	12 Konten Digital	52.774.000,00	0,00	0,00	0,00	52.774.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
75	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	130 Orang	37.908.000,00	0,00	0,00	0,00	37.908.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
76	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	91 Satuan Pendidikan	562.961.000,00	0,00	0,00	0,00	562.961.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah sekolah menengah kejuruan yang menerapkan layanan berbasis TIK	58 Sekolah							
77	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	600 Orang	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
78	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan									
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	10 Konten Digital	40.386.000,00	0,00	0,00	0,00	40.386.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
79	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan									
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	120 Orang	37.646.000,00	0,00	0,00	0,00	37.646.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik									
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	59 Satuan Pendidikan	369.991.000,00	0,00	0,00	0,00	369.991.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai							
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah	100 Persen							
81	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	51.355.900,00	88.806.600,00	0,00	0,00	140.162.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
82	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.499.600,00	0,00	0,00	0,00	3.499.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
83	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	49.994.000,00	0,00	0,00	0,00	49.994.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 Persen							
84	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	755.752.266,00	0,00	0,00	0,00	755.752.266,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	98.400.000,00	0,00	0,00	0,00	98.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
86	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
87	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase pemahaman Peserta Didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal	60.25 Persen							
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum muatan lokal pendidikan menengah	1 Kurikulum							
88	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	72 Orang	87.100.800,00	0,00	0,00	0,00	87.100.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan khusus yang ditetapkan	1 Kurikulum							
89	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus									
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	20 Orang	39.663.300,00	0,00	0,00	0,00	39.663.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Nilai rata-rata bahasa Bali pada satuan pendidikan	70.60 Nilai							
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan bahasa, aksara dan kesusastraan Bali	87.30 Persen							
90	1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	225 Peserta Didik	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81.75 Nilai							
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen							
91	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.613.000,00	0,00	0,00	0,00	8.613.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
92	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.547.600,00	0,00	0,00	0,00	6.547.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
93	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26.946.000,00	0,00	0,00	0,00	26.946.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase layanan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 Persen							
94	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	541.397.642,00	0,00	0,00	0,00	541.397.642,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia tepat waktu	100 Persen							
95	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	90.810.000,00	0,00	0,00	0,00	90.810.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kesehatan									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Faskes yang Terakreditasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persentase Desa UCI Cakupan Kepesertaan JKN	100 Persen 89 Nilai 96 Persen 97 Persen 98,3 Persen							
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Masyarakat yang terlayani sesuai Standar Pelayanan Minimal	100 Persen							
96	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana									
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	4380824 Orang	267.525.580,00	0,00	0,00	0,00	267.525.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
97	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)									
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	130000 Orang	141.542.800,00	0,00	0,00	0,00	141.542.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	288.757.730,00	0,00	0,00	0,00	288.757.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok
99	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	174.231.520,00	0,00	0,00	0,00	174.231.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
100	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	270.631.520,00	0,00	0,00	0,00	270.631.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
101	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	138.072.600,00	0,00	0,00	0,00	138.072.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
102	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	140.026.492,00	0,00	0,00	0,00	140.026.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
103	1.02.02.1.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	2.536.062.498,00	0,00	0,00	0,00	2.536.062.498,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok
104	1.02.02.1.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	53.127.000,00	0,00	0,00	0,00	53.127.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
105	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	24.665.908.700,00	0,00	0,00	0,00	24.665.908.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok
106	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	112.280.000,00	0,00	0,00	0,00	112.280.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi
107	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	322.771.520,00	0,00	0,00	0,00	322.771.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok
108	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen	115.867.600,00	0,00	0,00	0,00	115.867.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
109	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional									
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	150 Paket	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan e-Kesehatan melalui Komunikasi Data Terintegrasi	77 persen							
110	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	105.464.110,00	0,00	0,00	0,00	105.464.110,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	100 Persen							
111	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	25 Unit	150.356.540,00	0,00	0,00	0,00	150.356.540,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
112	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	196 Unit	147.759.680,00	0,00	0,00	0,00	147.759.680,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar Ketersediaan Tenaga Kesehatan	76 Persen							
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKM dan UKP Provinsi Sesuai Kebutuhan	100 persen							
113	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	29000 Orang	201.448.460,00	0,00	0,00	0,00	201.448.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kelulusan Tenaga Kesehatan Tingkat yang mengikuti uji kompetensi	90 persen							
114	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	200 Orang	84.590.000,00	0,00	0,00	0,00	84.590.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
115	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	99.999.400,00	0,00	0,00	0,00	99.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial	86 Persen							
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	100 persen							
116	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK									
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Perizinan	40 Sarana	250.153.570,00	0,00	0,00	0,00	250.153.570,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	100 Persen							
117	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional									
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindakanlanjutan Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	20 Sarana	139.106.400,00	0,00	0,00	0,00	139.106.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kabupaten/Kota yang Mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	66,67 Persen							
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya dukungan kerjasama mitra potensial/lintas sektor	1 Mitra Potensial							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	535.451.330,00	0,00	0,00	0,00	535.451.330,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah kabupaten/kota yang 80% Rumah Tangganya melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	7 Kabupaten/Kota							
119	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat									
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota dengan minimal 80% posyandu aktif	77,78 Persen							
120	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM									
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai							
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	7 Dokumen							
121	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	205.158.900,00	0,00	0,00	0,00	205.158.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
122	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	130.876.110,00	0,00	0,00	0,00	130.876.110,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan sesuai SOP	100 Persen							
123	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1705 Orang/ Bulan	298.716.634.158,00	0,00	0,00	0,00	298.716.634.158,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangan	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
124	1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	194.282.014,00	0,00	0,00	0,00	194.282.014,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen							
125	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.583.700,00	0,00	0,00	0,00	8.583.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
126	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	261.268.500,00	808.482.700,00	0,00	0,00	1.069.751.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
127	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	273.968.394,00	0,00	0,00	0,00	273.968.394,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	77.170.300,00	0,00	0,00	0,00	77.170.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
129	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
130	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	188.318.000,00	0,00	0,00	0,00	188.318.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen							
131	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	484.500.000,00	0,00	0,00	0,00	484.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
132	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.894.558.346,00	0,00	0,00	0,00	5.894.558.346,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai SOP	100 Persen							
133	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	44 Unit	515.400.000,00	0,00	0,00	0,00	515.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
134	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	81.769.500,00	0,00	0,00	0,00	81.769.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
135	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	893.602.000,00	0,00	0,00	0,00	893.602.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Kelulusan Peserta Pelatihan Tenaga Kesehatan	100 persen							
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peserta pelatihan yang lulus sesuai standar	100 persen							
136	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	150 Orang	369.183.034,00	0,00	0,00	0,00	369.183.034,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Pajak Rokok
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai							
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen							
137	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.924.000,00	0,00	0,00	0,00	17.924.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
138	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.316.000,00	127.268.400,00	0,00	0,00	128.584.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
139	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	155.458.100,00	0,00	0,00	0,00	155.458.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
140	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.134.000,00	0,00	0,00	0,00	6.134.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
141	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 persen							
142	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	363.900.000,00	0,00	0,00	0,00	363.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
143	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	810.685.512,00	0,00	0,00	0,00	810.685.512,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 Persen							
144	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	39.175.000,00	0,00	0,00	0,00	39.175.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
145	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	56.520.000,00	0,00	0,00	0,00	56.520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
146	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Bapelkesmas	82 Nilai							
147	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.755.300.000,00	244.700.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	Pendapatan dari BLUD
		UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase tersedianya pemeliharaan alat kesehatan sesuai standar	70 Persen							
148	1.02.02.1.01.0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center									
			Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	1 Unit	292.517.120,00	0,00	0,00	0,00	292.517.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pajak Rokok
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai							
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 Persen							
149	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	45.900.000,00	36.995.200,00	0,00	0,00	82.895.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
150	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	410.045.300,00	0,00	0,00	0,00	410.045.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 persen							
151	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	644.000.000,00	0,00	0,00	0,00	644.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
152	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	1.102.835.086,00	0,00	0,00	0,00	1.102.835.086,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 persen							
153	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	108.100.000,00	0,00	0,00	0,00	108.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
154	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	144.270.000,00	0,00	0,00	0,00	144.270.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
155	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	93.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali	82 Nilai							
156	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.985.932.983,00	970.146.000,00	0,00	0,00	6.956.078.983,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan dari BLUD
		UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kunjungan pelayanan kesehatan tradisional dan olah raga	3 persen							
157	1.02.02.1.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	122.080.400,00	0,00	0,00	0,00	122.080.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Rokok
158	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	158.690.210,00	0,00	0,00	0,00	158.690.210,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Rokok
159	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1.017.847.192,00	0,00	0,00	0,00	1.017.847.192,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Rokok
160	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)									
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1.794.227.018,00	0,00	0,00	0,00	1.794.227.018,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	Pajak Rokok
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai							
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 persen							
161	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.015.500,00	0,00	0,00	0,00	5.015.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
162	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	29.703.300,00	622.076.720,00	0,00	0,00	651.780.020,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	202.695.800,00	0,00	0,00	0,00	202.695.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
164	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	19.790.800,00	0,00	0,00	0,00	19.790.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
165	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
166	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	34.358.000,00	0,00	0,00	0,00	34.358.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen							
167	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98.500.000,00	0,00	0,00	0,00	98.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
168	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	988.375.510,00	0,00	0,00	0,00	988.375.510,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 persen							
169	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	263.900.000,00	0,00	0,00	0,00	263.900.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
170	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	50.690.000,00	0,00	0,00	0,00	50.690.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
171	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	498.839.940,00	660.665.000,00	0,00	0,00	1.159.504.940,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		RSUD Bali Mandara									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Laporan							
172	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan									
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	0,00	45.978.212.000,00	0,00	0,00	45.978.212.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Pengutan Sistem Kesehatan Pajak Rokok
173	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit									
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	0,00	8.277.374.205,00	0,00	0,00	8.277.374.205,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur	Pajak Rokok
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen							
174	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	30.686.107.309,00	0,00	0,00	0,00	30.686.107.309,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di RSUD Bali Mandara	82 Nilai							
175	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	170.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sanur Kauh	Pendapatan dari BLUD
		Rumah Sakit Jiwa									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	89 Nilai							
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit	1 Laporan							
176	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit									
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	73.944.700,00	16.603.149.570,00	0,00	0,00	16.677.094.270,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan Pajak Rokok
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai							
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.114.110.402,00	0,00	0,00	0,00	1.114.110.402,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
178	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.790.288.206,00	0,00	0,00	0,00	10.790.288.206,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Jiwa	82 Nilai							
179	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	24.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan dari BLUD
		Rumah Sakit Mata Bali Mandara									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan di BLUD	82 Nilai							
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Masyarakat di Rumah Sakit Mata Bali Mandara	82 Nilai							
180	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	81.218.160.000,00	8.781.840.000,00	0,00	0,00	90.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Pendapatan dari BLUD
		UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	89 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Laporan pengadaan sediaan farmasi, bahan laboratorium, dan alkes yang diadakan	1 Laporan							
181	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	360.783.000,00	0,00	0,00	0,00	360.783.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Rokok
182	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan									
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	4.490.490.960,00	0,00	0,00	0,00	4.490.490.960,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Provinsi Pajak Rokok
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah produk obat dan bahan obat tradisional yang diproduksi	9 Produk							
183	1.02.02.1.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	2 Dokumen	1.140.277.494,00	38.498.300,00	0,00	0,00	1.178.775.794,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Rokok
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5 Nilai							
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum sesuai SOP	100 persen							
184	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.575.400,00	0,00	0,00	0,00	11.575.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
185	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	40.279.580,00	212.009.720,00	0,00	0,00	252.289.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
186	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	408.786.200,00	0,00	0,00	0,00	408.786.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
187	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.970.300,00	0,00	0,00	0,00	3.970.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
188	1.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	11.700.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
189	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	53.836.000,00	0,00	0,00	0,00	53.836.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai SOP	100 Persen							
190	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	56.126.200,00	0,00	0,00	56.126.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
191	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	850.000.000,00	0,00	0,00	850.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai SOP	100 persen							
192	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.082.000,00	0,00	0,00	0,00	5.082.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
193	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	780.000.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
194	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	1.113.439.612,00	0,00	0,00	0,00	1.113.439.612,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah sesuai SOP	100 persen							
195	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
196	1.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	59 Unit	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit	532.441.100,00	0,00	0,00	0,00	532.441.100,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
198	1.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	492.000.000,00	0,00	0,00	0,00	492.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Pengotan Kab. Karangasem, Rendang, Rendang Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Peralatan dan Pengujian									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pelaku jasa konstruksi yang bersertifikat	25.9 Persen							
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang- undangan jasa konstruksi	4 Kegiatan							
199	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	12 Paket Pekerjaan	855.776.610,00	2.018.000.000,00	0,00	0,00	2.873.776.610,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja UPTD Balai Pengujian dan Peralatan	85 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
200	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11.782.000,00	0,00	0,00	0,00	11.782.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
201	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	20.930.200,00	0,00	0,00	0,00	20.930.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
202	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
203	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.638.700,00	0,00	0,00	0,00	4.638.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
204	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.446.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
205	1.03.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
206	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	11.520.000,00	0,00	0,00	0,00	11.520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan							
207	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	65 Paket	0,00	70.010.800,00	0,00	0,00	70.010.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
208	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	51.126.400,00	0,00	0,00	51.126.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun							
209	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
210	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
211	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan daerah provinsi	1 Tahun							
212	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	329.075.880,00	0,00	0,00	0,00	329.075.880,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	23.960.000,00	0,00	0,00	0,00	23.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
214	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	349.521.050,00	0,00	0,00	0,00	349.521.050,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Ubung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Air Minum									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95,5 %							
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan	5 Unit							
215	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)									
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	5 Unit	33.763.210.452,00	7.506.500.000,00	0,00	0,00	41.269.710.452,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD
		UPTD Pengelolaan Air Limbah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase responden yang puas terhadap pelayanan pengelolaan air limbah	100 %							
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Beroperasi dan Terpelihara	1 SPALD							
216	1.03.05.1.01.0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	1 Unit	12.076.373.000,00	2.360.000.000,00	0,00	0,00	14.436.373.000,00	Kab. Badung, Kuta, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan dari BLUD
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	48,74 %							
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang tertangani	6 Unit							
217	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai									
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
218	1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.215 KM	228.593.500,00	0,00	0,00	0,00	228.593.500,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
219	1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya									
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,16 KM	40.000.000,00	5.270.000.000,00	0,00	0,00	5.310.000.000,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
220	1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 Unit	319.833.300,00	15.000.000,00	0,00	0,00	334.833.300,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
221	1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya									
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
222	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2 Dokumen	16.004.200,00	199.992.000,00	0,00	0,00	215.996.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
223	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai									
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	33.429.800,00	651.348.420,00	0,00	0,00	684.778.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Irigasi yang meningkat kondisi dan kapasitas layanannya	14 D.I							
224	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Total			
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4,981 KM	259.707.430,00	14.917.923.400,00	0,00	0,00	15.177.630.830,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
225	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan											
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	172.972 KM	3.827.973.634,00	0,00	0,00	0,00	3.827.973.634,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
226	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa											

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	7 Dokumen	1.113.317.870,00	599.450.000,00	0,00	0,00	1.712.767.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase cakupan layanan Air Minum Layak	95.5 %								
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas layanan SPAM	5 SPAM								
227	1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	3 Dokumen	1.868.839.454,00	0,00	0,00	0,00	1.868.839.454,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
228	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota									
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	15 Liter/Detik	50.009.100,00	29.515.550.155,00	0,00	0,00	29.565.559.255,00	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase cakupan layanan Air Limbah Layak	92 %							
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah Rumah Tangga yang terlayani Sistem Pengelolaan Air Limbah DomestikTerpusat	300 Rumah Tangga							
229	1.03.05.1.01.0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	300 Rumah Tangga M ³ /Hari	32.090.000,00	3.150.000.552,00	0,00	0,00	3.182.090.552,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
230	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)									
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	2 Dokumen	58.946.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00	258.946.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan air minum layak	75 %							
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Perluasan SPAM Regional	285 SR							
231	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi									
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	285 SR	2.778.074.300,00	0,00	0,00	0,00	2.778.074.300,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik	76 %							
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi baik	8 Kawasan							
232	1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	6 Kawasan	112.200.785.800,00	14.018.670.000,00	0,00	0,00	126.219.455.800,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
233	1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	387.468.500,00	0,00	0,00	0,00	387.468.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya									
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan	8 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	82.65 %							
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Meningkatnya jalan provinsi dalam kondisi mantap	649,89 Km							
235	1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	0 KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
236	1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	805.35 KM	140.646.000,00	0,00	0,00	0,00	140.646.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
237	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,6 KM	50.400.000,00	14.711.201.205,00	0,00	0,00	14.761.601.205,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
238	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan									
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	11,35 KM	0,00	58.369.753.120,00	0,00	0,00	58.369.753.120,00	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
239	1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	789,32 KM	23.950.874.776,00	400.000.000,00	0,00	0,00	24.350.874.776,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
240	1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan										
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	2,68 KM	3.600.000,00	16.416.193.732,00	0,00	0,00	16.419.793.732,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
241	1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	6,23 KM	555.505.182,00	14.784.229.425,00	0,00	0,00	15.339.734.607,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
242	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	11 Dokumen	1.632.830.000,00	5.169.000.000,00	0,00	0,00	6.801.830.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
243	1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan									
			Panjang Jalan yang Dibangun	- KM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
244	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	805.35 KM	1.839.949.608,00	0,00	0,00	0,00	1.839.949.608,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
245	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-							
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-	-							
246	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli									
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	270 Orang	907.982.222,00	0,00	0,00	0,00	907.982.222,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	0 Kegiatan							
247	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Semua Kel/Desa	[object Object]
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan rapat pembahasan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi	5 Kegiatan							
248	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	15 Paket Pekerjaan	241.619.540,00	0,00	0,00	0,00	241.619.540,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
249	1.03.11.1.03.0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi									
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	277.276.150,00	0,00	0,00	0,00	277.276.150,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase tingkat kinerja penyelenggaraan penataan ruang	94.34 %							
	1.03.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang ditetapkan	1 Perda							
250	1.03.12.1.01.0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang									
			Jumlah publikasi informasi penataan ruang	1 Publikasi	90.705.400,00	0,00	0,00	0,00	90.705.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Raperda RTRW/RRTR Kabupaten/Kota yang dievaluasi	9 Dokumen							
251	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	9 Dokumen	825.581.870,00	0,00	0,00	0,00	825.581.870,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi	1 Dokumen							
252	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Laporan	370.466.750,00	0,00	0,00	0,00	370.466.750,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
253	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	165.510.600,00	0,00	0,00	0,00	165.510.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Bali	2 Dokumen							
254	1.03.12.1.04.0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	371.250.300,00	0,00	0,00	0,00	371.250.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
255	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	314.261.632,00	0,00	0,00	0,00	314.261.632,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	85 Nilai							
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	14 Dokumen							
256	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	373.006.372,00	0,00	0,00	0,00	373.006.372,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
257	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	354.358.232,00	0,00	0,00	0,00	354.358.232,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	178 Orang/Bulan	50.066.016.070,20	0,00	0,00	0,00	50.066.016.070,20	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 % 100 %							
259	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	22.172.600,00	0,00	0,00	0,00	22.172.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
260	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	57.485.000,00	0,00	0,00	0,00	57.485.000,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
261	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.820.120,00	0,00	0,00	0,00	50.820.120,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
262	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.734.000,00	0,00	0,00	0,00	66.734.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
263	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	15.816.000,00	0,00	0,00	0,00	15.816.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
264	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	52.250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	458.880.000,00	0,00	0,00	0,00	458.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 Layanan							
266	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	82.638.800,00	0,00	0,00	82.638.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
267	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	12.960.000,00	449.282.500,00	0,00	0,00	462.242.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	4 Layanan							
268	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	7.190.600,00	0,00	0,00	0,00	7.190.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
269	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	436.600.000,00	0,00	0,00	0,00	436.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	Dana Alokasi Umum (DAU)
270	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Laporan	49.770.000,00	0,00	0,00	0,00	49.770.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
271	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	548.895.440,00	0,00	0,00	0,00	548.895.440,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	3 Layanan							
272	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	1.568.132.460,00	0,00	0,00	0,00	1.568.132.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
273	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	119 Unit	192.696.230,00	0,00	0,00	0,00	192.696.230,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
274	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	756.208.704,00	0,00	0,00	0,00	756.208.704,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana provinsi atau dampak program pemerintah daerah provinsi	100 %							
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah ketersediaan database Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi yang disusun sesuai ketentuan	1 Paket							
275	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	175.149.750,00	0,00	0,00	0,00	175.149.750,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
276	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen	125.033.700,00	0,00	0,00	0,00	125.033.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah rumah layak huni kewenangan provinsi yang dibangun	1 Paket							
277	1.04.02.1.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi									
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1 Unit Rumah	421.690.350,00	1.135.527.580,00	0,00	0,00	1.557.217.930,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya luasan kawasan permukiman kumuh	4.89 %							
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tertanganinya luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	6.77 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	30 Unit Rumah	1.579.678.300,00	0,00	0,00	0,00	1.579.678.300,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
279	1.04.03.1.02.0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha									
			Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	1.98 Ha	1.026.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.320.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase bertambahnya luasan kawasan permukiman yang dilengkapi PSU	71 %							
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Bertambahnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pada Kawasan Permukiman	7.82 %							
280	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	1 Dokumen	15.718.400,00	0,00	0,00	0,00	15.718.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
281	1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman									
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	1 Lokasi	1.301.363.350,00	0,00	0,00	0,00	1.301.363.350,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
282	1.04.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1 Laporan	53.995.000,00	0,00	0,00	0,00	53.995.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Luas Tanah Yang Diberikan Ganti Kerugian untuk Pembangunan	1.23 Ha							
	2.10.05.1.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan							
283	2.10.05.1.01.0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	1 Laporan	75.876.000,00	0,00	0,00	0,00	75.876.000,00	Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah yang terinventarisasi	100 %							
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen redistribusi tanah yang terinventarisasi	1 Dokumen							
284	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	1 Berita Acara	86.847.700,00	0,00	0,00	0,00	86.847.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase data informasi pertanahan yang handal	50 %							
	2.10.10.1.01	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan penggunaan tanah kewenangan provinsi	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	2.10.10.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	1 Laporan	220.004.000,00	0,00	0,00	0,00	220.004.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Satuan Polisi Pamong Praja									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	100 persen							
1.05.02.1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	170 Pelanggaran							
286	1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	73.554.610,00	0,00	0,00	0,00	73.554.610,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
287	1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat									
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Orang	29.999.900,00	0,00	0,00	0,00	29.999.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
288	1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang Tersedia	50 Unit	20.450.348.273,00	0,00	0,00	0,00	20.450.348.273,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
289	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen	367.849.300,00	0,00	0,00	0,00	367.849.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
290	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	19.993.200,00	0,00	0,00	0,00	19.993.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
291	1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
			Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	103.555.110,00	0,00	0,00	0,00	103.555.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
292	1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan									
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	36 laporan	4.955.245.872,00	0,00	0,00	0,00	4.955.245.872,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
293	1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia									
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	192 Orang	349.687.312,00	0,00	0,00	0,00	349.687.312,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti secara yustisi dan non yustisi	195 Kasus							
294	1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	99.999.900,00	0,00	0,00	0,00	99.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
295	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan	1.742.662.038,00	0,00	0,00	0,00	1.742.662.038,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pungutan bagi Wisatawan Asing
296	1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	378.984.820,00	0,00	0,00	0,00	378.984.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pajak Rokok
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	-	-							
297	1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	[object Object]
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.6 Nilai							
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dokumen							
298	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
299	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
300	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/ Bulan	24.998.328.311,00	0,00	0,00	0,00	24.998.328.311,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-							
301	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	[object Object]
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Jenis							
302	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.706.800,00	0,00	0,00	0,00	40.706.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
303	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	52.802.800,00	498.633.800,00	0,00	0,00	551.436.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
304	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	106.033.390,00	0,00	0,00	0,00	106.033.390,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
305	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	12.301.900,00	0,00	0,00	0,00	12.301.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
306	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	147.505.000,00	0,00	0,00	0,00	147.505.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	1 Paket							
307	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	[object Object]
308	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	103.985.300,00	0,00	0,00	103.985.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
309	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	[object Object]
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan							
310	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.998.700,00	0,00	0,00	0,00	2.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Alokasi Umum (DAU)
312	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	48.720.000,00	0,00	0,00	0,00	48.720.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
313	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	923.397.642,00	0,00	0,00	0,00	923.397.642,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan							
314	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	49 Unit	2.841.523.590,00	0,00	0,00	0,00	2.841.523.590,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
315	1.05.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
316	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	100 Persen 3 Persen							
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	9 Kabupaten/Kota							
317	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)									
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	600 Orang	181.668.000,00	0,00	0,00	0,00	181.668.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen							
318	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	441.354.500,00	0,00	0,00	0,00	441.354.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
319	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	70 Orang	69.690.300,00	0,00	0,00	0,00	69.690.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
320	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalikan	1 Dokumen	184.643.000,00	0,00	0,00	0,00	184.643.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
321	1.05.03.1.02.0025	Penyusunan Rencana Kontijensi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	1 Dokumen	158.436.900,00	0,00	0,00	0,00	158.436.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
322	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	80 Orang	283.594.200,00	0,00	0,00	0,00	283.594.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
323	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	145 Keluarga	100.960.000,00	299.191.400,00	0,00	0,00	400.151.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
324	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	145 Orang	490.898.900,00	0,00	0,00	0,00	490.898.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah daerah terpapar bencana yang mendapat respon penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sasaran	9 Kabupate n/Kota							
325	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	900 Orang	752.027.200,00	0,00	0,00	0,00	752.027.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	
326	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	462.156.000,00	0,00	0,00	0,00	462.156.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis								
327	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	2 Dokumen	277.076.400,00	0,00	0,00	0,00	277.076.400,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
328	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	4 Lembaga	28.980.000,00	0,00	0,00	0,00	28.980.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
329	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	30 Orang	180.802.000,00	0,00	0,00	0,00	180.802.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
330	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen	438.317.500,00	0,00	0,00	0,00	438.317.500,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
331	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	76.490.000,00	0,00	0,00	0,00	76.490.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
332	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	9 kabupaten /kota	176.818.100,00	0,00	0,00	0,00	176.818.100,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)	83.35 Persen							
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	100 Persen							
333	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	97.051.000,00	0,00	0,00	0,00	97.051.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
334	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	107.041.000,00	0,00	0,00	0,00	107.041.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							
335	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	15.676.945.478,00	0,00	0,00	0,00	15.676.945.478,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur dengan kelengkapan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah	1 Paket							
336	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	168.104.200,00	0,00	0,00	0,00	168.104.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							
337	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.982.800,00	0,00	0,00	0,00	9.982.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
338	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.047.800,00	0,00	0,00	0,00	116.047.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
339	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	86.229.424,00	0,00	0,00	0,00	86.229.424,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
340	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	20.258.600,00	0,00	0,00	0,00	20.258.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
341	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
342	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	415.742.000,00	0,00	0,00	0,00	415.742.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Renon Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun							
343	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit	20.687.400,00	848.681.700,00	0,00	0,00	869.369.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	258.000.000,00	0,00	0,00	0,00	258.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
345	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.186.386.448,00	0,00	0,00	0,00	1.186.386.448,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun							
346	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit	2.287.969.800,00	0,00	0,00	0,00	2.287.969.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
347	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	22.380.000,00	0,00	0,00	0,00	22.380.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
348	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	100.000.000,00	2.272.000.000,00	0,00	0,00	2.372.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
349	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
350	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 Unit	64.810.000,00	0,00	0,00	0,00	64.810.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		UPTD Pengendalian Bencana Daerah										
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan darurat bencana Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	100 Persen 3 Persen								
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase sumber daya daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana	100 Persen								
351	1.05.03.1.02.0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
			Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Dokumen	953.192.000,00	0,00	0,00	0,00	953.192.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
352	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	70 Orang	212.209.900,00	0,00	0,00	0,00	212.209.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah kapasitas sistem dasar PB Daerah rawan bencana yang tersedia dalam penanggulangan bencana	5 Jenis								
353	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	677.060.000,00	2.772.940.069,00	0,00	0,00	3.450.000.069,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPBD)	83.35 Persen							
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							
354	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.846.800,00	0,00	0,00	0,00	16.846.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
355	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.992.300,00	0,00	0,00	0,00	25.992.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
356	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun							
357	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	106 Unit	24.829.200,00	1.623.900.800,00	0,00	0,00	1.648.730.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan dengan baik, benar, dan tepat waktu	100 Persen							
358	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
359	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.124.078.904,00	0,00	0,00	0,00	1.124.078.904,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun							
360	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	140.800.000,00	0,00	0,00	0,00	140.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
362	1.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	118 Unit	312.657.600,00	0,00	0,00	0,00	312.657.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PMKS	5.45 Persen							
1.06.02.1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase lembaga yang meningkat pemahamannya mengenai kebijakan pengelolaan sumber dana sosial	100 persen							
363	1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	20 Dokumen	3.484.600,00	0,00	0,00	0,00	3.484.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.06.02.1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah masyarakat dan lembaga yang memberikan pendampingan dan bantuan sosial	57 Orang							
364	1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	57 Orang	112.148.500,00	0,00	0,00	0,00	112.148.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100 persen							
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang							
365	1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal									
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	2 Orang	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	19.65 persen							
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah penyandang disabilitas dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	685 Orang							
366	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	55 Orang	28.624.600,00	0,00	0,00	0,00	28.624.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
367	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	20 Orang	30.024.300,00	0,00	0,00	0,00	30.024.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
368	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
369	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	580 Orang	220.000.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	837 Orang							
370	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	722 Orang	403.782.600,00	0,00	0,00	0,00	403.782.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
371	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang	236.941.200,00	0,00	0,00	0,00	236.941.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
372	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	30 Orang	38.120.000,00	0,00	0,00	0,00	38.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	731 Orang							
373	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	321 Orang	203.812.500,00	0,00	0,00	0,00	203.812.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
374	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial									
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	260 Orang	24.500.800,00	0,00	0,00	0,00	24.500.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	50 Orang	44.970.600,00	0,00	0,00	0,00	44.970.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
376	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan									
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	30 Orang	272.890.100,00	0,00	0,00	0,00	272.890.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah gelandangan dan pengemis dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	430 Orang							
377	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	430 Orang	19.999.400,00	0,00	0,00	0,00	19.999.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
378	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal									
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	430 Orang	164.120.000,00	0,00	0,00	0,00	164.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	0.04 persen							
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah pengangkatan anak yang diproses sesuai prosedur	20 orang							
379	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	20 Orang	17.136.600,00	0,00	0,00	0,00	17.136.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	292 keluarga							
380	1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	192 Keluarga	119.791.100,00	0,00	0,00	0,00	119.791.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
381	1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	100 Keluarga	5.640.000,00	0,00	0,00	0,00	5.640.000,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang tertangani	100 persen							
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terfasilitasi	720 Orang							
382	1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi									
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	2 Unit	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
383	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	100 Orang	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
384	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	620 Orang	344.931.800,00	0,00	0,00	0,00	344.931.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Penanganan TMP sesuai standar	100 Persen							
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	1 TMP							
385	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi									
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	898 Makam	309.258.400,00	0,00	0,00	0,00	309.258.400,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Delod Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai							
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase layanan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 persen							
386	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	27.907.600,00	0,00	0,00	0,00	27.907.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
387	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4.952.200,00	0,00	0,00	0,00	4.952.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
388	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.004.800,00	0,00	0,00	0,00	20.004.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 persen							
389	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	148 Orang/ Bulan	20.681.909.121,00	0,00	0,00	0,00	20.681.909.121,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen							
390	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.508.200,00	0,00	0,00	0,00	7.508.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
391	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	79.649.600,00	0,00	0,00	79.649.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
392	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	96.022.700,00	0,00	0,00	0,00	96.022.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
393	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	5.647.200,00	0,00	0,00	0,00	5.647.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
394	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
395	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	172.163.000,00	0,00	0,00	0,00	172.163.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen							
396	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
397	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	488.462.484,00	0,00	0,00	0,00	488.462.484,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 persen							
398	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	1.175.080.364,00	0,00	0,00	0,00	1.175.080.364,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
399	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	1.155.808.038,00	0,00	0,00	0,00	1.155.808.038,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Lembaga yang menerapkan PUG dan PPRG	100 Persen							
	2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	40 Lembaga							
400	2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi									
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	100 Orang	37.634.200,00	0,00	0,00	0,00	37.634.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapatkan sosialisasi, advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuanBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	47 Lembaga							
401	2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi									
			Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	250 Orang	77.333.500,00	0,00	0,00	0,00	77.333.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	11.89 Nilai							
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	4 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	59.546.100,00	0,00	0,00	0,00	59.546.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen advokasi, pendampingan, dan penguatan jejaring antar lembaga	1 Dokumen							
403	2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	73.14 Nilai							
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga yang mendapat advokasi dan pendampingan	5 Lembaga							
404	2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	11.878.600,00	0,00	0,00	0,00	11.878.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak dalam pembangunan daerah	35 Persen							
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak yang valid dan dimanfaatkan	2 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi									
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1 Dokumen	9.996.400,00	0,00	0,00	0,00	9.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	76.20 Nilai							
	2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan PHA	20 Lembaga							
406	2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi									
			umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	20 perangkat daerah	45.325.700,00	0,00	0,00	0,00	45.325.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen koordinasi, sinkronisasi, KIE, dan penguatan jejaring lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	2 Dokumen							
407	2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi									
			Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	200 Orang	650.611.600,00	0,00	0,00	0,00	650.611.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
408	2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota									
			Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	4 Kegiatan	121.145.600,00	0,00	0,00	0,00	121.145.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.28 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	1 Laporan							
409	2.08.07.1.03.0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi									
			Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	19.743.600,00	0,00	0,00	0,00	19.743.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Sosial									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasar nya	19.65 persen							
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	827 Orang							
410	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan									
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	45 Orang	91.401.500,00	0,00	0,00	0,00	91.401.500,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
411	1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	45 Orang	1.478.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.478.250.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
412	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	45 Orang	89.750.000,00	0,00	0,00	0,00	89.750.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
413	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	45 Orang	21.680.300,00	0,00	0,00	0,00	21.680.300,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	45 Orang	125.759.400,00	0,00	0,00	0,00	125.759.400,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
415	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	45 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
416	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	15 Orang	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah lanjut usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	494 Orang							
417	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	70 Orang	996.450.000,00	0,00	0,00	0,00	996.450.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
418	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang									
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	70 Orang	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
419	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial									
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	70 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)
420	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari									
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	70 Orang	164.987.000,00	0,00	0,00	0,00	164.987.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
421	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang	13.920.000,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
422	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan									
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	20 Orang	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	A Nilai							
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen							
423	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.813.400,00	0,00	0,00	0,00	9.813.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
424	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	159.941.800,00	0,00	0,00	0,00	159.941.800,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
425	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.415.000,00	0,00	0,00	0,00	17.415.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen							
426	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	201.100.000,00	0,00	0,00	0,00	201.100.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
427	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	337.221.344,00	0,00	0,00	0,00	337.221.344,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	278.322.984,00	0,00	0,00	0,00	278.322.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
429	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	3.454.397.000,00	0,00	0,00	3.654.397.000,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
430	1.06.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.136.217.130,00	0,00	0,00	0,00	1.136.217.130,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Perempuan korban kekerasan	11.89 Nilai							
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi, advokasi dan pendampingan perlindungan perempuan	18 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	18 Dokumen	127.407.200,00	0,00	0,00	0,00	127.407.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tahun layanan pengaduan dan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sesuai standar	1 Tahun							
432	2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	80 Orang	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
433	2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	80 Layanan	246.556.000,00	4.115.256.000,00	0,00	0,00	4.361.812.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rasio anak korban kekerasan	1.28 Nilai							
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pengembangan lembaga	4 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	4.499.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
435	2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan									
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	100 Orang	69.018.000,00	0,00	0,00	0,00	69.018.000,00	[object Object]	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD PPA)	A Nilai							
	2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan operasional perkantoran yang tersedia	100 persen							
436	2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	1.528.800,00	0,00	0,00	0,00	1.528.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
437	2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	26.266.900,00	0,00	0,00	26.266.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
438	2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	43.340.000,00	0,00	0,00	0,00	43.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang perkantoran yang tersedia	100 persen							
439	2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia	100 persen							
440	2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	129.131.492,00	0,00	0,00	0,00	129.131.492,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
441	2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	41.345.692,00	0,00	0,00	0,00	41.345.692,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
442	2.08.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	387.381.702,00	0,00	0,00	0,00	387.381.702,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Calon Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	75 Persen							
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	32 Orang							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	32 Orang	256.350.000,00	0,00	0,00	0,00	256.350.000,00	Kab. Buleleng, Gerokgak, Kab. Gianyar, Blahbatuh, Pering	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD, Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	86.82 Nilai							
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
444	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.252.600,00	0,00	0,00	0,00	3.252.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
445	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.117.700,00	0,00	0,00	0,00	6.117.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
446	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12.899.394,00	0,00	0,00	0,00	12.899.394,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
447	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	986.500,00	0,00	0,00	0,00	986.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
448	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
450	2.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
451	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
452	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.728.560,00	0,00	0,00	0,00	200.728.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen							
453	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	80.770.000,00	0,00	0,00	0,00	80.770.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	35.131.673,00	0,00	0,00	0,00	35.131.673,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
455	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40 Unit	273.550.034,00	0,00	0,00	0,00	273.550.034,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja									
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2.07.06		PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang menerapkan Pengujian K3	100 Persen							
2.07.06.1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang Menerapkan K3 melalui Pengujian Lingkungan serta Kesehatan Kerja sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku	90 Perusahaan							
456	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan									
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	90 Perusahaan	415.850.050,00	0,00	0,00	0,00	415.850.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD. Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	86.82 Nilai							
2.07.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
457	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.980.300,00	0,00	0,00	0,00	4.980.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.896.400,00	0,00	0,00	0,00	7.896.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
459	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.944.274,00	0,00	0,00	0,00	14.944.274,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
460	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.884.000,00	0,00	0,00	0,00	2.884.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
461	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	957.700,00	0,00	0,00	0,00	957.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
462	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
463	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	102.839.896,00	0,00	0,00	0,00	102.839.896,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
464	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	129.559.904,00	0,00	0,00	0,00	129.559.904,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
465	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
466	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	268.692.636,00	0,00	0,00	0,00	268.692.636,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikasi Kompetensi	34 Persen							
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi	30 Orang							
467	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	30 Dokumen	30.997.600,00	0,00	0,00	0,00	30.997.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja	34 Persen							
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja yang di Fasilitasin bekerja/ berwirausaha	20 Orang							
468	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	66.663.300,00	0,00	0,00	0,00	66.663.300,00	Kab. Bangli, Susut, Abuan	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	270 Orang							
469	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)									
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270 Orang	36.313.800,00	0,00	0,00	0,00	36.313.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Pengesahan Peraturan Perusahaan	11.97 Persen							
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Perkara Perselisihan yang terselesaikan	100 Persen							
470	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	9 Perkara	5.566.000,00	0,00	0,00	0,00	5.566.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Keputusan tentang Upah Minimum yang ditetapkan Jumlah rohaniwan yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan	2 Kep Gub 32273 Orang							
471	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)									
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	25.775.000,00	0,00	0,00	0,00	25.775.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
472	2.07.05.1.03.0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)									
			Jumlah penetapan UMK	1 Surat Keputusan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
473	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja									
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	32273 Orang	6.927.573.000,00	0,00	0,00	0,00	6.927.573.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Persentase Perusahaan yang patuh terhadap Peraturan Perusahaan di Bidang Jamsos	100 Persen							
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang Menaati Peraturan Perundangan di Bidang Perlindungan Tenaga kerja	40 Perusahaan							
474	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan									
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	40 Perusahaan	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral)	86.82 Nilai							
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan Tepat Waktu	100 Persen							
475	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/Bulan	30.920.989.502,00	0,00	0,00	0,00	30.920.989.502,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
476	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.992.900,00	0,00	0,00	0,00	14.992.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
477	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.179.800,00	0,00	0,00	0,00	41.179.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
478	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.133.994,00	0,00	0,00	0,00	65.133.994,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
479	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.124.600,00	0,00	0,00	0,00	15.124.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.614.000,00	0,00	0,00	0,00	8.614.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
481	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
482	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	167.104.000,00	0,00	0,00	0,00	167.104.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
483	2.07.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	116.064.000,00	0,00	0,00	116.064.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
484	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.873.100,00	0,00	0,00	0,00	2.873.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
485	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
486	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	626.571.323,00	0,00	0,00	0,00	626.571.323,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Memadai	100 Persen							
487	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	741.917.508,00	0,00	0,00	0,00	741.917.508,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
488	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	213.265.968,00	0,00	0,00	0,00	213.265.968,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
489	2.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	82 Unit	933.971.742,00	0,00	0,00	0,00	933.971.742,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
	3.29.02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen							
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Sesuai Ketentuan	65.00 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Persentase pengusahaan sumber daya mineral yang sesuai ketentuan	61.00 Persen							
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan batuan	15 Dokumen							
491	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut									
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	15 Dokumen	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.29.05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Peningkatan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	75 MW							
	3.29.05.1.08	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Meningkatnya Persentase Bauran Energi Daerah	4.8 Persen							
492	3.29.05.1.08.0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi									
			Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	94.999.500,00	0,00	0,00	0,00	94.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kesepakatan Penempatan Transmigrasi yang sesuai ketentuan KSAD	100 Persen							
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Presentase Lokasi transmigrasi yang dievaluasi sesuai target	100 Persen							
493	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi									
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan KTP EI mencapai target	100 Persen							
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP-el per satuan penduduk	100 Persen							
494	2.12.02.1.01.0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	1 Dokumen	353.619.030,00	0,00	0,00	0,00	353.619.030,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran 0-18 tahun mencapai target	100 Persen							
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	81 Persen							
495	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan	236.063.720,00	0,00	0,00	0,00	236.063.720,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah desa yang mengalami peningkatan PADesa	29 Desa							
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang melakukan kerjasama antar desa dan kemitraan	4.56 Persen							
496	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	135.878.612,00	0,00	0,00	0,00	135.878.612,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa cepat berkembang	93.87 Persen							
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan desa	93.87 Persen							
497	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen	187.162.830,00	0,00	0,00	0,00	187.162.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
498	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	441.492.840,00	0,00	0,00	0,00	441.492.840,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
499	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	37.595.700,00	0,00	0,00	0,00	37.595.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	99.69 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan desa yang aktif	100 Persen							
500	2.13.05.1.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1500 Unit	141.746.520,00	0,00	0,00	0,00	141.746.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
501	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	189.354.940,00	0,00	0,00	0,00	189.354.940,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
502	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	585.557.120,00	0,00	0,00	0,00	585.557.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
503	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	4.424.528.080,00	0,00	0,00	0,00	4.424.528.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.85 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja	0.12 Persen							
504	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	88.455.000,00	0,00	0,00	0,00	88.455.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
505	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	263.205.012,00	0,00	0,00	0,00	263.205.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	100 Persen							
506	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/ Bulan	12.823.823.571,00	0,00	0,00	0,00	12.823.823.571,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
507	2.13.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	128.066.130,00	0,00	0,00	0,00	128.066.130,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Layanan Administrasi Umum	12 Bulan							
508	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.992.400,00	0,00	0,00	0,00	5.992.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
509	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.523.100,00	0,00	0,00	0,00	25.523.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
510	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	75.738.750,00	0,00	0,00	0,00	75.738.750,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
511	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	6.048.100,00	0,00	0,00	0,00	6.048.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
512	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.626.600,00	0,00	0,00	0,00	4.626.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
513	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
514	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	254.624.000,00	0,00	0,00	0,00	254.624.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen							
515	2.13.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	6.439.600,00	0,00	0,00	0,00	6.439.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	174.800.000,00	0,00	0,00	0,00	174.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
517	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	515.870.594,00	0,00	0,00	0,00	515.870.594,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terselesaikan	100 Persen							
518	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	1.098.383.428,00	0,00	0,00	0,00	1.098.383.428,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
519	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	99.810.000,00	0,00	0,00	0,00	99.810.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Jumlah sektor (perangkat daerah dan mitra kerja) yang memanfaatkan profil penataan penduduk dan keluarga berencana	4 Sektor							
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi Program KB Krama Bali	1351 Orang							
520	2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	9 Daerah	199.955.000,00	0,00	0,00	0,00	199.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana
521	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1 Dokumen	478.838.860,00	0,00	0,00	0,00	478.838.860,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perhubungan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio konektivitas layanan angkutan darat	0,88 Rasio							
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan 1 Laporan							
522	2.15.02.1.05.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	311.703.542,00	0,00	0,00	0,00	311.703.542,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
523	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	94.844.000,00	0,00	0,00	0,00	94.844.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	1 Laporan 1 Laporan							
524	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin									
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan	529.972.000,00	0,00	0,00	0,00	529.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
525	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin									
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	3 Laporan	14.880.000,00	0,00	0,00	0,00	14.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan	1 Dokumen							
526	2.15.02.1.10.0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	301.664.400,00	0,00	0,00	0,00	301.664.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	380 Unit							
527	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	380 Unit	411.437.370,00	0,00	0,00	0,00	411.437.370,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	80 Persen							
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen Pendukung Pengembangan Pelabuhan Sangsit	1 Laporan							
528	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional									
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen	644.638.650,00	0,00	0,00	0,00	644.638.650,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase lintasan kereta api yang terbangun	35 Persen							
	2.15.05.1.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Pra Studi Kelayakan Angkutan Umum Massal Berbasis Kereta Api Lintasan Canggü-Mengwi	1 Dokumen							
529	2.15.05.1.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian									
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	646.933.460,00	0,00	0,00	0,00	646.933.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai							
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
530	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	24.236.000,00	0,00	0,00	0,00	24.236.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
531	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	34.643.000,00	0,00	0,00	0,00	34.643.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen							
532	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/ Bulan	24.619.225.316,00	0,00	0,00	0,00	24.619.225.316,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
533	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	15.514.000,00	0,00	0,00	0,00	15.514.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun							
534	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.993.800,00	0,00	0,00	0,00	6.993.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
535	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	381.258.300,00	614.776.540,00	0,00	0,00	996.034.840,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
536	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	75.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
537	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.253.700,00	0,00	0,00	0,00	9.253.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
538	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	938.788.000,00	0,00	0,00	0,00	938.788.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun							
539	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
540	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	168.273.400,00	0,00	0,00	168.273.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun							
541	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
542	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	295.000.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
543	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	342.775.436,00	0,00	0,00	0,00	342.775.436,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun							
544	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	904.767.984,00	0,00	0,00	0,00	904.767.984,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
545	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	73.770.000,00	0,00	0,00	0,00	73.770.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
546	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.130.374.168,00	0,00	0,00	0,00	1.130.374.168,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pusat Pengendalian LLAJ									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase pencapaian waktu tempuh 2,5 jam/100Km dari KSP menuju jalan nasional	66 Persen							
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
547	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	14 Unit	596.800.000,00	0,00	0,00	0,00	596.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan							
548	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi									
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	1.299.151.218,00	300.000.000,00	0,00	0,00	1.599.151.218,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket							
549	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.244.400,00	0,00	0,00	0,00	4.244.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
550	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.924.500,00	143.228.800,00	0,00	0,00	153.153.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
551	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
552	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	222.164.000,00	0,00	0,00	0,00	222.164.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan							
553	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
554	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	207.660.000,00	0,00	0,00	0,00	207.660.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Alokasi Umum (DAU)
555	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	42.765.792,00	0,00	0,00	0,00	42.765.792,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit 12 Unit							
556	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	167.299.600,00	0,00	0,00	0,00	167.299.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
557	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18.480.000,00	0,00	0,00	0,00	18.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks kepuasan layanan angkutan Trans Bali/Trans Sarbagita	83 Indeks							
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Jasa Layanan Angkutan Umum Trans SARBAGITA	7332 RIT							
558	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	10 Unit	7.938.004.159,00	0,00	0,00	0,00	7.938.004.159,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan perundang undangan yang tersedia Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia Jumlah Komponen instalasi Listrik yang tersedia Jumlah makanan dan minuman rapat dan perjalanan dinas yang tersedia Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
559	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	915.400,00	0,00	0,00	0,00	915.400,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
560	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.440.440,00	121.149.520,00	0,00	0,00	148.589.960,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
561	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.324.588,00	0,00	0,00	0,00	20.324.588,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
562	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.876.000,00	0,00	0,00	0,00	9.876.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
563	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	[object Object]
564	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	54.491.000,00	0,00	0,00	0,00	54.491.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah gedung kantor yang tersedia Jumlah mebel yang tersedia	2 Unit 3 Paket							
565	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	23.685.000,00	0,00	0,00	23.685.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia Jumlah jasa pelayanan umum kantor (jasa kebersihan) yang tersedia Jumlah jasa surat menyurat berupa materai yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun							
566	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
567	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	33.300.000,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Alokasi Umum (DAU)
568	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40.910.892,00	0,00	0,00	0,00	40.910.892,00	Kab. Gianyar, Sukawati, Batubulan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan AC, Laptop, PC dan printer yang tersedia Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas, tenaga administrasi, tenaga supir, pajak kendaraan yang tersedia	1 Tahun 1 Tahun							
569	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	343.638.132,00	0,00	0,00	0,00	343.638.132,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
570	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18.140.000,00	0,00	0,00	0,00	18.140.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UPTD Perlengkapan Jalan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kondisi baik	43,75 Persen							
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah perlengkapan jalan di jalan provinsi yang tersedia Jumlah perlengkapan jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	450 Unit 700 Unit							
571	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi									
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	300 Unit	2.008.551.820,00	495.443.200,00	0,00	0,00	2.503.995.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
572	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan									
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	246 Unit	944.221.240,00	0,00	0,00	0,00	944.221.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan 1 Paket							
573	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.276.800,00	0,00	0,00	0,00	5.276.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
574	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	34.066.400,00	0,00	0,00	0,00	34.066.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit							
575	2.15.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	100.650.800,00	0,00	0,00	100.650.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan Pajaknya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	2 Unit 16 Unit							
576	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	150.654.492,00	0,00	0,00	0,00	150.654.492,00	[object Object]	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
577	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	11.160.000,00	0,00	0,00	0,00	11.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional yang Operasionalnya menerapkan SPM	50 Persen							
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional yang tersedia	19 Laporan							
578	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	19 Laporan	139.540.200,00	0,00	0,00	0,00	139.540.200,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,90 Nilai							
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Yang Tersedia Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang tersedia	1 Paket 1 Paket 1 Tahun 1 Paket							
579	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.401.700,00	71.919.356,00	0,00	0,00	78.321.056,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
580	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
581	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	347.493.444,00	0,00	0,00	0,00	347.493.444,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Tersedia Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia	1 Paket 1 Paket							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
582	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0,00	16.130.800,00	0,00	0,00	16.130.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan	1 Paket							
583	2.15.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	486.700,00	0,00	0,00	0,00	486.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terpelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara Jumlah Sarana Prasarana Pendukung yang Tersedia	2 Unit 1 Paket 1 Paket							
584	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	120.984.000,00	0,00	0,00	0,00	120.984.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
585	2.15.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi yang disebarluaskan	94.10 persen							
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	83.00 Indeks							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten									
			Jumlah Konten Informasi Publik	120 Konten	1.256.984.130,00	124.658.650,00	0,00	0,00	1.381.642.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
587	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi									
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	90 Persentase	1.255.049.782,00	228.951.500,00	0,00	0,00	1.484.001.282,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
588	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik									
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	1 Laporan	1.687.524.460,00	0,00	0,00	0,00	1.687.524.460,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
589	2.16.02.1.01.0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat									
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	6 Komunitas	2.373.117.170,00	0,00	0,00	0,00	2.373.117.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
590	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik									
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	225 Permohonan	1.357.171.032,00	0,00	0,00	0,00	1.357.171.032,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
591	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik									
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 Rekomendasi	342.520.420,00	0,00	0,00	0,00	342.520.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
592	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik									
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	100 Media	3.936.233.828,00	46.862.200,00	0,00	0,00	3.983.096.028,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07 Nilai							
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 persen							
593	2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis									
			Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	2 Dokumen	2.935.189.600,00	0,00	0,00	0,00	2.935.189.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
594	2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah									
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2 Dokumen	1.338.598.202,00	296.168.512.120,00	0,00	0,00	297.507.110.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
595	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	29 perangkat daerah	16.911.602.192,00	1.555.000.000,00	0,00	0,00	18.466.602.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DISKOMINFOS)	82.80 Nilai							
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	15 Dokumen							
596	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	67.685.700,00	0,00	0,00	0,00	67.685.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
597	2.16.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	16.290.300,00	0,00	0,00	0,00	16.290.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 Dokumen							
598	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/Bulan	25.526.326.517,00	0,00	0,00	0,00	25.526.326.517,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
599	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	1.445.301.700,00	0,00	0,00	0,00	1.445.301.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 bulan							
600	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.443.000,00	0,00	0,00	0,00	15.443.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
601	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	42.914.800,00	0,00	0,00	0,00	42.914.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
602	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
603	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.670.400,00	0,00	0,00	0,00	13.670.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7649 Dokumen	31.522.600,00	0,00	0,00	0,00	31.522.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
605	2.16.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.630.000,00	0,00	0,00	0,00	12.630.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
606	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	683.978.000,00	0,00	0,00	0,00	683.978.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Paket							
607	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	0,00	199.761.000,00	0,00	0,00	199.761.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
608	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	29 Unit	0,00	697.980.340,00	0,00	0,00	697.980.340,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan							
609	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.998.700,00	0,00	0,00	0,00	2.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
610	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.000.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
611	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 Unit							
612	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	2.151.128.888,00	0,00	0,00	0,00	2.151.128.888,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
613	2.16.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	80 Unit	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
614	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	89 Unit	99.490.000,00	0,00	0,00	0,00	99.490.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
615	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.164.773.120,00	0,00	0,00	0,00	1.164.773.120,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
616	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	87.180.000,00	0,00	0,00	0,00	87.180.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4.20 Nilai							
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah dan diseminasi	11 Sektor							
617	2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral									
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 Orang	138.351.510,00	0,00	0,00	0,00	138.351.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
618	2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral									
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase	142.417.110,00	0,00	0,00	0,00	142.417.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
619	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia									
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen	150.703.020,00	0,00	0,00	0,00	150.703.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	76 Nilai							
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	29 OPD							
620	2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	34.024.900,00	0,00	0,00	0,00	34.024.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
621	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	172.677.410,00	0,00	0,00	0,00	172.677.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
622	2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	10.312.800,00	0,00	0,00	0,00	10.312.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
623	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 Perangkat Daerah	72.312.000,00	0,00	0,00	0,00	72.312.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 Perangkat Daerah							
624	2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 Perangkat Daerah	121.385.210,00	0,00	0,00	0,00	121.385.210,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07 Nilai							
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 persen							
625	2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	25 Aplikasi	3.963.388.200,00	329.830.050,00	0,00	0,00	4.293.218.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
626	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda									
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan	3.285.496.900,00	564.390.340,00	0,00	0,00	3.849.887.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	82.07 Nilai							
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan intranet, internet dan aplikasi	100 Persen							
627	2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas									
			Jumlah Kab/Kota di wilayah provinsi dan perangkat daerah di pemerintahan provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas	9 unit	11.514.213.894,00	0,00	0,00	0,00	11.514.213.894,00	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
628	2.16.03.1.02.0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi									
			Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	9 kabupaten /kota	3.110.693.000,00	3.517.540.150,00	0,00	0,00	6.628.233.150,00	Kab. Buleleng, Sukasada, Pegayaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang difasilitasi IUSP	3.70 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	10 Unit Usaha							
629	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	30 Unit Usaha	288.686.994,00	0,00	0,00	0,00	288.686.994,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.02.1.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan	1 Unit Usaha							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	2.17.02.1.02.0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	1 Unit Usaha	19.999.600,00	0,00	0,00	0,00	19.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi berkualitas	7.00 Persen							
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	90 Unit Usaha							
631	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	90 Unit Usaha	49.934.000,00	0,00	0,00	0,00	49.934.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.03.1.02	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diperiksa dan diawasi	70 Unit Usaha							
632	2.17.03.1.02.0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	70 Unit Usaha	133.498.810,00	0,00	0,00	0,00	133.498.810,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	3.30 Persen							
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan dilindungi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	164 Unit Usaha							
633	2.17.06.1.01.0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	84 Unit Usaha	142.110.620,00	0,00	0,00	0,00	142.110.620,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
634	2.17.06.1.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	80 Unit Usaha	49.999.600,00	0,00	0,00	0,00	49.999.600,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.17.07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan wirausaha	6.00 Persen								
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Kecil yang diberdayakan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	205 Unit Usaha								
635	2.17.07.1.01.0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	205 Unit Usaha	559.176.002,00	0,00	0,00	0,00	559.176.002,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
636	2.17.07.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	100 Orang	76.400.000,00	0,00	0,00	0,00	76.400.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	-							
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	145 Unit Usaha							
637	2.17.08.1.01.0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	110 Unit Usaha	215.843.804,00	0,00	0,00	0,00	215.843.804,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
638	2.17.08.1.01.0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	35 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
639	2.17.08.1.01.0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Wirausaha yang Difasilitasi	100 Orang	99.999.700,00	0,00	0,00	0,00	99.999.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
640	2.17.08.1.01.0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	10 Unit Usaha	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.38 Nilai							
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen							
641	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	142.177.312,00	0,00	0,00	0,00	142.177.312,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
642	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	10.184.900,00	0,00	0,00	0,00	10.184.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen							
643	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/ Bulan	16.437.269.734,00	0,00	0,00	0,00	16.437.269.734,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen							
644	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen							
645	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.997.800,00	0,00	0,00	0,00	10.997.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
646	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.405.800,00	0,00	0,00	0,00	48.405.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
647	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	76.071.194,00	0,00	0,00	0,00	76.071.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
648	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
649	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
650	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	59.753.000,00	0,00	0,00	0,00	59.753.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							
651	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	0,00	700.452.200,00	0,00	0,00	700.452.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen							
652	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.993.900,00	0,00	0,00	0,00	1.993.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
653	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	246.000.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
654	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	895.259.256,00	0,00	0,00	0,00	895.259.256,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen							
655	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	797.265.444,00	0,00	0,00	0,00	797.265.444,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
656	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	49.920.000,00	0,00	0,00	0,00	49.920.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
657	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	184.938.368,00	272.000.000,00	0,00	0,00	456.938.368,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengelola KUMKM Bersertifikasi Kompetensi	25,00 Persen							
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang ikut Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	410 Orang							
658	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	2.615.568.416,00	0,00	0,00	0,00	2.615.568.416,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISKOP)	82.38 Nilai							
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen							
659	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	699.600,00	0,00	0,00	0,00	699.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
660	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.146.100,00	0,00	0,00	0,00	13.146.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.904.050,00	0,00	0,00	0,00	56.904.050,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
662	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	999.700,00	0,00	0,00	0,00	999.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
663	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
664	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen							
665	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	989.100,00	0,00	0,00	0,00	989.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
666	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
667	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	160.265.968,00	0,00	0,00	0,00	160.265.968,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen							
668	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	101.191.492,00	0,00	0,00	0,00	101.191.492,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
669	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
670	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.132.984,00	0,00	0,00	0,00	90.132.984,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)	12650 Proyek							
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi Berbasis Jenis Usaha	2 Dokumen							
671	2.18.02.1.02.0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi									
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	215.186.230,00	0,00	0,00	0,00	215.186.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor Yang Mengajukan Permohonan Penanaman Modal di Provinsi Bali	33.5 Persen							
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Publikasi Promosi Penanaman Modal	2 Dokumen							
672	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	1 Dokumen	151.553.520,00	0,00	0,00	0,00	151.553.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 persen							
	2.18.04.1.01	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Izin dan Non Izin yang Terbit sesuai Kewenangan Provinsi	100 Persen							
673	2.18.04.1.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	400 Pelaku Usaha	667.234.100,00	0,00	0,00	0,00	667.234.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
674	2.18.04.1.01.0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko									
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	151.501.640,00	0,00	0,00	0,00	151.501.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi	12,3 Triliun							
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pemenuhan Komitmen Penanaman Modal	92 Persen							
675	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	18 Kegiatan usaha	34.560.000,00	0,00	0,00	0,00	34.560.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
676	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya									
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	13 Kegiatan usaha	150.146.230,00	0,00	0,00	0,00	150.146.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
677	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha									
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	40 Pelaku Usaha	38.900.000,00	0,00	0,00	0,00	38.900.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Informasi Penanaman Modal yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100 Persen							
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi	2 Dokumen							
678	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen	74.790.820,00	0,00	0,00	0,00	74.790.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	79 Nilai							
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	40 Dokumen							
679	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 Orang/ Bulan	15.130.595.620,00	0,00	0,00	0,00	15.130.595.620,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen							
680	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.073.400,00	0,00	0,00	0,00	5.073.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
681	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.134.300,00	0,00	0,00	0,00	73.134.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
682	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
683	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.516.200,00	0,00	0,00	0,00	25.516.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
684	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	327.386.000,00	0,00	0,00	0,00	327.386.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen							
685	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.846.500,00	0,00	0,00	0,00	3.846.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
686	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	152.000.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
687	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.319.974.430,00	0,00	0,00	0,00	1.319.974.430,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	20 Unit							
688	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	1.336.436.050,00	0,00	0,00	0,00	1.336.436.050,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
689	2.18.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	243.307.900,00	0,00	0,00	0,00	243.307.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kebudayaan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pemajuan Bahasa Aksara Dan Sastra	5 Persen							
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkelolanya Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2500 Orang							
690	2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	20 Objek	750.509.552,00	0,00	0,00	0,00	750.509.552,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
691	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1000 Orang	24.865.155.064,00	0,00	0,00	0,00	24.865.155.064,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	5 Persen							
692	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya									
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	320 Objek	8.948.586.970,00	0,00	0,00	0,00	8.948.586.970,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
693	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan									
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	23 Sertifikat	1.349.881.206,00	0,00	0,00	0,00	1.349.881.206,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 Lembaga							
694	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	150 Unit	10.126.210.100,00	0,00	0,00	0,00	10.126.210.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Peningkatan Pemajuan Kesenian dan Tenaga Kebudayaan	5 Persen							
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	518 Lembaga							
695	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	153 Orang	483.986.700,00	0,00	0,00	0,00	483.986.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
696	2.22.03.1.01.0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan									
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	200 Sertifikat	361.312.370,00	0,00	0,00	0,00	361.312.370,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Sejarah dan Tradisi	5 Persen							
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	2 Orang/Lembaga							
697	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah									
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	2 Dokumen	185.453.000,00	0,00	0,00	0,00	185.453.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Dan Permuseuman yang Maju	0,2 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	3 Objek							
698	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 Objek	240.753.230,00	0,00	0,00	0,00	240.753.230,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya yang diinventarisasi	245 Objek							
699	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	11 Objek	10.355.761.876,00	0,00	0,00	0,00	10.355.761.876,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
700	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	3 Objek	58.388.700,00	0,00	0,00	0,00	58.388.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
701	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya									
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	6 Objek	114.107.300,00	0,00	0,00	0,00	114.107.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
702	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya									
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	225 Orang	90.610.900,00	0,00	0,00	0,00	90.610.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Poin							
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen							
703	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	186.022.340,00	0,00	0,00	0,00	186.022.340,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
704	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	23.374.500,00	0,00	0,00	0,00	23.374.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Keuangan perangkat daerah	100 Persen							
705	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	849 Orang/ Bulan	59.409.471.111,00	0,00	0,00	0,00	59.409.471.111,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
706	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	559.678.506,00	0,00	0,00	0,00	559.678.506,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
707	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen							
708	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	26 Paket	27.085.500,00	0,00	0,00	0,00	27.085.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
709	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	0,00	331.754.660,00	0,00	0,00	331.754.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
710	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
711	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
712	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	22.915.200,00	0,00	0,00	0,00	22.915.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
713	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
714	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	55.488.000,00	0,00	0,00	0,00	55.488.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.495.000,00	0,00	0,00	0,00	5.495.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
716	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
717	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	24.950.000,00	0,00	0,00	0,00	24.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
718	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.104.242.068,00	0,00	0,00	0,00	1.104.242.068,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
719	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	834.287.460,00	0,00	0,00	0,00	834.287.460,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
720	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit	14.950.000,00	0,00	0,00	0,00	14.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
721	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	743.912.888,00	0,00	0,00	0,00	743.912.888,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Taman Budaya									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Taman Budaya	75 Persen							
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memadai	2000 orang							
722	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan									
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2000 Orang	2.529.984.000,00	0,00	0,00	0,00	2.529.984.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
723	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	4 Unit	370.516.000,00	0,00	0,00	0,00	370.516.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin							
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah pada UPTD Taman Budaya	100 Persen							
724	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	69.997.000,00	0,00	0,00	0,00	69.997.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
725	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	49.998.700,00	0,00	0,00	0,00	49.998.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
726	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
727	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.340.000,00	0,00	0,00	0,00	8.340.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
728	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	24.994.000,00	0,00	0,00	0,00	24.994.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
729	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	42.470.000,00	0,00	0,00	0,00	42.470.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	985.600.000,00	0,00	0,00	0,00	985.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
731	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	14.930.000,00	0,00	0,00	0,00	14.930.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
732	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.147.368.058,00	0,00	0,00	0,00	1.147.368.058,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
733	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
734	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	19.480.000,00	0,00	0,00	0,00	19.480.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
735	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1.066.728.792,00	0,00	0,00	0,00	1.066.728.792,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Museum Bali									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Museum Bali	75 Persen							
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Masyarakat ke Museum Bali sebagai tempat informasi Budaya Bali	25000 Orang							
736	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu									
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	700 Unit	909.890.300,00	0,00	0,00	0,00	909.890.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
737	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	1.609.445.400,00	0,00	0,00	0,00	1.609.445.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
738	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	6 Unit	104.705.800,00	64.043.500,00	0,00	0,00	168.749.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin							
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen							
739	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	61.517.500,00	0,00	0,00	0,00	61.517.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
740	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
741	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.472.000,00	0,00	0,00	0,00	25.472.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
742	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.402.000,00	0,00	0,00	0,00	5.402.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
743	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	13.713.000,00	0,00	0,00	0,00	13.713.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
744	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	5.698.300,00	15.388.000,00	0,00	0,00	21.086.300,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
745	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.386.400,00	0,00	0,00	0,00	2.386.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
746	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	206.000.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
747	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	19.264.840,00	0,00	0,00	0,00	19.264.840,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
748	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.002.640.136,00	0,00	0,00	0,00	1.002.640.136,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
749	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	101.600.000,00	0,00	0,00	0,00	101.600.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
750	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	38.080.000,00	0,00	0,00	0,00	38.080.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
751	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	722.444.080,00	78.665.521.933,00	0,00	0,00	79.387.966.013,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
		UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Indeks Kepuasan masyarakat Pada UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	78,5 Persen							
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Museum Provinsi yang memadai	51 Unit							
752	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu									
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	33 Unit	756.260.200,00	0,00	0,00	0,00	756.260.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
753	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum									
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	10 Unit	2.087.713.200,00	0,00	0,00	0,00	2.087.713.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
754	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	8 Unit	264.832.600,00	0,00	0,00	0,00	264.832.600,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Poin							
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.995.300,00	0,00	0,00	0,00	29.995.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
756	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	53.057.000,00	0,00	0,00	0,00	53.057.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
757	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	51.593.100,00	0,00	0,00	0,00	51.593.100,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
758	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.777.400,00	0,00	0,00	0,00	6.777.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
759	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
760	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.278.000,00	0,00	0,00	0,00	7.278.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
761	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
762	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.491.500,00	0,00	0,00	0,00	1.491.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
763	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)
764	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	42.930.000,00	0,00	0,00	0,00	42.930.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
765	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	946.852.824,00	0,00	0,00	0,00	946.852.824,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
766	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	123.975.000,00	0,00	0,00	0,00	123.975.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
767	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	14.970.000,00	0,00	0,00	0,00	14.970.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
768	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.002.328.024,00	0,00	0,00	0,00	2.002.328.024,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pemajuan Masyarakat Adat									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
	2.22.09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Indeks Membangun Desa Adat	0,8025 Nilai							
	2.22.09.8.01	Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	Jumlah Kelembagaan Desa Adat yang dibina	600 Desa Adat							
769	2.22.09.8.01.0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	300 Desa	465.670.107.876,00	0,00	0,00	0,00	465.670.107.876,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
770	2.22.09.8.01.0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Produk Hukum Desa Adat	300 Dokumen	257.177.312,00	0,00	0,00	0,00	257.177.312,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.09.8.02	Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	Jumlah Dokumen Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat yang diproses	75 Desa Adat							
771	2.22.09.8.02.0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	30 Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
772	2.22.09.8.02.0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	45 Desa	270.865.706,00	0,00	0,00	0,00	270.865.706,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	2.22.09.8.03	Penyelenggaraan Desa Adat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan	6 Dokumen								
773	2.22.09.8.03.0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	6 Laporan	388.347.930,00	0,00	0,00	0,00	388.347.930,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-							
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen							
774	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
775	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang di proses	44 Orang/Bulan							
776	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/Bulan	12.131.795.722,00	0,00	0,00	0,00	12.131.795.722,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang di Proses	847 Dokumen							
777	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.934.200,00	0,00	0,00	0,00	10.934.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
778	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.145.200,00	0,00	0,00	0,00	36.145.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
779	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	19.243.700,00	0,00	0,00	0,00	19.243.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
780	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	414.430.000,00	0,00	0,00	0,00	414.430.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dan siap pakai	15 Unit							
781	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9.609.840,00	257.994.240,00	0,00	0,00	267.604.080,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dan siap pakai	35 Laporan							
782	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	548.179.734,00	0,00	0,00	0,00	548.179.734,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara dan siap pakai	12 Laporan							
783	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	566.441.852,00	0,00	0,00	0,00	566.441.852,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
784	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	1.617.147.396,00	128.700.000,00	0,00	0,00	1.745.847.396,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Kelautan dan Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	46 Persen							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102575.33 Ha							
785	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru									
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	12 Pelaku Usaha	34.495.000,00	0,00	0,00	0,00	34.495.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	5 Kelompok							
786	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil									
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	70.101.492,00	0,00	0,00	0,00	70.101.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen							
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	105770.02 Ton							
787	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap									
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit	390.850.902,00	0,00	0,00	0,00	390.850.902,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8500 Ton							
788	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT									
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	30 Dokumen	33.723.000,00	0,00	0,00	0,00	33.723.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen							
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	33297.90 Ton							
789	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	171.427.500,00	0,00	0,00	0,00	171.427.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
790	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	27.620.000,00	0,00	0,00	0,00	27.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	3 Persen							
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	32 Pelaku Usaha							
791	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi									
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	30 Pelaku Usaha	31.268.900,00	0,00	0,00	0,00	31.268.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
792	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)									
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	40 Kelompok Masyarakat	150.240.984,00	0,00	0,00	0,00	150.240.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase produksi olahan hasil perikanan Tingkat Konsumsi Ikan	2 Persen 49.65 Kg/Ka pita/Tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	30 Unit Usaha							
793	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	30 Kegiatan	323.958.502,00	0,00	0,00	0,00	323.958.502,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai							
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
794	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	76.748.000,00	0,00	0,00	0,00	76.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen							
795	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1610 Orang/ Bulan	25.447.615.889,00	0,00	0,00	0,00	25.447.615.889,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
796	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.459.500,00	0,00	0,00	0,00	7.459.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
797	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	0,00	728.957.900,00	0,00	0,00	728.957.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
798	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	189.642.400,00	0,00	0,00	0,00	189.642.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
799	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.923.500,00	0,00	0,00	0,00	18.923.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
800	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	162.820.000,00	0,00	0,00	0,00	162.820.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
801	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	0,00	279.565.620,00	0,00	0,00	279.565.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
802	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.611.000,00	0,00	0,00	0,00	3.611.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
803	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.050.000,00	0,00	0,00	0,00	131.050.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
804	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9 Unit	950.364.936,00	0,00	0,00	0,00	950.364.936,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
805	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	573.924.074,00	2.255.000.000,00	0,00	0,00	2.828.924.074,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
806	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	90.230.000,00	0,00	0,00	0,00	90.230.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 Persen							
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1300000 Ekor							
807	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	824.870.604,00	0,00	0,00	0,00	824.870.604,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai							
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
808	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.664.000,00	0,00	0,00	0,00	4.664.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
809	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	7.117.200,00	0,00	0,00	0,00	7.117.200,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
810	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
811	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.996.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
812	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0,00	38.554.200,00	0,00	0,00	38.554.200,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
813	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	471.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
814	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	128.599.200,00	0,00	0,00	0,00	128.599.200,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
815	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	166.497.984,00	0,00	0,00	0,00	166.497.984,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
816	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	265.346.476,00	0,00	0,00	0,00	265.346.476,00	Kab. Badung, Abiansemal, Sangeh Kab. Klungkung, Dawan, Pesinggahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 Persen							
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2600 Reko mendasi							
817	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing									
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	7 Kegiatan	53.241.000,00	0,00	0,00	0,00	53.241.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
818	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar									
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	7 Kegiatan	341.260.800,00	100.260.000,00	0,00	0,00	441.520.800,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
819	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	8.433.000,00	0,00	0,00	0,00	8.433.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
820	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
821	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
822	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0,00	37.072.080,00	0,00	0,00	37.072.080,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
823	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.020.500,00	0,00	0,00	0,00	1.020.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
824	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.000.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
825	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	92.232.000,00	0,00	0,00	0,00	92.232.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
826	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	349.457.188,00	0,00	0,00	0,00	349.457.188,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
827	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	14.780.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali									
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
3.25.02		PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi persen dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	73 Persen							
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	5 Kawasan							
828	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	46,838.10 Ha	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai							
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
829	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.848.100,00	0,00	0,00	0,00	24.848.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
830	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
831	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	172.510.000,00	0,00	0,00	0,00	172.510.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
832	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	784.146.692,00	0,00	0,00	0,00	784.146.692,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelabuhan Perikanan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 Persen							
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8500 Ton							
833	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan									
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	1 Layanan	47.699.000,00	0,00	0,00	0,00	47.699.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali)	82 Nilai							
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
834	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	26.835.900,00	0,00	0,00	0,00	26.835.900,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
835	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
836	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	26.750.000,00	0,00	0,00	0,00	26.750.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
837	3.25.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	20.445.200,00	0,00	0,00	20.445.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100 Persen							
838	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kab. Badung, Kuta, Kedonganan Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100 Persen							
839	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	127.800.000,00	0,00	0,00	0,00	127.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
840	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	39.401.330,00	0,00	0,00	0,00	39.401.330,00	Kab. Buleleng, Sawan, Sangsit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pariwisata									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Pariwisata yang Berkualitas dan Berdaya Saing	14 Persentase							
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Daya Tarik Wisata yang berdaya saing	90 DTW							
841	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi									
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan	391.935.516,00	0,00	0,00	0,00	391.935.516,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Berbasis Komunitas Lokal	1 Laporan							
842	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	[object Object]
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	1 Dokumen							
843	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi									
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	10 Lokasi	278.795.900,00	0,00	0,00	0,00	278.795.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Usaha Pariwisata yang memperoleh standar	30 Usaha							
844	3.26.02.1.04.0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)									
			Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	10 Unit Usaha	100.672.510,00	0,00	0,00	0,00	100.672.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
845	3.26.02.1.04.0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata									
			Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	9 Laporan	280.116.230,00	0,00	0,00	0,00	280.116.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan	16.67 Persen							
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah masyarakat yang mengakses informasi pariwisata	23.00 Persentase							
846	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	305.544.020,00	0,00	0,00	0,00	305.544.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
847	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Dokumen	372.793.804,00	0,00	0,00	0,00	372.793.804,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
848	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri									
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	5.242.262.312,00	0,00	0,00	0,00	5.242.262.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pengajuan Usaha Ekonomi Kreatif yang memanfaatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	3 Persentase							
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Pembinaan dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	9 Kabupaten/Kota							
849	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	24 Laporan	114.881.384,00	0,00	0,00	0,00	114.881.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen							
850	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen	42.486.700,00	0,00	0,00	0,00	42.486.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang bersertifikat kompetensi pariwisata dan SDM ekonomi kreatif yang bersertifikat pelatihan	47 Persentase							
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah masyarakat dan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang memperoleh peningkatan kapasitas kepariwisataan	235 Orang							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	95 Orang	288.630.092,00	0,00	0,00	0,00	288.630.092,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
852	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata									
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	220 Orang	301.069.504,00	0,00	0,00	0,00	301.069.504,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
853	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif									
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang	473.422.102,00	0,00	0,00	0,00	473.422.102,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (DISPAR)	85 Persen							
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23 Dokumen							
854	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	122.996.812,00	0,00	0,00	0,00	122.996.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN yang dibayar sesuai ketentuan	86 Dokumen							
855	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/ Bulan	13.168.970.608,00	0,00	0,00	0,00	13.168.970.608,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Jenis							
856	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.216.600,00	0,00	0,00	0,00	7.216.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
857	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	53.551.900,00	274.162.200,00	0,00	0,00	327.714.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
858	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	69.617.494,00	0,00	0,00	0,00	69.617.494,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
859	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.882.600,00	0,00	0,00	0,00	9.882.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
860	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	179.997.000,00	0,00	0,00	0,00	179.997.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	3 Jenis							
861	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	182.008.200,00	0,00	0,00	0,00	182.008.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU)
862	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.312.719.880,00	0,00	0,00	0,00	1.312.719.880,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	3 Jenis							
863	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	551.217.000,00	0,00	0,00	0,00	551.217.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
864	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	313.400.000,00	0,00	0,00	0,00	313.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan Yang Terpublikasi	92 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	18 Kelompok							
865	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal									
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3 Laporan	493.326.192,00	0,00	0,00	0,00	493.326.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2.680 Kkl/ka pita/hari							
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen ketersediaan pangan	1 Dokumen							
866	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	148.245.830,00	0,00	0,00	0,00	148.245.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibina	166 Ton 9 LPM							
867	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	364.569.780,00	0,00	0,00	0,00	364.569.780,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,9 Persen							
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan Yang Diuji	1 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
868	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan									
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	145.368.130,00	0,00	0,00	0,00	145.368.130,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90 Persen							
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3 Laporan							
869	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian									
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan	5.203.591.720,00	0,00	0,00	0,00	5.203.591.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Mutu dan Baku Areal Komoditas Pertanian	80 Persen							
870	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan									
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	3 laporan	1.928.862.604,00	0,00	0,00	0,00	1.928.862.604,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya angka kelahiran ternak unggulan daerah	6000 Ekor							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
871	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	3.082.285.772,00	0,00	0,00	0,00	3.082.285.772,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15 Persen							
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen							
872	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian									
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	977.248.752,00	0,00	0,00	0,00	977.248.752,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
873	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	153.560.140,00	0,00	0,00	0,00	153.560.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen							
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR Yang Mendapatkan Pelayanan Vaksinasi Jumlah Kontrol Populasi HPR	200720 Ekor 30000 Ekor							
874	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi									
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2 Laporan	9.791.667.602,00	0,00	0,00	0,00	9.791.667.602,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem	8 RPH							
875	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya									
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3 Kasus	76.613.410,00	0,00	0,00	0,00	76.613.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan	60 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	102 Kelompok/Unit							
876	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani									
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	102 Kelompok	133.073.630,00	0,00	0,00	0,00	133.073.630,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai							
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
877	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	469.849.162,00	0,00	0,00	0,00	469.849.162,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
878	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	301.514.152,00	0,00	0,00	0,00	301.514.152,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen							
879	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	293 Orang/Bulan	59.247.337.822,00	0,00	0,00	0,00	59.247.337.822,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
880	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	295.899.180,00	0,00	0,00	0,00	295.899.180,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
881	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.263.000,00	0,00	0,00	0,00	19.263.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
882	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	53.274.500,00	167.607.800,00	0,00	0,00	220.882.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
883	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.003.400,00	0,00	0,00	0,00	67.003.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
884	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	19.125.000,00	0,00	0,00	0,00	19.125.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
885	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	107.840.000,00	0,00	0,00	0,00	107.840.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
886	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	417.000.000,00	0,00	0,00	0,00	417.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
887	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	296.109.662,00	0,00	0,00	0,00	296.109.662,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
888	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	58 Unit	1.845.842.822,00	0,00	0,00	0,00	1.845.842.822,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
889	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	742.110.364,00	0,00	0,00	0,00	742.110.364,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
890	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	314 Unit	180.800.000,00	0,00	0,00	0,00	180.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Produk Bersertifikat Organik Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	1,10 Persen 95,9 Persen							
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang Bersertifikat Organik	3 Sertifikat							
891	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5 Sertifikat	316.812.760,00	0,00	0,00	0,00	316.812.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
892	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	12 Dokumen	145.177.112,00	0,00	0,00	0,00	145.177.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai							
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
893	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.927.800,00	0,00	0,00	0,00	3.927.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
894	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.930.900,00	17.648.960,00	0,00	0,00	32.579.860,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
895	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
896	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	127.230.000,00	0,00	0,00	0,00	127.230.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
897	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	104.721.230,00	0,00	0,00	0,00	104.721.230,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
898	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	172.908.820,00	0,00	0,00	0,00	172.908.820,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
899	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	72.110.820,00	0,00	0,00	0,00	72.110.820,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
900	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	38 Unit	42.060.000,00	0,00	0,00	0,00	42.060.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kaja	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5 Persen							
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji Jumlah Unit Usaha PAH dan PSAT yang diuji	1000 Unit 75 Dokumen							
901	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit									
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000 Unit	233.221.240,00	0,00	0,00	0,00	233.221.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
902	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner									
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75 Dokumen	299.104.820,00	0,00	0,00	0,00	299.104.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)	82,91 Persen							
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	9 Kabupaten/Kota							
903	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4 Ha	423.615.100,00	0,00	0,00	0,00	423.615.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
904	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2 Ha	492.402.740,00	0,00	0,00	0,00	492.402.740,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
905	3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan									
			Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1 Laporan	335.163.354,00	0,00	0,00	0,00	335.163.354,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun							
906	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	599.900,00	0,00	0,00	0,00	599.900,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
907	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.056.000,00	0,00	0,00	0,00	5.056.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
908	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
909	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.520.000,00	0,00	0,00	0,00	220.520.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
910	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	178.320.332,00	0,00	0,00	0,00	178.320.332,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tanguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
911	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78 Unit	232.277.312,00	0,00	0,00	0,00	232.277.312,00	Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
912	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	561.897.642,00	0,00	0,00	0,00	561.897.642,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tanguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
913	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	148 Unit	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	Kab. Buleleng, Seririt, Tangguwisia Kab. Gianyar, Sukawati, Celuk Kab. Gianyar, Blahbatuh, Bedulu Kab. Tabanan, Kerambitan, Timpag Kota Denpasar, Denpasar Timur, Kesiman Kertalangu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,82 Persen							
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3 Laporan							
914	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi									
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	2.030.315.210,00	0,00	0,00	0,00	2.030.315.210,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
915	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.095.200,00	0,00	0,00	0,00	6.095.200,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
916	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.126.500,00	0,00	0,00	0,00	11.126.500,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
917	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
918	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
919	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	262.970.816,00	0,00	0,00	0,00	262.970.816,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
920	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	238.971.640,00	0,00	0,00	0,00	238.971.640,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
921	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	275.943.280,00	0,00	0,00	0,00	275.943.280,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
922	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	4.870.000,00	0,00	0,00	0,00	4.870.000,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Baturiti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Lokasi	Sumber Dana
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)							
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan										
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,70 Persen								
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3 Jenis								
923	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih										
			Jumlah Sertifikat Benih	75 Sertifikat	330.785.372,00	0,00	0,00	0,00	330.785.372,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
924	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan										
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	120 laporan	331.592.852,00	0,00	0,00	0,00	331.592.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai								
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket								
925	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.197.300,00	0,00	0,00	0,00	3.197.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
926	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.269.200,00	0,00	0,00	0,00	7.269.200,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
927	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000,00	0,00	0,00	0,00	32.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
928	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	135.109.000,00	0,00	0,00	0,00	135.109.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
929	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.074.020,00	0,00	0,00	0,00	72.074.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
930	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 Unit	127.155.410,00	0,00	0,00	0,00	127.155.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
931	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
932	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	11.850.000,00	0,00	0,00	0,00	11.850.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Sesetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,70 Persen							
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Laporan							
933	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	37500 Batang	554.830.310,00	0,00	0,00	0,00	554.830.310,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
934	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji									
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	5000000 Gram	662.854.730,00	0,00	0,00	0,00	662.854.730,00	Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
935	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih									
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	3 Ton	401.042.372,00	0,00	0,00	0,00	401.042.372,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Kerambitan, Meliling	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
936	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi									
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	0,75 Ton	364.569.924,00	0,00	0,00	0,00	364.569.924,00	Kab. Tabanan, Baturiti, Candikuning	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pengembangan tanaman puspa dewata dan tanaman usada	1 Laporan							
937	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1 Laporan	47.194.200,00	0,00	0,00	0,00	47.194.200,00	Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Rendang, Besakih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,60 Nilai							
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket							
938	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.996.900,00	0,00	0,00	0,00	1.996.900,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
939	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.998.100,00	0,00	0,00	0,00	5.998.100,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
940	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
941	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	117.912.191,00	0,00	0,00	0,00	117.912.191,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
942	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	107.999.312,00	0,00	0,00	0,00	107.999.312,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun							
943	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	85.570.410,00	0,00	0,00	0,00	85.570.410,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
944	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	42.566.492,00	0,00	0,00	0,00	42.566.492,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
945	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.920.000,00	0,00	0,00	0,00	2.920.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Baturiti, Luwus	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan bidang lingkungan yang disusun dengan kualitas baik	100 Persen							
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen							
946	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi									
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	104.999.800,00	0,00	0,00	0,00	104.999.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen							
947	2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS									
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen	112.110.820,00	0,00	0,00	0,00	112.110.820,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi GRK Indeks kualitas air Indeks kualitas air laut Indeks kualitas udara	13.26 Persen 63.10 Nilai 69.95 Nilai 88.65 Nilai							
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100 Persen							
948	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	157.493.600,00	0,00	0,00	0,00	157.493.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
949	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	109.960.000,00	0,00	0,00	0,00	109.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase penyusunan rencana pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100 Persen							
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen							
950	2.11.04.1.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									
			Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	73.261.000,00	0,00	0,00	0,00	73.261.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase perusahaan yang difasilitasi pemenuhan ijin pengumpulan limbah B3	100 Persen							
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilaksanakan	100 Persen							
951	2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	58.056.300,00	0,00	0,00	0,00	58.056.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap ijin lingkungan	70 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH	100 Persen							
952	2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	19.999.700,00	0,00	0,00	0,00	19.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	30 Persen 70 Persen							
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota dan Desa Adat/Desa/Kelurahan yang dibina dan dimonitoring dalam pengelolaan sampah berbasis sumber dan dalam tata laksana pengelolaan limbah B3	9 Kab/Kota							
953	2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1.117.590.230,00	0,00	0,00	0,00	1.117.590.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kinerja dunia pendidikan/ masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	35 Persen							
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Persentase pelaksanaan penilaian masyarakat/lembaga/pendidikan dalam PPLH	100 Persen							
954	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 Entitas	57.999.700,00	0,00	0,00	0,00	57.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat terkait permasalahan lingkungan	100 Persen							
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100 Persen							
955	2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi									
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	1 Pengaduan	19.994.300,00	0,00	0,00	0,00	19.994.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan	3.16 Persen							
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	100 Persen							
956	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan									
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	198.400.230,00	0,00	0,00	0,00	198.400.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peningkatan kelas kelompok	4.23 Persen							
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	100 Persen							
957	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	30.000.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Indeks Kualitas Lahan Persentase penurunan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan	42.16 Nilai 6.82 Persen							
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100 Persen							
958	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS									
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	89.554.810,00	0,00	0,00	0,00	89.554.810,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup)	A Nilai							
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 Persen							
959	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	37.694.200,00	0,00	0,00	0,00	37.694.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen							
960	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	194 Orang/ Bulan	40.168.919.046,00	0,00	0,00	0,00	40.168.919.046,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
961	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	43.679.800,00	0,00	0,00	0,00	43.679.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu	100 Persen							
962	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.097.000,00	0,00	0,00	0,00	17.097.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
963	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	47.975.000,00	0,00	0,00	0,00	47.975.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
964	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	97.000.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
965	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.350.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
966	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
967	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	593.922.000,00	0,00	0,00	0,00	593.922.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan	100 Persen							
968	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	196.560.000,00	0,00	0,00	0,00	196.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
969	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	413.283.344,00	0,00	0,00	0,00	413.283.344,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	100 Persen							
970	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	840.290.360,00	0,00	0,00	0,00	840.290.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
971	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit	472.289.248,00	0,00	0,00	0,00	472.289.248,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Utara)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen							
972	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.205.900,00	0,00	0,00	0,00	3.205.900,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
973	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.025.900,00	0,00	0,00	0,00	10.025.900,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
974	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.650.000,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
975	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	13.920.000,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen							
976	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuasari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
977	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	43.753.592,00	0,00	0,00	0,00	43.753.592,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuwarsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Utara	100 Persen							
978	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	149.705.410,00	0,00	0,00	0,00	149.705.410,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuwarsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
979	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	657.084.954,00	0,00	0,00	0,00	657.084.954,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Banyuwarsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Timur)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen							
980	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.129.800,00	0,00	0,00	0,00	3.129.800,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
981	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.443.900,00	0,00	0,00	0,00	13.443.900,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
982	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
983	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.698.100,00	0,00	0,00	0,00	3.698.100,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen							
984	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18.050.000,00	0,00	0,00	0,00	18.050.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
985	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.434.092,00	0,00	0,00	0,00	44.434.092,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Timur	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
986	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	488.554.597,00	0,00	0,00	0,00	488.554.597,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
987	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	7.140.000,00	0,00	0,00	0,00	7.140.000,00	Kab. Bangli, Kintamani, Kintamani Kab. Karangasem, Rendang, Rendang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Selatan)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen							
988	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.373.700,00	0,00	0,00	0,00	1.373.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
989	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.355.700,00	0,00	0,00	0,00	11.355.700,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
990	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
991	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.707.300,00	0,00	0,00	0,00	1.707.300,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
992	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.560.000,00	0,00	0,00	0,00	10.560.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen							
993	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
994	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	110.397.312,00	0,00	0,00	0,00	110.397.312,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Selatan	100 Persen							
995	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	223.154.492,00	0,00	0,00	0,00	223.154.492,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
996	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	9.990.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD KPH Bali Barat)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen							
997	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.137.000,00	0,00	0,00	0,00	3.137.000,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
998	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.811.900,00	0,00	0,00	0,00	10.811.900,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
999	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1000	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.502.800,00	0,00	0,00	0,00	2.502.800,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1001	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	12.960.000,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen							
1002	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	23.940.000,00	0,00	0,00	0,00	23.940.000,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1003	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	44.379.792,00	0,00	0,00	0,00	44.379.792,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD KPH Bali Barat	100 Persen							
1004	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	123.425.000,00	0,00	0,00	0,00	123.425.000,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1005	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	86.382.984,00	0,00	0,00	0,00	86.382.984,00	Kab. Jembrana, Jembrana, Dauhwaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Tahura Ngurah Rai)	A Nilai							
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan dilaksanakan tepat waktu di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen							
1006	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.530.500,00	0,00	0,00	0,00	2.530.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1007	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.920.800,00	0,00	0,00	0,00	6.920.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1008	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1009	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.598.700,00	0,00	0,00	0,00	2.598.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan penyediaan jasa penunjang yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen							
1010	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	324.000.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1011	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	243.354.292,00	0,00	0,00	0,00	243.354.292,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Tahura Ngurah Rai	100 Persen							
1012	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	112.130.000,00	0,00	0,00	0,00	112.130.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1013	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	884.133.673,00	0,00	0,00	0,00	884.133.673,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1014	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	11.970.000,00	0,00	0,00	0,00	11.970.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kepuasan masyarakat di dalam pelayanan laboratorium lingkungan	94.85 Persen							
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Kompetensi Laboratorium Menuju Akreditasi	27 Persen							
1015	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi									
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	252.757.125,00	0,00	0,00	0,00	252.757.125,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup)	A Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Laboratorium LH	100 Persen							
1016	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.866.500,00	0,00	0,00	0,00	4.866.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1017	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	935.500,00	0,00	0,00	0,00	935.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen							
1018	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.299.040,00	17.615.500,00	0,00	0,00	31.914.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Laboratorium LH	100 Persen							
1019	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	97.970.820,00	0,00	0,00	0,00	97.970.820,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengelolaan Sampah									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pelayanan pengelolaan persampahan pada TPA Regional	100 Persen							
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase Penanganan Sampah di TPA Regional yang terlaksana	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1020	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional									
			Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	8.143.408.590,00	2.925.000.000,00	0,00	0,00	11.068.408.590,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pungutan bagi Wisatawan Asing
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Pengelolaan Sampah)	A Nilai							
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan tepat waktu di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen							
1021	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.229.000,00	0,00	0,00	0,00	5.229.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1022	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.701.300,00	0,00	0,00	0,00	11.701.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1023	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Pemogan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1024	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.917.000,00	0,00	0,00	0,00	3.917.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1025	2.11.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan di UPTD Pengelolaan Sampah	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1026	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	330.930.974,00	0,00	0,00	0,00	330.930.974,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1027	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	27 Unit	118.270.000,00	0,00	0,00	0,00	118.270.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,00 Indeks							
	3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen							
1028	3.30.02.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA									
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	302.955.644,00	0,00	0,00	0,00	302.955.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	1 Pasar							
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dibina Jumlah Toko Swalayan yang dibina	18 Pasar 18 Toko Swalayan							
1029	3.30.03.1.01.0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	36 Laporan	24.968.600,00	0,00	0,00	0,00	24.968.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7 Persen							
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	18 Kali							
1030	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Laporan	243.576.100,00	0,00	0,00	0,00	243.576.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	55 Persen							
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi pameran	4 Pelaku Usaha							
1031	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor									
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	50 Produk	99.999.600,00	0,00	0,00	0,00	99.999.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,72 Indeks							
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Konsumen yang Diproses	100 %							
1032	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen									
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1033	3.30.06.1.01.0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	3 LPKSM	9.992.200,00	0,00	0,00	0,00	9.992.200,00	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku usaha yang menerapkan Tertib Niaga Persentase Produk yang sesuai dengan ketentuan	100 % 100 %							
1034	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	100 Laporan	123.621.202,00	0,00	0,00	0,00	123.621.202,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk lokal krama bali	30 Persen							
	3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal Bali	35 Pelaku Usaha							
1035	3.30.07.1.03.0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi									
			Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	5 Laporan	300.832.962,00	0,00	0,00	0,00	300.832.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali)	82,50							
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1036	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	66.082.800,00	0,00	0,00	0,00	66.082.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Sub Kegiatan							
1037	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	15.665.986.223,00	0,00	0,00	0,00	15.665.986.223,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Sub Kegiatan 100 %							
1038	3.30.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	6 Sub Kegiatan							
1039	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.267.000,00	0,00	0,00	0,00	18.267.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1040	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	111.454.400,00	476.633.000,00	0,00	0,00	588.087.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1041	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.483.394,00	0,00	0,00	0,00	67.483.394,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1042	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14.840.000,00	0,00	0,00	0,00	14.840.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1043	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6.424.000,00	0,00	0,00	0,00	6.424.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1044	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	316.901.000,00	0,00	0,00	0,00	316.901.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	3 Sub Kegiatan							
1045	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340.000.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1046	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	576.131.150,00	0,00	0,00	0,00	576.131.150,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1047	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	227.194.900,00	0,00	0,00	0,00	227.194.900,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Sub Kegiatan							
1048	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	834.042.460,00	0,00	0,00	0,00	834.042.460,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1049	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	151.553.984,00	0,00	0,00	0,00	151.553.984,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen							
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1.5 %							
1050	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	9 Dokumen	137.682.000,00	0,00	0,00	0,00	137.682.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1051	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	1.700.626.786,00	0,00	0,00	0,00	1.700.626.786,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 Persen							
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Data Industri yang terkumpul	100 %							
1052	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	150 Dokumen	49.999.900,00	0,00	0,00	0,00	49.999.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Rumah Kreatif									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
	3.31.02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase industri kreatif yang tumbuh	1,5 Persen							
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase Industri yang dibina	1.5 %							
1053	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	827.213.500,00	0,00	0,00	0,00	827.213.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Rumah Kreatif)	82,50							
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Sub Kegiatan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1054	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.821.900,00	10.613.160,00	0,00	0,00	33.435.060,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1055	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.450.500,00	0,00	0,00	0,00	2.450.500,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1056	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.212.000,00	0,00	0,00	0,00	3.212.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1057	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.680.000,00	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	1 Sub Kegiatan							
1058	3.31.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	44.555.410,00	0,00	0,00	0,00	44.555.410,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan							
1059	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	104.051.492,00	0,00	0,00	0,00	104.051.492,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang									
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	49,72 Indeks							
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat hasil pengujian yang di terbitkan	45 Sertifikat							
1060	3.30.06.1.02.0005	Pengembangan Layanan Pengujian									
			Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	45 laporan	244.401.176,00	0,00	0,00	0,00	244.401.176,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	82.50							
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5 Sub Kegiatan							
1061	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.455.700,00	0,00	0,00	0,00	1.455.700,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1062	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	21.887.400,00	0,00	0,00	0,00	21.887.400,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1063	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.038.040,00	0,00	0,00	0,00	16.038.040,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1065	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.280.000,00	0,00	0,00	0,00	6.280.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)	2 Sub Kegiatan							
1066	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1067	3.30.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	159.274.886,00	0,00	0,00	0,00	159.274.886,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Sub Kegiatan							
1068	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	120.969.044,00	0,00	0,00	0,00	120.969.044,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Hukum									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang diselesaikan dalam rangka kepastian hukum	100 %							
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka kepastian hukum	1220 Dokumen							
1069	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan									
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	45 Dokumen	936.594.722,00	0,00	0,00	0,00	936.594.722,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1070	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan									
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1000 Dokumen	161.709.540,00	0,00	0,00	0,00	161.709.540,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1071	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya									
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	50 Dokumen	269.300.042,00	0,00	0,00	0,00	269.300.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1072	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota									
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	125 Dokumen	443.463.170,00	0,00	0,00	0,00	443.463.170,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan	65 Kasus							
1073	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum									
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	33 Kasus	2.504.028.296,00	0,00	0,00	0,00	2.504.028.296,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1074	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	24 Kasus	263.703.440,00	0,00	0,00	0,00	263.703.440,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81 Nilai							
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	5 Paket							
1075	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.606.100,00	0,00	0,00	0,00	17.606.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1076	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	97.377.294,00	683.947.240,00	0,00	0,00	781.324.534,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1077	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10.990.900,00	0,00	0,00	0,00	10.990.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1078	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	229.491.000,00	0,00	0,00	0,00	229.491.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan	117 Unit							
1079	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	468.823.394,00	0,00	0,00	0,00	468.823.394,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1080	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	766.752.790,00	0,00	0,00	0,00	766.752.790,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1081	4.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1082	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Unit	58.290.000,00	0,00	0,00	0,00	58.290.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat Daerah									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83 Nilai							
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1083	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	262 Orang/ Bulan	78.743.344.494,00	0,00	0,00	0,00	78.743.344.494,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1084	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2.988.309.510,00	0,00	0,00	0,00	2.988.309.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Air Permukaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Persentase Realisasi Capaian SPM Provinsi Bali	75 %							
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kebijakan dan Regulasi yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %							
1085	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3 Dokumen	451.157.990,00	0,00	0,00	0,00	451.157.990,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1086	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	2 Dokumen	184.862.600,00	0,00	0,00	0,00	184.862.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kebijakan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100 %							
1087	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	2 Dokumen	399.993.300,00	0,00	0,00	0,00	399.993.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1088	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen	149.999.500,00	0,00	0,00	0,00	149.999.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100 %							
1089	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah									
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	2 Dokumen	339.909.422,00	0,00	0,00	0,00	339.909.422,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1090	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama									
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	1 Laporan	948.670.200,00	0,00	0,00	0,00	948.670.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Tindaklanjut Kebijakan Strategis yang mendukung Pengembangan Budaya Spiritual	100 %							
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Pengembangan Mental Spiritual	100 %							
1091	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	2.834.763.996,00	0,00	0,00	0,00	2.834.763.996,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1092	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual									
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	6 Lembaga	640.398.752,00	0,00	0,00	0,00	640.398.752,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	100 %							
1093	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1 Dokumen	25.865.611.676,00	0,00	0,00	0,00	25.865.611.676,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82 Nilai							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1094	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	332.213.362,00	0,00	0,00	0,00	332.213.362,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	100 %							
1095	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.976.600,00	0,00	0,00	0,00	15.976.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1096	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.026.000,00	398.256.320,00	0,00	0,00	416.282.320,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1097	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	31.727.000,00	0,00	0,00	0,00	31.727.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1098	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	339.429.000,00	0,00	0,00	0,00	339.429.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tertata	100 %							
1099	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	905.956.492,00	0,00	0,00	0,00	905.956.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1100	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	124 Unit	86.160.000,00	0,00	0,00	0,00	86.160.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1101	4.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	160 Unit	12.800.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Umum dan Protokol									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	- Persentase Lembaga Pemerintah, Organisasi dan Masyarakat yang tertib arsip - Nilai Evaluasi Kearsipan	100 Persentase 64 Nilai							
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Terwujudnya Penataan Arsip	100 Persen							
1102	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis									
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	1000 Arsip	372.965.866,00	0,00	0,00	0,00	372.965.866,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Nilai Reformasi Birokrasi Aspek Pelayanan Publik	22 Persen							
1103	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN									
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	150 Pengguna	60.757.500,00	0,00	0,00	0,00	60.757.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1104	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	45 Laporan	317.879.760,00	0,00	0,00	0,00	317.879.760,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	83 Nilai							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
1105	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	538.866.748,00	0,00	0,00	0,00	538.866.748,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1106	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	645.879.744,00	0,00	0,00	0,00	645.879.744,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen							
1107	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	21 Laporan	320.620.172,00	0,00	0,00	0,00	320.620.172,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen							
1108	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	645.221.040,00	39.916.800,00	0,00	0,00	685.137.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1109	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.952.676.318,00	694.995.040,00	0,00	0,00	2.647.671.358,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1110	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.336.554.462,00	0,00	0,00	0,00	7.336.554.462,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1111	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.194.377.134,00	0,00	0,00	0,00	10.194.377.134,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1112	4.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	520.540.874,00	0,00	0,00	0,00	520.540.874,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen							
1113	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.069.469.360,00	0,00	0,00	0,00	2.069.469.360,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1114	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	10.176.844.128,00	0,00	0,00	0,00	10.176.844.128,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1115	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	106 Laporan	5.891.296.300,00	0,00	0,00	0,00	5.891.296.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100 Persen							
1116	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	136 Unit	6.876.182.652,00	0,00	0,00	0,00	6.876.182.652,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1117	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	5.950.111.774,00	346.256.452,00	0,00	0,00	6.296.368.226,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil	100 Persen							
1118	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	5.372.057.408,00	0,00	0,00	0,00	5.372.057.408,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen							
1119	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	47 Paket	15.956.114.296,00	584.072.000,00	0,00	0,00	16.540.186.296,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1120	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	40 Paket	9.554.975.848,00	456.048.000,00	0,00	0,00	10.011.023.848,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1121	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah									
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	404.497.098,00	0,00	0,00	0,00	404.497.098,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen							
1122	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	541.115.000,00	0,00	0,00	0,00	541.115.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya Fasilitasi Keprotokolan	100 Persen							
1123	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan	2.079.394.124,00	0,00	0,00	0,00	2.079.394.124,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Organisasi									
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Tertangani dengan baik	58 %							
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik	12 %							
1124	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan									
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	50 Perpustakaan	70.066.492,00	0,00	0,00	0,00	70.066.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1125	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka									
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	55.066.392,00	45.000.000,00	0,00	0,00	100.066.392,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1126	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan									
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen	130.132.984,00	0,00	0,00	0,00	130.132.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Perpustakaan yang terlibat dalam Kegiatan Pembudayaan Kegemaran Membaca	39 %							
1127	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat									
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Lokus	70.066.492,00	0,00	0,00	0,00	70.066.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1128	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial									
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	15 Perpustakaan	130.132.984,00	0,00	0,00	0,00	130.132.984,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Daerah Bali yang dihimpun	4.20 %							
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Koleksi KCKR Daerah Bali yang dihimpun	300 Eksemplar							
1129	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam									
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	300 Eksemplar	110.132.984,00	0,00	0,00	0,00	110.132.984,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah yang Reformasi Birokrasinya Baik	89 %							
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	89 %							
1130	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1131	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1132	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	29 Dokumen	140.065.792,00	0,00	0,00	0,00	140.065.792,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Rencana Aksinya Baik	89 %							
1133	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	190.055.892,00	0,00	0,00	0,00	190.055.892,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1134	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	170.037.392,00	0,00	0,00	0,00	170.037.392,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1135	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	14.997.000,00	0,00	0,00	0,00	14.997.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1136	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2 Dokumen	140.065.492,00	0,00	0,00	0,00	140.065.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1137	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen	140.066.192,00	0,00	0,00	0,00	140.066.192,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Organisasi	86 Nilai							
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian diterbitkan	1 Dokumen							
1138	4.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	4.976.000,00	0,00	0,00	0,00	4.976.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan perbaikan yang ditindaklanjuti tepat waktu	100 %							
1139	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.999.900,00	0,00	0,00	0,00	19.999.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1140	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	438.559.188,00	175.493.140,00	0,00	0,00	614.052.328,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1141	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	310.342.000,00	0,00	0,00	0,00	310.342.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Terinventaris dengan baik.	1 Laporan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1142	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	789.308.052,00	0,00	0,00	0,00	789.308.052,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1143	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	117 Unit	80.450.000,00	0,00	0,00	0,00	80.450.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH									
	4.01.06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian Yang Ditindaklanjuti	100 Persen							
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro dan Mikro Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	2 Dokumen							
1144	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	369.987.000,00	0,00	0,00	0,00	369.987.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen							
1145	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	2 Dokumen	251.865.000,00	0,00	0,00	0,00	251.865.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen							
1146	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1 Dokumen	175.007.800,00	0,00	0,00	0,00	175.007.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	85 Persen							
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan							
1147	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	29.970.000,00	0,00	0,00	0,00	29.970.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1148	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	83.852.000,00	30.875.454.175,00	0,00	0,00	30.959.306.175,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1149	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	77.985.000,00	0,00	0,00	0,00	77.985.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan							
1150	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	12 Laporan	69.981.000,00	0,00	0,00	0,00	69.981.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1151	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	12 Laporan	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 Level							
1152	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	90 Orang	99.996.000,00	0,00	0,00	0,00	99.996.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1153	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	19.995.000,00	0,00	0,00	0,00	19.995.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1154	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	42.560.000,00	0,00	0,00	0,00	42.560.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku	87 Persen							
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	1 Laporan							
1155	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1 Laporan	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Laporan							
1156	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	44.400.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	82.5 Nilai							
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen							
1157	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	13.950.000,00	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan							
1158	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.386.246.936,00	629.246.900,00	0,00	0,00	2.015.493.836,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1159	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	45.464.000,00	0,00	0,00	0,00	45.464.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1160	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	284.960.000,00	0,00	0,00	0,00	284.960.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	12 Bulan							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1161	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	37 Unit	543.480.000,00	0,00	0,00	0,00	543.480.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1162	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	185 Unit	129.950.000,00	0,00	0,00	0,00	129.950.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Sekretariat DPRD									
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
	4.02	SEKRETARIAT DPRD									
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentase Fasilitasi Pelayanan Tugas dan Fungsi DPRD (SETWAN)	100 Persen							
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRD untuk Mendukung Kelancaran dan Tugas Fungsi DPRD	100 Persen							
1163	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1.931.295.420,00	0,00	0,00	0,00	1.931.295.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1164	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	21 Dokumen	20.090.198.230,00	0,00	0,00	0,00	20.090.198.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1165	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik									
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	926.795.510,00	0,00	0,00	0,00	926.795.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terbentuknya Kebijakan Anggaran Untuk Mendukung Kelancaran Tugas Fungsi DPRD	100 Persen							
1166	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.765.207.192,00	0,00	0,00	0,00	1.765.207.192,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1167	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1.685.902.010,00	0,00	0,00	0,00	1.685.902.010,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1168	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1.839.257.410,00	0,00	0,00	0,00	1.839.257.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1169	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	1.702.591.710,00	0,00	0,00	0,00	1.702.591.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1170	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1.812.628.310,00	0,00	0,00	0,00	1.812.628.310,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1171	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	9.602.197.714,00	0,00	0,00	0,00	9.602.197.714,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1172	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	9.599.763.250,00	0,00	0,00	0,00	9.599.763.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1173	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat									
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	8.786.622.980,00	0,00	0,00	0,00	8.786.622.980,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1174	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	10.684.155.020,00	0,00	0,00	0,00	10.684.155.020,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1175	4.02.02.1.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah									
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.665.224.500,00	0,00	0,00	0,00	1.665.224.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD untuk menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1176	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	6.285.481.230,00	0,00	0,00	0,00	6.285.481.230,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1177	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli									
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	18 Orang	4.872.166.400,00	0,00	0,00	0,00	4.872.166.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1178	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi									
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	730.186.800,00	0,00	0,00	0,00	730.186.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1179	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.477.743.520,00	0,00	0,00	0,00	1.477.743.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1180	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD									
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	60 Dokumen	4.318.303.470,00	0,00	0,00	0,00	4.318.303.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terserap dan Terhimpunnya Aspirasi Masyarakat untuk Menunjang Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1181	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan	3.810.849.012,00	0,00	0,00	0,00	3.810.849.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1182	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD									
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen	886.076.800,00	0,00	0,00	0,00	886.076.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1183	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	35.222.107.320,00	0,00	0,00	0,00	35.222.107.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-							
1184	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan	862.378.564,00	0,00	0,00	0,00	862.378.564,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-							
1185	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	10 Dokumen	9.648.671.930,00	0,00	0,00	0,00	9.648.671.930,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1186	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD									
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	180 Laporan	507.423.720,00	0,00	0,00	0,00	507.423.720,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1187	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	3.688.751.700,00	0,00	0,00	0,00	3.688.751.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (SETWAN)	86 Persen							
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan Terhadap Penganggaran Belanja OPD	100 Persen							
1188	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	491.165.710,00	0,00	0,00	0,00	491.165.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1189	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	307.463.410,00	0,00	0,00	0,00	307.463.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen							
1190	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134 Orang/ Bulan	13.882.480.678,00	0,00	0,00	0,00	13.882.480.678,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1191	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	155.478.410,00	0,00	0,00	0,00	155.478.410,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1192	4.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD									
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	151.841.510,00	0,00	0,00	0,00	151.841.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Selesai Dengan Baik dan Di Sampaikan Tepat Waktu	100 Persen							
1193	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	169.070.300,00	0,00	0,00	0,00	169.070.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1194	4.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	460.016.000,00	0,00	0,00	0,00	460.016.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1195	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	1.834.120.446,00	0,00	0,00	0,00	1.834.120.446,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1196	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	168.631.600,00	0,00	0,00	0,00	168.631.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1197	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.075.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.320.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1198	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	8.802.329.336,00	0,00	0,00	0,00	8.802.329.336,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Selesai Dengan Baik dan Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen							
1199	4.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	77.600.000,00	12.434.375.500,00	0,00	0,00	12.511.975.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pelayanan Penunjang Kantor Yang Selesai Dengan Baik Dan Berkualitas	100 Persen							
1200	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.700.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1201	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	380.000.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1202	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.677.324.042,00	0,00	0,00	0,00	1.677.324.042,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terpelihara Dengan Baik	100 Persen							
1203	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	61 Unit	3.750.756.238,00	0,00	0,00	0,00	3.750.756.238,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1204	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.015.661.300,00	21.388.884.912,00	0,00	0,00	24.404.546.212,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
1205	4.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	643.040.000,00	0,00	0,00	0,00	643.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1206	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	55 Orang/ Bulan	59.732.867.624,00	0,00	0,00	0,00	59.732.867.624,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1207	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	729 Paket	1.694.242.500,00	0,00	0,00	0,00	1.694.242.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1208	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	314.618.510,00	0,00	0,00	0,00	314.618.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi Untuk Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen							
1209	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	30 Laporan	184.444.240,00	0,00	0,00	0,00	184.444.240,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1210	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD									
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan	932.320.400,00	0,00	0,00	0,00	932.320.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.01	PERENCANAAN									
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	100 Persen							
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi	3 Dokumen							
1211	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	84.497.500,00	0,00	0,00	0,00	84.497.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1212	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi									
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	164.767.400,00	0,00	0,00	0,00	164.767.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1213	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	1.558.970.642,00	0,00	0,00	0,00	1.558.970.642,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah	7 Dokumen							
1214	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	522.329.832,00	0,00	0,00	0,00	522.329.832,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1215	5.01.02.1.02.0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi									
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	31.109.200,00	0,00	0,00	0,00	31.109.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan berlaku	41 Dokumen							
1216	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	274.355.700,00	0,00	0,00	0,00	274.355.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1217	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	6 Laporan	582.461.632,00	0,00	0,00	0,00	582.461.632,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1218	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	27 Dokumen	239.556.800,00	0,00	0,00	0,00	239.556.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data SIPD	1 Dokumen							
1219	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	91.369.700,00	0,00	0,00	0,00	91.369.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	100 Persen							
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen							
1220	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	132.314.520,00	0,00	0,00	0,00	132.314.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1221	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	116.194.510,00	0,00	0,00	0,00	116.194.510,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1222	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	275.847.622,00	0,00	0,00	0,00	275.847.622,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1223	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	224.219.112,00	0,00	0,00	0,00	224.219.112,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	4 Dokumen							
1224	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	240.081.022,00	0,00	0,00	0,00	240.081.022,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1225	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	229.211.812,00	0,00	0,00	0,00	229.211.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1226	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	85.873.110,00	0,00	0,00	0,00	85.873.110,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1227	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	193.409.620,00	0,00	0,00	0,00	193.409.620,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infratraktur dan Kewilayahan	1 Dokumen							
1228	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	326.252.960,00	0,00	0,00	0,00	326.252.960,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1229	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	78.929.700,00	0,00	0,00	0,00	78.929.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1230	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	285.012.150,00	0,00	0,00	0,00	285.012.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1231	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan									
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	78.913.600,00	0,00	0,00	0,00	78.913.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,15 Nilai							
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28 Dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1232	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	227.981.114,00	0,00	0,00	0,00	227.981.114,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1233	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	11.474.400,00	0,00	0,00	0,00	11.474.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1234	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	11.444.900,00	0,00	0,00	0,00	11.444.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1235	5.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	35.221.600,00	0,00	0,00	0,00	35.221.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Jenis							
1236	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	16.365.850.481,00	0,00	0,00	0,00	16.365.850.481,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1237	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	176.934.150,00	0,00	0,00	0,00	176.934.150,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1238	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	14 Dokumen	128.225.512,00	0,00	0,00	0,00	128.225.512,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Jenis							
1239	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	64.000.810,00	0,00	0,00	0,00	64.000.810,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1240	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	87.046.592,00	643.741.640,00	0,00	0,00	730.788.232,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1241	5.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	129.063.004,00	0,00	0,00	0,00	129.063.004,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1242	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	66.119.210,00	0,00	0,00	0,00	66.119.210,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1243	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	63.183.410,00	0,00	0,00	0,00	63.183.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1244	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	99.255.410,00	0,00	0,00	0,00	99.255.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1245	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	734.696.410,00	0,00	0,00	0,00	734.696.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis							
1246	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	361.989.600,00	0,00	0,00	361.989.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1247	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	49.155.092,00	0,00	0,00	0,00	49.155.092,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Laporan							
1248	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	36.616.910,00	0,00	0,00	0,00	36.616.910,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1249	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	197.266.492,00	0,00	0,00	0,00	197.266.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1250	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	726.775.182,00	0,00	0,00	0,00	726.775.182,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	227 Unit							
1251	5.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	771.388.362,00	0,00	0,00	0,00	771.388.362,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1252	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	190 Unit	192.660.410,00	0,00	0,00	0,00	192.660.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1253	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	346.066.492,00	1.714.616.000,00	0,00	0,00	2.060.682.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penyusunan Perda dan Pergub APBD Provinsi serta SK Evaluasi Ranperda/Ranperbup/Ranperwali dan Penyerapan Anggaran Tepat Waktu	100 Persen							
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase dokumen Rencana Anggaran Daerah Pemerintah Provinsi Bali disusun tepat waktu	72 Dokumen							
1254	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS									
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	58.287.100,00	0,00	0,00	0,00	58.287.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1255	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS									
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	58.110.300,00	0,00	0,00	0,00	58.110.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1256	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD									
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	40.764.500,00	0,00	0,00	0,00	40.764.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1257	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	20.456.000,00	0,00	0,00	0,00	20.456.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1258	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	1.089.801.740,00	0,00	0,00	0,00	1.089.801.740,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1259	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD									
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	674.584.700,00	0,00	0,00	0,00	674.584.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SK Gubernur tentang evaluasi kabupaten/kota disusun tepat waktu	27 SK Gubernur							
1260	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	9 Laporan	140.119.200,00	0,00	0,00	0,00	140.119.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1261	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	118.846.700,00	0,00	0,00	0,00	118.846.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1262	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	9 Laporan	143.127.400,00	0,00	0,00	0,00	143.127.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1263	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	9 Dokumen	194.972.400,00	0,00	0,00	0,00	194.972.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1264	5.02.02.1.02.0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota									
			Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	9 Dokumen	188.929.000,00	0,00	0,00	0,00	188.929.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase laporan perbendaharaan disusun tepat waktu	6 dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1265	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)									
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	609.999.800,00	0,00	0,00	0,00	609.999.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase dokumen Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD disusun tepat waktu	2 dokumen							
1266	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	628.600.306,00	0,00	0,00	0,00	628.600.306,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1267	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi									
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen	103.404.400,00	0,00	0,00	0,00	103.404.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan daerah disusun tepat waktu	4 dokumen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1268	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.026.843.633,00	0,00	0,00	0,00	2.026.843.633,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
1269	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	205.265.185.944,00	205.265.185.944,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Rokok Pungutan bagi Wisatawan Asing
1270	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	0,00	0,00	151.187.931.213,00	0,00	151.187.931.213,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) DAK Non Fisik-BOS Kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)
1271	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	582.188.016.684,00	582.188.016.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Air Permukaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Rokok
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan implementasi SIPD	12 dokumen							
1272	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12 Dokumen	145.903.500,00	0,00	0,00	0,00	145.903.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100 Persen 46.00 Persen							
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 dokumen 46 Persen							
1273	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga									
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	118.872.300,00	0,00	0,00	0,00	118.872.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1274	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	7 Dokumen	44.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1275	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	323.449.000,00	0,00	0,00	0,00	323.449.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1276	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen	1.295.156.812,00	0,00	0,00	0,00	1.295.156.812,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)	87.5 Nilai							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah disusun tepat waktu	9 dokumen							
1277	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	75.487.200,00	0,00	0,00	0,00	75.487.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen administrasi keuangan tepat waktu	2244 dokumen							
1278	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/ Bulan	20.152.321.982,00	0,00	0,00	0,00	20.152.321.982,00	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Retribusi Jasa Usaha
1279	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2200 Dokumen	8.628.432.002,00	0,00	0,00	0,00	8.628.432.002,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 tahun							
1280	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.204.900,00	0,00	0,00	0,00	18.204.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1281	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	67.110.820,00	983.168.040,00	0,00	0,00	1.050.278.860,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1282	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	324.675.840,00	0,00	0,00	0,00	324.675.840,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1283	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.587.800,00	0,00	0,00	0,00	12.587.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1284	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.999.900,00	0,00	0,00	0,00	7.999.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1285	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	127.305.410,00	0,00	0,00	0,00	127.305.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1286	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	544.586.000,00	0,00	0,00	0,00	544.586.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 tahun							
1287	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.710.000,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1288	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	285.300.000,00	0,00	0,00	0,00	285.300.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 tahun							
1289	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	844.089.830,00	0,00	0,00	0,00	844.089.830,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1290	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel									
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	15.520.000,00	0,00	0,00	0,00	15.520.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1291	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	171.456.710,00	0,00	0,00	0,00	171.456.710,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1292	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.043.777.914,00	131.546.600,00	0,00	0,00	1.175.324.514,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang Terpenuhi Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100 Persen 46.00 Persen							
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase laporan Barang Milik Daerah disusun tepat waktu Persentase Realisasi PAD dari Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1 dokumen 46 Persen							
1293	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	6 Laporan	2.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (BPKAD)	87.5 Nilai							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase laporan pelaksanaan administrasi umum disusun tepat waktu	1 tahun							
1294	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.748.500,00	0,00	0,00	0,00	43.748.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1295	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.449.100,00	0,00	0,00	0,00	9.449.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1296	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1297	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	10.485.000,00	0,00	0,00	0,00	10.485.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1298	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	93.271.000,00	0,00	0,00	0,00	93.271.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan jasa penunjang yang disusun tepat waktu	1 tahun							
1299	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1300	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1 tahun							
1301	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	154.525.000,00	0,00	0,00	0,00	154.525.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1302	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	15.260.000,00	0,00	0,00	0,00	15.260.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
1303	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	629.690.444,00	0,00	0,00	0,00	629.690.444,00	Kota Denpasar, Denpasar Barat, Dauh Puri Kelod	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
		Badan Pendapatan Daerah									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase perencanaan dan pelaporan keuangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 persen							
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan keuangan (pendapatan) di Kab/Kota yang terbina	100 persen							
1304	5.02.02.1.02.0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	1 Laporan	27.008.900,00	0,00	0,00	0,00	27.008.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian PAD terhadap target PAD	100 Persen							
1305	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	238.541.400,00	0,00	0,00	0,00	238.541.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1306	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	259.290.600,00	0,00	0,00	0,00	259.290.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1307	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	143.625.200,00	0,00	0,00	0,00	143.625.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1308	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Laporan	378.095.700,00	0,00	0,00	0,00	378.095.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1309	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	47.120.000,00	0,00	0,00	0,00	47.120.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100 Persen							
1310	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	22.721.100,00	0,00	0,00	0,00	22.721.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1311	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	24.941.200,00	0,00	0,00	0,00	24.941.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1312	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	340 Orang/ Bulan	140.831.740.151,00	0,00	0,00	0,00	140.831.740.151,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Air Permukaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1313	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1314	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.039.000,00	0,00	0,00	0,00	7.039.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1315	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	318.006.500,00	0,00	0,00	0,00	318.006.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1316	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	101.575.894,00	0,00	0,00	0,00	101.575.894,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1317	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	54.960.300,00	0,00	0,00	0,00	54.960.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1318	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.428.800,00	0,00	0,00	0,00	2.428.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1319	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1320	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	483.325.000,00	0,00	0,00	0,00	483.325.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1321	5.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	0,00	226.733.625,00	0,00	0,00	226.733.625,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1322	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	90 Unit	0,00	970.874.300,00	0,00	0,00	970.874.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1323	5.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	14.636.000,00	6.540.431.524,00	0,00	0,00	6.555.067.524,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1324	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.148.700,00	0,00	0,00	0,00	3.148.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1325	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	387.433.104,00	0,00	0,00	0,00	387.433.104,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Dana Alokasi Umum (DAU)
1326	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	420.453.373,00	0,00	0,00	0,00	420.453.373,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1327	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	124.469.592,00	0,00	0,00	0,00	124.469.592,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1328	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	1.434.609.652,00	0,00	0,00	0,00	1.434.609.652,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1329	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	839.934.430,00	0,00	0,00	0,00	839.934.430,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1330	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	571.794.960,00	712.457.500,00	0,00	0,00	1.284.252.460,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1331	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	1.213.538.973,00	0,00	0,00	0,00	1.213.538.973,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56,23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							
1332	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	1.753.359.942,00	0,00	0,00	0,00	1.753.359.942,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1333	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	5000 Dokumen SSPD	1.715.377.516,00	0,00	0,00	0,00	1.715.377.516,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1334	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.259.300,00	0,00	0,00	0,00	5.259.300,00	Kab. Buleleng, Baktiseraga	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1335	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	134.216.140,00	0,00	0,00	0,00	134.216.140,00	Kab. Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1336	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1337	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	10.239.200,00	0,00	0,00	0,00	10.239.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1338	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.854.500,00	0,00	0,00	0,00	4.854.500,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1339	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1340	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	77.400.000,00	0,00	0,00	0,00	77.400.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1341	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.789.800,00	0,00	0,00	0,00	1.789.800,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1342	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	261.000.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1343	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1344	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1345	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	175.714.492,00	0,00	0,00	0,00	175.714.492,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1346	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	21.180.000,00	0,00	0,00	0,00	21.180.000,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1347	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	643.353.314,00	0,00	0,00	0,00	643.353.314,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1348	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	16.723.800,00	0,00	0,00	0,00	16.723.800,00	Kab. Buleleng, Buleleng, Baktiseraga	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							
1349	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	360.859.772,00	0,00	0,00	0,00	360.859.772,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1350	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	14518 Dokumen SSPD	671.186.002,00	0,00	0,00	0,00	671.186.002,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1351	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3.664.700,00	0,00	0,00	0,00	3.664.700,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1352	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	122.248.420,00	0,00	0,00	0,00	122.248.420,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1353	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1354	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.691.900,00	0,00	0,00	0,00	4.691.900,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1355	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.775.000,00	0,00	0,00	0,00	4.775.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1356	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	29.700.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1357	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.491.500,00	0,00	0,00	0,00	1.491.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1358	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	181.000.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1359	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	190.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1360	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	46.703.000,00	0,00	0,00	0,00	46.703.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1361	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	154.708.392,00	0,00	0,00	0,00	154.708.392,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1362	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	41.020.000,00	0,00	0,00	0,00	41.020.000,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1363	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	430.385.464,00	0,00	0,00	0,00	430.385.464,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1364	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23 Unit	20.625.800,00	0,00	0,00	0,00	20.625.800,00	Kab. Jembrana, Negara, Banyu Biru	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							
1365	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	449.620.592,00	0,00	0,00	0,00	449.620.592,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1366	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	12620 Dokumen SSPD	498.676.002,00	0,00	0,00	0,00	498.676.002,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1367	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.949.800,00	0,00	0,00	0,00	6.949.800,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1368	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	136.866.890,00	0,00	0,00	0,00	136.866.890,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1369	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1370	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.783.700,00	0,00	0,00	0,00	6.783.700,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1371	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	3.375.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1372	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	21.285.000,00	0,00	0,00	0,00	21.285.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1373	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.978.200,00	0,00	0,00	0,00	1.978.200,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1374	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1375	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	294.000.000,00	0,00	0,00	0,00	294.000.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1376	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.855.000,00	0,00	0,00	0,00	45.855.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1377	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	225.937.992,00	0,00	0,00	0,00	225.937.992,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1378	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	21.460.000,00	0,00	0,00	0,00	21.460.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1379	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	533.098.428,00	0,00	0,00	0,00	533.098.428,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1380	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	16.250.000,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	Kab. Tabanan, Tabanan, Dajan Peken	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							
1381	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	2.140.725.352,00	0,00	0,00	0,00	2.140.725.352,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1382	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	288 Dokumen SSPD	665.703.576,00	0,00	0,00	0,00	665.703.576,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1383	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5.037.600,00	0,00	0,00	0,00	5.037.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1384	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	133.993.390,00	0,00	0,00	0,00	133.993.390,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1385	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1386	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	17.186.050,00	0,00	0,00	0,00	17.186.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1387	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.840.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1388	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	10.575.000,00	0,00	0,00	0,00	10.575.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1389	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	18.120.000,00	0,00	0,00	0,00	18.120.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1390	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.978.200,00	0,00	0,00	0,00	1.978.200,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1391	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	378.000.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1392	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	437.230.947,00	0,00	0,00	0,00	437.230.947,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1393	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	36.265.000,00	0,00	0,00	0,00	36.265.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1394	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	188.338.992,00	0,00	0,00	0,00	188.338.992,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1395	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00	19.920.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1396	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	664.194.297,00	0,00	0,00	0,00	664.194.297,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1397	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	27.840.000,00	0,00	0,00	0,00	27.840.000,00	Kab. Badung, Mengwi, Werdi Bhuwana	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							
1398	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	2.609.200.078,00	0,00	0,00	0,00	2.609.200.078,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1399	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	154572 Dokumen SSPD	490.087.084,00	0,00	0,00	0,00	490.087.084,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1400	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.435.800,00	0,00	0,00	0,00	4.435.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1401	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	199.920.870,00	0,00	0,00	0,00	199.920.870,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1402	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	57.122.194,00	0,00	0,00	0,00	57.122.194,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1403	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.536.700,00	0,00	0,00	0,00	65.536.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1404	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	6.424.000,00	0,00	0,00	0,00	6.424.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1405	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	20.875.000,00	0,00	0,00	0,00	20.875.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1406	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	13.365.000,00	0,00	0,00	0,00	13.365.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1407	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.491.500,00	0,00	0,00	0,00	1.491.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1408	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	474.550.000,00	0,00	0,00	0,00	474.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1409	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	391.923.894,00	0,00	0,00	0,00	391.923.894,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1410	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.895.800,00	0,00	0,00	0,00	47.895.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1411	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	203.989.104,00	0,00	0,00	0,00	203.989.104,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1412	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	17.040.000,00	0,00	0,00	0,00	17.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1413	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	751.906.893,00	0,00	0,00	0,00	751.906.893,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1414	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	33.026.900,00	0,00	0,00	0,00	33.026.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Panjer	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1415	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	1.154.773.644,00	0,00	0,00	0,00	1.154.773.644,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1416	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	13119 Dokumen SSPD	590.206.150,00	0,00	0,00	0,00	590.206.150,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1417	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.931.000,00	0,00	0,00	0,00	16.931.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1418	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	145.966.580,00	0,00	0,00	0,00	145.966.580,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1419	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	56.718.634,00	0,00	0,00	0,00	56.718.634,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1420	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.463.600,00	0,00	0,00	0,00	22.463.600,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1421	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.212.500,00	0,00	0,00	0,00	8.212.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1422	5.02.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12.375.000,00	0,00	0,00	0,00	12.375.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1423	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20.040.000,00	0,00	0,00	0,00	20.040.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1424	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.826.000,00	0,00	0,00	0,00	2.826.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1425	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1426	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1427	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1428	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	147.497.500,00	0,00	0,00	0,00	147.497.500,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1429	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	38.300.000,00	0,00	0,00	0,00	38.300.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1430	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	551.731.412,00	0,00	0,00	0,00	551.731.412,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1431	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	29 Unit	35.020.000,00	0,00	0,00	0,00	35.020.000,00	Kab. Gianyar, Gianyar, Samplangan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							
1432	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	492.786.822,00	0,00	0,00	0,00	492.786.822,00	[object Object]	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1433	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10000 Dokumen SSPD	594.342.232,00	0,00	0,00	0,00	594.342.232,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1434	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.009.700,00	0,00	0,00	0,00	7.009.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1435	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	116.788.300,00	0,00	0,00	0,00	116.788.300,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1436	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1437	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.399.700,00	0,00	0,00	0,00	3.399.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1438	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3.250.800,00	0,00	0,00	0,00	3.250.800,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1439	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1440	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1441	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.789.800,00	0,00	0,00	0,00	1.789.800,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1442	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1443	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	359.849.487,00	0,00	0,00	0,00	359.849.487,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1444	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	47.995.000,00	0,00	0,00	0,00	47.995.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1445	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	104.518.700,00	0,00	0,00	0,00	104.518.700,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1446	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1447	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	412.176.002,00	0,00	0,00	0,00	412.176.002,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1448	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit	8.099.200,00	0,00	0,00	0,00	8.099.200,00	Kab. Bangli, Bangli, Kawan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							
1449	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	440.509.592,00	0,00	0,00	0,00	440.509.592,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1450	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	10963 Dokumen SSPD	463.615.756,00	0,00	0,00	0,00	463.615.756,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1451	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.660.400,00	0,00	0,00	0,00	2.660.400,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1452	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.050.400,00	0,00	0,00	0,00	110.050.400,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1453	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.280.000,00	0,00	0,00	0,00	30.280.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1454	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3.674.000,00	0,00	0,00	0,00	3.674.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1455	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1456	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.325.000,00	0,00	0,00	0,00	4.325.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1457	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	42.900.000,00	0,00	0,00	0,00	42.900.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1458	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1459	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1460	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1461	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	42.835.000,00	0,00	0,00	0,00	42.835.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1462	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	152.991.500,00	0,00	0,00	0,00	152.991.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1463	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	16.390.000,00	0,00	0,00	0,00	16.390.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1464	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	707.464.134,00	0,00	0,00	0,00	707.464.134,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1465	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	17.560.000,00	0,00	0,00	0,00	17.560.000,00	Kab. Klungkung, Klungkung, Semarapura Kauh	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.02	KEUANGAN									
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah	56.23 Persen							
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian PAD terhadap Target PAD (UPTD)	100 Persen							
1466	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah									
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	12 Laporan	491.616.002,00	0,00	0,00	0,00	491.616.002,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1467	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah									
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	13155 Dokumen SSPD	458.820.592,00	0,00	0,00	0,00	458.820.592,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai evaluasi manajemen kinerja	88 Nilai Sakip							
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 Persen							
1468	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.827.100,00	0,00	0,00	0,00	3.827.100,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1469	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	122.245.980,00	0,00	0,00	0,00	122.245.980,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1470	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	27.837.000,00	0,00	0,00	0,00	27.837.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1471	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.182.900,00	0,00	0,00	0,00	5.182.900,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1472	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1473	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.575.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1474	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.410.000,00	0,00	0,00	0,00	55.410.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia	100 Persen							
1475	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.193.200,00	0,00	0,00	0,00	1.193.200,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1476	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1477	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	237.000.000,00	0,00	0,00	0,00	237.000.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan	100 Persen							
1478	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	52.490.000,00	0,00	0,00	0,00	52.490.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1479	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	123.835.592,00	0,00	0,00	0,00	123.835.592,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1480	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	14.200.000,00	0,00	0,00	0,00	14.200.000,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1481	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	333.843.542,00	0,00	0,00	0,00	333.843.542,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
1482	5.02.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	16.020.500,00	0,00	0,00	0,00	16.020.500,00	Kab. Karangasem, Karangasem, Subagan	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	60,00 Nilai							
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Jenis Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terlaksana	6 Jenis							
1483	5.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	74.830.000,00	0,00	0,00	0,00	74.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1484	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK									
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	890.904.000,00	0,00	0,00	0,00	890.904.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1485	5.03.02.1.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	71.584.000,00	0,00	0,00	0,00	71.584.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1486	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian									
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	150.033.410,00	0,00	0,00	0,00	150.033.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1487	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN									
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	271.750.500,00	0,00	0,00	0,00	271.750.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1488	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	214.203.012,00	0,00	0,00	0,00	214.203.012,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah jenis layanan mutasi promosi ASN terlaksana baik	3 Jenis							
1489	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	71.793.110,00	0,00	0,00	0,00	71.793.110,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1490	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan	187.543.410,00	0,00	0,00	0,00	187.543.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1491	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	189.454.410,00	0,00	0,00	0,00	189.454.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan karier jabatan fungsional yang terlaksana sesuai ketentuan	5 Jenis							
1492	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN									
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	1 Dokumen	100.730.492,00	0,00	0,00	0,00	100.730.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1493	5.03.02.1.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.587.606.492,00	0,00	0,00	0,00	1.587.606.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1494	5.03.02.1.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	1 Laporan	27.248.000,00	0,00	0,00	0,00	27.248.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1495	5.03.02.1.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional									
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	1 Dokumen	280.244.000,00	0,00	0,00	0,00	280.244.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1496	5.03.02.1.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional									
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	12 Dokumen	119.600.410,00	0,00	0,00	0,00	119.600.410,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Jenis Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Terlaksana	4 Jenis							
1497	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Dokumen	150.185.902,00	0,00	0,00	0,00	150.185.902,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1498	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3 Orang	122.577.100,00	0,00	0,00	0,00	122.577.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1499	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai									
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	400 Orang	177.870.702,00	0,00	0,00	0,00	177.870.702,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1500	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN									
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1500 Orang	136.347.902,00	0,00	0,00	0,00	136.347.902,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1501	5.03.02.1.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN									
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	32.684.700,00	0,00	0,00	0,00	32.684.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,5 Nilai							
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah terlaksana	4 jenis							
1502	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	65.646.000,00	0,00	0,00	0,00	65.646.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1503	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1504	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	75.074.600,00	0,00	0,00	0,00	75.074.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1505	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.020.000,00	0,00	0,00	0,00	100.020.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	3 Dokumen							
1506	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang/ Bulan	31.401.080.353,00	0,00	0,00	0,00	31.401.080.353,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	6 Jenis							
1507	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.762.400,00	0,00	0,00	0,00	17.762.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1508	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	153.768.400,00	0,00	0,00	0,00	153.768.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1509	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	85.079.034,00	0,00	0,00	0,00	85.079.034,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1510	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	22.503.400,00	0,00	0,00	0,00	22.503.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1511	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	4.137.000,00	0,00	0,00	0,00	4.137.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1512	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	290.593.000,00	0,00	0,00	0,00	290.593.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan Pengadaan Barang Milik Daerah terlaksana	1 Jenis							
1513	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	200.000,00	575.633.000,00	0,00	0,00	575.833.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	3 Jenis							
1514	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.386.400,00	0,00	0,00	0,00	2.386.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1515	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	253.600.000,00	0,00	0,00	0,00	253.600.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1516	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	867.129.578,00	0,00	0,00	0,00	867.129.578,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah terlaksana	4 Jenis							
1517	5.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	996.648.320,00	0,00	0,00	0,00	996.648.320,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1518	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	118.731.000,00	0,00	0,00	0,00	118.731.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1519	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	117.700.000,00	0,00	0,00	0,00	117.700.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus Pengembangan SDM berbasis Kompetensi	100 Persen							
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah jenis kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan	6 Jenis							
1520	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional									
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen	273.191.492,00	0,00	0,00	0,00	273.191.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1521	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi									
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	1 Dokumen	263.898.000,00	0,00	0,00	0,00	263.898.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1522	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota									
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	120 Orang	499.545.492,00	0,00	0,00	0,00	499.545.492,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1523	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar									
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	2 Laporan	246.566.500,00	0,00	0,00	0,00	246.566.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1524	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga									
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	3 Dokumen	114.950.910,00	0,00	0,00	0,00	114.950.910,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1525	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan									
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Dokumen	120.678.000,00	0,00	0,00	0,00	120.678.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Profesionalitas ASN Instansi	60,00 Nilai							
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah layanan pengembangan kompetensi ASN	1 Jenis							
1526	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center									
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1.598.227.300,00	0,00	0,00	0,00	1.598.227.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,5 Nilai							
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah terlaksana	2 Jenis							
1527	5.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5.361.800,00	0,00	0,00	0,00	5.361.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1528	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	48.298.000,00	0,00	0,00	0,00	48.298.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan pengadaan barang milih daerah penunjang terlaksana	1 layanan							
1529	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	0,00	25.550.000,00	0,00	0,00	25.550.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah terlaksana	1 Jenis							
1530	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	241.398.952,00	0,00	0,00	0,00	241.398.952,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinta terlaksana	2 Jenis							
1531	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	78.656.500,00	0,00	0,00	0,00	78.656.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1532	5.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	9.660.000,00	0,00	0,00	0,00	9.660.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia									
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.03	KEPEGAWAIAN									
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manaemen Kinerja	86,5 Nilai							
	5.03.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	88 persen							
1533	5.03.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD									
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Riset dan Inovasi Daerah									
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen							
1534	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 Laporan	4.270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.270.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1535	5.05.02.1.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Laporan	325.000.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1536	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	7 Dokumen	386.742.000,00	0,00	0,00	0,00	386.742.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1537	5.05.02.1.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan									
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	1 Rekomendasi	227.852.000,00	0,00	0,00	0,00	227.852.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen							
1538	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	2 Dokumen	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1539	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	4 Dokumen	975.000.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1540	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	266.000.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1541	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 Persen							
1542	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1543	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	139.365.900,00	0,00	0,00	0,00	139.365.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1544	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual									
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	4 Laporan	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80 Nilai							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen							
1545	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1546	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen							
1547	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/ Bulan	11.284.006.527,00	0,00	0,00	0,00	11.284.006.527,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen							
1548	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	21.938.000,00	0,00	0,00	0,00	21.938.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1549	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Paket	198.905.500,00	0,00	0,00	0,00	198.905.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1550	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	107.436.400,00	0,00	0,00	0,00	107.436.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1551	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	24.180.200,00	0,00	0,00	0,00	24.180.200,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1552	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	14.998.700,00	0,00	0,00	0,00	14.998.700,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1553	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	568.024.000,00	0,00	0,00	0,00	568.024.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Diadakan	100 Persen							
1554	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	0,00	419.204.600,00	0,00	0,00	419.204.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1555	5.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	0,00	465.615.240,00	0,00	0,00	465.615.240,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen							
1556	5.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.992.600,00	0,00	0,00	0,00	4.992.600,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1557	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	167.200.000,00	0,00	0,00	0,00	167.200.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1558	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	341.506.444,00	0,00	0,00	0,00	341.506.444,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen							
1559	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	795.794.806,00	0,00	0,00	0,00	795.794.806,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1560	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.100.582.562,00	236.945.000,00	0,00	0,00	1.337.527.562,00	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Penghubung									
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	5.07	PENGELOLAAN PENGHUBUNG									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.07.02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Bali di Jakarta	90 Indeks							
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	90 Indeks							
1561	5.07.02.1.01.0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat									
			Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	12 Laporan	93.309.700,00	66.618.787,00	0,00	0,00	159.928.487,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1562	5.07.02.1.01.0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya									
			Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	12 Laporan	314.769.196,00	0,00	0,00	0,00	314.769.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1563	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung									
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan	2.485.776.784,00	0,00	0,00	0,00	2.485.776.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (Badan Penghubung)	82 Nilai							
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	100 persen							
1564	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4.999.300,00	0,00	0,00	0,00	4.999.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-							
1565	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	3.119.038.696,00	0,00	0,00	0,00	3.119.038.696,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-							
1566	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.989.400,00	0,00	0,00	0,00	14.989.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1567	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	54.981.200,00	0,00	0,00	0,00	54.981.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1568	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1569	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.499.300,00	0,00	0,00	0,00	8.499.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1570	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	62.171.000,00	0,00	0,00	0,00	62.171.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-							
1571	5.07.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0,00	229.503.420,00	0,00	0,00	229.503.420,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1572	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	8.989.100,00	0,00	0,00	0,00	8.989.100,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1573	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	306.800.000,00	0,00	0,00	0,00	306.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1574	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.159.107.136,00	0,00	0,00	0,00	1.159.107.136,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-							
1575	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	1.332.537.868,00	0,00	0,00	0,00	1.332.537.868,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1576	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	175.164.000,00	220.179.000,00	0,00	0,00	395.343.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1577	5.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	141.769.196,00	0,00	0,00	0,00	141.769.196,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Inspektorat									
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
6.01		INSPEKTORAT DAERAH									
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 Persen							
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase hasil pembinaan dan Pengawasan Internal	100 Persen							
1578	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	9 Laporan	204.768.384,00	0,00	0,00	0,00	204.768.384,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1579	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Laporan	254.791.784,00	0,00	0,00	0,00	254.791.784,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1580	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja									
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	45 Laporan	79.999.500,00	0,00	0,00	0,00	79.999.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1581	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 Laporan	252.391.492,00	0,00	0,00	0,00	252.391.492,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1582	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	58 Laporan	904.768.184,00	0,00	0,00	0,00	904.768.184,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1583	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal									
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	449.960.300,00	0,00	0,00	0,00	449.960.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1584	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	55 Dokumen	404.768.484,00	0,00	0,00	0,00	404.768.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Hasil pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu	100 Persen							
1585	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah									
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	114.768.684,00	0,00	0,00	0,00	114.768.684,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1586	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	34 Laporan	912.792.776,00	0,00	0,00	0,00	912.792.776,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang telah dilaksanakan	100 Persen							
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang telah dilaksanakan	100 Persen							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1587	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	54 Rekomendasi	394.509.276,00	0,00	0,00	0,00	394.509.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1588	6.01.03.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan									
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1.664.241.952,00	0,00	0,00	0,00	1.664.241.952,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase kegiatan asistensi dan pendampingan yang telah dilaksanakan	100 Persen							
1589	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 Perangkat Daerah	282.141.676,00	0,00	0,00	0,00	282.141.676,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1590	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	33 Perangkat Daerah	169.988.800,00	0,00	0,00	0,00	169.988.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1591	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi									
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	494.364.900,00	0,00	0,00	0,00	494.364.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1592	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas									
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	1 Perangkat Daerah	99.996.400,00	0,00	0,00	0,00	99.996.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	87,5 Persen							
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	100 Persen							
1593	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	49.999.800,00	0,00	0,00	0,00	49.999.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1594	6.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen							
1595	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	163 Orang/ Bulan	26.324.679.033,00	0,00	0,00	0,00	26.324.679.033,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi yang terpenuhi	100 Persen							
1596	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.999.400,00	0,00	0,00	0,00	49.999.400,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1597	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	99.999.800,00	0,00	0,00	0,00	99.999.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1598	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	158.109.394,00	0,00	0,00	0,00	158.109.394,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1599	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	40.070.300,00	0,00	0,00	0,00	40.070.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1600	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	44.140.800,00	0,00	0,00	0,00	44.140.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1601	6.01.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	39.960.000,00	0,00	0,00	0,00	39.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1602	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	849.995.000,00	0,00	0,00	0,00	849.995.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terlaksana	100 Persen							
1603	6.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	193 Unit	0,00	1.709.720.040,00	0,00	0,00	1.709.720.040,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi	100 Persen							
1604	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.092.900,00	0,00	0,00	0,00	5.092.900,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1605	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	280.500.000,00	0,00	0,00	0,00	280.500.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	Dana Alokasi Umum (DAU)
1606	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	309.560.560,00	0,00	0,00	0,00	309.560.560,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100 Persen							
1607	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	1.621.453.428,00	0,00	0,00	0,00	1.621.453.428,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1608	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	131.952.212,00	0,00	0,00	0,00	131.952.212,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1609	6.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	224.762.984,00	0,00	0,00	0,00	224.762.984,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	92 %							

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang							
1610	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	1.196.846.794,00	0,00	0,00	0,00	1.196.846.794,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1611	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka									
			Jumlah Paskibraka	72 Orang	3.535.199.600,00	0,00	0,00	0,00	3.535.199.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	85 %							
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200 Orang							
1612	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200 Orang	24.374.767.294,00	0,00	0,00	0,00	24.374.767.294,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terdata	85 %							
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang							
1613	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	500 Orang	681.089.000,00	0,00	0,00	0,00	681.089.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase terjaminnya pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Daerah	85 %							
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang							
1614	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	1.049.045.322,00	0,00	0,00	0,00	1.049.045.322,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	95 %							
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang							
1615	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	40 Orang	676.176.212,00	0,00	0,00	0,00	676.176.212,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1616	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi									
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	12 Dokumen	999.999.700,00	0,00	0,00	0,00	999.999.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83.5 Nilai							
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	8 Dokumen							
1617	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	93.164.000,00	0,00	0,00	0,00	93.164.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1618	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan	100 %							
1619	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/ Bulan	10.015.015.243,00	0,00	0,00	0,00	10.015.015.243,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	6 Laporan							
1620	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	14.921.500,00	0,00	0,00	0,00	14.921.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1621	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.140.000,00	221.977.300,00	0,00	0,00	240.117.300,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1622	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	77.229.424,00	0,00	0,00	0,00	77.229.424,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1623	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.880.500,00	0,00	0,00	0,00	35.880.500,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1624	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan									

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.996.100,00	0,00	0,00	0,00	4.996.100,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1625	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	402.759.000,00	0,00	0,00	0,00	402.759.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Laporan							
1626	8.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel									
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	0,00	189.401.500,00	0,00	0,00	189.401.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1627	8.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0,00	416.922.740,00	0,00	0,00	416.922.740,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa urusan pemerintahan	3 Laporan							
1628	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.994.800,00	0,00	0,00	0,00	11.994.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1629	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1630	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	916.019.544,00	0,00	0,00	0,00	916.019.544,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

No	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
				Target 2024	Pagu Indikatif Belanja (Rp)					Lokasi	Sumber Dana
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah terpelihara	5 Laporan							
1631	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23 unit Unit	790.100.000,00	0,00	0,00	0,00	790.100.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1632	8.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	19.960.000,00	0,00	0,00	0,00	19.960.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1633	8.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	181.981.800,00	0,00	0,00	0,00	181.981.800,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1634	8.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	16.880.000,00	0,00	0,00	0,00	16.880.000,00	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta Kelod	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN V

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1				PELAYANAN UMUM					
1	01	1	01	Pendidikan	1.335.808.928.423,00	575.750.280,00	0,00	0,00	1.336.384.678.703,00
1	01	1	02	Kesehatan	644.303.280.862,00	25.370.309.940,00	0,00	0,00	669.673.590.802,00
1	01	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	56.113.058.858,20	653.058.500,00	0,00	0,00	56.766.117.358,20
1	01	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	52.303.158.887,00	5.347.201.600,00	0,00	0,00	57.650.360.487,00
1	01	1	06	Sosial	26.359.157.365,00	3.534.046.600,00	0,00	0,00	29.893.203.965,00
1	01	2	07	Tenaga Kerja	35.356.478.008,00	144.064.000,00	0,00	0,00	35.500.542.008,00
1	01	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	607.727.686,00	26.266.900,00	0,00	0,00	633.994.586,00
1	01	2	09	Pangan	570.389.570,00	17.648.960,00	0,00	0,00	588.038.530,00
1	01	2	11	Lingkungan Hidup	632.370.134,00	17.615.500,00	0,00	0,00	649.985.634,00
1	01	2	12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	589.682.750,00	0,00	0,00	0,00	589.682.750,00
1	01	2	13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.716.072.927,00	0,00	0,00	0,00	21.716.072.927,00
1	01	2	15	Perhubungan	31.765.192.184,00	1.259.814.216,00	0,00	0,00	33.025.006.400,00
1	01	2	16	Komunikasi dan Informatika	32.020.233.725,00	897.741.340,00	0,00	0,00	32.917.975.065,00
1	01	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.484.045.702,00	972.452.200,00	0,00	0,00	20.456.497.902,00
1	01	2	18	Penanaman Modal	18.687.270.400,00	0,00	0,00	0,00	18.687.270.400,00
1	01	2	20	Statistik	431.471.640,00	0,00	0,00	0,00	431.471.640,00
1	01	2	22	Kebudayaan	88.687.463.171,00	79.434.358.833,00	0,00	0,00	168.121.822.004,00
1	01	2	24	Kearsipan	751.603.126,00	0,00	0,00	0,00	751.603.126,00
1	01	3	25	Kelautan dan Perikanan	30.164.295.869,00	3.359.595.000,00	0,00	0,00	33.523.890.869,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	01	3	26	Pariwisata	15.971.578.094,00	274.162.200,00	0,00	0,00	16.245.740.294,00
1	01	3	27	Pertanian	67.024.386.021,00	167.607.800,00	0,00	0,00	67.191.993.821,00
1	01	3	28	Kehutanan	46.863.572.188,00	0,00	0,00	0,00	46.863.572.188,00
1	01	3	30	Perdagangan	18.811.366.381,00	476.633.000,00	0,00	0,00	19.287.999.381,00
1	01	3	31	Perindustrian	184.771.302,00	10.613.160,00	0,00	0,00	195.384.462,00
1	01	4	01	Sekretariat Daerah	210.340.008.488,00	34.883.686.067,00	0,00	0,00	245.223.694.555,00
1	01	4	02	Sekretariat DPRD	244.318.471.976,00	33.823.260.412,00	0,00	0,00	278.141.732.388,00
1	01	5	01	Perencanaan	26.336.104.087,00	2.720.347.240,00	0,00	0,00	29.056.451.327,00
1	01	5	02	Keuangan	222.167.260.604,00	9.565.211.589,00	151.187.931.213,00	787.453.202.628,00	1.170.373.606.034,00
1	01	5	03	Kepegawaian	48.414.453.589,00	1.601.183.000,00	0,00	0,00	50.015.636.589,00
1	01	5	04	Pendidikan dan Pelatihan	1.518.830.394,00	0,00	0,00	0,00	1.518.830.394,00
1	01	5	05	Penelitian dan Pengembangan	22.163.525.639,00	1.121.764.840,00	0,00	0,00	23.285.290.479,00
1	01	5	07	Penghubung	9.372.901.876,00	516.301.207,00	0,00	0,00	9.889.203.083,00
1	01	6	01	Inspektorat	36.954.528.203,00	1.709.720.040,00	0,00	0,00	38.664.248.243,00
1	01	8	01	Kesatuan Bangsa dan Politik	45.280.165.833,00	828.301.540,00	0,00	0,00	46.108.467.373,00
2				KETERTIBAN DAN KEAMANAN					
2	03	1	05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	34.718.255.235,00	3.072.131.469,00	0,00	0,00	37.790.386.704,00
2	03	1	06	Sosial	351.411.800,00	0,00	0,00	0,00	351.411.800,00
2	03	4	01	Sekretariat Daerah	4.578.799.210,00	0,00	0,00	0,00	4.578.799.210,00
3				EKONOMI					
3	04	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	148.983.574.122,00	147.540.761.302,00	0,00	0,00	296.524.335.424,00
3	04	2	07	Tenaga Kerja	7.787.188.750,00	0,00	0,00	0,00	7.787.188.750,00
3	04	2	09	Pangan	1.613.499.804,00	0,00	0,00	0,00	1.613.499.804,00
3	04	2	15	Perhubungan	15.882.342.059,00	795.443.200,00	0,00	0,00	16.677.785.259,00

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
3	04	2	16	Komunikasi dan Informatika	55.267.782.810,00	302.535.745.010,00	0,00	0,00	357.803.527.820,00
3	04	2	17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.351.217.546,00	0,00	0,00	0,00	4.351.217.546,00
3	04	2	18	Penanaman Modal	1.483.872.540,00	0,00	0,00	0,00	1.483.872.540,00
3	04	2	21	Persandian	410.712.320,00	0,00	0,00	0,00	410.712.320,00
3	04	3	25	Kelautan dan Perikanan	2.550.757.684,00	100.260.000,00	0,00	0,00	2.651.017.684,00
3	04	3	27	Pertanian	27.853.595.854,00	0,00	0,00	0,00	27.853.595.854,00
3	04	3	28	Kehutanan	228.400.730,00	0,00	0,00	0,00	228.400.730,00
3	04	3	29	Energi dan Sumber Daya Mineral	115.499.500,00	0,00	0,00	0,00	115.499.500,00
3	04	3	30	Perdagangan	1.806.347.484,00	0,00	0,00	0,00	1.806.347.484,00
3	04	3	31	Perindustrian	2.715.522.186,00	0,00	0,00	0,00	2.715.522.186,00
4				PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP					
4	05	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.305.185.952,00	5.710.000.552,00	0,00	0,00	20.015.186.504,00
4	05	2	10	Pertanahan	382.727.700,00	0,00	0,00	0,00	382.727.700,00
4	05	2	11	Lingkungan Hidup	10.227.631.165,00	2.925.000.000,00	0,00	0,00	13.152.631.165,00
4	05	3	28	Kehutanan	89.554.810,00	0,00	0,00	0,00	89.554.810,00
5				PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM					
5	06	1	03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38.460.133.306,00	37.022.050.155,00	0,00	0,00	75.482.183.461,00
5	06	1	04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.698.948.850,00	1.135.527.580,00	0,00	0,00	5.834.476.430,00
6				KESEHATAN					
6	07	1	02	Kesehatan	40.948.676.178,00	70.897.234.075,00	0,00	0,00	111.845.910.253,00
6	07	2	14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	678.793.860,00	0,00	0,00	0,00	678.793.860,00
7				PARIWISATA					
7	08	3	26	Pariwisata	8.192.610.074,00	0,00	0,00	0,00	8.192.610.074,00
8				PENDIDIKAN					

Kode				Uraian	Kelompok Belanja				Jumlah
					Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
8	10	1	01	Pendidikan	408.777.010.402,00	222.625.673.320,00	0,00	0,00	631.402.683.722,00
8	10	2	19	Kepemudaan dan Olahraga	87.810.156.532,00	67.374.500,00	0,00	0,00	87.877.531.032,00
8	10	2	22	Kebudayaan	533.250.563.292,00	64.043.500,00	0,00	0,00	533.314.606.792,00
8	10	2	23	Perpustakaan	565.598.328,00	45.000.000,00	0,00	0,00	610.598.328,00
9				PERLINDUNGAN SOSIAL					
9	11	1	06	Sosial	8.010.218.500,00	0,00	0,00	0,00	8.010.218.500,00
9	11	2	08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.588.375.500,00	4.115.256.000,00	0,00	0,00	5.703.631.500,00
9	11	3	32	Transmigrasi	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00
				TOTAL	4.880.783.654.845,20	1.007.960.216.627,00	151.187.931.213,00	787.453.202.628,00	6.827.385.005.313,20

Pj. GUBERNUR BALI,



AS. IM MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VI

REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM



PROVINSI BALI
REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
A SPM Bidang Pendidikan			
1.	Angka Partisipasi Sekolah	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	138.370.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.533.566.200,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	85.899.900,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.871.116.400,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	68.000.000.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	4.704.150.000,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	56.800.000,00
		Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	22.212.384.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	5.393.781.500,00
		Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	4.012.000.000,00
		Total	117.008.068.000,00
2.	Literasi dan Numerasi	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.700,00
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.400,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	4.649.915.980,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	362.880.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	104.996.800,00
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	37.908.000,00
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.970.000,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	382.366.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	105.000.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	52.774.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	31.956.434.118,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	12.590.598.000,00
		Total	50.424.841.998,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Kekhususan SMK	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	104.628.200,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	522.432.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.955.825.000,00
		Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	47.370.185.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	105.000.000,00
Total			51.058.070.200,00
4.	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	900.976.300,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	162.820.000,00
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	40.386.000,00
Total			1.104.182.300,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan			219.595.162.498,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	267.525.580,00
Total			267.525.580,00
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	141.542.800,00
Total			141.542.800,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan			409.068.380,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	41.269.710.452,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	29.565.559.255,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.868.839.454,00
Total			72.704.109.161,00
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.436.373.000,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	3.182.090.552,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	258.946.400,00
Total			17.877.409.952,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			90.581.519.113,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	125.033.700,00
		Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	175.149.750,00
Total			300.183.450,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			300.183.450,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.	Pelayanana Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	20.450.348.273,00
		Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	349.687.312,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	29.999.900,00
		Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.993.200,00
Total			20.850.028.685,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			20.850.028.685,00
F SPM Bidang Sosial			
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	220.000.000,00
		Penyediaan Alat Bantu	30.024.300,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.500.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	28.624.600,00
Total			2.778.648.900,00
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000,00
		Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	125.759.400,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	59.720.000,00
		Pengasuhan	91.401.500,00
		Penyediaan Makanan	1.882.032.600,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21.680.300,00
		Penyediaan Sandang	89.750.000,00
Total			2.607.285.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	4
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	164.987.000,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	58.890.600,00
		Pemulasaraan	332.890.100,00
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00
		Penyediaan Permakanan	1.200.262.500,00
		Penyediaan Sandang	70.000.000,00
Total			1.871.531.000,00
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pemulangan ke Daerah Asal	164.120.000,00
		Penyediaan Permakanan	19.999.400,00
Total			184.119.400,00
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Pelayanan Dukungan Psikososial	344.931.800,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00
Total			351.411.800,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			7.792.996.100,00



 Pj. GUBERNUR BALI,



 S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VII

SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD PROVINSI



LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	1.336.384.678.703,0 0
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0,00	631.110.920.522,00
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0,00	126.764.100,00
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0,00	79.999.100,00
1	01	06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	0,00	85.000.000,00
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	669.673.590.802,00
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	110.015.978.059,00
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	0,00	755.220.894,00
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	0,00	389.259.970,00
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	0,00	685.451.330,00
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	56.766.117.358,20
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	0,00	27.492.573.554,00
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	0,00	72.704.109.161,00
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	0,00	17.877.409.952,00
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0,00	2.778.074.300,00
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0,00	126.606.924.300,00
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	0,00	138.124.183.048,00
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	0,00	4.300.654.522,00
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	0,00	2.137.776.552,00
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	0,00	1.857.401.380,00
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	0,00	2.605.998.300,00
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	0,00	1.371.076.750,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	57.650.360.487,00
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	28.571.880.335,00
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	0,00	9.218.506.369,00
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	29.893.203.965,00
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	0,00	115.633.100,00
1	06	03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	0,00	1.175.000,00
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	0,00	7.441.584.300,00
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	0,00	142.567.700,00
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	0,00	351.411.800,00
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	0,00	309.258.400,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	35.500.542.008,00
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	0,00	287.347.600,00
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	0,00	102.977.100,00
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	0,00	6.960.714.000,00
2	07	06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	0,00	436.150.050,00
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	633.994.586,00
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0,00	114.967.700,00
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	4.656.445.300,00
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	11.878.600,00
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	9.996.400,00
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	817.082.900,00
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	93.260.600,00
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	588.038.530,00
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	0,00	493.326.192,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	0,00	512.815.610,00
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	0,00	607.358.002,00
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	75.876.000,00
2	10	06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	0,00	86.847.700,00
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	0,00	220.004.000,00
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	649.985.634,00
2	11	02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	0,00	217.110.620,00
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	520.210.725,00
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	0,00	73.261.000,00
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	0,00	58.056.300,00
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	0,00	19.999.700,00
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	1.117.590.230,00
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	0,00	57.999.700,00
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	0,00	19.994.300,00
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	0,00	11.068.408.590,00
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	0,00	353.619.030,00
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	0,00	236.063.720,00
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	15.572.756.285,00
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	0,00	135.878.612,00
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	0,00	666.251.370,00
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	0,00	5.341.186.660,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	0,00	678.793.860,00
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	33.025.006.400,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	0,00	15.246.672.949,00
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	0,00	784.178.850,00
2	15	05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	0,00	646.933.460,00
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	32.917.975.065,00
2	16	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	0,00	12.609.073.172,00
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	0,00	345.194.454.648,00
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	20.456.497.902,00
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	0,00	308.686.594,00
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0,00	183.432.810,00
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	0,00	2.615.568.416,00
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	468.000.000,00	192.110.220,00
2	17	07	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	0,00	635.576.002,00
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	0,00	415.843.504,00
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	18.687.270.400,00
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	0,00	215.186.230,00
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	0,00	151.553.520,00
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	0,00	818.735.740,00
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	0,00	223.606.230,00
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	0,00	74.790.820,00
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	0,00	1.949.998.400,00
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	0,00	84.427.532.632,00
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	0,00	1.500.000.000,00
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	0,00	431.471.640,00
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	0,00	410.712.320,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	168.121.822.004,00
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	48.940.842.892,00
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	0,00	845.299.070,00
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	0,00	185.453.000,00
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	0,00	10.859.622.006,00
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	5.796.891.000,00
2	22	09	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	422.452.064.646,00	466.686.498.824,00
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	0,00	500.465.344,00
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	0,00	110.132.984,00
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	0,00	751.603.126,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3	25	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	33.523.890.869,00
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	0,00	154.596.492,00
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0,00	472.272.902,00
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	0,00	1.023.918.104,00
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	0,00	181.509.884,00
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0,00	818.720.302,00
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3	26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	16.245.740.294,00
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	0,00	1.051.520.156,00
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	0,00	5.920.600.136,00
3	26	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	0,00	157.368.084,00
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	0,00	1.063.121.698,00
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3	27	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,0 0	67.191.993.821,00
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	0,00	14.937.925.066,00
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	0,00	1.130.808.892,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	0,00	10.400.607.072,00
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	0,00	1.251.181.194,00
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	0,00	133.073.630,00
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		
3	28	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	46.863.572.188,00
3	28	03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	0,00	198.400.230,00
3	28	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	0,00	30.000.500,00
3	28	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	0,00	89.554.810,00
3	29		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
3	29	02	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	0,00	8.000.000,00
3	29	03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	0,00	12.500.000,00
3	29	05	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	0,00	94.999.500,00
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	19.287.999.381,00
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	0,00	302.955.644,00
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	0,00	24.968.600,00
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	0,00	243.576.100,00
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	99.999.600,00
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0,00	834.014.578,00
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	300.832.962,00
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3	31	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	195.384.462,00
3	31	02	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0,00	2.665.522.286,00
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	0,00	49.999.900,00
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0,00	24.884.800,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4	01		SEKRETARIAT DAERAH		
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	180.207.586.384,00
4	01	02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	0,00	945.287.760,00
4	01	03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	0,00	2.474.593.012,00

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
4	01	04	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	29.340.774.424,00
4	01	05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	0,00	4.578.799.210,00
4	01	06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	0,00	796.859.800,00
4	01	07	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	0,00	31.369.793.175,00
4	01	08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	0,00	88.800.000,00
4	02		SEKRETARIAT DPRD		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	133.739.752.666,00
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	0,00	144.401.979.722,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5	01		PERENCANAAN		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	23.240.773.183,00
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.327.594.514,00	3.549.418.406,00
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.847.735.070,00	2.266.259.738,00
5	02		KEUANGAN		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	204.173.094.896,00
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	944.910.893.420,00
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	0,00	4.181.478.112,00
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	17.108.139.606,00
5	03		KEPEGAWAIAN		
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	43.560.217.737,00
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	0,00	6.455.418.852,00
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	1.518.830.394,00
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	15.856.330.579,00
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	7.428.959.900,00
5	07		PENGELOLAAN PENGHUBUNG		
5	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	6.928.728.616,00
5	07	02	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	0,00	2.960.474.467,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6	01		INSPEKTORAT DAERAH		

KODE			URAIAN	RPJMD/RPD (Rp)	RANCANGAN APBD (Rp)
1			2	3	4
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	31.979.995.651,00
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	0,00	3.579.009.588,00
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	0,00	3.105.243.004,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.488.503.175.279,00	13.595.343.451,00
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	0,00	4.732.046.394,00
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	0,00	24.374.767.294,00
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	0,00	681.089.000,00
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	0,00	1.049.045.322,00
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	0,00	1.676.175.912,00

PI. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN VIII

SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PROVINSI BALI



PROVINSI BALI
SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS
DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000						Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.232.142.312.806,00	1.232.142.312.806,00	2.052.433.530.749,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.195.564.777.506,00	1.195.564.777.506,00	1.964.555.999.717,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.195.564.777.506,00	1.195.564.777.506,00	1.964.555.999.717,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	258.623.985.656,00	258.623.985.656,00	629.823.284.522,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	144.954.632.240,00	144.954.632.240,00	295.956.385.118,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00	68.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	4.497.000.000,00	4.497.000.000,00	1.980.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0041	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	382.366.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	4.704.150.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.660.000.000,00	1.660.000.000,00	2.782.735.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	43.660.702.640,00	43.660.702.640,00	31.956.434.118,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	150.000.000,00	150.000.000,00	162.820.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	0,00	0,00	161.691.130.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	39.999.900,00	39.999.900,00	57.409.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	99.999.900,00	99.999.900,00	85.899.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	50.000.000,00	44.690.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.503.000.000,00	5.503.000.000,00	8.871.116.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	104.996.800,00	104.996.800,00	104.996.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	12.083.933.000,00	12.083.933.000,00	12.027.637.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	99.255.719.396,00	99.255.719.396,00	307.988.995.724,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	34.000.000.000,00	34.000.000.000,00	22.212.384.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	11.150.616.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	3.450.000.000,00	3.450.000.000,00	3.914.925.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0033	Pengadaaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	0,00	0,00	47.370.185.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	7.920.000.000,00	7.920.000.000,00	5.393.781.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.955.825.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	35.848.916.696,00	35.848.916.696,00	20.272.868.244,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	250.000.000,00	250.000.000,00	522.432.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	0,00	0,00	180.529.850.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	100.000.000,00	100.000.000,00	64.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000,00	100.000.000,00	56.800.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	200.000.000,00	200.000.000,00	112.160.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	4.012.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	11.526.805.900,00	11.526.805.900,00	9.211.539.880,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	104.996.800,00	104.996.800,00	104.628.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus	14.413.634.020,00	14.413.634.020,00	25.877.903.680,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.200.000.000,00	2.200.000.000,00	1.880.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	3.533.566.200,00	3.533.566.200,00	3.533.566.200,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.421.071.000,00	1.421.071.000,00	1.593.966.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.619.416.120,00	5.619.416.120,00	4.649.915.980,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	306.611.500,00	306.611.500,00	900.976.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	0,00	0,00	10.808.510.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	15.547.600,00	15.547.600,00	15.547.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	141.250.000,00	141.250.000,00	138.370.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	16.171.600,00	16.171.600,00	16.171.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	800.000.000,00	800.000.000,00	1.978.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	360.000.000,00	360.000.000,00	362.880.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	79.999.100,00	79.999.100,00	79.999.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	79.999.100,00	79.999.100,00	79.999.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.400,00	39.999.400,00	39.999.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	39.999.700,00	39.999.700,00	39.999.700,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	936.860.792.750,00	936.860.792.750,00	1.334.652.716.095,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	319.106.000,00	319.106.000,00	319.855.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.512.600,00	142.512.600,00	150.331.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	176.593.400,00	176.593.400,00	169.524.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	923.691.458.800,00	923.691.458.800,00	1.319.237.313.513,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	923.421.461.000,00	923.421.461.000,00	1.317.702.881.213,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	109.997.800,00	109.997.800,00	1.284.575.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	160.000.000,00	160.000.000,00	249.856.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.025.000,00	43.025.000,00	766.145.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	43.025.000,00	43.025.000,00	766.145.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.713.400,00	43.713.400,00	68.193.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	43.713.400,00	43.713.400,00	68.193.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.165.634.050,00	1.165.634.050,00	1.213.431.810,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.917.800,00	419.917.800,00	467.715.560,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.840.000,00	10.840.000,00	10.840.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.526.250,00	31.526.250,00	31.526.250,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	608.350.000,00	608.350.000,00	608.350.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.921.795.050,00	9.921.795.050,00	9.847.361.472,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.033.492.150,00	1.033.492.150,00	978.222.150,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.888.302.900,00	8.888.302.900,00	8.869.139.322,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.676.060.450,00	1.676.060.450,00	3.200.415.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	596.585.000,00	596.585.000,00	954.685.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	792.285.950,00	792.285.950,00	1.977.200.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	1	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	287.189.500,00	287.189.500,00	268.530.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	36.577.535.300,00	36.577.535.300,00	87.877.531.032,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	36.577.535.300,00	36.577.535.300,00	87.877.531.032,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.949.999.300,00	1.949.999.300,00	1.949.998.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	1.949.999.300,00	1.949.999.300,00	1.949.998.400,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	399.999.900,00	399.999.900,00	648.324.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	199.999.900,00	199.999.900,00	199.999.900,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	199.999.700,00	199.999.700,00	199.900.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	899.999.900,00	899.999.900,00	788.299.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	249.999.900,00	249.999.900,00	113.475.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	33.127.536.000,00	33.127.536.000,00	84.427.532.632,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	17.952.536.000,00	17.952.536.000,00	24.076.132.632,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	15.823.596.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	7.952.536.000,00	7.952.536.000,00	8.252.536.132,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	175.000.000,00	175.000.000,00	351.400.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	175.000.000,00	175.000.000,00	351.400.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	60.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	60.000.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0000	2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001						UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	2.374.539.150,00	2.374.539.150,00	2.345.284.366,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.374.539.150,00	2.374.539.150,00	2.345.284.366,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.374.539.150,00	2.374.539.150,00	2.345.284.366,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.308.356.000,00	1.308.356.000,00	1.287.636.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	766.093.000,00	766.093.000,00	755.613.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	101.970.000,00	101.970.000,00	101.970.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	57.094.000,00	57.094.000,00	52.774.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	44.068.000,00	44.068.000,00	37.908.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	562.961.000,00	562.961.000,00	562.961.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	542.263.000,00	542.263.000,00	532.023.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	45.186.000,00	45.186.000,00	40.386.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	43.086.000,00	43.086.000,00	37.646.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	02	1.02	0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	369.991.000,00	369.991.000,00	369.991.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.066.183.150,00	1.066.183.150,00	1.057.648.366,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.590.350,00	194.590.350,00	193.656.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.096.750,00	141.096.750,00	140.162.500,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.499.600,00	3.499.600,00	3.499.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.994.000,00	49.994.000,00	49.994.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	753.642.800,00	753.642.800,00	755.752.266,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	753.642.800,00	753.642.800,00	755.752.266,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.950.000,00	117.950.000,00	108.240.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.000.000,00	105.000.000,00	98.400.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	2.940.000,00	2.940.000,00	1.440.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0001	1	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.010.000,00	10.010.000,00	8.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.01.0002						UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	865.466.960,00	865.466.960,00	886.078.342,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	120.000.000,00	120.000.000,00	126.764.100,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	80.000.000,00	80.000.000,00	87.100.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	80.000.000,00	80.000.000,00	87.100.800,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	40.000.000,00	40.000.000,00	39.663.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	40.000.000,00	40.000.000,00	39.663.300,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	06	1.01	0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	660.466.960,00	660.466.960,00	674.314.242,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.107.000,00	42.107.000,00	42.106.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.613.400,00	8.613.400,00	8.613.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.547.600,00	6.547.600,00	6.547.600,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.946.000,00	26.946.000,00	26.946.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.549.960,00	527.549.960,00	541.397.642,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	527.549.960,00	527.549.960,00	541.397.642,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.810.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00
1.01.2.19.0.00.01.0002	1	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	90.810.000,00	90.810.000,00	90.810.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kesehatan	364.147.338.602,00	364.146.954.002,00	339.885.707.672,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	364.147.338.602,00	364.146.954.002,00	339.885.707.672,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.278.760.636,00	27.278.760.636,00	29.667.885.890,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	27.044.011.436,00	27.044.011.436,00	29.264.305.560,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	167.893.500,00	167.893.500,00	267.525.580,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	61.610.000,00	61.610.000,00	141.542.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	153.291.500,00	153.291.500,00	288.757.730,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	69.620.000,00	69.620.000,00	174.231.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	166.020.000,00	166.020.000,00	270.631.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	98.106.200,00	98.106.200,00	138.072.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	99.960.000,00	99.960.000,00	140.026.492,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.422.335.136,00	1.422.335.136,00	2.536.062.498,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	0,00	0,00	53.127.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	24.633.909.100,00	24.633.909.100,00	24.665.908.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	0,00	0,00	112.280.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	99.996.000,00	99.996.000,00	322.771.520,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	33.770.000,00	33.770.000,00	115.867.600,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	37.500.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	34.749.700,00	34.749.700,00	105.464.110,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	34.749.700,00	34.749.700,00	105.464.110,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	199.999.500,00	199.999.500,00	298.116.220,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	99.999.500,00	99.999.500,00	150.356.540,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100.000.000,00	100.000.000,00	147.759.680,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	248.387.800,00	248.387.800,00	386.037.860,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	63.798.000,00	63.798.000,00	201.448.460,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	63.798.000,00	63.798.000,00	201.448.460,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	184.589.800,00	184.589.800,00	184.589.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	84.590.000,00	84.590.000,00	84.590.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	99.999.800,00	99.999.800,00	99.999.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	207.230.000,00	207.230.000,00	389.259.970,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	108.090.000,00	108.090.000,00	250.153.570,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	108.090.000,00	108.090.000,00	250.153.570,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	99.140.000,00	99.140.000,00	139.106.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	99.140.000,00	99.140.000,00	139.106.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	433.118.700,00	433.118.700,00	685.451.330,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	283.118.700,00	283.118.700,00	535.451.330,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	283.118.700,00	283.118.700,00	535.451.330,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	335.979.841.466,00	335.979.456.866,00	308.757.072.622,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	302.479.600,00	302.479.600,00	336.035.010,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.158.900,00	205.158.900,00	205.158.900,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.320.700,00	97.320.700,00	130.876.110,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	321.946.089.832,00	321.946.089.832,00	298.910.916.172,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	321.932.607.032,00	321.932.607.032,00	298.716.634.158,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.482.800,00	13.482.800,00	194.282.014,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.161.307.094,00	2.161.307.094,00	1.640.291.594,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.922.000,00	6.922.000,00	8.583.700,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.634.783.200,00	1.632.436.700,00	1.069.751.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	231.928.394,00	234.668.394,00	273.968.394,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	76.630.500,00	76.462.000,00	77.170.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.543.000,00	188.318.000,00	188.318.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.026.833.440,00	10.026.833.440,00	6.379.058.346,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	480.000.000,00	480.000.000,00	484.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.546.833.440,00	9.546.833.440,00	5.894.558.346,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.543.131.500,00	1.542.746.900,00	1.490.771.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	584.600.000,00	584.600.000,00	515.400.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.929.500,00	78.544.900,00	81.769.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	879.602.000,00	879.602.000,00	893.602.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001						UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	5.004.536.280,00	5.004.536.280,00	5.008.814.046,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	121.273.000,00	121.273.000,00	369.183.034,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	121.273.000,00	121.273.000,00	369.183.034,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	121.273.000,00	121.273.000,00	369.183.034,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.883.263.280,00	4.883.263.280,00	4.639.631.012,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.350.500,00	319.350.500,00	319.350.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.924.000,00	17.924.000,00	17.924.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128.584.400,00	128.584.400,00	128.584.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.458.100,00	155.458.100,00	155.458.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.134.000,00	6.134.000,00	6.134.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.381.317.780,00	1.381.317.780,00	1.174.585.512,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	363.900.000,00	363.900.000,00	363.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.017.417.780,00	1.017.417.780,00	810.685.512,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.182.595.000,00	1.182.595.000,00	1.145.695.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.175.000,00	39.175.000,00	39.175.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.420.000,00	93.420.000,00	56.520.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0001	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002						UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	10.076.478.043,00	10.076.477.823,00	9.833.741.689,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	177.120.000,00	177.120.000,00	292.517.120,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	177.120.000,00	177.120.000,00	292.517.120,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	177.120.000,00	177.120.000,00	292.517.120,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.899.358.043,00	9.899.357.823,00	9.541.224.569,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	604.956.720,00	605.096.500,00	492.940.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.201.920,00	82.895.200,00	82.895.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	521.754.800,00	522.201.300,00	410.045.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.975.252.340,00	1.975.252.340,00	1.746.835.086,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	644.000.000,00	644.000.000,00	644.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.331.252.340,00	1.331.252.340,00	1.102.835.086,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	363.070.000,00	362.930.000,00	345.370.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.100.000,00	108.100.000,00	108.100.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	161.970.000,00	161.830.000,00	144.270.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.956.078.983,00	6.956.078.983,00	6.956.078.983,00
1.02.0.00.0.00.01.0002	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.956.078.983,00	6.956.078.983,00	6.956.078.983,00
1.02.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	5.686.884.860,00	5.686.884.664,00	6.568.955.390,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.929.486.940,00	2.929.486.744,00	3.092.844.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.929.486.940,00	2.929.486.744,00	3.092.844.820,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.533.400,00	50.533.400,00	122.080.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	78.487.500,00	78.487.500,00	158.690.210,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	304.318.360,00	304.318.200,00	1.017.847.192,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	2.496.147.680,00	2.496.147.644,00	1.794.227.018,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.757.397.920,00	2.757.397.920,00	3.476.110.570,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	485.914.520,00	485.914.520,00	915.140.120,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.015.500,00	5.015.500,00	5.015.500,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.766.420,00	350.766.420,00	651.780.020,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.295.800,00	76.295.800,00	202.695.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.978.800,00	17.978.800,00	19.790.800,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.358.000,00	34.358.000,00	34.358.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.095.293.400,00	2.095.293.400,00	1.086.875.510,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.500.000,00	98.500.000,00	98.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.996.793.400,00	1.996.793.400,00	988.375.510,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.190.000,00	176.190.000,00	1.474.094.940,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.400.000,00	57.400.000,00	263.900.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	88.790.000,00	88.790.000,00	50.690.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	1.159.504.940,00
1.02.0.00.0.00.01.0004						RSUD Bali Mandara	212.937.846.599,00	212.937.846.599,00	264.941.693.514,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	54.255.586.205,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	54.255.586.205,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0,00	0,00	45.978.212.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	8.277.374.205,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	212.937.846.599,00	212.937.846.599,00	210.686.107.309,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.937.846.599,00	32.937.846.599,00	30.686.107.309,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	32.937.846.599,00	32.937.846.599,00	30.686.107.309,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00	180.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005						Rumah Sakit Jiwa	38.404.362.122,00	38.404.362.122,00	54.581.492.878,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	0,00	0,00	16.677.094.270,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	0,00	0,00	16.677.094.270,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	0,00	0,00	16.677.094.270,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.404.362.122,00	38.404.362.122,00	37.904.398.608,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.404.362.122,00	12.404.362.122,00	11.904.398.608,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00	1.114.110.402,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.290.251.720,00	11.290.251.720,00	10.790.288.206,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006						Rumah Sakit Mata Bali Mandara	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00	90.000.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007						UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	6.703.334.961,00	6.702.435.770,00	10.699.095.866,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.278.403.941,00	1.278.089.950,00	6.030.049.754,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	378.453.141,00	378.452.100,00	4.851.273.960,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	195.000.000,00	195.000.000,00	360.783.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	183.453.141,00	183.452.100,00	4.490.490.960,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	899.950.800,00	899.637.850,00	1.178.775.794,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	899.950.800,00	899.637.850,00	1.178.775.794,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.424.931.020,00	5.424.345.820,00	4.669.046.112,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	788.120.360,00	787.919.660,00	742.157.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.592.400,00	12.592.400,00	11.575.400,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	298.335.460,00	298.145.960,00	252.289.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	407.686.200,00	407.675.000,00	408.786.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.970.300,00	3.970.300,00	3.970.300,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.700.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.836.000,00	53.836.000,00	53.836.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	961.984.000,00	961.635.000,00	906.126.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	111.984.000,00	111.635.000,00	56.126.200,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.503.035.560,00	2.503.035.560,00	1.898.521.612,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.082.000,00	5.082.000,00	5.082.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	780.000.000,00	780.000.000,00	780.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.717.953.560,00	1.717.953.560,00	1.113.439.612,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.171.791.100,00	1.171.755.600,00	1.122.241.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	75.480.000,00	75.480.000,00	57.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	566.511.100,00	566.475.600,00	532.441.100,00
1.02.0.00.0.00.01.0007	1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	489.000.000,00	489.000.000,00	492.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001						UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	4.102.152.358,00	4.100.515.980,00	4.017.980.840,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.102.152.358,00	4.100.515.980,00	4.017.980.840,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.919.170.718,00	2.919.170.640,00	2.873.776.610,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	2.919.170.718,00	2.919.170.640,00	2.873.776.610,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	2.919.170.718,00	2.919.170.640,00	2.873.776.610,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.182.981.640,00	1.181.345.340,00	1.144.204.230,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	98.775.300,00	98.221.300,00	99.316.900,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.782.000,00	11.782.000,00	11.782.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.853.600,00	19.853.600,00	20.930.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.619.700,00	4.619.700,00	4.638.700,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	4.446.000,00	4.446.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.166.700,00	84.551.200,00	121.137.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	70.166.700,00	70.010.800,00	70.010.800,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	14.540.400,00	51.126.400,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.200.000,00	221.193.200,00	221.193.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.193.200,00	1.193.200,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.839.640,00	777.379.640,00	702.556.930,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	345.582.800,00	345.582.800,00	329.075.880,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.420.000,00	23.960.000,00	23.960.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0001	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	407.836.840,00	407.836.840,00	349.521.050,00
1.03.1.04.0.00.01.0002						UPTD Pengelolaan Air Minum	41.803.049.560,00	41.803.049.560,00	41.269.710.452,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	41.803.049.560,00	41.803.049.560,00	41.269.710.452,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	41.803.049.560,00	41.803.049.560,00	41.269.710.452,00
1.03.1.04.0.00.01.0002	1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	41.803.049.560,00	41.803.049.560,00	41.269.710.452,00
1.03.1.04.0.00.01.0003						UPTD Pengelolaan Air Limbah	14.892.528.760,00	14.892.528.760,00	14.436.373.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	14.892.528.760,00	14.892.528.760,00	14.436.373.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	14.892.528.760,00	14.892.528.760,00	14.436.373.000,00
1.03.1.04.0.00.01.0003	1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	14.892.528.760,00	14.892.528.760,00	14.436.373.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000						Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	338.711.699.747,00	338.579.455.575,00	395.280.962.585,20
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	16.449.000.000,00	16.448.999.400,00	27.492.573.554,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.107.030.120,00	7.107.029.620,00	6.774.201.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	35.900.000,00	35.900.000,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	241.073.500,00	241.073.500,00	228.593.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	5.310.000.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	406.543.300,00	406.543.300,00	334.833.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	46.088.400,00	46.088.400,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	215.996.300,00	215.996.200,00	215.996.200,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	1.121.428.620,00	1.121.428.220,00	684.778.220,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.341.969.880,00	9.341.969.780,00	20.718.372.334,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.769.601.620,00	3.769.601.620,00	15.177.630.830,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.842.183.180,00	3.842.183.180,00	3.827.973.634,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.730.185.080,00	1.730.184.980,00	1.712.767.870,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	23.030.621.612,00	23.030.621.612,00	31.434.398.709,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	23.030.621.612,00	23.030.621.612,00	31.434.398.709,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.138.810.320,00	2.138.810.320,00	1.868.839.454,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	20.891.811.292,00	20.891.811.292,00	29.565.559.255,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.441.036.952,00	3.441.036.952,00	3.441.036.952,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	3.441.036.952,00	3.441.036.952,00	3.441.036.952,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	3.182.090.552,00	3.182.090.552,00	3.182.090.552,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	258.946.400,00	258.946.400,00	258.946.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.678.074.300,00	2.678.074.300,00	2.778.074.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	2.678.074.300,00	2.678.074.300,00	2.778.074.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	2.678.074.300,00	2.678.074.300,00	2.778.074.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	171.691.924.300,00	171.691.924.300,00	126.606.924.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	171.691.924.300,00	171.691.924.300,00	126.606.924.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	169.498.313.100,00	169.498.313.100,00	126.219.455.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	587.468.500,00	587.468.500,00	387.468.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	09	1.01	0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.606.142.700,00	1.606.142.700,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	77.418.795.022,00	77.418.795.022,00	138.124.183.048,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	77.418.795.022,00	77.418.795.022,00	138.124.183.048,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	2.349.657.120,00	2.349.657.120,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	154.752.000,00	154.752.000,00	140.646.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	8.392.009.482,00	8.392.009.482,00	14.761.601.205,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	0,00	0,00	58.369.753.120,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	24.866.561.020,00	24.866.561.020,00	24.350.874.776,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0038	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.903.600.000,00	4.903.600.000,00	16.419.793.732,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar	30.360.261.400,00	30.360.261.400,00	15.339.734.607,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.830.198.000,00	4.830.198.000,00	6.801.830.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0042	Pembangunan Jalan	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.461.756.000,00	1.461.756.000,00	1.839.949.608,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.474.014.420,00	1.474.014.420,00	1.426.877.912,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	917.978.060,00	917.978.060,00	907.982.222,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	917.978.060,00	917.978.060,00	907.982.222,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	0,00	0,00	0,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	556.036.360,00	556.036.360,00	518.895.690,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	258.126.460,00	258.126.460,00	241.619.540,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	297.909.900,00	297.909.900,00	277.276.150,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.201.420.580,00	2.201.420.580,00	2.137.776.552,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	90.705.800,00	90.705.800,00	90.705.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	90.705.800,00	90.705.800,00	90.705.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	854.468.980,00	854.468.980,00	825.581.870,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	854.468.980,00	854.468.980,00	825.581.870,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	556.611.300,00	556.611.300,00	535.977.350,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	391.100.600,00	391.100.600,00	370.466.750,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	165.510.700,00	165.510.700,00	165.510.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	699.634.500,00	699.634.500,00	685.511.932,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	371.250.300,00	371.250.300,00	371.250.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	328.384.200,00	328.384.200,00	314.261.632,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34.123.137.881,00	33.991.339.909,00	55.621.913.128,20
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	772.117.240,00	772.116.760,00	727.364.604,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	403.635.860,00	403.635.860,00	373.006.372,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	368.481.380,00	368.480.900,00	354.358.232,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.311.315.507,00	28.311.677.855,00	50.066.016.070,20
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.311.315.507,00	28.311.677.855,00	50.066.016.070,20
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	731.321.200,00	724.157.720,00	724.157.720,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.179.000,00	22.172.600,00	22.172.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.487.900,00	57.485.000,00	57.485.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.500.000,00	50.820.120,00	50.820.120,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	66.734.300,00	66.734.000,00	66.734.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	16.260.000,00	15.816.000,00	15.816.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.250.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	458.910.000,00	458.880.000,00	458.880.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	555.784.200,00	544.881.300,00	544.881.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	87.676.200,00	82.638.800,00	82.638.800,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	468.108.000,00	462.242.500,00	462.242.500,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.042.733.080,00	1.042.456.040,00	1.042.456.040,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	7.190.600,00	7.190.600,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	436.600.000,00	436.600.000,00	436.600.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.770.000,00	49.770.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.933.080,00	548.895.440,00	548.895.440,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.709.866.654,00	2.596.050.234,00	2.517.037.394,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.564.610.700,00	1.564.610.700,00	1.568.132.460,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	205.846.420,00	205.076.420,00	192.696.230,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	939.409.534,00	826.363.114,00	756.208.704,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.896.478.980,00	5.896.377.380,00	5.834.476.430,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.898.675.980,00	1.898.668.680,00	1.857.401.380,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	320.824.400,00	320.817.100,00	300.183.450,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	295.790.700,00	295.783.400,00	175.149.750,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	25.033.700,00	25.033.700,00	125.033.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.577.851.580,00	1.577.851.580,00	1.557.217.930,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	1.577.851.580,00	1.577.851.580,00	1.557.217.930,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.605.998.300,00	2.605.998.300,00	2.605.998.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2.605.998.300,00	2.605.998.300,00	2.605.998.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.579.678.300,00	1.579.678.300,00	1.579.678.300,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.026.320.000,00	1.026.320.000,00	1.026.320.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.391.804.700,00	1.391.710.400,00	1.371.076.750,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	1.391.804.700,00	1.391.710.400,00	1.371.076.750,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	114.412.000,00	114.412.000,00	15.718.400,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1.223.310.700,00	1.223.303.400,00	1.301.363.350,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	54.082.000,00	53.995.000,00	53.995.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.03.1.04.2.10.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	307.195.700,00	306.851.700,00	382.727.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	307.195.700,00	306.851.700,00	382.727.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	0,00	0,00	75.876.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	75.876.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	05	1.01	0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	75.876.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	86.847.700,00	86.847.700,00	86.847.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	86.847.700,00	86.847.700,00	86.847.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	86.847.700,00	86.847.700,00	86.847.700,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	220.348.000,00	220.004.000,00	220.004.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	220.348.000,00	220.004.000,00	220.004.000,00
1.03.1.04.2.10.01.0000	2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	220.348.000,00	220.004.000,00	220.004.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000						Satuan Polisi Pamong Praja	53.379.955.947,00	53.379.955.947,00	58.799.817.568,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	53.379.955.947,00	53.379.955.947,00	58.799.817.568,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	53.379.955.947,00	53.379.955.947,00	58.799.817.568,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.122.893.537,00	27.122.893.537,00	28.571.880.335,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	25.034.747.517,00	25.034.747.517,00	26.350.233.577,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	77.681.740,00	77.681.740,00	73.554.610,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	29.999.900,00	29.999.900,00	29.999.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	19.013.008.957,00	19.013.008.957,00	20.450.348.273,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	334.999.700,00	334.999.700,00	367.849.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	19.993.200,00	19.993.200,00	19.993.200,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	107.681.840,00	107.681.840,00	103.555.110,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5.092.335.760,00	5.092.335.760,00	4.955.245.872,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.01	0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	359.046.420,00	359.046.420,00	349.687.312,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	2.088.146.020,00	2.088.146.020,00	2.221.646.758,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	99.999.900,00	99.999.900,00	99.999.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1.688.146.340,00	1.688.146.340,00	1.742.662.038,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.02	0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	299.999.780,00	299.999.780,00	378.984.820,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.257.062.410,00	26.257.062.410,00	30.227.937.233,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	24.998.328.311,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	24.998.328.311,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	848.682.790,00	848.682.790,00	857.983.690,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.380.900,00	40.380.900,00	40.706.800,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	552.061.600,00	552.061.600,00	551.436.600,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	93.335.290,00	93.335.290,00	106.033.390,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	12.301.900,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.905.000,00	137.905.000,00	147.505.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.985.300,00	103.985.300,00	103.985.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	103.985.300,00	103.985.300,00	103.985.300,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.172.744.000,00	1.172.744.000,00	1.140.116.342,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.700,00	2.998.700,00	2.998.700,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.720.000,00	48.720.000,00	48.720.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.025.300,00	956.025.300,00	923.397.642,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.110.650.320,00	3.110.650.320,00	3.106.523.590,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.845.650.320,00	2.845.650.320,00	2.841.523.590,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000						Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.236.823.811,00	27.236.815.533,00	28.382.422.050,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.554.763.300,00	4.554.758.300,00	4.603.104.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	185.448.000,00	185.448.000,00	181.668.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	185.448.000,00	185.448.000,00	181.668.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.967.829.200,00	1.967.829.200,00	2.028.769.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	392.616.500,00	392.616.500,00	441.354.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.159.500,00	100.159.500,00	69.690.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	193.529.500,00	193.529.500,00	184.643.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	158.439.500,00	158.439.500,00	158.436.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	283.594.200,00	283.594.200,00	283.594.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	342.944.400,00	342.944.400,00	400.151.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	496.545.600,00	496.545.600,00	490.898.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.214.251.200,00	1.214.251.200,00	1.214.183.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	752.037.200,00	752.037.200,00	752.027.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	462.214.000,00	462.214.000,00	462.156.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.187.234.900,00	1.187.229.900,00	1.178.484.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	275.663.800,00	275.658.800,00	277.076.400,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	28.980.000,00	28.980.000,00	28.980.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	182.292.500,00	182.292.500,00	180.802.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	438.317.500,00	438.317.500,00	438.317.500,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	76.490.000,00	76.490.000,00	76.490.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	185.491.100,00	185.491.100,00	176.818.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.682.060.511,00	22.682.057.233,00	23.779.317.650,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.079.000,00	204.079.000,00	204.092.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.050.000,00	97.050.000,00	97.051.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	107.029.000,00	107.029.000,00	107.041.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.321.714.887,00	14.321.714.209,00	15.676.945.478,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.321.714.887,00	14.321.714.209,00	15.676.945.478,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	172.000.000,00	172.000.000,00	168.104.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	172.000.000,00	172.000.000,00	168.104.200,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	616.408.124,00	616.405.524,00	654.260.624,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.984.800,00	9.982.800,00	9.982.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.712.800,00	112.712.200,00	116.047.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	86.229.424,00	86.229.424,00	86.229.424,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.131.100,00	20.131.100,00	20.258.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.350.000,00	381.350.000,00	415.742.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	905.145.500,00	905.145.500,00	869.369.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	905.145.500,00	905.145.500,00	869.369.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.503.773.200,00	1.503.773.200,00	1.444.386.448,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	258.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.245.773.200,00	1.245.773.200,00	1.186.386.448,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.958.939.800,00	4.958.939.800,00	4.762.159.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.467.969.800,00	2.467.969.800,00	2.287.969.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	16.000.000,00	22.380.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.372.000.000,00	2.372.000.000,00	2.372.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.970.000,00	87.970.000,00	64.810.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001						UPTD Pengendalian Bencana Daerah	8.235.176.189,00	8.235.174.089,00	8.258.507.573,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.615.489.069,00	4.615.487.869,00	4.615.401.969,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.165.429.000,00	1.165.427.800,00	1.165.401.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	953.198.200,00	953.197.000,00	953.192.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	212.230.800,00	212.230.800,00	212.209.900,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	3.450.060.069,00	3.450.060.069,00	3.450.000.069,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	3.450.060.069,00	3.450.060.069,00	3.450.000.069,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.619.687.120,00	3.619.686.220,00	3.643.105.604,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.839.100,00	66.839.100,00	66.839.100,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.846.800,00	16.846.800,00	16.846.800,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.992.300,00	25.992.300,00	25.992.300,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.526.141.500,00	1.526.141.500,00	1.648.730.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.526.141.500,00	1.526.141.500,00	1.648.730.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.463.071.320,00	1.463.070.420,00	1.364.078.904,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.223.071.320,00	1.223.070.420,00	1.124.078.904,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.635.200,00	563.635.200,00	563.457.600,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	140.800.000,00	140.800.000,00	140.800.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00
1.05.0.00.0.00.04.0001	1	05	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	312.835.200,00	312.835.200,00	312.657.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000						Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	29.835.805.708,00	29.836.693.408,00	30.339.822.707,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	28.702.578.008,00	28.703.478.108,00	29.206.607.407,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	115.633.100,00	115.633.100,00	115.633.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3.484.600,00	3.484.600,00	3.484.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	3.484.600,00	3.484.600,00	3.484.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	112.148.500,00	112.148.500,00	112.148.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	02	1.02	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	112.148.500,00	112.148.500,00	112.148.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.187.919.300,00	4.187.786.100,00	4.187.786.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	2.778.624.600,00	2.778.648.900,00	2.778.648.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	28.624.600,00	28.624.600,00	28.624.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	30.000.000,00	30.024.300,00	30.024.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	678.843.800,00	678.843.800,00	678.843.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	403.782.600,00	403.782.600,00	403.782.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	236.941.200,00	236.941.200,00	236.941.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	38.120.000,00	38.120.000,00	38.120.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	546.251.500,00	546.174.000,00	546.174.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	203.890.000,00	203.812.500,00	203.812.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	24.500.800,00	24.500.800,00	24.500.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	44.970.600,00	44.970.600,00	44.970.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	272.890.100,00	272.890.100,00	272.890.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	184.199.400,00	184.119.400,00	184.119.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	19.999.400,00	19.999.400,00	19.999.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	164.200.000,00	164.120.000,00	164.120.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	142.568.100,00	142.567.700,00	142.567.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	17.136.600,00	17.136.600,00	17.136.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	17.136.600,00	17.136.600,00	17.136.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	125.431.500,00	125.431.100,00	125.431.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	119.791.500,00	119.791.100,00	119.791.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	05	1.02	0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.640.000,00	5.640.000,00	5.640.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	351.413.100,00	351.411.800,00	351.411.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	351.413.100,00	351.411.800,00	351.411.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	3.240.000,00	3.240.000,00	3.240.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	344.933.100,00	344.931.800,00	344.931.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	309.258.400,00	309.258.400,00	309.258.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	309.258.400,00	309.258.400,00	309.258.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	309.258.400,00	309.258.400,00	309.258.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.594.611.008,00	23.595.646.008,00	24.098.775.307,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.864.600,00	52.864.600,00	52.864.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.907.600,00	27.907.600,00	27.907.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	4.952.200,00	4.952.200,00	4.952.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.004.800,00	20.004.800,00	20.004.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.170.802.108,00	20.170.802.108,00	20.681.909.121,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.170.802.108,00	20.170.802.108,00	20.681.909.121,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	364.650.700,00	364.650.700,00	364.650.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.508.200,00	7.508.200,00	7.508.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.649.600,00	79.649.600,00	79.649.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.022.700,00	96.022.700,00	96.022.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.647.200,00	5.647.200,00	5.647.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.163.000,00	172.163.000,00	172.163.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	651.772.020,00	651.772.020,00	668.462.484,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	471.772.020,00	471.772.020,00	488.462.484,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.354.521.580,00	2.355.556.580,00	2.330.888.402,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.133.511.380,00	1.134.546.380,00	1.175.080.364,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.221.010.200,00	1.221.010.200,00	1.155.808.038,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.133.227.700,00	1.133.215.300,00	1.133.215.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.133.227.700,00	1.133.215.300,00	1.133.215.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	114.967.700,00	114.967.700,00	114.967.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	37.634.200,00	37.634.200,00	37.634.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.01	0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	37.634.200,00	37.634.200,00	37.634.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	77.333.500,00	77.333.500,00	77.333.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	02	1.02	0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	77.333.500,00	77.333.500,00	77.333.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	159.546.100,00	159.546.100,00	159.546.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	59.546.100,00	59.546.100,00	59.546.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	59.546.100,00	59.546.100,00	59.546.100,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	03	1.03	0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	11.891.000,00	11.878.600,00	11.878.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	11.891.000,00	11.878.600,00	11.878.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	04	1.02	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	11.891.000,00	11.878.600,00	11.878.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	9.996.400,00	9.996.400,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	9.996.400,00	9.996.400,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	05	1.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	9.996.400,00	9.996.400,00	9.996.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	817.082.900,00	817.082.900,00	817.082.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	45.325.700,00	45.325.700,00	45.325.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.01	0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	45.325.700,00	45.325.700,00	45.325.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	771.757.200,00	771.757.200,00	771.757.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	650.611.600,00	650.611.600,00	650.611.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	06	1.02	0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	121.145.600,00	121.145.600,00	121.145.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	19.743.600,00	19.743.600,00	19.743.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.743.600,00	19.743.600,00	19.743.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0000	2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	19.743.600,00	19.743.600,00	19.743.600,00
1.06.2.08.0.00.06.0001						UPTD Pelayanan Sosial	9.163.457.620,00	9.162.977.620,00	9.048.226.858,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.163.457.620,00	9.162.977.620,00	9.048.226.858,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	9.163.457.620,00	9.162.977.620,00	9.048.226.858,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.254.279.200,00	3.253.799.200,00	3.253.798.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1.928.442.200,00	1.928.442.200,00	1.928.441.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	91.401.500,00	91.401.500,00	91.401.500,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0002	Penyediaan Makanan	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00	1.478.250.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	89.750.000,00	89.750.000,00	89.750.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	21.680.300,00	21.680.300,00	21.680.300,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	125.760.400,00	125.760.400,00	125.759.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	21.600.000,00	21.600.000,00	21.600.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.325.837.000,00	1.325.357.000,00	1.325.357.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	996.450.000,00	996.450.000,00	996.450.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	164.987.000,00	164.987.000,00	164.987.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	14.400.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.909.178.420,00	5.909.178.420,00	5.794.428.658,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.180.800,00	187.180.800,00	187.170.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.824.000,00	9.824.000,00	9.813.400,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.941.800,00	159.941.800,00	159.941.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.415.000,00	17.415.000,00	17.415.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.647.120,00	521.647.120,00	538.321.344,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.100.000,00	201.100.000,00	201.100.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	320.547.120,00	320.547.120,00	337.221.344,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.200.350.500,00	5.200.350.500,00	5.068.937.114,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	273.554.280,00	273.554.280,00	278.322.984,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.654.397.000,00	3.654.397.000,00	3.654.397.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0001	1	06	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.272.399.220,00	1.272.399.220,00	1.136.217.130,00
1.06.2.08.0.00.06.0002						UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	669.493.160,00	669.083.519,00	5.204.410.786,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	669.493.160,00	669.083.519,00	5.204.410.786,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	669.493.160,00	669.083.519,00	5.204.410.786,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	33.600.000,00	33.600.000,00	4.496.899.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	25.920.000,00	25.920.000,00	127.407.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	25.920.000,00	25.920.000,00	127.407.200,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.680.000,00	7.680.000,00	4.369.492.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.680.000,00	7.680.000,00	7.680.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	4.361.812.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	4.499.900,00	4.499.000,00	73.517.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.499.900,00	4.499.000,00	73.517.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	4.499.900,00	4.499.000,00	4.499.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	07	1.03	0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	0,00	0,00	69.018.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	631.393.260,00	630.984.519,00	633.994.586,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.548.800,00	71.141.959,00	71.135.700,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.528.800,00	1.528.800,00	1.528.800,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.680.000,00	26.273.159,00	26.266.900,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.340.000,00	43.340.000,00	43.340.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.844.460,00	554.842.560,00	557.858.886,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164.439.280,00	164.439.280,00	129.131.492,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.961.340,00	38.961.340,00	41.345.692,00
1.06.2.08.0.00.06.0002	2	08	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	351.443.840,00	351.441.940,00	387.381.702,00
2.07.3.29.0.00.01.0001						UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	952.109.407,00	952.109.407,00	935.284.461,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	952.109.407,00	952.109.407,00	935.284.461,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	256.350.000,00	256.350.000,00	256.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	256.350.000,00	256.350.000,00	256.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	256.350.000,00	256.350.000,00	256.350.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	695.759.407,00	695.759.407,00	678.934.461,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	36.754.194,00	36.754.194,00	36.754.194,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.252.600,00	3.252.600,00	3.252.600,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.117.700,00	6.117.700,00	6.117.700,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.899.394,00	12.899.394,00	12.899.394,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	986.500,00	986.500,00	986.500,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.298.000,00	12.298.000,00	12.298.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.728.560,00	224.728.560,00	224.728.560,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.728.560,00	200.728.560,00	200.728.560,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	406.276.653,00	406.276.653,00	389.451.707,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.770.000,00	80.770.000,00	80.770.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.131.673,00	35.131.673,00	35.131.673,00
2.07.3.29.0.00.01.0001	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.374.980,00	290.374.980,00	273.550.034,00
2.07.3.29.0.00.01.0002						UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	974.327.800,00	974.327.800,00	975.605.160,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	415.850.050,00	415.850.050,00	415.850.050,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	415.850.050,00	415.850.050,00	415.850.050,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	415.850.050,00	415.850.050,00	415.850.050,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	558.477.750,00	558.477.750,00	559.755.110,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.704.974,00	30.704.974,00	30.704.974,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.980.300,00	4.980.300,00	4.980.300,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.896.400,00	7.896.400,00	7.896.400,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.944.274,00	14.944.274,00	14.944.274,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.884.000,00	2.884.000,00	2.884.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.797.596,00	115.797.596,00	115.797.596,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	957.700,00	957.700,00	957.700,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.839.896,00	102.839.896,00	102.839.896,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.975.180,00	411.975.180,00	413.252.540,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.182.140,00	127.182.140,00	129.559.904,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07.3.29.0.00.01.0002	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.793.040,00	269.793.040,00	268.692.636,00
2.07.3.29.3.32.01.0000						Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	39.255.406.353,00	39.255.406.353,00	41.517.225.437,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	30.997.600,00	30.997.600,00	30.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	30.997.600,00	30.997.600,00	30.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	30.997.600,00	30.997.600,00	30.997.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	102.977.100,00	102.977.100,00	102.977.100,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	66.663.300,00	66.663.300,00	66.663.300,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	66.663.300,00	66.663.300,00	66.663.300,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	36.313.800,00	36.313.800,00	36.313.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	36.313.800,00	36.313.800,00	36.313.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	7.033.141.000,00	7.033.141.000,00	6.960.714.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000,00	5.566.000,00	5.566.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	5.566.000,00	5.566.000,00	5.566.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK)	7.027.575.000,00	7.027.575.000,00	6.955.148.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	25.775.000,00	25.775.000,00	25.775.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	6.927.573.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	20.300.000,00	20.300.000,00	20.300.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	31.927.606.353,00	31.927.606.353,00	34.261.852.437,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.567.230.040,00	28.567.230.040,00	30.920.989.502,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.567.230.040,00	28.567.230.040,00	30.920.989.502,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.269.794,00	335.269.794,00	322.199.294,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.992.900,00	14.992.900,00	14.992.900,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.179.800,00	41.179.800,00	41.179.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	69.683.994,00	69.683.994,00	65.133.994,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.645.100,00	23.645.100,00	15.124.600,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.614.000,00	8.614.000,00	8.614.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.104.000,00	167.104.000,00	167.104.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	67.487.000,00	67.487.000,00	116.064.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.487.000,00	67.487.000,00	116.064.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.013.444.423,00	1.013.444.423,00	1.013.444.423,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.873.100,00	2.873.100,00	2.873.100,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.000.000,00	384.000.000,00	384.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	626.571.323,00	626.571.323,00	626.571.323,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.944.175.096,00	1.944.175.096,00	1.889.155.218,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	685.810.896,00	685.810.896,00	741.917.508,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	185.728.560,00	185.728.560,00	213.265.968,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	2	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.072.635.640,00	1.072.635.640,00	933.971.742,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	140.384.300,00	140.384.300,00	140.384.300,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	115.499.500,00	115.499.500,00	115.499.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	94.999.500,00	94.999.500,00	94.999.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	94.999.500,00	94.999.500,00	94.999.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	94.999.500,00	94.999.500,00	94.999.500,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00
2.07.3.29.3.32.01.0000	3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	24.884.800,00	24.884.800,00	24.884.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000						Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23.202.974.946,00	23.202.948.986,00	22.984.549.537,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	23.202.974.946,00	23.202.948.986,00	22.984.549.537,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	647.999.224,00	647.998.940,00	589.682.750,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	365.999.520,00	365.999.520,00	353.619.030,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	365.999.520,00	365.999.520,00	353.619.030,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	365.999.520,00	365.999.520,00	353.619.030,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	281.999.704,00	281.999.420,00	236.063.720,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	281.999.704,00	281.999.420,00	236.063.720,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	281.999.704,00	281.999.420,00	236.063.720,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	22.051.376.482,00	22.051.350.806,00	21.716.072.927,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	116.966.120,00	116.966.120,00	135.878.612,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	116.966.120,00	116.966.120,00	135.878.612,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	116.966.120,00	116.966.120,00	135.878.612,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	613.538.580,00	613.538.580,00	666.251.370,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	613.538.580,00	613.538.580,00	666.251.370,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	117.943.020,00	117.943.020,00	187.162.830,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	457.999.760,00	457.999.760,00	441.492.840,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	37.595.800,00	37.595.800,00	37.595.700,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.333.595.940,00	4.333.595.940,00	5.341.186.660,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.333.595.940,00	4.333.595.940,00	5.341.186.660,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	149.999.980,00	149.999.980,00	141.746.520,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	230.643.460,00	230.643.460,00	189.354.940,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	675.410.580,00	675.410.580,00	585.557.120,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.277.541.920,00	3.277.541.920,00	4.424.528.080,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.987.275.842,00	16.987.250.166,00	15.572.756.285,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	358.149.192,00	358.149.192,00	351.660.012,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.715.300,00	15.715.300,00	88.455.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	342.433.892,00	342.433.892,00	263.205.012,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.377.410.384,00	14.377.410.384,00	12.951.889.701,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.236.963.864,00	14.236.963.864,00	12.823.823.571,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	140.446.520,00	140.446.520,00	128.066.130,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	504.452.950,00	504.452.950,00	373.902.950,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.992.400,00	5.992.400,00	5.992.400,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	352.708.600,00	352.708.600,00	25.523.100,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.738.750,00	75.738.750,00	75.738.750,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.979.600,00	5.979.600,00	6.048.100,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.626.600,00	4.626.600,00	4.626.600,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.850.000,00	5.850.000,00	1.350.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.557.000,00	53.557.000,00	254.624.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.439.600,00	6.439.600,00	6.439.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.439.600,00	6.439.600,00	6.439.600,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	694.613.780,00	694.613.780,00	690.670.594,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.800.000,00	174.800.000,00	174.800.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	519.813.780,00	519.813.780,00	515.870.594,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.046.209.936,00	1.046.184.260,00	1.198.193.428,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.004.929.936,00	1.004.924.260,00	1.098.383.428,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	13	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.280.000,00	41.260.000,00	99.810.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	503.599.240,00	503.599.240,00	678.793.860,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	503.599.240,00	503.599.240,00	678.793.860,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	503.599.240,00	503.599.240,00	678.793.860,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	0,00	0,00	199.955.000,00
2.13.2.12.2.14.01.0000	2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	503.599.240,00	503.599.240,00	478.838.860,00
2.15.0.00.0.00.01.0000						Dinas Perhubungan	26.118.757.710,00	26.557.136.701,00	33.596.033.066,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	26.118.757.710,00	26.557.136.701,00	33.596.033.066,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.211.997.680,00	1.711.784.020,00	1.664.501.312,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	425.000.000,00	424.910.840,00	406.547.542,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	330.000.000,00	329.952.840,00	311.703.542,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	95.000.000,00	94.958.000,00	94.844.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	45.000.000,00	544.880.000,00	544.852.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	30.000.000,00	530.000.000,00	529.972.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	15.000.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	301.664.700,00	301.664.700,00	301.664.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.10	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	301.664.700,00	301.664.700,00	301.664.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	440.332.980,00	440.328.480,00	411.437.370,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	440.332.980,00	440.328.480,00	411.437.370,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	566.952.040,00	703.471.940,00	644.638.650,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	566.952.040,00	703.471.940,00	644.638.650,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	566.952.040,00	703.471.940,00	644.638.650,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	671.694.840,00	671.693.840,00	646.933.460,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	671.694.840,00	671.693.840,00	646.933.460,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	671.694.840,00	671.693.840,00	646.933.460,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	23.668.113.150,00	23.470.186.901,00	30.639.959.644,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.376.000,00	58.879.000,00	58.879.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.118.000,00	24.236.000,00	24.236.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.258.000,00	34.643.000,00	34.643.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.248.537.150,00	18.256.051.150,00	24.634.739.316,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.240.537.150,00	18.240.537.150,00	24.619.225.316,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.000.000,00	15.514.000,00	15.514.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.996.000.000,00	2.132.807.460,00	2.026.670.340,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00	6.993.800,00	6.993.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.130.000.000,00	1.102.171.960,00	996.034.840,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	75.600.000,00	75.600.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	9.253.700,00	9.253.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	770.000.000,00	938.788.000,00	938.788.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.000.000,00	258.580.171,00	1.168.273.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.000.000,00	90.306.771,00	1.000.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	350.000.000,00	168.273.400,00	168.273.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.200.000,00	623.410.620,00	642.485.436,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	420.000.000,00	323.700.620,00	342.775.436,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.207.000.000,00	2.140.458.500,00	2.108.912.152,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.000.000,00	899.999.280,00	904.767.984,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107.000.000,00	73.770.000,00	73.770.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	2	15	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000.000,00	1.166.689.220,00	1.130.374.168,00
2.15.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	4.246.970.492,00	3.142.640.140,00	3.013.711.510,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.635.813.452,00	2.327.264.200,00	2.195.951.218,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	397.000.000,00	596.800.000,00	596.800.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	397.000.000,00	596.800.000,00	596.800.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	3.238.813.452,00	1.730.464.200,00	1.599.151.218,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	3.238.813.452,00	1.730.464.200,00	1.599.151.218,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	611.157.040,00	815.375.940,00	817.760.292,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	382.743.500,00	380.361.700,00	380.361.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.248.000,00	4.244.400,00	4.244.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.251.500,00	153.153.300,00	153.153.300,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.444.000,00	222.164.000,00	222.164.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.434.940,00	249.234.640,00	251.618.992,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.193.200,00	1.193.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000,00	207.660.000,00	207.660.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.034.940,00	40.381.440,00	42.765.792,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	184.978.600,00	185.779.600,00	185.779.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166.498.600,00	167.299.600,00	167.299.600,00
2.15.0.00.0.00.01.0001	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.480.000,00	18.480.000,00	18.480.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002						UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	8.786.542.013,00	8.773.277.421,00	8.632.346.131,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.063.449.173,00	8.063.448.033,00	7.938.004.159,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.063.449.173,00	8.063.448.033,00	7.938.004.159,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.063.449.173,00	8.063.448.033,00	7.938.004.159,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	723.092.840,00	709.829.388,00	694.341.972,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.500.000,00	237.946.148,00	234.196.948,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	915.400,00	915.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	148.589.960,00	148.589.960,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	20.324.588,00	20.324.588,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	9.876.000,00	9.876.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.000.000,00	3.749.200,00	0,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.500.000,00	54.491.000,00	54.491.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	23.685.000,00	23.685.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	25.000.000,00	23.685.000,00	23.685.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.462.140,00	72.297.540,00	74.681.892,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	480.000,00	471.000,00	471.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.682.140,00	38.526.540,00	40.910.892,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.130.700,00	375.900.700,00	361.778.132,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	357.990.700,00	357.760.700,00	343.638.132,00
2.15.0.00.0.00.01.0002	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.140.000,00	18.140.000,00	18.140.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0003						UPTD Perlengkapan Jalan	3.086.139.333,00	3.772.400.980,00	3.750.024.752,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.786.653.193,00	3.472.976.840,00	3.448.216.260,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.786.653.193,00	3.472.976.840,00	3.448.216.260,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	2.435.925.033,00	2.512.248.680,00	2.503.995.020,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	350.728.160,00	960.728.160,00	944.221.240,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	299.486.140,00	299.424.140,00	301.808.492,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.343.200,00	39.343.200,00	39.343.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.276.800,00	5.276.800,00	5.276.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.066.400,00	34.066.400,00	34.066.400,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.650.800,00	100.650.800,00	100.650.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.650.800,00	100.650.800,00	100.650.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	159.492.140,00	159.430.140,00	161.814.492,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148.332.140,00	148.270.140,00	150.654.492,00
2.15.0.00.0.00.01.0003	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.160.000,00	11.160.000,00	11.160.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004						UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	751.562.760,00	744.516.630,00	710.676.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	139.567.000,00	139.540.200,00	139.540.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	139.540.200,00	139.540.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	139.567.000,00	139.540.200,00	139.540.200,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	611.995.760,00	604.976.430,00	571.136.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	462.095.760,00	461.974.930,00	428.134.500,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.323.500,00	78.321.056,00	78.321.056,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.320.000,00	2.320.000,00	2.320.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	381.452.260,00	381.333.874,00	347.493.444,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.000.000,00	16.130.800,00	16.130.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	23.000.000,00	16.130.800,00	16.130.800,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.000,00	486.700,00	486.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	486.700,00	486.700,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.400.000,00	126.384.000,00	126.384.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.000.000,00	120.984.000,00	120.984.000,00
2.15.0.00.0.00.01.0004	2	15	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000						Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	67.026.099.465,00	67.025.771.515,00	365.278.134.311,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	66.100.025.725,00	66.099.697.775,00	364.435.950.351,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	13.218.105.160,00	13.217.777.310,00	12.609.073.172,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	13.218.105.160,00	13.217.777.310,00	12.609.073.172,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	1.498.987.520,00	1.498.663.070,00	1.381.642.780,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	1.400.000.200,00	1.399.996.800,00	1.484.001.282,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1.593.884.980,00	1.593.884.980,00	1.687.524.460,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	2.418.762.680,00	2.418.762.680,00	2.373.117.170,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	1.385.243.600,00	1.385.243.600,00	1.357.171.032,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	396.069.080,00	396.069.080,00	342.520.420,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4.525.157.100,00	4.525.157.100,00	3.983.096.028,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	32.887.621.520,00	32.887.621.420,00	318.908.902.114,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	32.887.621.520,00	32.887.621.420,00	318.908.902.114,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	2.935.189.600,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	10.827.881.880,00	10.827.881.880,00	297.507.110.322,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	18.559.739.640,00	18.559.739.540,00	18.466.602.192,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.994.299.045,00	19.994.299.045,00	32.917.975.065,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.714.900,00	47.714.900,00	83.976.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.441.700,00	34.441.700,00	67.685.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.273.200,00	13.273.200,00	16.290.300,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.130.179.925,00	16.130.179.925,00	26.971.628.217,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.081.128.225,00	16.081.128.225,00	25.526.326.517,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	49.051.700,00	49.051.700,00	1.445.301.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	311.136.700,00	311.136.700,00	887.658.800,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.487.900,00	4.487.900,00	15.443.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.006.800,00	40.006.800,00	42.914.800,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000,00	87.500.000,00	87.500.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.670.400,00	13.670.400,00	13.670.400,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	31.522.600,00	31.522.600,00	31.522.600,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.630.000,00	12.630.000,00	12.630.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.319.000,00	121.319.000,00	683.978.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97.813.960,00	97.813.960,00	897.741.340,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	32.240.600,00	32.240.600,00	199.761.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	65.573.360,00	65.573.360,00	697.980.340,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	567.998.700,00	567.998.700,00	567.998.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.998.700,00	2.998.700,00	2.998.700,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	385.000.000,00	385.000.000,00	385.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.839.454.860,00	2.839.454.860,00	3.508.972.008,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.237.189.960,00	1.237.189.960,00	2.151.128.888,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.400.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.510.000,00	99.510.000,00	99.490.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.411.874.900,00	1.411.874.900,00	1.164.773.120,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	16	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.480.000,00	84.480.000,00	87.180.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	460.728.560,00	460.728.560,00	431.471.640,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	460.728.560,00	460.728.560,00	431.471.640,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	460.728.560,00	460.728.560,00	431.471.640,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	145.328.240,00	145.328.240,00	138.351.510,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	150.743.840,00	150.743.840,00	142.417.110,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	20	02	1.01	0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	164.656.480,00	164.656.480,00	150.703.020,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	465.345.180,00	465.345.180,00	410.712.320,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	465.345.180,00	465.345.180,00	410.712.320,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	330.632.840,00	330.632.840,00	289.327.110,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	34.024.900,00	34.024.900,00	34.024.900,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	184.380.940,00	184.380.940,00	172.677.410,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	39.915.000,00	39.915.000,00	10.312.800,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	72.312.000,00	72.312.000,00	72.312.000,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	134.712.340,00	134.712.340,00	121.385.210,00
2.16.2.20.2.21.02.0000	2	21	02	1.02	0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	134.712.340,00	134.712.340,00	121.385.210,00
2.16.2.20.2.21.02.0001						UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	8.517.245.485,00	8.517.245.385,00	8.143.105.490,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.517.245.485,00	8.517.245.385,00	8.143.105.490,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	8.517.245.485,00	8.517.245.385,00	8.143.105.490,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	8.517.245.485,00	8.517.245.385,00	8.143.105.490,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02	0014	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4.293.218.360,00	4.293.218.310,00	4.293.218.250,00
2.16.2.20.2.21.02.0001	2	16	03	1.02	0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	4.224.027.125,00	4.224.027.075,00	3.849.887.240,00
2.16.2.20.2.21.02.0002						UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	64.095.363.680,00	64.095.351.570,00	18.142.447.044,00
2.16.2.20.2.21.02.0002	2	16	03	1.02	0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	14.575.363.980,00	14.575.362.570,00	11.514.213.894,00
2.16.2.20.2.21.02.0002	2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	49.519.999.700,00	49.519.989.000,00	6.628.233.150,00
2.17.0.00.0.00.01.0000						Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.698.467.539,00	17.694.910.453,00	21.714.338.038,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.698.467.539,00	17.694.910.453,00	21.714.338.038,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	243.046.420,00	243.044.620,00	308.686.594,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	223.046.420,00	223.045.020,00	288.686.994,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	223.046.420,00	223.045.020,00	288.686.994,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	19.999.600,00	19.999.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	20.000.000,00	19.999.600,00	19.999.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	187.682.140,00	187.649.480,00	183.432.810,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	49.980.600,00	49.934.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50.000.000,00	49.980.600,00	49.934.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	137.682.140,00	137.668.880,00	133.498.810,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	137.682.140,00	137.668.880,00	133.498.810,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	200.364.280,00	200.363.680,00	192.110.220,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	200.364.280,00	200.363.680,00	192.110.220,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	150.364.280,00	150.364.080,00	142.110.620,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	49.999.600,00	49.999.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	678.585.680,00	678.585.680,00	635.576.002,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	678.585.680,00	678.585.680,00	635.576.002,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	602.185.680,00	602.185.680,00	559.176.002,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	76.400.000,00	76.400.000,00	76.400.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	419.328.560,00	419.328.560,00	415.843.504,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	419.328.560,00	419.328.560,00	415.843.504,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	219.328.560,00	219.328.560,00	215.843.804,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	100.000.000,00	100.000.000,00	99.999.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	08	1.01	0006	Fasilitas Inkubator Usaha Kecil	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.969.460.459,00	15.965.938.433,00	19.978.688.908,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	158.046.420,00	158.046.420,00	152.362.212,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	148.046.420,00	148.046.420,00	142.177.312,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	10.184.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.007.778.019,00	13.007.778.019,00	16.437.269.734,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.007.778.019,00	13.007.778.019,00	16.437.269.734,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.571.194,00	214.333.894,00	221.227.794,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	10.997.800,00	10.997.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.500.000,00	41.499.900,00	48.405.800,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	76.071.194,00	76.071.194,00	76.071.194,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,00	59.765.000,00	59.753.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	125.000.000,00	123.485.600,00	700.452.200,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.000.000,00	123.485.600,00	700.452.200,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.165.007.080,00	1.164.365.260,00	1.143.253.156,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.993.900,00	1.993.900,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	246.000.000,00	246.000.000,00	246.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.007.080,00	916.371.360,00	895.259.256,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.279.057.746,00	1.277.929.240,00	1.304.123.812,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	781.574.980,00	780.574.980,00	797.265.444,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	49.950.000,00	49.920.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0000	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	447.482.766,00	447.404.260,00	456.938.368,00
2.17.0.00.0.00.01.0001						UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	628.868.310,00	628.821.010,00	3.093.377.410,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	175.364.280,00	175.364.080,00	2.615.568.416,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	175.364.280,00	175.364.080,00	2.615.568.416,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	175.364.280,00	175.364.080,00	2.615.568.416,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	453.504.030,00	453.456.930,00	477.808.994,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.404.050,00	64.297.850,00	74.659.450,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	700.000,00	699.600,00	699.600,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.800.000,00	2.784.500,00	13.146.100,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.904.050,00	56.904.050,00	56.904.050,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	999.700,00	999.700,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.000.000,00	990.000,00	990.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.000.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.728.560,00	207.717.660,00	209.755.068,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	989.100,00	989.100,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.500.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.228.560,00	158.228.560,00	160.265.968,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.371.420,00	181.441.420,00	193.394.476,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94.007.140,00	94.007.140,00	101.191.492,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
2.17.0.00.0.00.01.0001	2	17	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.364.280,00	85.364.280,00	90.132.984,00
2.18.0.00.0.00.01.0000						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.755.928.560,00	17.755.448.155,00	20.171.142.940,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	17.755.928.560,00	17.755.448.155,00	20.171.142.940,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	259.998.420,00	259.998.420,00	215.186.230,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	259.998.420,00	259.998.420,00	215.186.230,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	259.998.420,00	259.998.420,00	215.186.230,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	277.600.560,00	277.262.280,00	151.553.520,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	277.600.560,00	277.262.280,00	151.553.520,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	277.600.560,00	277.262.280,00	151.553.520,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	609.629.960,00	609.629.960,00	818.735.740,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	609.629.960,00	609.629.960,00	818.735.740,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	456.021.400,00	456.021.400,00	667.234.100,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	153.608.560,00	153.608.560,00	151.501.640,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	331.846.141,00	331.747.760,00	223.606.230,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	331.846.141,00	331.747.760,00	223.606.230,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	49.575.000,00	49.575.000,00	34.560.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	232.505.941,00	232.407.560,00	150.146.230,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	49.765.200,00	49.765.200,00	38.900.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	90.724.280,00	90.724.280,00	74.790.820,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	90.724.280,00	90.724.280,00	74.790.820,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	90.724.280,00	90.724.280,00	74.790.820,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.186.129.199,00	16.186.085.455,00	18.687.270.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.575.703.875,00	13.575.703.875,00	15.130.595.620,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.575.703.875,00	13.575.703.875,00	15.130.595.620,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.692.644,00	517.689.000,00	501.109.900,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.599.100,00	12.597.300,00	5.073.400,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.473.244,00	72.471.700,00	73.134.300,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.000.000,00	80.000.000,00	70.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.225.300,00	25.225.000,00	25.516.200,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	327.395.000,00	327.395.000,00	327.386.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.481.471.980,00	1.481.471.980,00	1.475.820.930,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.464.900,00	2.464.900,00	3.846.500,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160.000.000,00	160.000.000,00	152.000.000,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.319.007.080,00	1.319.007.080,00	1.319.974.430,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.260.700,00	611.220.600,00	1.579.743.950,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	549.440.700,00	549.440.700,00	1.336.436.050,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	2	18	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.820.000,00	61.779.900,00	243.307.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kebudayaan	76.802.298.247,00	76.802.268.347,00	122.113.694.201,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	76.802.298.247,00	76.802.268.347,00	122.113.694.201,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	39.641.428.360,00	39.641.428.260,00	46.040.342.892,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	27.031.884.140,00	27.031.884.040,00	25.615.664.616,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	384.746.980,00	384.746.980,00	750.509.552,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	26.647.137.160,00	26.647.137.060,00	24.865.155.064,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	12.127.066.820,00	12.127.066.820,00	10.298.468.176,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	10.317.208.480,00	10.317.208.480,00	8.948.586.970,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	1.809.858.340,00	1.809.858.340,00	1.349.881.206,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	482.477.400,00	482.477.400,00	10.126.210.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	482.477.400,00	482.477.400,00	10.126.210.100,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	840.137.740,00	840.134.040,00	845.299.070,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	840.137.740,00	840.134.040,00	845.299.070,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	486.616.700,00	486.616.700,00	483.986.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	353.521.040,00	353.517.340,00	361.312.370,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	185.801.400,00	185.801.400,00	185.453.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	185.801.400,00	185.801.400,00	185.453.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	185.801.400,00	185.801.400,00	185.453.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	10.964.649.040,00	10.964.649.040,00	10.859.622.006,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	305.733.420,00	305.733.420,00	240.753.230,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	305.733.420,00	305.733.420,00	240.753.230,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	10.658.915.620,00	10.658.915.620,00	10.618.868.776,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	10.341.102.820,00	10.341.102.820,00	10.355.761.876,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	91.080.200,00	91.080.200,00	58.388.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	136.121.300,00	136.121.300,00	114.107.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	90.611.300,00	90.611.300,00	90.610.900,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.170.281.707,00	25.170.255.607,00	64.182.977.233,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.903.760,00	225.903.760,00	209.396.840,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.529.260,00	202.529.260,00	186.022.340,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.374.500,00	23.374.500,00	23.374.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.534.322.467,00	21.534.322.467,00	59.971.149.617,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.962.831.667,00	20.962.831.667,00	59.409.471.111,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	569.490.800,00	569.490.800,00	559.678.506,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	255.805.700,00	255.779.600,00	554.593.360,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.085.500,00	27.085.500,00	27.085.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.000.000,00	31.973.900,00	331.754.660,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	22.915.200,00	22.915.200,00	22.915.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.455.000,00	56.455.000,00	55.488.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.149.024.300,00	1.149.024.300,00	1.854.687.068,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.495.000,00	5.495.000,00	5.495.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	500.000.000,00	500.000.000,00	720.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.950.000,00	24.950.000,00	24.950.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.579.300,00	618.579.300,00	1.104.242.068,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.005.225.480,00	2.005.225.480,00	1.593.150.348,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	822.857.700,00	822.857.700,00	834.287.460,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.950.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0000	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.167.417.780,00	1.167.417.780,00	743.912.888,00
2.22.0.00.0.00.01.0001						UPTD Taman Budaya	3.512.493.020,00	3.511.880.620,00	6.400.906.550,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	2.900.500.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0,00	0,00	2.900.500.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	0,00	0,00	2.529.984.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	0,00	0,00	370.516.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.512.493.020,00	3.511.880.620,00	3.500.406.550,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.832.300,00	158.832.300,00	158.829.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	69.999.000,00	69.999.000,00	69.997.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.999.300,00	49.999.300,00	49.998.700,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.340.000,00	8.340.000,00	8.340.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.994.000,00	24.994.000,00	24.994.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.500.000,00	42.479.000,00	42.470.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.500.000,00	42.479.000,00	42.470.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.995.332.240,00	1.995.260.840,00	2.147.898.058,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	985.600.000,00	985.600.000,00	985.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	14.930.000,00	14.930.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	994.732.240,00	994.730.840,00	1.147.368.058,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.315.828.480,00	1.315.308.480,00	1.151.208.792,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	19.480.000,00	19.480.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0001	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.230.828.480,00	1.230.828.480,00	1.066.728.792,00
2.22.0.00.0.00.01.0002						UPTD Museum Bali	43.529.032.340,00	43.528.969.380,00	83.678.213.189,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	0,00	2.688.085.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	0,00	0,00	2.688.085.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0,00	0,00	909.890.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0,00	0,00	1.609.445.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	0,00	168.749.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	43.529.032.340,00	43.528.969.380,00	80.990.128.189,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.104.500,00	211.104.500,00	211.104.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.517.500,00	61.517.500,00	61.517.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.472.000,00	25.472.000,00	25.472.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.402.000,00	5.402.000,00	5.402.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.713.000,00	13.713.000,00	13.713.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.148.000,00	21.086.300,00	21.086.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.148.000,00	21.086.300,00	21.086.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.829.814.840,00	1.829.813.580,00	1.230.291.376,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.386.400,00	2.386.400,00	2.386.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.000.000,00	206.000.000,00	206.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.273.200,00	25.272.040,00	19.264.840,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.596.155.240,00	1.596.155.140,00	1.002.640.136,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41.466.965.000,00	41.466.965.000,00	79.527.646.013,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	107.795.000,00	107.795.000,00	101.600.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.840.000,00	34.840.000,00	38.080.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0002	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.324.330.000,00	41.324.330.000,00	79.387.966.013,00
2.22.0.00.0.00.01.0003						UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3.640.058.800,00	3.640.058.800,00	6.779.494.148,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	0,00	0,00	3.108.806.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi	0,00	0,00	3.108.806.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	0,00	0,00	756.260.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	0,00	0,00	2.087.713.200,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	0,00	0,00	264.832.600,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.640.058.800,00	3.640.058.800,00	3.670.688.148,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.905.200,00	149.905.200,00	153.140.800,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.995.300,00	29.995.300,00	29.995.300,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.821.400,00	49.821.400,00	53.057.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.593.100,00	51.593.100,00	51.593.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.777.400,00	6.777.400,00	6.777.400,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.440.000,00	4.440.000,00	4.440.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.278.000,00	7.278.000,00	7.278.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.265.238.600,00	3.265.238.600,00	1.341.274.324,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.930.000,00	42.930.000,00	42.930.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.870.817.100,00	2.870.817.100,00	946.852.824,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.915.000,00	189.915.000,00	2.141.273.024,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	144.945.000,00	144.945.000,00	123.975.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.970.000,00	14.970.000,00	14.970.000,00
2.22.0.00.0.00.01.0003	2	22	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	2.002.328.024,00
2.22.0.00.0.00.05.0000						Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	481.841.162.990,00	481.841.162.990,00	482.464.120.708,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	466.797.881.540,00	466.797.881.540,00	466.686.498.824,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat	466.021.060.580,00	466.021.060.580,00	465.927.285.188,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	465.758.014.160,00	465.758.014.160,00	465.670.107.876,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.01	0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	263.046.420,00	263.046.420,00	257.177.312,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat	376.092.840,00	376.092.840,00	370.865.706,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.02	0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	276.092.840,00	276.092.840,00	270.865.706,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat	400.728.120,00	400.728.120,00	388.347.930,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	09	8.03	0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	400.728.120,00	400.728.120,00	388.347.930,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.043.281.450,00	15.043.281.450,00	15.777.621.884,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.500.412.296,00	11.500.412.296,00	12.131.795.722,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.500.412.296,00	11.500.412.296,00	12.131.795.722,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	654.730.234,00	654.730.234,00	480.753.100,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.934.200,00	10.934.200,00	10.934.200,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.145.200,00	36.145.200,00	36.145.200,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.243.700,00	19.243.700,00	19.243.700,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588.407.134,00	588.407.134,00	414.430.000,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	269.007.960,00	269.007.960,00	267.604.080,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	269.007.960,00	269.007.960,00	267.604.080,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	374.202.600,00	374.202.600,00	548.179.734,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	374.202.600,00	374.202.600,00	548.179.734,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.207.928.360,00	2.207.928.360,00	2.312.289.248,00
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	553.336.340,00	553.336.340,00	566.441.852,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
2.22.0.00.0.00.05.0000	2	22	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.654.592.020,00	1.654.592.020,00	1.745.847.396,00
3.25.0.00.0.00.01.0000						Dinas Kelautan dan Perikanan	28.225.131.424,00	28.212.829.738,00	32.149.599.099,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28.225.131.424,00	28.212.829.738,00	32.149.599.099,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	28.225.131.424,00	28.212.829.738,00	32.149.599.099,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	107.791.540,00	107.791.540,00	104.596.492,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	34.890.000,00	34.890.000,00	34.495.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	34.890.000,00	34.890.000,00	34.495.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	72.901.540,00	72.901.540,00	70.101.492,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	72.901.540,00	72.901.540,00	70.101.492,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	163.998.520,00	163.998.420,00	424.573.902,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	130.275.520,00	130.275.420,00	390.850.902,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	130.275.520,00	130.275.420,00	390.850.902,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	33.723.000,00	33.723.000,00	33.723.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	03	1.09	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	33.723.000,00	33.723.000,00	33.723.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	199.047.500,00	199.047.500,00	199.047.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	199.047.500,00	199.047.500,00	199.047.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	171.427.500,00	171.427.500,00	171.427.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	27.620.000,00	27.620.000,00	27.620.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100.000.100,00	99.992.500,00	181.509.884,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100.000.100,00	99.992.500,00	181.509.884,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	31.280.100,00	31.280.100,00	31.268.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	68.720.000,00	68.712.400,00	150.240.984,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	325.716.880,00	325.716.880,00	323.958.502,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	325.716.880,00	325.716.880,00	323.958.502,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	325.716.880,00	325.716.880,00	323.958.502,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.328.576.884,00	27.316.282.898,00	30.915.912.819,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.414.400,00	58.414.000,00	76.748.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.414.400,00	58.414.000,00	76.748.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.748.340.878,00	23.748.340.878,00	25.447.615.889,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23.748.340.878,00	23.748.340.878,00	25.447.615.889,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.211.526.986,00	1.199.837.600,00	1.107.803.300,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.477.500,00	7.477.500,00	7.459.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	827.763.586,00	816.057.200,00	728.957.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.542.400,00	194.559.400,00	189.642.400,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.923.500,00	18.923.500,00	18.923.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	162.820.000,00	162.820.000,00	162.820.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	533.503.960,00	532.905.760,00	279.565.620,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	533.503.960,00	532.905.760,00	279.565.620,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.661.000,00	134.661.000,00	134.661.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.611.000,00	3.611.000,00	3.611.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.050.000,00	131.050.000,00	131.050.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.642.129.660,00	1.642.123.660,00	3.869.519.010,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	916.713.980,00	916.707.980,00	950.364.936,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	615.185.680,00	615.185.680,00	2.828.924.074,00
3.25.0.00.0.00.01.0000	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.230.000,00	110.230.000,00	90.230.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001						UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	678.050.700,00	677.222.016,00	1.470.616.664,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	49.640.000,00	49.635.200,00	824.870.604,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	49.640.000,00	49.635.200,00	824.870.604,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	49.640.000,00	49.635.200,00	824.870.604,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	628.410.700,00	627.586.816,00	645.746.060,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.777.200,00	48.777.200,00	46.277.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.000,00	4.664.000,00	4.664.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.117.200,00	7.117.200,00	7.117.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.996.000,00	1.996.000,00	1.996.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.377.600,00	38.554.200,00	38.554.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.377.600,00	38.554.200,00	38.554.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.070.200,00	129.070.200,00	129.070.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	471.000,00	471.000,00	471.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	128.599.200,00	128.599.200,00	128.599.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.185.700,00	411.185.216,00	431.844.460,00
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	124.047.140,00	124.047.140,00	166.497.984,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0001	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	287.138.560,00	287.138.076,00	265.346.476,00
3.25.0.00.0.00.01.0002						UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	781.304.020,00	781.304.020,00	1.148.256.568,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	49.995.600,00	49.995.600,00	494.761.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	49.995.600,00	49.995.600,00	494.761.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitas, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	49.296.000,00	49.296.000,00	53.241.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	699.600,00	699.600,00	441.520.800,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	731.308.420,00	731.308.420,00	653.494.768,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.933.000,00	41.933.000,00	41.933.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.433.000,00	8.433.000,00	8.433.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.749.680,00	56.749.680,00	37.072.080,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.749.680,00	56.749.680,00	37.072.080,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.020.500,00	118.020.500,00	118.020.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.500,00	1.020.500,00	1.020.500,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.000.000,00	117.000.000,00	117.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.605.240,00	514.605.240,00	456.469.188,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.232.000,00	92.232.000,00	92.232.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	422.373.240,00	422.373.240,00	349.457.188,00
3.25.0.00.0.00.01.0002	3	25	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	14.780.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0003						UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1.079.888.760,00	1.079.888.760,00	1.073.004.792,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.029.888.760,00	1.029.888.760,00	1.023.004.792,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	66.358.100,00	66.358.100,00	66.348.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.858.100,00	24.858.100,00	24.848.100,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	41.500.000,00	41.500.000,00	41.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	963.530.660,00	963.530.660,00	956.656.692,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.570.000,00	172.570.000,00	172.510.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0003	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	790.960.660,00	790.960.660,00	784.146.692,00
3.25.0.00.0.00.01.0004						UPTD Pelabuhan Perikanan	334.678.160,00	334.678.160,00	333.431.430,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	47.899.000,00	47.899.000,00	47.699.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	47.899.000,00	47.899.000,00	47.699.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	47.899.000,00	47.899.000,00	47.699.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	286.779.160,00	286.779.160,00	285.732.430,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	85.760.700,00	85.760.700,00	86.085.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.510.700,00	26.510.700,00	26.835.900,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.750.000,00	26.750.000,00	26.750.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.226.320,00	21.226.320,00	20.445.200,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.226.320,00	21.226.320,00	20.445.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.792.140,00	167.792.140,00	167.201.330,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.110.000,00	130.110.000,00	127.800.000,00
3.25.0.00.0.00.01.0004	3	25	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.682.140,00	37.682.140,00	39.401.330,00
3.26.0.00.0.00.01.0000						Dinas Pariwisata	22.441.808.866,00	22.441.808.066,00	24.438.350.368,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	22.441.808.866,00	22.441.808.066,00	24.438.350.368,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.077.392.788,00	1.077.392.388,00	1.051.520.156,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	401.289.780,00	401.289.380,00	391.935.516,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	401.289.780,00	401.289.380,00	391.935.516,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	0,00	0,00	0,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	278.795.900,00	278.795.900,00	278.795.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	278.795.900,00	278.795.900,00	278.795.900,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	397.307.108,00	397.307.108,00	380.788.740,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	104.810.688,00	104.810.688,00	100.672.510,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	02	1.04	0013	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	292.496.420,00	292.496.420,00	280.116.230,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	5.938.207.460,00	5.938.207.460,00	5.920.600.136,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5.938.207.460,00	5.938.207.460,00	5.920.600.136,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	213.797.480,00	213.797.480,00	305.544.020,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	376.278.560,00	376.278.560,00	372.793.804,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.348.131.420,00	5.348.131.420,00	5.242.262.312,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	150.100.836,00	150.100.836,00	157.368.084,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	107.614.136,00	107.614.136,00	114.881.384,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	107.614.136,00	107.614.136,00	114.881.384,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	42.486.700,00	42.486.700,00	42.486.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	42.486.700,00	42.486.700,00	42.486.700,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	921.098.880,00	921.098.480,00	1.063.121.698,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	921.098.880,00	921.098.480,00	1.063.121.698,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	286.245.740,00	286.245.740,00	288.630.092,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	304.554.260,00	304.554.260,00	301.069.504,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	330.298.880,00	330.298.480,00	473.422.102,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	14.355.008.902,00	14.355.008.902,00	16.245.740.294,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.118.104,00	125.118.104,00	122.996.812,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.118.104,00	125.118.104,00	122.996.812,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.862.914.778,00	11.862.914.778,00	13.168.970.608,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.862.914.778,00	11.862.914.778,00	13.168.970.608,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.429.300,00	589.429.300,00	594.427.794,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.216.600,00	7.216.600,00	7.216.600,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	327.201.700,00	327.201.700,00	327.714.100,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	69.617.494,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.924.000,00	9.924.000,00	9.882.600,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.587.000,00	177.587.000,00	179.997.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.207.929.720,00	1.207.929.720,00	1.494.728.080,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.008.200,00	182.008.200,00	182.008.200,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.025.921.520,00	1.025.921.520,00	1.312.719.880,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	569.617.000,00	569.617.000,00	864.617.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	551.217.000,00	551.217.000,00	551.217.000,00
3.26.0.00.0.00.01.0000	3	26	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.400.000,00	18.400.000,00	313.400.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000						Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	59.424.172.690,00	59.424.169.840,00	86.728.990.426,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.220.635.300,00	1.220.634.500,00	1.151.509.932,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.220.635.300,00	1.220.634.500,00	1.151.509.932,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	558.435.740,00	558.435.740,00	493.326.192,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	558.435.740,00	558.435.740,00	493.326.192,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	558.435.740,00	558.435.740,00	493.326.192,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	539.251.780,00	539.251.780,00	512.815.610,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	198.308.160,00	198.308.160,00	148.245.830,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	198.308.160,00	198.308.160,00	148.245.830,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	340.943.620,00	340.943.620,00	364.569.780,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	340.943.620,00	340.943.620,00	364.569.780,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	122.947.780,00	122.946.980,00	145.368.130,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	122.947.780,00	122.946.980,00	145.368.130,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	122.947.780,00	122.946.980,00	145.368.130,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	58.203.537.390,00	58.203.535.340,00	85.577.480.494,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	58.203.537.390,00	58.203.535.340,00	85.577.480.494,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.754.191.960,00	7.754.191.960,00	10.214.740.096,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	5.159.525.180,00	5.159.525.180,00	5.203.591.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	5.159.525.180,00	5.159.525.180,00	5.203.591.720,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.091.751.520,00	2.091.751.520,00	1.928.862.604,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	2.091.751.520,00	2.091.751.520,00	1.928.862.604,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	502.915.260,00	502.915.260,00	3.082.285.772,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	502.915.260,00	502.915.260,00	3.082.285.772,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.260.928.040,00	1.260.927.740,00	1.130.808.892,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	1.260.928.040,00	1.260.927.740,00	1.130.808.892,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1.090.854.680,00	1.090.854.380,00	977.248.752,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	170.073.360,00	170.073.360,00	153.560.140,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.371.104.420,00	1.371.104.420,00	9.868.281.012,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.290.364.280,00	1.290.364.280,00	9.791.667.602,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.290.364.280,00	1.290.364.280,00	9.791.667.602,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan	80.740.140,00	80.740.140,00	76.613.410,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	80.740.140,00	80.740.140,00	76.613.410,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	145.453.820,00	145.453.820,00	133.073.630,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	145.453.820,00	145.453.820,00	133.073.630,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	145.453.820,00	145.453.820,00	133.073.630,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	47.671.859.150,00	47.671.857.400,00	64.230.576.864,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	837.192.100,00	837.192.100,00	771.363.314,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	494.101.920,00	494.101.920,00	469.849.162,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	343.090.180,00	343.090.180,00	301.514.152,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.209.753.020,00	43.209.753.020,00	59.543.237.002,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42.879.400.000,00	42.879.400.000,00	59.247.337.822,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	330.353.020,00	330.353.020,00	295.899.180,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.167.050,00	375.167.100,00	434.113.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.263.000,00	19.263.000,00	19.263.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	220.836.250,00	220.836.300,00	220.882.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.987.800,00	57.987.800,00	67.003.400,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.300.000,00	6.300.000,00	19.125.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.780.000,00	70.780.000,00	107.840.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.614.220,00	739.612.420,00	713.109.662,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.000.000,00	417.000.000,00	417.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	322.614.220,00	322.612.420,00	296.109.662,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.510.132.760,00	2.510.132.760,00	2.768.753.186,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.545.044.960,00	1.545.044.960,00	1.845.842.822,00
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	772.642.800,00	772.642.800,00	742.110.364,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0000	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	192.445.000,00	192.445.000,00	180.800.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009						UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	1.694.642.604,00	1.694.640.640,00	1.582.354.462,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.109.554.000,00	1.109.554.000,00	1.050.028.402,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.109.554.000,00	1.109.554.000,00	1.050.028.402,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	492.619.360,00	492.619.360,00	461.989.872,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	492.619.360,00	492.619.360,00	461.989.872,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	341.573.140,00	341.573.140,00	316.812.760,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	151.046.220,00	151.046.220,00	145.177.112,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	616.934.640,00	616.934.640,00	588.038.530,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.007.660,00	69.007.660,00	69.007.660,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.927.800,00	3.927.800,00	3.927.800,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.579.860,00	32.579.860,00	32.579.860,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.331.420,00	244.331.420,00	231.951.230,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.230.000,00	127.230.000,00	127.230.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	117.101.420,00	117.101.420,00	104.721.230,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.595.560,00	303.595.560,00	287.079.640,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	181.171.280,00	181.171.280,00	172.908.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.364.280,00	80.364.280,00	72.110.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	2	09	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.060.000,00	42.060.000,00	42.060.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0009	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	585.088.604,00	585.086.640,00	532.326.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	585.088.604,00	585.086.640,00	532.326.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	585.088.604,00	585.086.640,00	532.326.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	585.088.604,00	585.086.640,00	532.326.060,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	256.728.260,00	256.728.160,00	233.221.240,00
3.27.2.09.0.00.01.0009	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	328.360.344,00	328.358.480,00	299.104.820,00
3.27.2.09.0.00.01.0012						UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.707.721.876,00	2.707.721.580,00	2.505.052.380,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.375.141.416,00	1.375.141.120,00	1.251.181.194,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.375.141.416,00	1.375.141.120,00	1.251.181.194,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	450.962.700,00	450.962.700,00	423.615.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	557.029.256,00	557.029.060,00	492.402.740,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	367.149.460,00	367.149.360,00	335.163.354,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.332.580.460,00	1.332.580.460,00	1.253.871.186,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.655.900,00	55.655.900,00	55.655.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	599.900,00	599.900,00	599.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.056.000,00	5.056.000,00	5.056.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.993.900,00	430.993.900,00	398.840.332,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.360.000,00	239.360.000,00	220.520.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.633.900,00	191.633.900,00	178.320.332,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.930.660,00	845.930.660,00	799.374.954,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.146.420,00	232.146.420,00	232.277.312,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	610.414.240,00	610.414.240,00	561.897.642,00
3.27.2.09.0.00.01.0012	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.370.000,00	3.370.000,00	5.200.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013						UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.109.328.700,00	3.109.328.600,00	2.928.792.646,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.189.658.780,00	2.189.658.680,00	2.030.315.210,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.189.658.780,00	2.189.658.680,00	2.030.315.210,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2.189.658.780,00	2.189.658.680,00	2.030.315.210,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	919.669.920,00	919.669.920,00	898.477.436,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.721.700,00	49.721.700,00	49.721.700,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.095.200,00	6.095.200,00	6.095.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.126.500,00	11.126.500,00	11.126.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.324.680,00	338.324.680,00	328.970.816,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	272.324.680,00	272.324.680,00	262.970.816,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.623.540,00	531.623.540,00	519.784.920,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.796.420,00	217.796.420,00	238.971.640,00
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	308.957.120,00	308.957.120,00	275.943.280,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0013	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.870.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014						UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.145.272.800,00	1.145.269.700,00	1.071.483.154,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	778.270.480,00	778.267.380,00	662.378.224,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	778.270.480,00	778.267.380,00	662.378.224,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	368.616.260,00	368.614.860,00	330.785.372,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	02	1.02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	409.654.220,00	409.652.520,00	331.592.852,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	367.002.320,00	367.002.320,00	409.104.930,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.495.700,00	42.495.700,00	42.966.500,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.197.300,00	3.197.300,00	3.197.300,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.798.400,00	6.798.400,00	7.269.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.736.480,00	170.736.480,00	207.183.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.409.000,00	90.409.000,00	135.109.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.327.480,00	80.327.480,00	72.074.020,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	153.770.140,00	153.770.140,00	158.955.410,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.782.140,00	111.782.140,00	127.155.410,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.928.000,00	34.928.000,00	19.950.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0014	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.060.000,00	7.060.000,00	11.850.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015						UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.621.421.000,00	2.621.417.600,00	2.430.454.941,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.172.074.660,00	2.172.072.760,00	2.030.491.536,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	2.124.708.460,00	2.124.706.560,00	1.983.297.336,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	600.224.540,00	600.224.340,00	554.830.310,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	716.502.220,00	716.502.220,00	662.854.730,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	431.673.360,00	431.671.860,00	401.042.372,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.02	0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	376.308.340,00	376.308.140,00	364.569.924,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	47.366.200,00	47.366.200,00	47.194.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	47.366.200,00	47.366.200,00	47.194.200,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	449.346.340,00	449.344.840,00	399.963.405,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.996.500,00	42.995.000,00	42.995.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.900,00	1.996.900,00	1.996.900,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.999.600,00	5.998.100,00	5.998.100,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.868.420,00	236.868.420,00	225.911.503,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000,00	123.000.000,00	117.912.191,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.868.420,00	113.868.420,00	107.999.312,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.481.420,00	169.481.420,00	131.056.902,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	127.379.280,00	127.379.280,00	85.570.410,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.182.140,00	39.182.140,00	42.566.492,00
3.27.2.09.0.00.01.0015	3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.920.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000						Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40.444.200.672,00	40.443.922.229,00	45.107.980.988,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	944.676.700,00	944.663.900,00	1.831.465.450,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	944.676.700,00	944.663.900,00	1.831.465.450,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	225.364.280,00	225.364.080,00	217.110.620,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	105.000.000,00	104.999.800,00	104.999.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	105.000.000,00	104.999.800,00	104.999.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	120.364.280,00	120.364.280,00	112.110.820,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	02	1.02	0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	120.364.280,00	120.364.280,00	112.110.820,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	267.454.155,00	267.453.600,00	267.453.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	267.454.155,00	267.453.600,00	267.453.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	157.493.955,00	157.493.600,00	157.493.600,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	109.960.200,00	109.960.000,00	109.960.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	73.266.000,00	73.261.000,00	73.261.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	73.266.000,00	73.261.000,00	73.261.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	04	1.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	73.266.000,00	73.261.000,00	73.261.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	58.056.600,00	58.056.300,00	58.056.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	58.056.600,00	58.056.300,00	58.056.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	05	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	58.056.600,00	58.056.300,00	58.056.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	20.000.000,00	19.999.700,00	19.999.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	20.000.000,00	19.999.700,00	19.999.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	19.999.700,00	19.999.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	222.535.665,00	222.535.220,00	1.117.590.230,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	222.535.665,00	222.535.220,00	1.117.590.230,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	08	1.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	222.535.665,00	222.535.220,00	1.117.590.230,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	58.000.000,00	57.999.700,00	57.999.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	58.000.000,00	57.999.700,00	57.999.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	58.000.000,00	57.999.700,00	57.999.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	20.000.000,00	19.994.300,00	19.994.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	20.000.000,00	19.994.300,00	19.994.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	20.000.000,00	19.994.300,00	19.994.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	39.499.523.972,00	39.499.258.329,00	43.276.515.538,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	39.499.523.972,00	39.499.258.329,00	43.276.515.538,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	210.780.420,00	210.780.420,00	198.400.230,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	210.780.420,00	210.780.420,00	198.400.230,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	210.780.420,00	210.780.420,00	198.400.230,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	30.000.500,00	30.000.500,00	30.000.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	30.000.500,00	30.000.500,00	30.000.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	30.000.500,00	30.000.500,00	30.000.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	93.681.640,00	93.681.540,00	89.554.810,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	93.681.640,00	93.681.540,00	89.554.810,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	93.681.640,00	93.681.540,00	89.554.810,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	39.165.061.412,00	39.164.795.869,00	42.958.559.998,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.695.000,00	37.694.600,00	37.694.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.695.000,00	37.694.600,00	37.694.200,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.423.802.432,00	36.423.802.432,00	40.212.598.846,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	36.380.122.432,00	36.380.122.432,00	40.168.919.046,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.680.000,00	43.680.000,00	43.679.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	511.380.400,00	511.163.800,00	785.844.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.097.000,00	17.097.000,00	17.097.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.571.400,00	35.566.800,00	47.975.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.000.000,00	97.000.000,00	97.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.096.000,00	16.096.000,00	10.350.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	65.100.000,00	65.100.000,00	19.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280.516.000,00	280.304.000,00	593.922.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	595.915.463,00	595.914.780,00	609.843.344,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.560.000,00	196.560.000,00	196.560.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.355.463,00	399.354.780,00	413.283.344,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.596.268.117,00	1.596.220.257,00	1.312.579.608,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.100.454.577,00	1.100.454.577,00	840.290.360,00
3.28.2.11.0.00.01.0000	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	495.813.540,00	495.765.680,00	472.289.248,00
3.28.2.11.0.00.01.0001						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	974.433.520,00	974.298.200,00	943.845.756,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.923.905,00	61.808.300,00	61.801.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.212.370,00	3.205.900,00	3.205.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.033.535,00	10.032.400,00	10.025.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.650.000,00	34.650.000,00	34.650.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.028.000,00	13.920.000,00	13.920.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.876.875,00	72.869.240,00	75.253.592,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.376.875,00	41.369.240,00	43.753.592,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.632.740,00	839.620.660,00	806.790.364,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.844.220,00	153.832.140,00	149.705.410,00
3.28.2.11.0.00.01.0001	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	685.788.520,00	685.788.520,00	657.084.954,00
3.28.2.11.0.00.01.0002						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	633.201.200,00	633.062.913,00	615.450.489,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.292.305,00	57.276.900,00	57.271.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.131.520,00	3.129.800,00	3.129.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.450.185,00	13.449.000,00	13.443.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.012.500,00	37.000.000,00	37.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.698.100,00	3.698.100,00	3.698.100,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.102.622,00	60.099.740,00	62.484.092,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.050.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.052.622,00	42.049.740,00	44.434.092,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	515.806.273,00	515.686.273,00	495.694.597,00
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	508.546.273,00	508.546.273,00	488.554.597,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0002	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.260.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	405.065.000,00	405.026.960,00	401.538.504,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	50.038.440,00	50.000.400,00	49.996.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.383.150,00	1.373.700,00	1.373.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.363.690,00	11.359.400,00	11.355.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.731.600,00	1.707.300,00	1.707.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.560.000,00	10.560.000,00	10.560.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.266.420,00	124.266.420,00	118.397.312,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.266.420,00	116.266.420,00	110.397.312,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.760.140,00	230.760.140,00	233.144.492,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.770.140,00	220.770.140,00	223.154.492,00
3.28.2.11.0.00.01.0003	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	9.990.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	334.493.300,00	334.388.020,00	341.539.476,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	63.417.705,00	63.413.300,00	63.411.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.140.130,00	3.137.000,00	3.137.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.814.475,00	10.813.500,00	10.811.900,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.503.100,00	2.502.800,00	2.502.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.960.000,00	12.960.000,00	12.960.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.936.315,00	65.935.440,00	68.319.792,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.940.000,00	23.940.000,00	23.940.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.996.315,00	41.995.440,00	44.379.792,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.139.280,00	205.039.280,00	209.807.984,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.425.000,00	123.425.000,00	123.425.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0004	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.714.280,00	81.614.280,00	86.382.984,00
3.28.2.11.0.00.01.0005						UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	1.937.159.784,00	1.937.070.013,00	1.602.637.965,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	27.070.100,00	27.050.600,00	27.050.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.548.800,00	2.530.500,00	2.530.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.922.400,00	6.921.400,00	6.920.800,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.598.900,00	2.598.700,00	2.598.700,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	785.976.944,00	785.973.740,00	567.354.292,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	420.000.000,00	420.000.000,00	324.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.976.944,00	365.973.740,00	243.354.292,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.124.112.740,00	1.124.045.673,00	1.008.233.673,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.142.740,00	112.130.000,00	112.130.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.000.000.000,00	999.945.673,00	884.133.673,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0005	3	28	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.970.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0006						UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	396.762.186,00	396.701.945,00	388.444.485,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	396.762.186,00	396.701.945,00	388.444.485,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	396.762.186,00	396.701.945,00	388.444.485,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	245.927.000,00	245.908.025,00	252.757.125,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	245.927.000,00	245.908.025,00	252.757.125,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	245.927.000,00	245.908.025,00	252.757.125,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	150.835.186,00	150.793.920,00	135.687.360,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.581.600,00	4.579.700,00	5.802.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.729.600,00	3.727.700,00	4.866.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	852.000,00	852.000,00	935.500,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.999.300,00	39.989.940,00	31.914.540,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.999.300,00	39.989.940,00	31.914.540,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.254.286,00	106.224.280,00	97.970.820,00
3.28.2.11.0.00.01.0006	2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.254.286,00	106.224.280,00	97.970.820,00
3.28.2.11.0.00.01.0007						UPTD Pengelolaan Sampah	11.717.633.538,00	11.717.511.538,00	11.582.706.864,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.188.173.848,00	11.188.054.848,00	11.068.408.590,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	11.188.173.848,00	11.188.054.848,00	11.068.408.590,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	11.188.173.848,00	11.188.054.848,00	11.068.408.590,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	529.459.690,00	529.456.690,00	514.298.274,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.520.500,00	68.517.500,00	65.097.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.232.000,00	5.229.000,00	5.229.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.701.500,00	11.701.500,00	11.701.300,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.917.000,00	3.917.000,00	3.917.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	5.670.000,00	5.670.000,00	2.250.000,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.939.190,00	460.939.190,00	449.200.974,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.669.190,00	342.669.190,00	330.930.974,00
3.28.2.11.0.00.01.0007	2	11	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	118.270.000,00	118.270.000,00	118.270.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000						Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.503.301.834,00	22.503.301.834,00	22.398.249.305,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22.503.301.834,00	22.503.301.834,00	22.398.249.305,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	20.863.434.314,00	20.863.434.314,00	20.509.940.619,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	322.947.320,00	322.947.320,00	302.955.644,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	322.947.320,00	322.947.320,00	302.955.644,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	322.947.320,00	322.947.320,00	302.955.644,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	24.968.600,00	24.968.600,00	24.968.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	24.968.600,00	24.968.600,00	24.968.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	24.968.600,00	24.968.600,00	24.968.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING	244.884.500,00	244.884.500,00	243.576.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	244.884.500,00	244.884.500,00	243.576.100,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	244.884.500,00	244.884.500,00	243.576.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	99.999.600,00	99.999.600,00	99.999.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	99.999.600,00	99.999.600,00	99.999.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	99.999.600,00	99.999.600,00	99.999.600,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	591.354.180,00	591.354.180,00	589.613.402,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	465.990.200,00	465.990.200,00	465.992.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	456.000.000,00	456.000.000,00	456.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	9.990.200,00	9.990.200,00	9.992.200,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	125.363.980,00	125.363.980,00	123.621.202,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	125.363.980,00	125.363.980,00	123.621.202,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	292.078.580,00	292.078.580,00	300.832.962,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	292.078.580,00	292.078.580,00	300.832.962,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	07	1.03	0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	292.078.580,00	292.078.580,00	300.832.962,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19.287.201.534,00	19.287.201.534,00	18.947.994.311,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.743.600,00	62.743.600,00	66.082.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.743.600,00	62.743.600,00	66.082.800,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	15.665.986.223,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	15.665.986.223,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	991.887.094,00	991.887.094,00	1.012.002.794,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.899.100,00	14.899.100,00	18.267.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	550.895.100,00	550.895.100,00	588.087.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102.483.394,00	102.483.394,00	67.483.394,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.840.500,00	14.840.500,00	14.840.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.345.000,00	302.345.000,00	316.901.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.163.664.860,00	1.163.664.860,00	1.143.326.050,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	596.469.960,00	596.469.960,00	576.131.150,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	227.194.900,00	227.194.900,00	227.194.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	993.905.980,00	993.905.980,00	985.596.444,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	822.120.700,00	822.120.700,00	834.042.460,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	30	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.785.280,00	171.785.280,00	151.553.984,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.639.867.520,00	1.639.867.520,00	1.888.308.686,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.589.867.620,00	1.589.867.620,00	1.838.308.786,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	1.589.867.620,00	1.589.867.620,00	1.838.308.786,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	137.682.000,00	137.682.000,00	137.682.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.452.185.620,00	1.452.185.620,00	1.700.626.786,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00
3.31.3.30.0.00.02.0000	3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	49.999.900,00	49.999.900,00	49.999.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0001						UPTD Rumah Kreatif	1.024.340.340,00	1.024.340.340,00	1.022.597.962,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	827.213.500,00	827.213.500,00	827.213.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	827.213.500,00	827.213.500,00	827.213.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	827.213.500,00	827.213.500,00	827.213.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	197.126.840,00	197.126.840,00	195.384.462,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.087.560,00	46.087.560,00	46.777.560,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.436.060,00	33.436.060,00	33.435.060,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.239.500,00	2.239.500,00	2.450.500,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.212.000,00	3.212.000,00	3.212.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.200.000,00	7.200.000,00	7.680.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.372.140,00	49.372.140,00	44.555.410,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.372.140,00	49.372.140,00	44.555.410,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.667.140,00	101.667.140,00	104.051.492,00
3.31.3.30.0.00.02.0001	3	31	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.667.140,00	101.667.140,00	104.051.492,00
3.31.3.30.0.00.02.0002						UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	582.448.512,00	582.448.512,00	584.406.246,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	582.448.512,00	582.448.512,00	584.406.246,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	247.252.020,00	247.252.020,00	244.401.176,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	247.252.020,00	247.252.020,00	244.401.176,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	247.252.020,00	247.252.020,00	244.401.176,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	335.196.492,00	335.196.492,00	340.005.070,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	45.313.240,00	45.313.240,00	47.761.140,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.455.700,00	1.455.700,00	1.455.700,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.922.500,00	19.922.500,00	21.887.400,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.038.040,00	16.038.040,00	16.038.040,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.797.000,00	5.797.000,00	6.280.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.298.560,00	171.298.560,00	171.274.886,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.298.560,00	159.298.560,00	159.274.886,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.584.692,00	118.584.692,00	120.969.044,00
3.31.3.30.0.00.02.0002	3	30	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.584.692,00	118.584.692,00	120.969.044,00
4.01.0.00.0.00.01.0004						Biro Hukum	7.996.249.205,00	7.996.246.670,00	6.913.677.928,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	7.996.249.205,00	7.996.246.670,00	6.913.677.928,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	7.996.249.205,00	7.996.246.670,00	6.913.677.928,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	5.659.430.240,00	5.659.416.740,00	4.578.799.210,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	2.380.491.180,00	2.380.477.680,00	1.811.067.474,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.400.607.560,00	1.400.596.460,00	936.594.722,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	178.217.560,00	178.217.060,00	161.709.540,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	290.733.640,00	290.731.740,00	269.300.042,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	510.932.420,00	510.932.420,00	443.463.170,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02		Fasilitas Bantuan Hukum	3.278.939.060,00	3.278.939.060,00	2.767.731.736,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02	0001	Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	2.998.728.700,00	2.998.728.700,00	2.504.028.296,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	05	1.02	0002	Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	280.210.360,00	280.210.360,00	263.703.440,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.336.818.965,00	2.336.829.930,00	2.334.878.718,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.051.809.025,00	1.039.419.990,00	1.039.412.534,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.663.650,00	17.610.300,00	17.606.100,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	793.615.375,00	781.327.790,00	781.324.534,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	10.990.900,00	10.990.900,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.530.000,00	229.491.000,00	229.491.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.285.009.940,00	1.297.409.940,00	1.295.466.184,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	431.081.420,00	428.581.420,00	468.823.394,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	793.478.520,00	808.478.520,00	766.752.790,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
4.01.0.00.0.00.01.0004	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.850.000,00	58.750.000,00	58.290.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0000						Sekretariat Daerah	65.094.919.510,00	66.799.173.951,00	81.731.654.004,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62.106.610.000,00	63.810.864.441,00	78.743.344.494,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.106.610.000,00	63.810.864.441,00	78.743.344.494,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.988.309.510,00	2.988.309.510,00	2.988.309.510,00
4.01.2.23.2.24.01.0000	4	01	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.988.309.510,00	2.988.309.510,00	2.988.309.510,00
4.01.2.23.2.24.01.0001						Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.073.962.680,00	17.073.962.680,00	33.955.912.210,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.500.210.780,00	2.500.210.780,00	2.474.593.012,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	651.639.420,00	651.639.420,00	636.020.590,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	451.640.920,00	451.640.920,00	451.157.990,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	199.998.500,00	199.998.500,00	184.862.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah	549.995.500,00	549.995.500,00	549.992.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	399.995.800,00	399.995.800,00	399.993.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	149.999.700,00	149.999.700,00	149.999.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	1.298.575.860,00	1.298.575.860,00	1.288.579.622,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	349.905.360,00	349.905.360,00	339.909.422,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	948.670.500,00	948.670.500,00	948.670.200,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.404.153.120,00	12.404.153.120,00	29.340.774.424,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	3.536.006.880,00	3.536.006.880,00	3.475.162.748,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	2.872.232.100,00	2.872.232.100,00	2.834.763.996,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	663.774.780,00	663.774.780,00	640.398.752,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	8.868.146.240,00	8.868.146.240,00	25.865.611.676,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	8.868.146.240,00	8.868.146.240,00	25.865.611.676,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.169.598.780,00	2.169.598.780,00	2.140.544.774,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.457.120,00	351.457.120,00	332.213.362,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	351.457.120,00	351.457.120,00	332.213.362,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	799.949.520,00	799.949.520,00	803.414.920,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.976.600,00	15.976.600,00	15.976.600,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	419.289.920,00	419.289.920,00	416.282.320,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	31.727.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	339.683.000,00	339.683.000,00	339.429.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.018.192.140,00	1.018.192.140,00	1.004.916.492,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	903.572.140,00	903.572.140,00	905.956.492,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.820.000,00	86.820.000,00	86.160.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0001	4	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.800.000,00	27.800.000,00	12.800.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003						Biro Umum dan Protokol	91.382.244.910,00	89.692.233.476,00	89.899.685.898,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	743.908.500,00	743.908.500,00	751.603.126,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	743.908.500,00	743.908.500,00	751.603.126,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	743.908.500,00	743.908.500,00	751.603.126,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	378.193.000,00	378.193.000,00	372.965.866,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	378.193.000,00	378.193.000,00	372.965.866,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	365.715.500,00	365.715.500,00	378.637.260,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	60.757.500,00	60.757.500,00	60.757.500,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	304.958.000,00	304.958.000,00	317.879.760,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	90.638.336.410,00	88.948.324.976,00	89.148.082.772,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	90.638.336.410,00	88.948.324.976,00	89.148.082.772,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	90.638.336.410,00	88.948.324.976,00	89.148.082.772,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.058.000,00	600.025.320,00	538.866.748,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	600.058.000,00	600.025.320,00	538.866.748,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	712.618.860,00	669.457.032,00	645.879.744,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	712.618.860,00	669.457.032,00	645.879.744,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	375.436.860,00	351.382.160,00	320.620.172,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	375.436.860,00	351.382.160,00	320.620.172,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.834.109.564,00	21.507.257.870,00	21.384.281.668,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	701.629.360,00	701.629.360,00	685.137.840,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.766.767.920,00	2.439.983.110,00	2.647.671.358,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.506.488.700,00	7.506.488.700,00	7.336.554.462,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.268.558.584,00	10.268.558.320,00	10.194.377.134,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	590.665.000,00	590.598.380,00	520.540.874,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.006.262.976,00	18.006.262.236,00	18.137.609.788,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.292.764.360,00	2.292.764.360,00	2.069.469.360,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.115.678.116,00	10.115.677.716,00	10.176.844.128,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.597.820.500,00	5.597.820.160,00	5.891.296.300,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.939.089.716,00	12.939.089.360,00	13.172.550.878,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.956.498.580,00	6.956.498.320,00	6.876.182.652,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.982.591.136,00	5.982.591.040,00	6.296.368.226,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.511.675.000,00	5.253.447.764,00	5.372.057.408,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.511.675.000,00	5.253.447.764,00	5.372.057.408,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	27.019.667.714,00	27.019.667.714,00	26.955.707.242,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	16.587.955.616,00	16.587.955.616,00	16.540.186.296,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	10.152.215.000,00	10.152.215.000,00	10.011.023.848,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	279.497.098,00	279.497.098,00	404.497.098,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	541.115.000,00	541.115.000,00	541.115.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	541.115.000,00	541.115.000,00	541.115.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan	2.098.302.720,00	2.060.620.520,00	2.079.394.124,00
4.01.2.23.2.24.01.0003	4	01	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2.098.302.720,00	2.060.620.520,00	2.079.394.124,00
4.01.2.23.2.24.01.0005						Biro Organisasi	3.327.338.970,00	3.327.338.270,00	3.375.014.368,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	589.139.160,00	589.139.160,00	610.598.328,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	589.139.160,00	589.139.160,00	610.598.328,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	483.774.880,00	483.774.880,00	500.465.344,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	290.728.460,00	290.728.460,00	300.265.868,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	67.682.140,00	67.682.140,00	70.066.492,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	97.682.040,00	97.682.040,00	100.066.392,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	125.364.280,00	125.364.280,00	130.132.984,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	193.046.420,00	193.046.420,00	200.199.476,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	67.682.140,00	67.682.140,00	70.066.492,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	125.364.280,00	125.364.280,00	130.132.984,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	105.364.280,00	105.364.280,00	110.132.984,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	105.364.280,00	105.364.280,00	110.132.984,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	105.364.280,00	105.364.280,00	110.132.984,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	2.738.199.810,00	2.738.199.110,00	2.764.416.040,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01				SEKRETARIAT DAERAH	2.738.199.810,00	2.738.199.110,00	2.764.416.040,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	933.366.700,00	933.366.700,00	945.287.760,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	287.682.140,00	287.682.140,00	290.065.792,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	137.682.140,00	137.682.140,00	140.065.792,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	645.684.560,00	645.684.560,00	655.221.968,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	187.671.540,00	187.671.540,00	190.055.892,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	167.653.040,00	167.653.040,00	170.037.392,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	14.997.000,00	14.997.000,00	14.997.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	137.681.140,00	137.681.140,00	140.065.492,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	137.681.840,00	137.681.840,00	140.066.192,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.804.833.110,00	1.804.832.410,00	1.819.128.280,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.976.000,00	4.976.000,00	4.976.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4.976.000,00	4.976.000,00	4.976.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	934.105.170,00	934.104.470,00	944.394.228,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.999.900,00	19.999.900,00	19.999.900,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	614.053.270,00	614.052.570,00	614.052.328,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.052.000,00	300.052.000,00	310.342.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865.751.940,00	865.751.940,00	869.758.052,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	775.001.940,00	775.001.940,00	789.308.052,00
4.01.2.23.2.24.01.0005	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.750.000,00	90.750.000,00	80.450.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0007						Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	16.242.732.660,00	16.242.659.129,00	35.288.750.811,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	543.228.000,00	633.744.600,00	796.859.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	250.000.000,00	249.988.000,00	369.987.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	250.000.000,00	249.988.000,00	369.987.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	150.028.000,00	150.028.000,00	251.865.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	150.028.000,00	150.028.000,00	251.865.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	143.200.000,00	233.728.600,00	175.007.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	143.200.000,00	233.728.600,00	175.007.800,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	12.477.675.000,00	12.387.215.169,00	31.369.793.175,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12.187.675.000,00	12.097.243.169,00	31.067.261.175,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.970.000,00	29.970.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	12.127.675.000,00	12.037.288.169,00	30.959.306.175,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	29.985.000,00	77.985.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	140.000.000,00	139.981.000,00	139.981.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	70.000.000,00	69.981.000,00	69.981.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.991.000,00	162.551.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.996.000,00	99.996.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.995.000,00	19.995.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	42.560.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	60.000.000,00	60.000.000,00	88.800.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	44.400.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	30.000.000,00	30.000.000,00	44.400.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	44.400.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	44.400.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.161.829.660,00	3.161.699.360,00	3.033.297.836,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	13.995.000,00	13.950.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.000.000,00	13.995.000,00	13.950.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.487.829.660,00	2.487.759.360,00	2.345.917.836,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.162.829.660,00	2.162.790.360,00	2.015.493.836,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	45.464.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	285.000.000,00	284.969.000,00	284.960.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.000.000,00	659.945.000,00	673.430.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	530.000.000,00	529.995.000,00	543.480.000,00
4.01.2.23.2.24.01.0007	4	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	130.000.000,00	129.950.000,00	129.950.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000						Sekretariat DPRD	259.120.598.399,00	259.120.598.340,00	278.141.732.388,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02				SEKRETARIAT DPRD	259.120.598.399,00	259.120.598.340,00	278.141.732.388,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	139.119.141.664,00	141.322.961.340,00	144.401.979.722,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	19.998.271.680,00	19.998.263.680,00	22.948.289.160,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.939.550.680,00	1.939.550.680,00	1.931.295.420,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	17.264.544.320,00	17.264.544.220,00	20.090.198.230,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	794.176.680,00	794.168.780,00	926.795.510,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	8.277.959.200,00	10.121.315.000,00	8.805.586.632,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	1.649.331.340,00	2.487.781.640,00	1.765.207.192,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1.662.496.040,00	2.408.174.340,00	1.685.902.010,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	1.655.956.040,00	1.769.120.140,00	1.839.257.410,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	1.654.204.040,00	1.686.900.440,00	1.702.591.710,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1.655.971.740,00	1.769.338.440,00	1.812.628.310,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	37.595.503.616,00	37.883.724.860,00	40.337.963.464,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9.295.573.080,00	9.298.492.660,00	9.602.197.714,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	9.216.366.500,00	9.216.366.500,00	9.599.763.250,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	8.454.536.920,00	8.454.535.920,00	8.786.622.980,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9.011.091.116,00	9.245.476.280,00	10.684.155.020,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1.617.936.000,00	1.668.853.500,00	1.665.224.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	17.113.601.008,00	17.012.035.480,00	17.683.881.420,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	6.352.255.820,00	6.297.861.420,00	6.285.481.230,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	3.288.832.448,00	3.252.166.400,00	4.872.166.400,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	920.451.180,00	910.186.800,00	730.186.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	2.204.342.880,00	2.204.160.980,00	1.477.743.520,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4.347.718.680,00	4.347.659.880,00	4.318.303.470,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	41.461.463.180,00	41.614.205.340,00	39.919.033.132,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	3.816.718.420,00	3.816.718.420,00	3.810.849.012,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	2.376.673.400,00	2.529.415.600,00	886.076.800,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	35.268.071.360,00	35.268.071.320,00	35.222.107.320,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	836.713.080,00	858.654.580,00	862.378.564,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	836.713.080,00	858.654.580,00	862.378.564,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD	13.835.629.900,00	13.834.762.400,00	13.844.847.350,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	9.661.184.220,00	9.661.052.120,00	9.648.671.930,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	485.055.880,00	484.958.580,00	507.423.720,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3.689.389.800,00	3.688.751.700,00	3.688.751.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	120.001.456.735,00	117.797.637.000,00	133.739.752.666,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	794.007.780,00	796.307.580,00	798.629.120,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	482.401.640,00	484.717.440,00	491.165.710,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	311.606.140,00	311.590.140,00	307.463.410,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.114.825.303,00	11.115.538.503,00	14.189.800.598,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.799.965.123,00	10.799.965.123,00	13.882.480.678,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159.607.840,00	159.605.140,00	155.478.410,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	155.252.340,00	155.968.240,00	151.841.510,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.785.757.720,00	8.390.399.966,00	12.509.487.682,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	169.339.900,00	169.070.300,00	169.070.300,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	899.275.600,00	463.859.700,00	460.016.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.358.543.300,00	1.356.956.446,00	1.834.120.446,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135.240.000,00	163.963.800,00	168.631.600,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.062.108.000,00	1.075.320.000,00	1.075.320.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.161.250.920,00	5.161.229.720,00	8.802.329.336,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.562.944.000,00	4.561.645.880,00	12.511.975.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.562.944.000,00	4.561.645.880,00	12.511.975.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.523.742.864,00	2.210.694.760,00	2.073.024.042,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	9.985.200,00	15.700.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900.000.000,00	580.000.000,00	380.000.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.613.742.864,00	1.620.709.560,00	1.677.324.042,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.594.604.710,00	25.945.667.671,00	28.798.342.450,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.610.132.060,00	3.647.132.060,00	3.750.756.238,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.368.892.650,00	21.667.745.611,00	24.404.546.212,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	615.580.000,00	630.790.000,00	643.040.000,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	60.513.985.118,00	60.669.158.940,00	61.741.728.634,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	57.682.611.078,00	57.841.161.700,00	59.732.867.624,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	2.509.994.500,00	2.509.252.000,00	1.694.242.500,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	321.379.540,00	318.745.240,00	314.618.510,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD	6.111.589.240,00	4.108.223.700,00	1.116.764.640,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	2.204.342.880,00	200.951.160,00	184.444.240,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	4	02	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	3.907.246.360,00	3.907.272.540,00	932.320.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.036.014.506,00	28.036.014.506,00	29.056.451.327,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	28.036.014.506,00	28.036.014.506,00	29.056.451.327,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01				PERENCANAAN	28.036.014.506,00	28.036.014.506,00	29.056.451.327,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.536.912.840,00	3.536.912.840,00	3.549.418.406,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.817.484.840,00	1.817.484.840,00	1.808.235.542,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	84.497.500,00	84.497.500,00	84.497.500,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	164.767.400,00	164.767.400,00	164.767.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.568.219.940,00	1.568.219.940,00	1.558.970.642,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	567.561.600,00	567.561.600,00	553.439.032,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	536.452.400,00	536.452.400,00	522.329.832,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	31.109.200,00	31.109.200,00	31.109.200,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.060.496.700,00	1.060.496.700,00	1.096.374.132,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	274.355.700,00	274.355.700,00	274.355.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	546.584.200,00	546.584.200,00	582.461.632,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	239.556.800,00	239.556.800,00	239.556.800,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	91.369.700,00	91.369.700,00	91.369.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	91.369.700,00	91.369.700,00	91.369.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.368.144.240,00	2.368.144.240,00	2.266.259.738,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	776.821.100,00	776.821.100,00	748.575.764,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	140.567.980,00	140.567.980,00	132.314.520,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	120.321.240,00	120.321.240,00	116.194.510,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	285.843.460,00	285.843.460,00	275.847.622,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	230.088.420,00	230.088.420,00	224.219.112,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	776.820.700,00	776.820.700,00	748.575.564,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	250.076.860,00	250.076.860,00	240.081.022,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	235.080.920,00	235.080.920,00	229.211.812,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	89.999.840,00	89.999.840,00	85.873.110,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	201.663.080,00	201.663.080,00	193.409.620,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	814.502.440,00	814.502.440,00	769.108.410,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	351.013.340,00	351.013.340,00	326.252.960,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	78.929.700,00	78.929.700,00	78.929.700,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	305.645.800,00	305.645.800,00	285.012.150,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	78.913.600,00	78.913.600,00	78.913.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	22.130.957.426,00	22.130.957.426,00	23.240.773.183,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293.733.500,00	293.733.500,00	286.122.014,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	235.592.600,00	235.592.600,00	227.981.114,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.474.400,00	11.474.400,00	11.474.400,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.444.900,00	11.444.900,00	11.444.900,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.221.600,00	35.221.600,00	35.221.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.852.532.834,00	16.852.532.834,00	16.671.010.143,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.520.870.414,00	16.520.870.414,00	16.365.850.481,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	197.567.800,00	197.567.800,00	176.934.150,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	134.094.620,00	134.094.620,00	128.225.512,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.571.810.772,00	1.571.810.772,00	1.887.106.486,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	68.127.540,00	68.127.540,00	64.000.810,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	397.243.220,00	397.243.220,00	730.788.232,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.678.652,00	126.678.652,00	129.063.004,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70.245.940,00	70.245.940,00	66.119.210,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	67.310.140,00	67.310.140,00	63.183.410,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	103.382.140,00	103.382.140,00	99.255.410,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	738.823.140,00	738.823.140,00	734.696.410,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.606.140,00	120.606.140,00	411.144.692,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	73.835.400,00	73.835.400,00	361.989.600,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.770.740,00	46.770.740,00	49.155.092,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.695.920,00	890.695.920,00	960.658.584,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.743.640,00	40.743.640,00	36.616.910,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.882.140,00	194.882.140,00	197.266.492,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	655.070.140,00	655.070.140,00	726.775.182,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.401.578.260,00	2.401.578.260,00	3.024.731.264,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	761.208.980,00	761.208.980,00	771.388.362,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.287.140,00	203.287.140,00	192.660.410,00
5.01.0.00.0.00.01.0000	5	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.437.082.140,00	1.437.082.140,00	2.060.682.492,00
5.02.0.00.0.00.02.0000						Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	858.098.444.591,00	858.098.509.731,00	980.103.643.580,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02				KEUANGAN	858.098.444.591,00	858.098.509.731,00	980.103.643.580,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	831.717.704.650,00	831.693.121.121,00	944.883.884.520,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.681.455.783,00	1.692.386.960,00	1.942.004.340,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	27.825.000,00	54.687.100,00	58.287.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	23.452.800,00	54.510.300,00	58.110.300,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	364.616.385,00	352.364.500,00	40.764.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	84.511.770,00	86.956.000,00	20.456.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	712.675.068,00	711.326.160,00	1.089.801.740,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	468.374.760,00	432.542.900,00	674.584.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.030.597.470,00	983.773.800,00	785.994.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	212.955.120,00	212.783.400,00	140.119.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	185.405.430,00	184.066.700,00	118.846.700,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	215.656.665,00	212.667.400,00	143.127.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	203.625.135,00	180.581.400,00	194.972.400,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	212.955.120,00	193.674.900,00	188.929.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	610.000.000,00	610.000.000,00	609.999.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	610.000.000,00	610.000.000,00	609.999.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	487.233.117,00	487.231.840,00	732.004.706,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	383.827.857,00	383.827.440,00	628.600.306,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	103.405.260,00	103.404.400,00	103.404.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	827.752.277.020,00	827.752.277.021,00	940.667.977.474,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00	2.026.843.633,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	194.405.785.945,00	194.405.785.946,00	205.265.185.944,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	151.187.931.213,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	581.319.647.442,00	581.319.647.442,00	582.188.016.684,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	156.141.260,00	167.451.500,00	145.903.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	156.141.260,00	167.451.500,00	145.903.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.307.797.093,00	1.308.901.220,00	1.781.478.112,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.307.797.093,00	1.308.901.220,00	1.781.478.112,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	118.872.390,00	118.872.300,00	118.872.300,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	323.449.370,00	323.449.000,00	323.449.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	821.475.333,00	822.579.920,00	1.295.156.812,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.072.942.848,00	25.096.487.390,00	33.438.280.948,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.855.250,00	38.855.200,00	75.487.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.855.250,00	38.855.200,00	75.487.200,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.854.689.314,00	20.878.273.700,00	28.780.753.984,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.409.610.400,00	20.433.197.500,00	20.152.321.982,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	445.078.914,00	445.076.200,00	8.628.432.002,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.002.417.305,00	1.935.004.370,00	2.085.638.710,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	18.225.900,00	18.204.900,00	18.204.900,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.031.173.395,00	873.558.920,00	1.050.278.860,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	598.249.785,00	360.860.710,00	324.675.840,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.060.825,00	12.587.800,00	12.587.800,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	13.650.000,00	7.999.900,00	7.999.900,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.562.500,00	131.432.140,00	127.305.410,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.494.900,00	530.360.000,00	544.586.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.300.000,00	290.010.000,00	290.010.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	285.300.000,00	285.300.000,00	285.300.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.888.680.979,00	1.954.344.120,00	2.206.391.054,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	775.638.654,00	856.485.520,00	844.089.830,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	6.000.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	137.042.325,00	179.243.440,00	171.456.710,00
5.02.0.00.0.00.02.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	970.000.000,00	903.095.160,00	1.175.324.514,00
5.02.0.00.0.00.02.0001						UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.289.203.720,00	3.289.138.580,00	3.418.829.044,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	889.203.720,00	889.138.580,00	1.018.829.044,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.212.490,00	161.153.600,00	161.153.600,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.748.780,00	43.748.500,00	43.748.500,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.449.160,00	9.449.100,00	9.449.100,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.489.500,00	10.485.000,00	10.485.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.325.050,00	93.271.000,00	93.271.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	57.000.000,00	57.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.791.230,00	669.784.980,00	799.475.444,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.531.230,00	154.525.000,00	154.525.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.260.000,00	15.260.000,00	15.260.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0001	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	500.000.000,00	499.999.980,00	629.690.444,00
5.02.0.00.0.00.03.0000						Badan Pendapatan Daerah	118.352.181.320,00	118.352.795.294,00	156.464.435.478,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	27.008.900,00	27.008.900,00	27.008.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	27.008.900,00	27.008.900,00	27.008.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	27.008.900,00	27.008.900,00	27.008.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.019.677.200,00	1.018.498.300,00	1.066.672.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.019.677.200,00	1.018.498.300,00	1.066.672.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	324.466.500,00	324.466.500,00	238.541.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	259.290.700,00	259.290.700,00	259.290.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	144.804.100,00	143.625.200,00	143.625.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	243.995.900,00	243.995.900,00	378.095.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	47.120.000,00	47.120.000,00	47.120.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	117.305.495.220,00	117.307.288.094,00	155.370.753.678,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.878.900,00	45.278.300,00	47.662.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.562.100,00	20.337.100,00	22.721.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.316.800,00	24.941.200,00	24.941.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	107.755.269.287,00	107.755.269.287,00	140.831.740.151,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	107.755.269.287,00	107.755.269.287,00	140.831.740.151,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	983.837.494,00	959.571.494,00	980.835.494,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.932.000,00	4.932.000,00	7.039.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335.062.500,00	310.849.500,00	318.006.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.575.894,00	101.575.894,00	101.575.894,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.013.300,00	54.960.300,00	54.960.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.428.800,00	2.428.800,00	2.428.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	471.325.000,00	471.325.000,00	483.325.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.618.028.401,00	2.682.687.875,00	7.752.675.449,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	226.733.625,00	226.733.625,00	226.733.625,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	972.493.671,00	972.478.400,00	970.874.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.418.801.105,00	1.483.475.850,00	6.555.067.524,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	808.635.177,00	808.635.177,00	811.035.177,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.148.700,00	3.148.700,00	3.148.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	387.433.104,00	387.433.104,00	387.433.104,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418.053.373,00	418.053.373,00	420.453.373,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.045.845.961,00	5.005.845.961,00	4.896.805.107,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.765.240,00	120.765.240,00	124.469.592,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.362.003.540,00	1.362.003.540,00	1.434.609.652,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	934.849.220,00	934.849.220,00	839.934.430,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.440.000.000,00	1.400.000.000,00	1.284.252.460,00
5.02.0.00.0.00.03.0000	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.188.227.961,00	1.188.227.961,00	1.213.538.973,00
5.02.0.00.0.00.03.0001						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Buleleng	5.426.440.600,00	5.426.065.040,00	5.169.318.004,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.717.432.600,00	3.717.432.600,00	3.468.737.458,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.717.432.600,00	3.717.432.600,00	3.468.737.458,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.899.996.300,00	1.899.996.300,00	1.753.359.942,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	1.817.436.300,00	1.817.436.300,00	1.715.377.516,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.709.008.000,00	1.708.632.440,00	1.700.580.546,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.403.900,00	264.028.340,00	263.819.140,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.259.300,00	5.259.300,00	5.259.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.450.900,00	134.425.340,00	134.216.140,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.239.200,00	10.239.200,00	10.239.200,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.854.500,00	4.854.500,00	4.854.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000,00	6.850.000,00	6.850.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	77.400.000,00	77.400.000,00	77.400.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.789.800,00	532.789.800,00	532.789.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.000.000,00	261.000.000,00	261.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.814.300,00	911.814.300,00	903.971.606,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.450.000,00	46.450.000,00	47.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.910.540,00	171.910.540,00	175.714.492,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.180.000,00	21.180.000,00	21.180.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	655.549.960,00	655.549.960,00	643.353.314,00
5.02.0.00.0.00.03.0001	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.723.800,00	16.723.800,00	16.723.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0002						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Jembrana	2.324.311.656,00	2.324.284.276,00	2.288.059.950,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.105.684.940,00	1.105.684.940,00	1.032.045.774,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.105.684.940,00	1.105.684.940,00	1.032.045.774,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	391.489.260,00	391.489.260,00	360.859.772,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	714.195.680,00	714.195.680,00	671.186.002,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.218.626.716,00	1.218.599.336,00	1.256.014.176,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.107.400,00	190.080.020,00	190.080.020,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.664.700,00	3.664.700,00	3.664.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.250.800,00	122.248.420,00	122.248.420,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.691.900,00	4.691.900,00	4.691.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.800.000,00	4.775.000,00	4.775.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.491.500,00	372.491.500,00	372.491.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.000.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	656.027.816,00	656.027.816,00	693.442.656,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.703.000,00	46.703.000,00	46.703.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.324.040,00	110.324.040,00	154.708.392,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.020.000,00	41.020.000,00	41.020.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	437.354.976,00	437.354.976,00	430.385.464,00
5.02.0.00.0.00.03.0002	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.625.800,00	20.625.800,00	20.625.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0003						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Tabanan	2.391.420.660,00	2.391.395.820,00	2.469.136.604,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.030.189.220,00	1.030.189.220,00	948.296.594,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.030.189.220,00	1.030.189.220,00	948.296.594,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	488.503.540,00	488.503.540,00	449.620.592,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	541.685.680,00	541.685.680,00	498.676.002,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.361.231.440,00	1.361.206.600,00	1.520.840.010,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	198.461.000,00	198.436.160,00	202.260.390,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.949.800,00	6.949.800,00	6.949.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.874.500,00	136.867.660,00	136.866.890,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.783.700,00	6.783.700,00	6.783.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.393.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.460.000,00	17.460.000,00	21.285.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	475.978.200,00	475.978.200,00	475.978.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.978.200,00	1.978.200,00	1.978.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	294.000.000,00	294.000.000,00	294.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686.792.240,00	686.792.240,00	842.601.420,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.855.000,00	45.855.000,00	45.855.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.767.640,00	220.767.640,00	225.937.992,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.460.000,00	21.460.000,00	21.460.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	378.321.400,00	378.321.400,00	533.098.428,00
5.02.0.00.0.00.03.0003	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.388.200,00	20.388.200,00	16.250.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Badung	5.030.165.144,00	5.030.089.184,00	4.774.948.404,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.071.276.260,00	3.071.276.260,00	2.806.428.928,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.071.276.260,00	3.071.276.260,00	2.806.428.928,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.321.488.440,00	2.321.488.440,00	2.140.725.352,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	749.787.820,00	749.787.820,00	665.703.576,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.958.888.884,00	1.958.812.924,00	1.968.519.476,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.828.000,00	214.752.040,00	214.752.040,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.037.600,00	5.037.600,00	5.037.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	134.005.000,00	133.993.390,00	133.993.390,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.228.800,00	17.186.050,00	17.186.050,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.840.000,00	4.840.000,00	4.840.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.596.600,00	10.575.000,00	10.575.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.120.000,00	18.120.000,00	18.120.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.209.147,00	817.209.147,00	817.209.147,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.978.200,00	1.978.200,00	1.978.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	378.000.000,00	378.000.000,00	378.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.230.947,00	437.230.947,00	437.230.947,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.851.737,00	926.851.737,00	936.558.289,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.272.000,00	36.272.000,00	36.265.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.962.040,00	185.962.040,00	188.338.992,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.920.000,00	19.920.000,00	19.920.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	656.857.697,00	656.857.697,00	664.194.297,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0004	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.840.000,00	27.840.000,00	27.840.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kota Denpasar	5.689.130.527,00	5.689.123.557,00	5.388.790.817,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.382.564.040,00	3.382.564.040,00	3.099.287.162,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.382.564.040,00	3.382.564.040,00	3.099.287.162,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.892.660.500,00	2.892.660.500,00	2.609.200.078,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	489.903.540,00	489.903.540,00	490.087.084,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.306.566.487,00	2.306.559.517,00	2.289.503.655,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	294.924.094,00	294.917.124,00	367.679.564,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.435.800,00	4.435.800,00	4.435.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.167.600,00	127.165.630,00	199.920.870,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.122.194,00	57.122.194,00	57.122.194,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.529.500,00	65.529.500,00	65.536.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.424.000,00	6.424.000,00	6.424.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.880.000,00	20.875.000,00	20.875.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.365.000,00	13.365.000,00	13.365.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	981.959.962,00	981.959.962,00	867.965.394,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.491.500,00	1.491.500,00	1.491.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.550.000,00	474.550.000,00	474.550.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	505.918.462,00	505.918.462,00	391.923.894,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.029.682.431,00	1.029.682.431,00	1.053.858.697,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.925.000,00	47.925.000,00	47.895.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	148.644.780,00	148.644.780,00	203.989.104,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.040.000,00	17.040.000,00	17.040.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	782.765.751,00	782.765.751,00	751.906.893,00
5.02.0.00.0.00.03.0005	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.306.900,00	33.306.900,00	33.026.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0006						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Gianyar	3.569.465.734,00	3.569.428.514,00	3.412.562.020,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.901.852.020,00	1.901.852.020,00	1.744.979.794,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.901.852.020,00	1.901.852.020,00	1.744.979.794,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.257.299.920,00	1.257.299.920,00	1.154.773.644,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	644.552.100,00	644.552.100,00	590.206.150,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.667.613.714,00	1.667.576.494,00	1.667.582.226,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.304.534,00	290.267.314,00	282.707.314,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.931.000,00	16.931.000,00	16.931.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	145.969.900,00	145.966.580,00	145.966.580,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.718.634,00	56.718.634,00	56.718.634,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.475.000,00	22.463.600,00	22.463.600,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.212.500,00	8.212.500,00	8.212.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.397.500,00	12.375.000,00	12.375.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.600.000,00	27.600.000,00	20.040.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	562.826.000,00	562.826.000,00	562.826.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.826.000,00	2.826.000,00	2.826.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814.483.180,00	814.483.180,00	822.048.912,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.500.000,00	49.500.000,00	49.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127.897.500,00	127.897.500,00	147.497.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.990.000,00	38.990.000,00	38.300.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	562.185.680,00	562.185.680,00	551.731.412,00
5.02.0.00.0.00.03.0006	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.910.000,00	35.910.000,00	35.020.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Bangli	2.390.396.487,00	2.390.370.487,00	2.320.580.743,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.193.782.060,00	1.193.782.060,00	1.087.129.054,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.193.782.060,00	1.193.782.060,00	1.087.129.054,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	544.049.960,00	544.049.960,00	492.786.822,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	649.732.100,00	649.732.100,00	594.342.232,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.196.614.427,00	1.196.588.427,00	1.233.451.689,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.953.700,00	171.927.700,00	171.923.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.009.700,00	7.009.700,00	7.009.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.789.300,00	116.788.300,00	116.788.300,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.399.700,00	3.399.700,00	3.399.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.255.000,00	3.255.000,00	3.250.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000,00	2.975.000,00	2.975.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.639.287,00	481.639.287,00	481.639.287,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.789.800,00	1.789.800,00	1.789.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	359.849.487,00	359.849.487,00	359.849.487,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.021.440,00	543.021.440,00	579.888.902,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.000.000,00	48.000.000,00	47.995.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	61.318.700,00	61.318.700,00	104.518.700,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	418.503.540,00	418.503.540,00	412.176.002,00
5.02.0.00.0.00.03.0007	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.099.200,00	8.099.200,00	8.099.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0008						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Klungkung	2.481.064.220,00	2.481.055.280,00	2.449.028.982,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	968.687.080,00	968.687.080,00	904.125.348,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	968.687.080,00	968.687.080,00	904.125.348,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	479.393.540,00	479.393.540,00	440.509.592,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	489.293.540,00	489.293.540,00	463.615.756,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.512.377.140,00	1.512.368.200,00	1.544.903.634,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.483.200,00	196.474.260,00	196.469.800,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.660.400,00	2.660.400,00	2.660.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.056.200,00	110.054.860,00	110.050.400,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.280.000,00	30.280.000,00	30.280.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	3.674.000,00	3.674.000,00	3.674.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	4.332.600,00	4.325.000,00	4.325.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.900.000,00	42.900.000,00	42.900.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381.193.200,00	381.193.200,00	411.193.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	180.000.000,00	210.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	934.700.740,00	934.700.740,00	937.240.634,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.840.000,00	42.840.000,00	42.835.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.386.500,00	129.386.500,00	152.991.500,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.390.000,00	16.390.000,00	16.390.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	727.914.240,00	727.914.240,00	707.464.134,00
5.02.0.00.0.00.03.0008	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.170.000,00	18.170.000,00	17.560.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009						UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi di Kabupaten Karangasem	2.142.493.600,00	2.142.462.080,00	2.114.272.408,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.014.089.220,00	1.014.089.220,00	950.436.594,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.014.089.220,00	1.014.089.220,00	950.436.594,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	516.385.680,00	516.385.680,00	491.616.002,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	497.703.540,00	497.703.540,00	458.820.592,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.128.404.380,00	1.128.372.860,00	1.163.835.814,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.654.000,00	192.622.980,00	220.252.980,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.827.100,00	3.827.100,00	3.827.100,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	122.252.000,00	122.245.980,00	122.245.980,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.837.000,00	27.837.000,00	27.837.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.182.900,00	5.182.900,00	5.182.900,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2.175.000,00	2.175.000,00	2.175.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000,00	3.575.000,00	3.575.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.780.000,00	27.780.000,00	55.410.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	403.193.200,00	403.193.200,00	403.193.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.193.200,00	1.193.200,00	1.193.200,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532.557.180,00	532.556.680,00	540.389.634,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.498.000,00	52.498.000,00	52.490.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.863.740,00	101.863.240,00	123.835.592,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	352.092.840,00	352.092.840,00	333.843.542,00
5.02.0.00.0.00.03.0009	5	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.902.600,00	11.902.600,00	16.020.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	351.799.383.104,00	351.799.180.477,00	41.527.314.431,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03				KEPEGAWAIAN	350.142.757.684,00	350.142.555.057,00	40.008.484.037,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.861.393.576,00	4.861.347.440,00	4.857.191.552,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.713.300.760,00	1.713.300.760,00	1.673.304.922,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	74.830.000,00	74.830.000,00	74.830.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	920.904.000,00	920.904.000,00	890.904.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	71.584.000,00	71.584.000,00	71.584.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	162.320.140,00	162.320.140,00	150.033.410,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	263.590.500,00	263.590.500,00	271.750.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	220.072.120,00	220.072.120,00	214.203.012,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN	432.035.820,00	432.035.120,00	448.790.930,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	81.200.240,00	81.199.840,00	71.793.110,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	152.502.440,00	152.502.140,00	187.543.410,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	198.333.140,00	198.333.140,00	189.454.410,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	2.069.171.456,00	2.069.171.420,00	2.115.429.394,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	164.375.140,00	164.375.140,00	100.730.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.585.222.140,00	1.585.222.140,00	1.587.606.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	32.000.000,00	32.000.000,00	27.248.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	161.447.000,00	161.447.000,00	280.244.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	126.127.176,00	126.127.140,00	119.600.410,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	646.885.540,00	646.840.140,00	619.666.306,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	151.958.280,00	151.928.280,00	150.185.902,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	162.254.000,00	162.242.100,00	122.577.100,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	161.898.280,00	161.894.780,00	177.870.702,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	138.090.280,00	138.090.280,00	136.347.902,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	32.684.700,00	32.684.700,00	32.684.700,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	345.281.364.108,00	345.281.207.617,00	35.151.292.485,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	225.621.025,00	225.620.600,00	244.340.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.646.000,00	65.646.000,00	65.646.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.075.025,00	75.074.600,00	75.074.600,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.300.000,00	81.300.000,00	100.020.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	341.666.515.063,00	341.666.515.063,00	31.401.080.353,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	341.666.515.063,00	341.666.515.063,00	31.401.080.353,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	559.010.400,00	558.993.234,00	573.843.234,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.766.000,00	17.762.400,00	17.762.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.768.400,00	153.768.400,00	153.768.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.891.000,00	98.887.434,00	85.079.034,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.695.000,00	8.695.000,00	22.503.400,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.140.000,00	4.137.000,00	4.137.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	275.750.000,00	275.743.000,00	290.593.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	575.839.000,00	575.833.000,00	575.833.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	575.839.000,00	575.833.000,00	575.833.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.165.624.220,00	1.165.606.620,00	1.123.115.978,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000,00	2.386.400,00	2.386.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	253.600.000,00	253.600.000,00	253.600.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.624.220,00	909.620.220,00	867.129.578,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.088.754.400,00	1.088.639.100,00	1.233.079.320,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	890.984.400,00	890.939.100,00	996.648.320,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	118.731.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.770.000,00	117.700.000,00	117.700.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.656.625.420,00	1.656.625.420,00	1.518.830.394,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.656.625.420,00	1.656.625.420,00	1.518.830.394,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.656.625.420,00	1.656.625.420,00	1.518.830.394,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	274.167.140,00	274.167.140,00	273.191.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	265.818.000,00	265.818.000,00	263.898.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	497.161.140,00	497.161.140,00	499.545.492,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	366.547.500,00	366.547.500,00	246.566.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	119.773.640,00	119.773.640,00	114.950.910,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	133.158.000,00	133.158.000,00	120.678.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001						UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	2.029.542.180,00	2.029.541.780,00	2.007.152.552,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03				KEPEGAWAIAN	2.029.542.180,00	2.029.541.780,00	2.007.152.552,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.598.227.600,00	1.598.227.300,00	1.598.227.300,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN	1.598.227.600,00	1.598.227.300,00	1.598.227.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	1.598.227.600,00	1.598.227.300,00	1.598.227.300,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	431.314.580,00	431.314.480,00	408.925.252,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.455.700,00	53.455.700,00	53.659.800,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.157.700,00	5.157.700,00	5.361.800,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48.298.000,00	48.298.000,00	48.298.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.951.400,00	26.951.300,00	25.550.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.951.400,00	26.951.300,00	25.550.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	263.774.980,00	263.774.980,00	241.398.952,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263.774.980,00	263.774.980,00	241.398.952,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.132.500,00	87.132.500,00	88.316.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.162.500,00	78.162.500,00	78.656.500,00
5.03.5.04.0.00.02.0001	5	03	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.970.000,00	8.970.000,00	9.660.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002						UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00	8.000.000.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002	5	03	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00	8.000.000.000,00
5.03.5.04.0.00.02.0002	5	03	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	6.959.832.000,00	6.959.832.000,00	8.000.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000						Badan Riset dan Inovasi Daerah	19.119.816.620,00	19.119.722.176,00	23.285.290.479,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	19.119.816.620,00	19.119.722.176,00	23.285.290.479,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.795.000.000,00	3.795.000.000,00	7.428.959.900,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1.640.000.000,00	1.640.000.000,00	5.209.594.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	840.000.000,00	840.000.000,00	4.270.000.000,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	300.000.000,00	300.000.000,00	386.742.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	175.000.000,00	175.000.000,00	227.852.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00	1.725.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	975.000.000,00	975.000.000,00	975.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	266.000.000,00	266.000.000,00	266.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	234.000.000,00	234.000.000,00	234.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	430.000.000,00	430.000.000,00	494.365.900,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	185.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	75.000.000,00	75.000.000,00	139.365.900,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.324.816.620,00	15.324.722.176,00	15.856.330.579,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.428.500.000,00	10.428.500.000,00	11.284.006.527,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.428.500.000,00	10.428.500.000,00	11.284.006.527,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	685.568.200,00	685.514.300,00	935.482.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.938.000,00	21.938.000,00	21.938.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.907.000,00	198.907.000,00	198.905.500,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.475.000,00	107.436.400,00	107.436.400,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.180.200,00	24.180.200,00	24.180.200,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,00	14.998.700,00	14.998.700,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	318.068.000,00	318.054.000,00	568.024.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.697.754.884,00	1.697.754.340,00	884.819.840,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	517.834.600,00	531.381.600,00	419.204.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.179.920.284,00	1.166.372.740,00	465.615.240,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	497.015.980,00	497.015.980,00	513.699.044,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	5.000.000,00	4.992.600,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.200.000,00	167.200.000,00	167.200.000,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.815.980,00	324.815.980,00	341.506.444,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.910.977.556,00	1.910.937.556,00	2.133.322.368,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	737.999.776,00	737.999.776,00	795.794.806,00
5.05.0.00.0.00.01.0000	5	05	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.172.977.780,00	1.172.937.780,00	1.337.527.562,00
5.07.0.00.0.00.01.0000						Badan Penghubung	9.757.562.920,00	9.757.562.920,00	9.889.203.083,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG	9.757.562.920,00	9.757.562.920,00	9.889.203.083,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	3.323.474.541,00	3.323.474.541,00	2.960.474.467,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	3.323.474.541,00	3.323.474.541,00	2.960.474.467,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	159.920.561,00	159.920.561,00	159.928.487,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	314.777.196,00	314.777.196,00	314.769.196,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.848.776.784,00	2.848.776.784,00	2.485.776.784,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	6.434.088.379,00	6.434.088.379,00	6.928.728.616,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.999.300,00	4.999.300,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.300,00	4.999.300,00	4.999.300,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.987.398.459,00	2.987.398.459,00	3.119.038.696,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.987.398.459,00	2.987.398.459,00	3.119.038.696,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.640.900,00	230.640.900,00	230.640.900,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.400,00	14.989.400,00	14.989.400,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.981.200,00	54.981.200,00	54.981.200,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.499.300,00	8.499.300,00	8.499.300,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.171.000,00	62.171.000,00	62.171.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	229.503.420,00	229.503.420,00	229.503.420,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	229.503.420,00	229.503.420,00	229.503.420,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.474.896.236,00	1.474.896.236,00	1.474.896.236,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.989.100,00	8.989.100,00	8.989.100,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.800.000,00	306.800.000,00	306.800.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.159.107.136,00	1.159.107.136,00	1.159.107.136,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.506.650.064,00	1.506.650.064,00	1.869.650.064,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	969.537.868,00	969.537.868,00	1.332.537.868,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	395.343.000,00	395.343.000,00	395.343.000,00
5.07.0.00.0.00.01.0000	5	07	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	141.769.196,00	141.769.196,00	141.769.196,00
6.01.0.00.0.00.01.0000						Inspektorat	38.758.989.954,00	38.758.987.354,00	38.664.248.243,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	38.758.989.954,00	38.758.987.354,00	38.664.248.243,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01				INSPEKTORAT DAERAH	38.758.989.954,00	38.758.987.354,00	38.664.248.243,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.639.996.460,00	3.639.993.760,00	3.579.009.588,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.529.991.560,00	2.529.989.060,00	2.551.448.128,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	199.999.680,00	199.999.680,00	204.768.384,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	250.023.080,00	250.023.080,00	254.791.784,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	79.999.600,00	79.999.600,00	79.999.500,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	250.007.140,00	250.007.140,00	252.391.492,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	899.999.480,00	899.999.480,00	904.768.184,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	449.962.800,00	449.960.300,00	449.960.300,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	399.999.780,00	399.999.780,00	404.768.484,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.110.004.900,00	1.110.004.700,00	1.027.561.460,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	109.999.980,00	109.999.980,00	114.768.684,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.000.004.920,00	1.000.004.720,00	912.792.776,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.982.279.980,00	2.982.280.980,00	3.105.243.004,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2.037.291.060,00	2.037.292.060,00	2.058.751.228,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	387.355.220,00	387.356.220,00	394.509.276,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	1.649.935.840,00	1.649.935.840,00	1.664.241.952,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi	944.988.920,00	944.988.920,00	1.046.491.776,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	274.994.820,00	274.994.820,00	282.141.676,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	169.995.000,00	169.995.000,00	169.988.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	399.999.900,00	399.999.900,00	494.364.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	99.999.200,00	99.999.200,00	99.996.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	32.136.713.514,00	32.136.712.614,00	31.979.995.651,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.999.800,00	89.999.800,00	89.999.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.485.658.000,00	21.485.658.000,00	26.324.679.033,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.485.658.000,00	21.485.658.000,00	26.324.679.033,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.282.296.994,00	1.282.296.094,00	1.282.274.694,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.400,00	49.999.400,00	49.999.400,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.999.800,00	99.999.800,00	99.999.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.003.394,00	158.109.394,00	158.109.394,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.441.400,00	39.334.500,00	40.070.300,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	44.898.000,00	44.898.000,00	44.140.800,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	39.960.000,00	39.960.000,00	39.960.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	849.995.000,00	849.995.000,00	849.995.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.709.720.040,00	1.709.720.040,00	1.709.720.040,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.709.720.040,00	1.709.720.040,00	1.709.720.040,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598.050.140,00	598.050.140,00	595.153.460,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.092.900,00	5.092.900,00	5.092.900,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.500.000,00	280.500.000,00	280.500.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	312.457.240,00	312.457.240,00	309.560.560,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.970.988.540,00	6.970.988.540,00	1.978.168.624,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.599.994.260,00	1.599.994.260,00	1.621.453.428,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.151.000.000,00	5.151.000.000,00	131.952.212,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	6	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	219.994.280,00	219.994.280,00	224.762.984,00
8.01.0.00.0.00.01.0000						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43.790.763.848,00	43.790.683.344,00	46.108.467.373,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	43.790.763.848,00	43.790.683.344,00	46.108.467.373,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	43.790.763.848,00	43.790.683.344,00	46.108.467.373,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	4.382.046.020,00	4.382.045.920,00	4.732.046.394,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.382.046.020,00	4.382.045.920,00	4.732.046.394,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	846.846.320,00	846.846.320,00	1.196.846.794,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	3.535.199.700,00	3.535.199.600,00	3.535.199.600,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.272.226.420,00	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.272.226.420,00	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24.272.226.420,00	24.272.226.420,00	24.374.767.294,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	246.649.900,00	246.649.900,00	681.089.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	246.649.900,00	246.649.900,00	681.089.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	246.649.900,00	246.649.900,00	681.089.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	897.378.760,00	897.378.656,00	1.049.045.322,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	897.378.760,00	897.378.656,00	1.049.045.322,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	897.378.760,00	897.378.656,00	1.049.045.322,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.598.246.320,00	1.598.246.020,00	1.676.175.912,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.598.246.320,00	1.598.246.020,00	1.676.175.912,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	598.246.420,00	598.246.120,00	676.176.212,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	999.999.900,00	999.999.900,00	999.999.700,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.394.216.428,00	12.394.136.428,00	13.595.343.451,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	104.930.400,00	104.930.400,00	131.164.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.940.800,00	74.940.800,00	93.164.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.989.600,00	29.989.600,00	38.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.313.377.684,00	9.313.377.684,00	10.015.015.243,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.313.377.684,00	9.313.377.684,00	10.015.015.243,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	670.697.724,00	670.617.724,00	775.903.824,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.371.000,00	12.371.000,00	14.921.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	138.647.600,00	138.647.600,00	240.117.300,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.229.424,00	77.229.424,00	77.229.424,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.613.600,00	34.613.600,00	35.880.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.996.100,00	4.996.100,00	4.996.100,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	402.840.000,00	402.760.000,00	402.759.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.807.640,00	233.807.640,00	606.324.240,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	74.884.900,00	74.884.900,00	189.401.500,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.922.740,00	158.922.740,00	416.922.740,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.082.591.180,00	1.082.591.180,00	1.058.014.344,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.994.800,00	11.994.800,00	11.994.800,00

Kode						Uraian	RKPD (Rp)	PPAS (Rp)	Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	940.596.380,00	940.596.380,00	916.019.544,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.811.800,00	988.811.800,00	1.008.921.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	772.100.000,00	772.100.000,00	790.100.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.850.000,00	17.850.000,00	19.960.000,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	181.981.800,00	181.981.800,00	181.981.800,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.880.000,00	16.880.000,00	16.880.000,00
TOTAL							5.565.666.183.704,00	5.565.525.524.950,00	6.827.385.005.313,20

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN IX

SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI



PROVINSI BALI
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	748.575.564,00	0,00	0,00	0,00	748.575.564,00
2	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan dan Perikanan	76.748.000,00	0,00	0,00	0,00	76.748.000,00
3	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	512.815.610,00	0,00	0,00	0,00	512.815.610,00
4	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	145.368.130,00	0,00	0,00	0,00	145.368.130,00
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	9.868.281.012,00	0,00	0,00	0,00	9.868.281.012,00
6	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	64.062.969.064,00	167.607.800,00	0,00	0,00	64.230.576.864,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
7	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.130.808.892,00	0,00	0,00	0,00	1.130.808.892,00
8	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.214.740.096,00	0,00	0,00	0,00	10.214.740.096,00
9	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	133.073.630,00	0,00	0,00	0,00	133.073.630,00
10	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	898.477.436,00	0,00	0,00	0,00	898.477.436,00
11	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	2.030.315.210,00	0,00	0,00	0,00	2.030.315.210,00
12	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.251.181.194,00	0,00	0,00	0,00	1.251.181.194,00
13	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1.253.871.186,00	0,00	0,00	0,00	1.253.871.186,00
14	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	461.989.872,00	0,00	0,00	0,00	461.989.872,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
15	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	532.326.060,00	0,00	0,00	0,00	532.326.060,00
16	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan	570.389.570,00	17.648.960,00	0,00	0,00	588.038.530,00
17	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	769.108.410,00	0,00	0,00	0,00	769.108.410,00
18	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	6.960.714.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960.714.000,00
19	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	30.997.600,00	0,00	0,00	0,00	30.997.600,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
20	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	24.884.800,00	0,00	0,00	0,00	24.884.800,00
21	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	36.313.800,00	0,00	0,00	0,00	36.313.800,00
22	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00
23	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	34.145.788.437,00	116.064.000,00	0,00	0,00	34.261.852.437,00
24	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	21.185.389.994,00	297.723.512.120,00	0,00	0,00	318.908.902.114,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
25	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.208.600.822,00	400.472.350,00	0,00	0,00	12.609.073.172,00
26	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	28.511.261.717,00	897.741.340,00	0,00	0,00	29.409.003.057,00
27	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	289.327.110,00	0,00	0,00	0,00	289.327.110,00
28	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	431.471.640,00	0,00	0,00	0,00	431.471.640,00
29	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	308.686.594,00	0,00	0,00	0,00	308.686.594,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
30	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	192.110.220,00	0,00	0,00	0,00	192.110.220,00
31	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	635.576.002,00	0,00	0,00	0,00	635.576.002,00
32	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	183.432.810,00	0,00	0,00	0,00	183.432.810,00
33	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	415.843.504,00	0,00	0,00	0,00	415.843.504,00
34	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.876.000,00	0,00	0,00	0,00	75.876.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
35	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Dinas Perhubungan	644.638.650,00	0,00	0,00	0,00	644.638.650,00
36	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Dinas Perhubungan	646.933.460,00	0,00	0,00	0,00	646.933.460,00
37	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perhubungan	29.856.909.704,00	783.049.940,00	0,00	0,00	30.639.959.644,00
38	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan	1.664.501.312,00	0,00	0,00	0,00	1.664.501.312,00
39	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	415.850.050,00	0,00	0,00	0,00	415.850.050,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
40	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	559.755.110,00	0,00	0,00	0,00	559.755.110,00
41	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	256.350.000,00	0,00	0,00	0,00	256.350.000,00
42	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	650.934.461,00	28.000.000,00	0,00	0,00	678.934.461,00
43	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	855.776.610,00	2.018.000.000,00	0,00	0,00	2.873.776.610,00
44	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Peralatan dan Pengujian	99.316.900,00	0,00	0,00	0,00	99.316.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
45	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2.615.568.416,00	0,00	0,00	0,00	2.615.568.416,00
46	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	UPTD Pengembangan dan Integrasi Layanan Digital	7.248.885.100,00	894.220.390,00	0,00	0,00	8.143.105.490,00
47	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	139.540.200,00	0,00	0,00	0,00	139.540.200,00
48	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penyelenggaraan Pelabuhan	483.085.844,00	88.050.156,00	0,00	0,00	571.136.000,00
49	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlengkapan Jalan	201.157.692,00	100.650.800,00	0,00	0,00	301.808.492,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
50	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Perlengkapan Jalan	2.952.773.060,00	495.443.200,00	0,00	0,00	3.448.216.260,00
51	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	674.531.492,00	143.228.800,00	0,00	0,00	817.760.292,00
52	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Pusat Pengendalian LLAJ	1.895.951.218,00	300.000.000,00	0,00	0,00	2.195.951.218,00
53	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	549.507.452,00	144.834.520,00	0,00	0,00	694.341.972,00
54	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita	7.938.004.159,00	0,00	0,00	0,00	7.938.004.159,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
55	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	UPTD Turyapada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali	14.624.906.894,00	3.517.540.150,00	0,00	0,00	18.142.447.044,00
56	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
57	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	94.999.500,00	0,00	0,00	0,00	94.999.500,00
58	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
59	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	493.326.192,00	0,00	0,00	0,00	493.326.192,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
60	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.999.700,00	0,00	0,00	0,00	19.999.700,00
61	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	19.994.300,00	0,00	0,00	0,00	19.994.300,00
62	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	30.000.500,00	0,00	0,00	0,00	30.000.500,00
63	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	89.554.810,00	0,00	0,00	0,00	89.554.810,00
64	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	198.400.230,00	0,00	0,00	0,00	198.400.230,00
65	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	73.261.000,00	0,00	0,00	0,00	73.261.000,00
66	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	58.056.300,00	0,00	0,00	0,00	58.056.300,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
67	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	267.453.600,00	0,00	0,00	0,00	267.453.600,00
68	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	57.999.700,00	0,00	0,00	0,00	57.999.700,00
69	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.117.590.230,00	0,00	0,00	0,00	1.117.590.230,00
70	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	42.958.559.998,00	0,00	0,00	0,00	42.958.559.998,00
71	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	104.999.800,00	0,00	0,00	0,00	104.999.800,00
72	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	181.509.884,00	0,00	0,00	0,00	181.509.884,00
73	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Dinas Kelautan dan Perikanan	104.596.492,00	0,00	0,00	0,00	104.596.492,00
74	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Kelautan dan Perikanan	199.047.500,00	0,00	0,00	0,00	199.047.500,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
75	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKATAN TANGKAP	Dinas Kelautan dan Perikanan	424.573.902,00	0,00	0,00	0,00	424.573.902,00
76	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Kelautan dan Perikanan	323.958.502,00	0,00	0,00	0,00	323.958.502,00
77	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.575.641.299,00	3.263.523.520,00	0,00	0,00	30.839.164.819,00
78	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
79	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kawasan Konservasi Provinsi Bali	1.023.004.792,00	0,00	0,00	0,00	1.023.004.792,00
80	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat	341.539.476,00	0,00	0,00	0,00	341.539.476,00
81	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Selatan	401.538.504,00	0,00	0,00	0,00	401.538.504,00
82	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Timur	615.450.489,00	0,00	0,00	0,00	615.450.489,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
83	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Utara	943.845.756,00	0,00	0,00	0,00	943.845.756,00
84	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	252.757.125,00	0,00	0,00	0,00	252.757.125,00
85	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	103.772.820,00	0,00	0,00	0,00	103.772.820,00
86	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	UPTD Pelabuhan Perikanan	47.699.000,00	0,00	0,00	0,00	47.699.000,00
87	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelabuhan Perikanan	265.287.230,00	20.445.200,00	0,00	0,00	285.732.430,00
88	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	UPTD Pengelolaan Sampah	8.143.408.590,00	2.925.000.000,00	0,00	0,00	11.068.408.590,00
89	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Sampah	514.298.274,00	0,00	0,00	0,00	514.298.274,00
90	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	53.241.000,00	0,00	0,00	0,00	53.241.000,00
91	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan	616.422.688,00	37.072.080,00	0,00	0,00	653.494.768,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
92	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	824.870.604,00	0,00	0,00	0,00	824.870.604,00
93	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut	607.191.860,00	38.554.200,00	0,00	0,00	645.746.060,00
94	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Hutan Raya Ngurah Rai	718.504.292,00	0,00	0,00	0,00	718.504.292,00
95	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.781.478.112,00	0,00	0,00	0,00	1.781.478.112,00
96	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.900.746.173,00	0,00	151.187.931.213,00	787.453.202.628,00	943.541.880.014,00
97	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.508.972.008,00	0,00	0,00	0,00	3.508.972.008,00
98	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	121.385.210,00	0,00	0,00	0,00	121.385.210,00
99	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
101	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000.000,00
102	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.049.045.322,00	0,00	0,00	0,00	1.049.045.322,00
103	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	88.800.000,00	0,00	0,00	0,00	88.800.000,00
104	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	494.339.000,00	30.875.454.175,00	0,00	0,00	31.369.793.175,00
105	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	2.274.100.936,00	629.246.900,00	0,00	0,00	2.903.347.836,00
106	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian	796.859.800,00	0,00	0,00	0,00	796.859.800,00
107	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	666.251.370,00	0,00	0,00	0,00	666.251.370,00
108	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.341.186.660,00	0,00	0,00	0,00	5.341.186.660,00
109	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	478.838.860,00	0,00	0,00	0,00	478.838.860,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
110	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	135.878.612,00	0,00	0,00	0,00	135.878.612,00
111	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.572.756.285,00	0,00	0,00	0,00	15.572.756.285,00
112	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	74.790.820,00	0,00	0,00	0,00	74.790.820,00
113	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	215.186.230,00	0,00	0,00	0,00	215.186.230,00
114	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	223.606.230,00	0,00	0,00	0,00	223.606.230,00
115	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	151.553.520,00	0,00	0,00	0,00	151.553.520,00
116	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	399.963.405,00	0,00	0,00	0,00	399.963.405,00
117	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.030.491.536,00	0,00	0,00	0,00	2.030.491.536,00
118	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	409.104.930,00	0,00	0,00	0,00	409.104.930,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
119	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	662.378.224,00	0,00	0,00	0,00	662.378.224,00
120	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	799.475.444,00	0,00	0,00	0,00	799.475.444,00
121	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	685.451.330,00	0,00	0,00	0,00	685.451.330,00
122	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	29.502.478.890,00	0,00	0,00	0,00	29.502.478.890,00
123	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	386.037.860,00	0,00	0,00	0,00	386.037.860,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
124	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kesehatan	307.948.589.922,00	808.482.700,00	0,00	0,00	308.757.072.622,00
125	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	389.259.970,00	0,00	0,00	0,00	389.259.970,00
126	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	79.999.100,00	0,00	0,00	0,00	79.999.100,00
127	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	91.710.229.302,00	105.424.355.920,00	0,00	0,00	197.134.585.222,00
128	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	68.541.829.632,00	62.106.500,00	0,00	0,00	68.603.936.132,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
129	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.949.998.400,00	0,00	0,00	0,00	1.949.998.400,00
130	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
131	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.333.399.627.415,00	486.943.680,00	0,00	0,00	1.333.886.571.095,00
132	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	115.633.100,00	0,00	0,00	0,00	115.633.100,00
133	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	817.082.900,00	0,00	0,00	0,00	817.082.900,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
134	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	351.411.800,00	0,00	0,00	0,00	351.411.800,00
135	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.175.000,00
136	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	114.967.700,00	0,00	0,00	0,00	114.967.700,00
137	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9.996.400,00	0,00	0,00	0,00	9.996.400,00
138	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	309.258.400,00	0,00	0,00	0,00	309.258.400,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
139	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	11.878.600,00	0,00	0,00	0,00	11.878.600,00
140	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	24.011.617.507,00	0,00	0,00	0,00	24.011.617.507,00
141	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	142.567.700,00	0,00	0,00	0,00	142.567.700,00
142	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	19.743.600,00	0,00	0,00	0,00	19.743.600,00
143	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	159.546.100,00	0,00	0,00	0,00	159.546.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
144	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	4.187.786.100,00	0,00	0,00	0,00	4.187.786.100,00
145	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	RSUD Bali Mandara	0,00	45.978.212.000,00	0,00	0,00	45.978.212.000,00
146	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	RSUD Bali Mandara	200.686.107.309,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	210.686.107.309,00
147	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Jiwa	35.904.398.608,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	37.904.398.608,00
148	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rumah Sakit Mata Bali Mandara	81.218.160.000,00	8.781.840.000,00	0,00	0,00	90.000.000.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
149	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	8.534.083.369,00	1.007.141.200,00	0,00	0,00	9.541.224.569,00
150	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	369.183.034,00	0,00	0,00	0,00	369.183.034,00
151	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat	4.267.662.612,00	371.968.400,00	0,00	0,00	4.639.631.012,00
152	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
153	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	126.764.100,00	0,00	0,00	0,00	126.764.100,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
154	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan	674.314.242,00	0,00	0,00	0,00	674.314.242,00
155	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	1.287.636.000,00	0,00	0,00	0,00	1.287.636.000,00
156	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan	968.841.766,00	88.806.600,00	0,00	0,00	1.057.648.366,00
157	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	3.092.844.820,00	0,00	0,00	0,00	3.092.844.820,00
158	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Kesehatan Pengobatan Tradisional	2.193.368.850,00	1.282.741.720,00	0,00	0,00	3.476.110.570,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
159	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pelayanan Sosial	2.340.031.658,00	3.454.397.000,00	0,00	0,00	5.794.428.658,00
160	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	UPTD Pelayanan Sosial	3.253.798.200,00	0,00	0,00	0,00	3.253.798.200,00
161	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	5.991.551.454,00	38.498.300,00	0,00	0,00	6.030.049.754,00
162	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengujian, Pengembangan Obat Tradisional dan Pengelolaan Perbekalan Kesehatan	3.550.910.192,00	1.118.135.920,00	0,00	0,00	4.669.046.112,00
163	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenetraraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	49.868.800,00	26.266.900,00	0,00	0,00	76.135.700,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
164	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	4.499.000,00	0,00	0,00	0,00	4.499.000,00
165	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	135.087.200,00	0,00	0,00	0,00	135.087.200,00
166	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.303.913.000,00	299.191.400,00	0,00	0,00	4.603.104.400,00
167	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.658.635.950,00	3.120.681.700,00	0,00	0,00	23.779.317.650,00
168	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	25.865.611.676,00	0,00	0,00	0,00	25.865.611.676,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
169	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Kebudayaan	10.859.622.006,00	0,00	0,00	0,00	10.859.622.006,00
170	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Dinas Kebudayaan	185.453.000,00	0,00	0,00	0,00	185.453.000,00
171	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Kebudayaan	46.040.342.892,00	0,00	0,00	0,00	46.040.342.892,00
172	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan	845.299.070,00	0,00	0,00	0,00	845.299.070,00
173	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Kebudayaan	63.851.222.573,00	331.754.660,00	0,00	0,00	64.182.977.233,00
174	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	112.110.820,00	0,00	0,00	0,00	112.110.820,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
175	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	466.686.498.824,00	0,00	0,00	0,00	466.686.498.824,00
176	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat	15.390.927.644,00	386.694.240,00	0,00	0,00	15.777.621.884,00
177	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	14.299.040,00	17.615.500,00	0,00	0,00	31.914.540,00
178	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3.108.806.000,00	0,00	0,00	0,00	3.108.806.000,00
179	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Monumen Perjuangan Rakyat Bali	3.635.688.148,00	35.000.000,00	0,00	0,00	3.670.688.148,00
180	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	UPTD Museum Bali	2.624.041.500,00	64.043.500,00	0,00	0,00	2.688.085.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
181	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Museum Bali	2.309.218.256,00	78.680.909.933,00	0,00	0,00	80.990.128.189,00
182	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	1.842.461.900,00	2.772.940.069,00	0,00	0,00	4.615.401.969,00
183	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengendalian Bencana Daerah	2.019.204.804,00	1.623.900.800,00	0,00	0,00	3.643.105.604,00
184	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	UPTD Taman Budaya	2.900.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.500.000,00
185	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Taman Budaya	3.500.406.550,00	0,00	0,00	0,00	3.500.406.550,00
186	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	748.575.764,00	0,00	0,00	0,00	748.575.764,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
187	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.520.425.943,00	2.720.347.240,00	0,00	0,00	23.240.773.183,00
188	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.549.418.406,00	0,00	0,00	0,00	3.549.418.406,00
189	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Biro Organisasi	110.132.984,00	0,00	0,00	0,00	110.132.984,00
190	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Biro Organisasi	455.465.344,00	45.000.000,00	0,00	0,00	500.465.344,00
191	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi	655.221.968,00	0,00	0,00	0,00	655.221.968,00
192	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Organisasi	1.643.635.140,00	175.493.140,00	0,00	0,00	1.819.128.280,00
193	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2.474.593.012,00	0,00	0,00	0,00	2.474.593.012,00
194	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	332.213.362,00	0,00	0,00	0,00	332.213.362,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
195	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Biro Umum dan Protokol	751.603.126,00	0,00	0,00	0,00	751.603.126,00
196	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Umum dan Protokol	87.026.794.480,00	2.121.288.292,00	0,00	0,00	89.148.082.772,00
197	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja	28.571.880.335,00	0,00	0,00	0,00	28.571.880.335,00
198	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Satuan Polisi Pamong Praja	29.625.318.133,00	602.619.100,00	0,00	0,00	30.227.937.233,00
199	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sekretariat Daerah	81.731.654.004,00	0,00	0,00	0,00	81.731.654.004,00
200	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.857.191.552,00	0,00	0,00	0,00	4.857.191.552,00
201	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.518.830.394,00	0,00	0,00	0,00	1.518.830.394,00
202	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34.575.659.485,00	575.633.000,00	0,00	0,00	35.151.292.485,00
203	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	681.089.000,00	0,00	0,00	0,00	681.089.000,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
204	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.676.175.912,00	0,00	0,00	0,00	1.676.175.912,00
205	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	24.374.767.294,00	0,00	0,00	0,00	24.374.767.294,00
206	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.423.015.387,00	416.922.740,00	0,00	0,00	11.839.938.127,00
207	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.323.566.308,00	1.114.714.640,00	0,00	0,00	33.438.280.948,00
208	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah	7.428.959.900,00	0,00	0,00	0,00	7.428.959.900,00
209	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Badan Riset dan Inovasi Daerah	14.734.565.739,00	1.121.764.840,00	0,00	0,00	15.856.330.579,00
210	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Biro Hukum	4.578.799.210,00	0,00	0,00	0,00	4.578.799.210,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
211	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Biro Organisasi	290.065.792,00	0,00	0,00	0,00	290.065.792,00
212	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	236.063.720,00	0,00	0,00	0,00	236.063.720,00
213	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	353.619.030,00	0,00	0,00	0,00	353.619.030,00
214	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	818.735.740,00	0,00	0,00	0,00	818.735.740,00
215	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.518.619.900,00	0,00	0,00	0,00	18.518.619.900,00
216	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengelolaan Barang Milik Daerah	219.353.600,00	0,00	0,00	0,00	219.353.600,00
217	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000.000,00
218	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	1.598.227.300,00	0,00	0,00	0,00	1.598.227.300,00
219	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai	383.375.252,00	25.550.000,00	0,00	0,00	408.925.252,00

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	
220	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Hukum	1.650.931.478,00	683.947.240,00	0,00	0,00	2.334.878.718,00
221	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.475.162.748,00	0,00	0,00	0,00	3.475.162.748,00
222	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.410.075.092,00	398.256.320,00	0,00	0,00	1.808.331.412,00
223	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	766.145.000,00	0,00	0,00	0,00	766.145.000,00
224	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa	292.517.120,00	0,00	0,00	0,00	292.517.120,00
225	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	557.858.886,00	0,00	0,00	0,00	557.858.886,00
226	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.732.046.394,00	0,00	0,00	0,00	4.732.046.394,00
TOTAL				3.746.313.427.225,00	624.889.525.795,00	151.187.931.213,00	787.453.202.628,00	5.309.844.086.861,00



Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN X

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN



PROVINSI BALI
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan IV/e	1					14			15
Golongan IV/d		17				8			25
Golongan IV/c		19	1			451			471
Golongan IV/b		2	101			1,279	2		1,384
Golongan IV/a		1	66	89		898	35		1,089
JUMLAH GOLONGAN IV	1	39	168	89	0	2,650	37	0	2,984
Golongan III/e									0
Golongan III/d			4	111		1,289	457		1,861
Golongan III/c				20		427	254		701
Golongan III/b						976	502		1,478
Golongan III/a						374	361		735
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	4	131	0	3,066	1,574	0	4,775
Golongan II/e									0
Golongan II/d						175	253		428
Golongan II/c						49	406		455
Golongan II/b						1	28		29
Golongan II/a							20		20
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	0	0	225	707	0	932

GOLONGAN/ RUANG	ESELON					NON ESELON			JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	PPPK	
Golongan I/e									0
Golongan I/d							4		4
Golongan I/c							4		4
Golongan I/b							1		1
Golongan I/a									0
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Golongan VII								313	313
JUMLAH GOLONGAN VII	0	0	0	0	0	0	0	313	313
Golongan IX								3,938	3,938
JUMLAH GOLONGAN IX	0	0	0	0	0	0	0	3,938	3,938
Golongan X								140	140
JUMLAH GOLONGAN X	0	0	0	0	0	0	0	140	140
Golongan XI								36	36
JUMLAH GOLONGAN XI	0	0	0	0	0	0	0	36	36
TOTAL	1	39	172	220	0	5,941	2,327	4,427	13,127

PJ. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XI

DAFTAR PIUTANG DAERAH



PROVINSI BALI
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan Tahun 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan s/d. Desember 2024	Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Piutang Pajak Daerah		52,151,207,987.00	44,354,090,408.00	52,151,207,987.00	44,354,090,408.00
	a. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	2017 s/d. 2019	126,767,000.00	0.00	126,767,000.00	-
	b. Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2017 dan 2019	277,695,000.00	0.00	277,695,000.00	-
	c. Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Desember 2023	51,369,828,554.00	43,977,172,975.00	51,369,828,554.00	43,977,172,975.00
	d. Piutang Pajak Air Permukaan	Desember 2023	376,917,433.00	376,917,433.00	376,917,433.00	376,917,433.00
	e. Piutang Pajak Rokok	-	-	-	-	-
2	Piutang Retribusi	-	-	-	-	-
3	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-
5	Piutang Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah			52,151,207,987.00	44,354,090,408.00	52,151,207,987.00	44,354,090,408.00



Pj. GUBERNUR BALI,
S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XII

DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA



No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2004	PT. BPD Bali	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	Rp764.912.000.000,00	Rp644.912.000.000,00	Rp120.000.000.000,00	Rp644.912.000.000,00	Rp0,00	Rp191.580.177.566,00	-
2	2010	PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda)	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali - Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/Hk/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali	Uang	180.000.000.000,00	Rp142.000.000.000,00	Rp38.000.000.000,00	Rp142.000.000.000,00	Rp0,00	Rp1.522.740.477,00	-
3	1974	Perusahaan Daerah Provinsi Bali	- Peraturan Dasrah Propinsi, Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp5.282.769.658,00	Rp5.282.769.658,00	Rp0,00	Rp5.282.769.658,00	Rp0,00	Rp0,00	-
4	2003	PT. Puri Raharja	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp8.736.000.000,00	Rp8.736.000.000,00	Rp0,00	Rp8.736.000.000,00	Rp0,00	Rp609.518.542,00	-
5	1990	PT. Asuransi Bangun Askrida	- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Asuransi Bangun Askrida - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp1.150.000.000,00	Rp1.150.000.000,00	Rp0,00	Rp1.150.000.000,00	Rp0,00	Rp184.259.300,00	-

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Modal Yang telah disertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertaka sampai dengan tanggal tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2013	PT. Jasamarga Bali Tol	• Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah • Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyertaan Modal Daerah	Uang	Rp100.000.000.000,00	Rp100.000.000.000,00	Rp0,00	Rp100.000.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	-
Jumlah					1.060.080.769.658,00	902.080.769.658,00	158.000.000.000,00	902.080.769.658,00	-	193.896.695.885,00	-

Pl. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XIII

DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN



No	Nama Aset	Jenis Aset	Saldo pada akhir tahun 2023	Perkiraan Penambahan Tahun 2024	Perkiraan Pengurangan Tahun 2024	Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1.	Aset Tetap	Tanah	4.907.796.884.852,40	76.321.486.000,00	47.641.473.400,97	4.936.476.897.451,42
		Peralatan dan Mesin	2.046.115.176.574,25	41.153.005.701,16	23.043.053.291,08	2.064.225.128.984,32
		Gedung dan Bangunan	3.208.051.168.977,71	118.289.810.330,00	120.640.379.597,05	3.205.700.599.710,66
		Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.476.544.508.140,82	25.816.649.058,00	23.852.518.117,00	3.478.508.639.081,81
		Aset Tetap Lainnya	83.879.383.673,69	17.162.531.481,00	5.468.362.024,00	95.573.553.130,69
		Konstruksi dalam Pengerjaan	266.126.280.404,04	62.505.634.770,03	914.988.219,33	327.716.926.954,74
2.	Aset Lainnya	Aset Tidak Berwujud	25.490.762.758,65	2.943.050,00	-	25.493.705.808,65
		Aset Lain-Lain	348.901.073.824,67	17.432.504.586,95	219.549.143.421,33	146.784.434.990,29
Jumlah			13.988.513.402.622,90	341.249.117.340,19	221.560.774.649,44	14.108.201.745.313,70

Pj. GUBERNUR BALI



S. M. MAHENDRA

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XIV

**DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM
DISELESAIKAN DAN DINGGARKAN KEMBALI
DALAM TAHUN YANG DIRENCANAKAN**



LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

1) Tahun Pertama

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7		9
1								
2				NIHIL				
3								
dst.								
Jumlah								

2) Tahun Kedua

PROVINSI BALI
DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama SKPD	Nama Sub Kegiatan	Lokasi Sub Kegiatan	Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp)		Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun T-1 (Rp)		Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA T-1 (Rp)	Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini (Rp)	
				APBD TA T-2	Perubahan APBD TA T-2		APBD TA T-1	Perubahan APBD TA T-1		APBD TA T	Perubahan APBD TA T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
dst.											
Jumlah											

Pi. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XV

DAFTAR DANA CADANGAN



LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					NIHIL			
	Jumlah							

Pj. GUBERNUR BALI,


S. M. MAHENDRA JAYA

LAMPIRAN XVI

DAFTAR PINJAMAN DAERAH



LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI BALI
DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman (%)	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PT. SMI	PP 43/2020 tentang Perubahan PP 23/2020	2021	1.450.000.000.000	10	0%	Pembangunan Pusat Kesenian Bali	248.917.013.352	0%	1.055.294.920.719	0%
Jumlah				1.450.000.000.000				248.917.013.352		1.055.294.920.719	

Pj. GUBERNUR BALI,

S. M. MAHENDRA JAYA